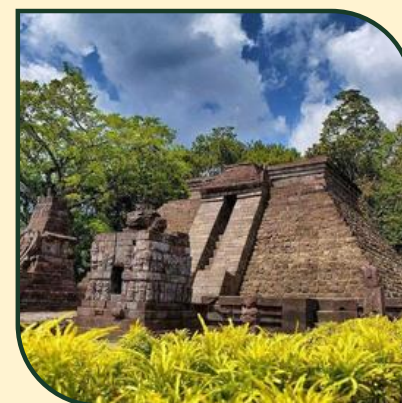


RPJMD

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2029

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181)



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan bernegara yakni mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka perlu disusun perencanaan pembangunan di Daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan terarah sesuai visi dan misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
20. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III berisi Visi, Misi, dan Program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: 5-134/2025



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



Metty Ferriska R.
METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan Daerah hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem ini mencakup arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritas, sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam RPJPN kemudian dituangkan ke dalam RPJMN. RPJMN bertujuan memberikan gambaran tentang wujud masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya, RPJMN diterjemahkan menjadi rencana operasional tahunan yang konkret, spesifik dan terukur.

Selain mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, pembangunan Daerah juga bertujuan untuk memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita pembangunan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati untuk kurun waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, termasuk periodisasi RPJMD mengikuti RPJMN dan RPJPD sehingga periodisasi RPJMD menjadi 2025-2029.

Dalam rangka kesinambungan perencanaan pembangunan maka dalam dokumen RPJMD ini juga mengatur terkait RKPD Tahun 2030, yang berpedoman pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Melalui RPJMD, Pemerintah Daerah memiliki arah yang jelas untuk merealisasikan tujuan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 181

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-111
2.3. Permasalahan dan Analisis Isu-Isu Strategis	II-150
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-35
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-60
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2. Pedoman Transisi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Potensi Unggulan Pertanian di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-3
Tabel 2.2.	Kriteria dan Pemanfaatan Kelas Lahan di Kabupaten Karanganyar	II-6
Tabel 2.3.	Kebutuhan Permukiman di Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2029 Dirinci per Kecamatan	II-8
Tabel 2.4.	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Permukiman Tahun 2022	II-8
Tabel 2.5.	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Permukiman di Kabupaten Karanganyar	II-9
Tabel 2.6.	Luas Tanam dan Luas Panen Beras Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (ha)	II-10
Tabel 2.7.	Daya Dukung Pangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2029	II-12
Tabel 2.8.	Ketersediaan Air Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	II-13
Tabel 2.9.	Kebutuhan Air Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2029	II-14
Tabel 2.10.	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Karanganyar	II-15
Tabel 2.11.	Komposit Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-20
Tabel 2.12.	Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	II-20
Tabel 2.13.	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2024	II-27
Tabel 2.14.	PDRB Per Kapita Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2.15.	Rasio Ketersediaan Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk (Per 30.000 Penduduk) Tahun 2024	II-41
Tabel 2.16.	Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	II-42
Tabel 2.17.	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada <i>Assessment</i> Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang) Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2024 ..	II-51
Tabel 2.18.	PDRB ADHB & ADHK Kabupaten Karanganyar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.19.	Data Daya Tarik Wisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	II-63
Tabel 2.20.	Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.21.	Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2025	II-72
Tabel 2.22.	Potensi Angin, Surya dan Hidro Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	II-73
Tabel 2.23.	Potensi Panas Bumi Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	II-74
Tabel 2.24.	Potensi Bioenergi Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	II-74
Tabel 2.25.	Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-76
Tabel 2.26.	Data BUMDes/BUMDesma Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2.27.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-79

Tabel 2.28.	Jumlah dan Golongan Kecelakaan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2022	II-81
Tabel 2.29.	Angkutan Trayek (Angkutan Perdesaan) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	II-82
Tabel 2.30.	Disparitas Harga 13 Komoditas Barang Pokok Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2024	II-84
Tabel 2.31.	Capaian Pembangunan Pendidikan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-88
Tabel 2.32.	Capaian Pembangunan Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.33.	Capaian Pembangunan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-91
Tabel 2.34.	Capaian Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.35.	Capaian Pembangunan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-93
Tabel 2.36.	Capaian Pembangunan Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-93
Tabel 2.37.	Capaian Pembangunan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.38.	Capaian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2.39.	Capaian Pembangunan Pangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.40.	Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.41.	Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2.42.	Capaian Pembangunan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2.43.	Capaian Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024..	II-99
Tabel 2.44.	Capaian Pembangunan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2.45.	Capaian Pembangunan Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2.46.	Capaian Pembangunan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2.47.	Capaian Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2.48.	Capaian Pembangunan Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2.49.	Capaian Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2.50.	Capaian Pembangunan Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2.51.	Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-103
Tabel 2.52.	Capaian Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-103

Tabel 2.53.	Capaian Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.54.	Capaian Pembangunan Pariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-105
Tabel 2.55.	Capaian Pembangunan Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-105
Tabel 2.56.	Capaian Pembangunan Perdagangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-106
Tabel 2.57.	Capaian Pembangunan Perindustrian Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2.58.	Capaian Pembangunan Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-109
Tabel 2.59.	Capaian Pembangunan Pengadaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-109
Tabel 2.60.	Capaian Pembangunan Kepegawaian Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-110
Tabel 2.61.	Capaian Pembangunan Manajemen Keuangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2.62.	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-113
Tabel 2.63.	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp. 000)	II-116
Tabel 2.64.	Persentase Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)	II-120
Tabel 2.65.	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp.000)	II-122
Tabel 2.66.	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp.000)	II-126
Tabel 2.67.	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2.68.	Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kabupaten Karanganyar	II-130
Tabel 2.69.	Neraca Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 – 2024	II-132
Tabel 2.70.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp. 000,00)	II-139
Tabel 2.71.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp.000)	II-140
Tabel 2.72.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2030	II-146
Tabel 2.73.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2025-2030 (Rp)	II-147
Tabel 2.74.	Isu Strategis Internasional dan Tantangan Pembangunan	II-157
Tabel 2.75.	Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional	II-158
Tabel 2.76.	Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Karanganyar	II-169
Tabel 3.1	Kesesuaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045	III-4

Tabel 3.2	Kesesuaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 3.3	Kesesuaian Visi RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029...	III-6
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-9
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-11
Tabel 3.6	Persandingan Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	III-33
Tabel 3.7	Pentahapan Pembangunan Periode 2026-2030	III-42
Tabel 3.8	Keselarasan Pentahapan RPJMD Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah	III-43
Tabel 3.9	Keterkaitan Misi dengan Arah Kebijakan	III-54
Tabel 3.10	Keterkaitan Penahapan Prioritas Tahunan dengan Arah Kebijakan	III-58
Tabel 3.11	Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2029	III-67
Tabel 3.12	Persandingan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Unggulan Daerah	III-87
Tabel 3.13	Persandingan Program Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Karanganyar	III-92
Tabel 3.14	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar Terhadap 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota	III-95
Tabel 3.15	Dukungan Program Daerah Kabupaten Karanganyar terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029	III-99
Tabel 3.16	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029	III-101
Tabel 3.17	Cascading Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-116
Tabel 4.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030	IV-16
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	IV-60
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	IV-65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Hierarkis RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-6
Gambar 2.1.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-16
Gambar 2.2.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024	II-17
Gambar 2.3.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) Kabupaten Karanganyar, Tahun 2020-2024	II-17
Gambar 2.4.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024	II-18
Gambar 2.5.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-19
Gambar 2.6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-19
Gambar 2.7.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 ...	II-21
Gambar 2.8.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-22
Gambar 2.9.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-24
Gambar 2.10.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Karanganyar Tahun 2020-2024 (TonCO ₂ eq)	II-25
Gambar 2.11.	Perkembangan Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-25
Gambar 2.12.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024	II-28
Gambar 2.13.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	II-29
Gambar 2.14.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tetangga, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2024	II-30
Gambar 2.15.	Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-31
Gambar 2.16.	Indeks Gini Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024	II-32
Gambar 2.17.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)	II-33
Gambar 2.18.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar Dibandingkan Dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Tahun 2024	II-33
Gambar 2.19.	Persentase TPT Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	II-34
Gambar 2.20.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (%)	II-35
Gambar 2.21.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia pada Persentase Pengeluaran Kelompok 40 Persen Penduduk Terbawah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-35

Gambar 2.22. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 II-36

Gambar 2.23. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 II-37

Gambar 2.24. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah) II-38

Gambar 2.25. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga 2024 (Tahun) II-39

Gambar 2.26. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) II-39

Gambar 2.27. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024 (Tahun) II-40

Gambar 2.28. Jumlah Kematian Ibu Hamil Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 II-45

Gambar 2.29. Prevalensi Stunting pada Balita Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024 II-46

Gambar 2.30. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 II-47

Gambar 2.31. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 II-48

Gambar 2.32. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) II-48

Gambar 2.33. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024 (Tahun) II-49

Gambar 2.34. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) II-50

Gambar 2.35. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga 2024 (Tahun) II-51

Gambar 2.36. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 II-52

Gambar 2.37. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%) II-53

Gambar 2.38. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 II-54

Gambar 2.39. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 II-55

Gambar 2.40. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 II-56

Gambar 2.41. Perkembangan IKG Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 II-57

Gambar 2.42. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024 II-58

Gambar 2.43. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024 II-58

Gambar 2.44. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 II-59

Gambar 2.45. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024.. II-60

Gambar 2.46.	TPAK Perempuan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-61
Gambar 2.47.	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-62
Gambar 2.48.	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)	II-63
Gambar 2.49.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-68
Gambar 2.50.	Rasio Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-69
Gambar 2.51.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-70
Gambar 2.52.	ROA BUMD di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-71
Gambar 2.53.	Profil Area Prospek Panas Bumi Gunung Lawu	II-73
Gambar 2.54.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-75
Gambar 2.55.	Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)	II-76
Gambar 2.56.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-78
Gambar 2.57.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)	II-78
Gambar 2.58.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Kurang dari 10 Ha Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024	II-80
Gambar 2.59.	Persentase Jalan Mantap Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)	II-81
Gambar 2.60.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-83
Gambar 2.61.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-84
Gambar 2.62.	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-86
Gambar 2.63.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-86
Gambar 2.64.	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-112
Gambar 2.65.	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)	II-115
Gambar 2.66.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)	II-115
Gambar 2.67.	Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (%)	II-116
Gambar 2.68.	Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah	II-119
Gambar 2.69.	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-120
Gambar 2.70.	Proporsi Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024 (%)	II-121
Gambar 2.71.	Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024 (%)	II-122
Gambar 2.72.	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp. 000,00)	II-128
Gambar 2.73.	Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp. 000,0)	II-128

Gambar 2.74.	Megatren Global 2045	II-157
Gambar 3.1.	Keterkaitan Visi, Misi dan Fokus Kerja RPJMD Karanganyar Tahun 2025-2029	III-3
Gambar 3.2.	Logframe Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-8
Gambar 3.3.	Tema Pembangunan Tahunan Periode 2026-2030	III-41
Gambar 3.4.	Peta Wilayah Pengembangan Pusat Pelayanan Hierarki IV	III-112
Gambar 3.5.	Peta Wilayah Pengembangan Sentra Industri, Perdagangan dan Jasa	III-113
Gambar 3.6.	Peta Wilayah Pengembangan Sentra Produksi Pertanian	III-114
Gambar 3.7.	Peta Wilayah Pengembangan Agrowisata	III-115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Peraturan ini bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Salah satu amanat dalam undang-undang ini adalah kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan tersebut merupakan proses penentuan kebijakan masa depan melalui skala prioritas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (iii) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada tanggal 27 November 2024, Kabupaten Karanganyar menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2025–2030. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, pasangan Rober Christanto, S.E., M.M. dan Adhe Eliana, S.E. ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar untuk periode tersebut dan resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagai kepala daerah terpilih, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menetapkannya dalam bentuk peraturan daerah paling lambat enam bulan setelah pelantikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar, berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD ini merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2045, sehingga menjadi tahapan yang sangat penting karena menjadi dasar pencapaian target pembangunan jangka panjang di Kabupaten Karanganyar. Tahapan lima tahun pertama pembangunan ini diarahkan pada peningkatan integritas, daya saing pemerintah dan masyarakat Karanganyar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar. Masyarakat diharapkan memiliki integritas, daya saing dan daya juang yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah serta dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan provinsi dan nasional.

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan

pembangunan, yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* diterapkan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi serta aspirasi masyarakat. Sementara itu, pendekatan politis dilakukan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD.

Dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2045, RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032, serta berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selain itu, dokumen RPJMD juga diselaraskan dengan hasil rekomendasi dari dokumen KLHS. Penyusunan isu strategis RPJMD mendasarkan salah satunya pada hasil rekomendasi isu strategis dokumen KLHS, begitu juga dengan strategi dan arah kebijakan. Dengan penyelarasan dokumen perencanaan ini, diharapkan tercipta sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan dan dokumen strategis perencanaan seperti RAD SDGs, RIPJPID, Rencana Aksi Stunting, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan dokumen Rencana Induk Bidang Kesehatan (Kementerian Kesehatan).

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111); dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168).

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen perencanaan yang akan dianalisis adalah dokumen perencanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain : RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD daerah sekitar, RPJPD Kabupaten Karanganyar, RTRW Kabupaten Karanganyar, RTRW daerah sekitar, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program serta dokumen lainnya seperti Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar memedomani dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 terutama terkait isu strategis, visi dan misi Presiden, sasaran pokok pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMN.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar memedomani dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Karanganyar, yaitu pada periode pertama RPJMD. RPJMD harus memperhatikan isu strategis, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan yang ada di RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.

4. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) Kabupaten Karanganyar

Penyusunan RPJMD memperhatikan peta jalan IPTEK daerah yang tertuang dalam dokumen RIPJPID dalam mendukung riset, teknologi dan inovasi.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional

RPJMD diselaraskan dengan RTRW Nasional agar pembangunan di Karanganyar sesuai dengan arahan tata ruang nasional, terutama dalam konektivitas, kawasan strategis, dan perlindungan ruang.

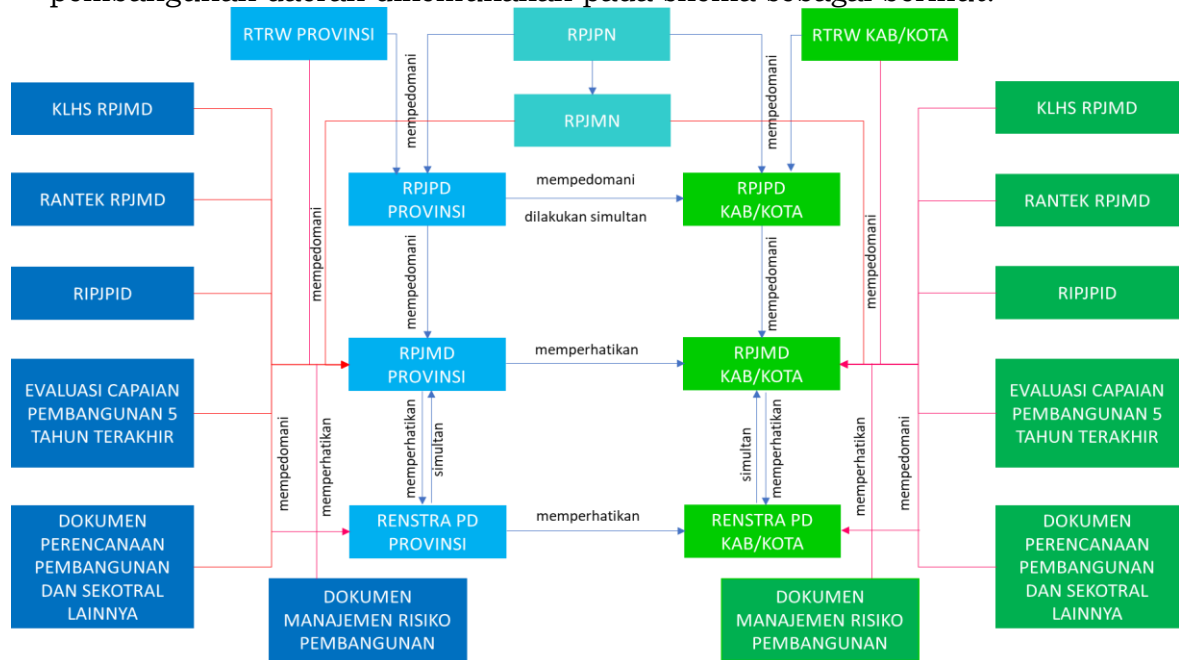
6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

RPJMD mengacu pada RTRW Provinsi untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah, dan dukungan terhadap kebijakan pembangunan provinsi.

- 7. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar**
Penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, untuk melihat struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang.
- 8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Sekitar**
Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah lain agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah antar kabupaten/kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan wilayah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya, khususnya yang berbatasan langsung, berada dalam satu sistem wilayah pembangunan, atau memiliki keterkaitan fungsional dan pengaruh timbal balik dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu kawasan strategis yang perlu diperhatikan adalah wilayah Subosukawonosraten, yaitu Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Ketujuh daerah ini membentuk satu kawasan aglomerasi yang terintegrasi secara sosial, ekonomi, budaya, dan infrastruktur, serta memiliki peran penting dalam mendukung pusat pertumbuhan di Jawa Tengah bagian selatan.
- 9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Karanganyar**
RPJMD 2025–2029 mengacu pada KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi, termasuk mitigasi risiko lingkungan dan pencapaian tujuan SDGs.
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar**
Penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar memperhatikan dokumen RPJMD dari daerah sekitar, khususnya terkait kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan yang memiliki keterkaitan langsung dengan Kabupaten Karanganyar. Hal ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan lintas wilayah, mencegah tumpang tindih program, serta memperkuat kolaborasi pembangunan yang saling mendukung. Kabupaten Karanganyar berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota di kawasan strategis Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Oleh karena itu, penyelarasan RPJMD Karanganyar dengan RPJMD kabupaten/kota di wilayah ini sangat penting.
- 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar**
RPJMD Kabupaten Karanganyar setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2026 sampai tahun 2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.
- 12. Renstra-PD Tahun 2025-2029**
RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renstra-PD Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.
- 13. Dokumen Perencanaan Multi Sektor**
Penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain

Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Pangan dan Gizi, RAD Kelitbangan, dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

Selengkapnya hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikemukakan pada skema sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Hubungan Hierarkis RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai rencana induk jangka menengah yang menjadi dasar untuk merumuskan arah kebijakan tahunan. RPJMD menyajikan informasi mengenai data dan informasi pembangunan daerah antara lain, kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Prioritas Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi data capaian pembangunan dan kondisi keuangan lima tahun terakhir untuk merumuskan permasalahan pembangunan dan Isu Strategis;
2. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan program Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
4. Merumuskan target pembangunan jangka menengah sebagai acuan untuk penyusunan target tahunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar, landasan hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi penjelasan mengenai visi, misi, serta tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi daftar program, indikator, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta pedoman transisi.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah.

Kabupaten Karanganyar secara astronomis terletak antara 110° 40” – 110° 70” Bujur Timur dan 70° 28” – 70° 46” Lintang Selatan, dengan luas wilayah 76.778,64 Ha. Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan dan 162 desa, 2.004 rukun warga (RW) dan 6.508 rukun tetangga (RT). Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan, Kabupaten Magetan dan Ngawi Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, serta Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta di sebelah barat.

Rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada diatas permukaan laut yakni 511 m, adapun wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar berada di Kecamatan Kebakkramat yang hanya 95 m dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu yang mencapai 1.200 m diatas permukaan laut. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 76.778,64 Ha. Pada tahun 2024, luas wilayah tersebut terdiri dari tanah pertanian seluas 16.254,09 Ha dan tanah non pertanian 60.524,55 Ha.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Karanganyar meningkat dari 4.588,63 ton pada tahun 2020 menjadi 5.092,52 ton pada 2024. Beberapa komoditas mengalami pertumbuhan signifikan, seperti tembakau yang naik dari 64,28 ton menjadi 197,36 ton, serta kopi dari 17,78 ton menjadi 116,46 ton. Komoditas lain, seperti teh, cengkeh, kelapa, kakao, dan tebu, juga meningkat dengan laju lebih stabil. Pertumbuhan ini didorong oleh perluasan lahan, perbaikan teknik budidaya, serta meningkatnya permintaan pasar. Meski demikian, tantangan seperti perubahan iklim dan kesejahteraan petani tetap perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan sektor perkebunan.

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Padi menunjukkan pertumbuhan stabil dari 333.306 ton menjadi 343.996 ton, didukung oleh manajemen pertanian dan teknologi yang lebih baik. Jagung dan kacang tanah mengalami variasi produksi, sementara kedelai tetap rendah dengan tren yang tidak menentu. Produksi ubi kayu menurun dari 86.079 ton menjadi 74.553 ton, sedangkan ubi jalar sempat turun drastis sebelum melonjak kembali ke 38.842 ton. Secara keseluruhan, meski beberapa komoditas menunjukkan pertumbuhan, fluktuasi produksi masih menjadi tantangan. Upaya stabilisasi dan penguatan sektor pertanian diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Produksi hortikultura di Kabupaten Karanganyar menunjukkan dinamika yang bervariasi dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, total produksi mengalami fluktuasi, dengan puncaknya pada tahun 2023 sebesar 873.770 kuintal sebelum sedikit menurun menjadi 762.682 kuintal di tahun 2024. Beberapa komoditas utama seperti bawang merah mengalami peningkatan signifikan, tumbuh dari 36.894 kuintal di tahun 2020 menjadi 50.564 kuintal pada tahun 2024, yang mungkin mencerminkan adanya peningkatan luas tanam atau efisiensi budidaya. Sebaliknya, produksi cabai besar dan cabai rawit menunjukkan tren naik-turun, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan fluktuasi harga pasar yang mendorong petani untuk menyesuaikan pola tanam mereka.

Untuk komoditas buah-buahan, produksi durian mencatat pertumbuhan pesat, meningkat hampir dua kali lipat dari 58.449 kuintal pada 2020 menjadi 117.156 kuintal di 2024. Hal ini menunjukkan adanya ekspansi lahan atau peningkatan minat pasar terhadap durian. Pisang dan mangga juga mengalami peningkatan produksi, menandakan stabilnya permintaan dan potensi pasar yang kuat. Namun, beberapa komoditas seperti duku mengalami penurunan tajam pada 2024, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan preferensi petani atau tantangan dalam budidaya. Fluktuasi yang terjadi dalam produksi hortikultura mengindikasikan bahwa sektor ini masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim, kebijakan pertanian, serta dinamika pasar yang mempengaruhi keputusan petani dalam menentukan komoditas yang akan dibudidayakan.

Populasi ternak di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, dengan total populasi ternak meningkat dari 10.091.654 ekor pada tahun pertama menjadi 12.729.410 ekor pada tahun terakhir. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan signifikan pada ternak unggas, yang meningkat dari 9.878.178 ekor menjadi 12.520.658 ekor. Pertumbuhan ini menunjukkan tingginya permintaan pasar terhadap unggas, kemungkinan akibat peningkatan konsumsi daging ayam dan telur.

Populasi ternak besar juga mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam dari 68.464 ekor pada tahun sebelumnya menjadi 55.183 ekor di lima tahun terakhir. Ini dapat disebabkan oleh faktor seperti biaya pemeliharaan yang tinggi atau pergeseran preferensi peternak ke ternak unggas yang lebih cepat panen. Sementara itu, populasi ternak kecil mengalami pertumbuhan yang stabil, meningkat dari 146.923 ekor menjadi 153.569 ekor, yang mengindikasikan bahwa sektor ini relatif lebih tahan terhadap perubahan kondisi pasar. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa sektor peternakan di Karanganyar berkembang pesat, meskipun ada tantangan dalam mempertahankan stabilitas populasi ternak besar. Selengkapnya terkait potensi unggulan pertanian di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Potensi Unggulan Pertanian di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Potensi Unggulan		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Komoditas Perkebunan (Bidang Perkebunan)	Angka produksi komoditas perkebunan 8 komoditas (Tembakau, Kopi, Teh, Cengkeh, Kelapa, Kakao, Tebu, Karet) dalam tahun n	Ton	4588.63	4710.59	4766.00	4880.69	5092.52
	1. Tembakau	Ton	64.28	94.28	125.28	159.28	197.36
	2. Kopi	Ton	17.78	18.75	19.47	43.11	116.46
	3. Teh	Ton	0.33	1.28	1.29	1.29	1.32
	4. Cengkeh	Ton	48.29	48.85	56.70	58.57	59.08
	5. Kelapa	Ton	639.68	665.69	679.88	681.40	681.43
	6. Kakao	Ton	30.65	31.15	32.19	34.01	34.33
	7. Tebu	Ton	3,782.34	3,845.17	3,845.17	3,897.00	3,996.00
	8. Karet	Ton	5.28	5.42	6.02	6.03	6.54
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Produksi Pertanian Pangan per Hektar per tahun / Luas Panen	Ton/Ha/Tahun					
	Padi	Ton/Ha/Tahun	6.07	6.03	6.20	6.22	6.223
	Jagung	Ton/Ha/Tahun	6.80	6.64	6.99	6.83	7.10
	Kedelai	Ton/Ha/Tahun	1.70	1.70	1.70	1.77	-
	Kacang Tanah	Ton/Ha/Tahun	1.85	1.89	1.90	2.01	2.03
	Ubi Kayu	Ton/Ha/Tahun	35.86	32.00	33.92	36.84	37.84
	Ubi Jalar	Ton/Ha/Tahun	38.40	41.34	42.42	43.82	44.82
Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi 6 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	473,440	479,223	466,163	463,871	487,862
	1. Padi	Ton	333,306	341,820	342,002	343,995	343,996

Potensi Unggulan		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	2. Jagung	Ton	21,822	27,494	23,102	24,917	27,264
	3. Kedelai	Ton	343	590	339	683	-
	4. Kacang Tanah	Ton	3,280	3,173	3,151	2,331	3,207
	5. Ubi Kayu	Ton	86,079	77,238	73,453	77,376	74,553
	6. Ubi Jalar	Ton	28,610	28,908	24,116	14,569	38,842
Produksi Tanaman Hortikultura	Jumlah Produksi 10 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, mangga, pisang, rambutan)	Kuintal	727,793	571,996	759,867	873,770	762,682
	1. Cabai besar	Kuintal	26,928	34,053	23,045	20,373	28,440
	2. Cabai rawit	Kuintal	5,805	7,803	6,332	5,884	8,240
	3. Bawang Merah	Kuintal	36,894	56,804	48,077	42,897	50,564
	4. Bawang Putih	Kuintal	26,314	20,977	41,795	56,883	24,468
	5. Alpukat	Kuintal	16,709	80,739	92,385	103,611	96,314
	6. Duku	Kuintal	14,864	9,430	15,392	57,490	3,992
	7. Durian	Kuintal	58,449	88,865	134,350	106,279	117,156
	8. Mangga	Kuintal	263,583	93,504	109,433	211,045	99,165
	9. Pisang	Kuintal	144,036	108,039	133,457	149,509	170,273
	10. Rambutan	Kuintal	134,211	71,782	155,601	119,799	164,070
Populasi ternak	- Ternak Besar	Ekor	66.796	67.252	68.620	52.636	55.290
	Sapi Perah	Ekor	260	232	199	95	125
	Sapi Potong	Ekor	66.293	66.762	68.130	52.388	55.007
	Kerbau	Ekor	97	84	88	52	52

Potensi Unggulan		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Kuda	Ekor	146	174	203	101	106
	- Ternak Kecil	Ekor	173.882	169.955	170.828	28.667	167.684
	Kambing	Ekor	28.388	29.823	31.181	NA	129.877
	Domba	Ekor	118.535	119.609	120.276	23.265	25.591
	Babi	Ekor	26.959	20.523	19.371	5.402	12.216
	- Ternak Unggas	Ekor	9.878.178	10.005.850	10.215.220	10.351.341	12.520.658
	Daging	Kg	7.772.525	8.396.132	8.738.693	8.917.526	9.310.242
	Telur	Kg	21.978.773	21.013.320	20.022.168	20.810.649	23.225.372
	Susu	Liter	221.256	206.822	199.304	203.700	193.970

Sumber : DispertanPP dan BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Ketersediaan sumber daya alam adalah terbatas dan potensi untuk penurunannya cukup besar baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga diharapkan untuk lebih bijaksana dan terarah dalam pemanfaatannya. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan. Sumber daya tergantung kepada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air.

1) Kemampuan Lahan

Kondisi daya tampung lahan didefinisikan dengan kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di atasnya. Dari hasil analisis kemampuan lahan, dapat diketahui bahwa kelas kemampuan lahan di Kabupaten Karanganyar termasuk di dalam kelas kemampuan lahan kelas zona I, II, zona III, Zona IV, VI dan VII. Untuk lebih jelasnya mengenai kemampuan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Kriteria dan Pemanfaatan Kelas Lahan
di Kabupaten Karanganyar

Kelas Kemampuan Lahan	Luas (Ha)	Kriteria	Pemanfaatan
I	3.068,05	1. Tidak mempunyai atau sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya. 2. Sesuai berbagai penggunaan, terutama pertanian. 3. Karakteristik lahannya: topografi hampir datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik, subur, tidak terancam banjir.	1. Tanaman pertanian semusim. 2. Tanaman rumput. 3. Hutan dan cagar alam.
II Ke (Erosi)	9.840,80	1. Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang sedang. 2. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan.	1. Tanaman semusim. 2. Tanaman dengan pengolahan tanah. 3. Tanaman rumput. 4. Padang rumput. 5. Hutan produksi. 6. Hutan lindung dan cagar alam
II Ke,O (Erosi & Banjir)	240,11		
II L (Lereng)	7.900,05		
II L,Ke ((Lereng & Erosi)	6.680,34		
II O (Banjir)	10,48		
III L (Lereng)	26.022,03	1. Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus dan keduanya. 2. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan. 3. Hambatan pada angka I membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas tersebut.	1. Tanaman semusim. 2. Tanaman dengan pengolahan tanah. 3. Tanaman rumput. 4. Padang rumput. 5. Hutan produksi. 6. Hutan lindung & cagar alam.
IV L (Lereng)	10.823,97	1. Hambatan dan ancaman kerusakan	1. Tanaman semusim dan tanaman

Kelas Kemampuan Lahan	Luas (Ha)	Kriteria	Pemanfaatan
		2. Tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas. 3. Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan.	pertanian pada umumnya. 2. Tanaman rumput. 3. Hutan produksi. 4. Padang penggembalaan. 5. Hutan lindung dan suaka alam.
VI L (Lereng)	10.283,45	1. Mempunyai faktor penghambat berat yang menyebabkan penggunaan tanah sangat terbatas karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. 2. Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari erosi.	1. Pertanian 2. Tanaman rumput. 3. Padang penggembalaan. 4. Hutan produksi. 5. Hutan lindung dan cagar alam. 6. Non-pertanian.
VII L (Lereng)	5.380,67	Mempunyai faktor penghambat dan ancaman berat yang tidak dapat dihilangkan, karena itu pemanfaatannya harus bersifat konservasi. Jika digunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan pencegahan erosi yang berat.	1. Padang rumput. 2. Hutan produksi.

Sumber: Hasil Analisis dan Interpretasi Permen LH No. 17 tahun 2009

2) Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung wilayah untuk lahan permukiman, dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Kebutuhan lahan per orang adalah 26,67 m² dimana 20 m² merupakan kebutuhan lahan permukiman dan 6,67 m² merupakan kebutuhan lahan untuk fasilitas pelayanan per orang (1/3 dari kebutuhan lahan permukiman). Pada kajian ini juga dilakukan perhitungan proyeksi penduduk sampai Tahun 2029 dimana bisa dilihat perkembangan daya dukung lahan permukiman dari Tahun 2022-2029.

Kebutuhan lahan permukiman dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada Tahun 2022 dan proyeksinya pada Tahun 2029. Dengan jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebanyak 951.215 jiwa maka kebutuhan lahan permukiman sebesar 3.462 ha dan ini meningkat menjadi 3.885 ha pada Tahun 2029. Kebutuhan permukiman terbesar berada di Kecamatan Gondangrejo yaitu sebesar 327 ha pada Tahun 2022 dan meningkat menjadi 371 ha pada Tahun 2029. Kebutuhan permukiman yang terbesar di Kecamatan Gondangrejo diakibatkan oleh jumlah penduduk yang besar dan tarikan pertumbuhan perumahan untuk dekat dengan kegiatan ekonomi mereka. Kecamatan Gondangrejo merupakan salah satu kawasan perkotaan yang bersinggungan langsung dengan Kota Surakarta sehingga permintaan akan kebutuhan perumahan juga cukup besar di wilayah tersebut.

Tabel 2.3.
Kebutuhan Permukiman di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022-2029 Dirinci per Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun (Kebutuhan Permukiman Dalam ha)							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Jatipuro	127	131	134	137	140	144	147	150
2	Jatiyoso	146	148	149	151	153	155	156	158
3	Jumapolo	158	162	165	169	173	177	181	185
4	Jumantono	184	188	192	196	200	204	208	302
5	Matesih	165	167	170	172	174	177	179	181
6	Tawangmangu	174	175	177	178	180	181	183	184
7	Ngargoyoso	137	139	142	144	146	149	151	153
8	Karangpandan	162	164	166	168	170	173	175	177
9	Karanganyar	315	319	323	327	330	334	338	342
10	Tasikmadu	246	250	253	258	262	266	270	274
11	Jaten	309	310	312	313	315	317	318	319
12	Colomadu	275	277	278	279	280	281	282	284
13	Gondangrejo	327	333	339	345	351	358	364	371
14	Kebakkramat	237	239	241	243	244	246	248	250
15	Mojogedang	260	265	270	275	280	285	290	295
16	Kerjo	140	142	143	145	147	149	151	153
17	Jenawi	101	102	103	104	104	105	106	107
Kabupaten Karanganyar		3.462	3.508	3.555	3.602	3.650	3.699	3.749	3.885

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Ketersediaan lahan permukiman dihitung berdasarkan pada daya tampung lahan permukiman yang memiliki kriteria kelayakan yang tinggi untuk menampung kegiatan permukiman. Jasa lingkungan Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh kelas jasa tinggi yang menempati luasan 39.328,87 hektar atau 49,37% dari luas wilayah total selain itu kelas jasa sedang memiliki luasan yang cukup besar yaitu 18.519,04 hektar atau 23,25% dari luas wilayah total.

Status daya dukung dan daya tampung permukiman dihitung dengan membandingkan faktor ketersediaan lahan dengan kebutuhan lahan. Pada Tahun 2022, jika dilihat berdasarkan sebaran kawasan permukiman eksisting, kawasan permukiman yang berada pada lahan tidak layak seluas 5.281,01 ha yang sebagian besar berada di Kecamatan Ngargoyoso sebesar 1.116,04 ha dan Kecamatan Jatiyoso sebesar 1.091,49 ha. Kawasan permukiman yang menempati lahan pada kawasan dengan kategori tidak layak ini sebagian besar berada pada kawasan perbukitan dan juga merupakan kawasan dengan tarikan ekonomi yang cukup tinggi. Tarikan berupa daya tarik wisata sekaligus kondisi alam yang menarik menyebabkan iklim investasi di bidang perumahan masuk di wilayah tersebut. Secara rinci, status daya dukung dan daya tampung lahan permukiman Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 yang berbasis pada sebaran kawasan permukiman existing dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Permukiman Tahun 2022

No	Kecamatan	Permukiman Eksisting (ha)		Total (ha)
		Layak/Tidak Terlampaui	Tidak Layak/ Terlampaui	
1	Jatipuro	1.427,24	53,70	1.480,94
2	Jatiyoso	101,80	1.091,49	1.193,29
3	Jumapolo	1.662,80	390,97	2.053,77
4	Jumantono	1.653,60	29,56	1.683,16
5	Matesih	683,64	238,32	921,96
6	Tawangmangu	48,81	724,05	772,86

No	Kecamatan	Permukiman Eksisting (ha)		Total (ha)
		Layak/Tidak Terlampaui	Tidak Layak/ Terlampaui	
7	Ngargoyoso	89,55	1.116,04	1.205,59
8	Karangpandan	836,34	457,33	1.293,67
9	Karanganyar	1.714,67	0,00	1.714,67
10	Tasikmadu	1.036,48	0,00	1.036,48
11	Jaten	1.000,03	0,00	1.000,03
12	Colomadu	1.002,83	0,01	1.002,84
13	Gondangrejo	1.640,61	0,01	1.640,61
14	Kebakkramat	1.157,18	0,00	1.157,18
15	Mojogedang	2.411,78	12,89	2.424,68
16	Kerjo	989,04	298,57	1.287,60
17	Jenawi	0,33	868,10	868,43
Kabupaten Karanganyar		17.456,75	5.281,01	22.737,76

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Adapun jika dibandingkan dengan analisis kebutuhan lahan, status daya dukung dan daya tampung lahan permukiman di Kabupaten Karanganyar ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Permukiman di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Ketersediaan Lahan Permukiman Total (ha)	Permukiman Eksisting (ha)	Kebutuhan (ha)		Nilai Status (ha)		Status
				2022	2045	2022	2045	
1	Jatipuro	2.744,39	1.427,24	127,00	267,00	1.190,15	1.050,15	Tidak Terlampaui
2	Jatiyoso	179,70	101,80	146,00	208,00	- 68,10	- 130,10	Terlampaui
3	Jumapolo	2.666,94	1.662,80	158,00	320,00	846,14	684,14	Tidak Terlampaui
4	Jumantono	3.278,49	1.653,60	184,00	345,00	1.440,89	1.279,89	Tidak Terlampaui
5	Matesih	824,16	683,64	165,00	252,00	- 24,48	- 111,48	Terlampaui
6	Tawangmangu	69,06	48,81	174,00	228,00	- 153,75	- 207,75	Terlampaui
7	Ngargoyoso	156,95	89,55	137,00	230,00	- 69,60	- 162,60	Terlampaui
8	Karangpandan	1.165,72	836,34	162,00	244,00	167,38	- 85,38	Tidak Terlampaui
9	Karanganyar	2.488,61	1.714,67	315,00	454,00	458,94	- 319,94	Tidak Terlampaui
10	Tasikmadu	1.226,62	1.036,48	246,00	400,00	- 55,86	- 209,86	Terlampaui
11	Jaten	1.359,72	1.000,03	309,00	360,00	50,68	0,32	Terlampaui
12	Colomadu	1.137,98	1.002,83	275,00	312,00	- 139,85	- 176,85	Terlampaui
13	Gondangrejo	6.227,86	1.640,61	327,00	572,00	4.260,25	4.015,25	Tidak Terlampaui
14	Kebakkramat	1.527,76	1.157,18	237,00	298,00	133,57	72,57	Tidak Terlampaui
15	Mojogedang	3.253,52	2.411,78	260,00	456,00	581,74	385,74	Tidak Terlampaui
16	Kerjo	2.033,58	989,04	140,00	209,00	904,54	835,54	Tidak Terlampaui
17	Jenawi	1,18	0,33	101,00	132,00	- 100,15	- 131,15	Terlampaui
Kabupaten Karanganyar		30.342,24	17.456,75	5.484,40	7.340,00	7.401,09	5.545,49	Tidak Terlampaui

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum lahan permukiman sebenarnya masih tersedia hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Hanya saja terdapat beberapa kawasan permukiman eksisting yang berada pada kawasan yang tidak seharusnya digunakan untuk permukiman (tidak layak bermukim), sehingga jika dilihat sebaran maupun kebutuhan lahan permukiman terdapat gap status

daya dukung dan daya tampung permukiman antar kecamatan. Beberapa kecamatan berada pada status terlampaui seperti di Kecamatan Colomadu, Jaten, Jatiyoso, Jenawi, Matesih, Ngargoyoso, Tasikmadu, dan Tawangmangu.

3) Daya Dukung Pangan

Analisis kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan membandingkan luas lahan pertanian pangan (luas panen) dengan kebutuhan lahan pertanian pangan sesuai dengan standar kebutuhan pangan per kapita. Kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan dihitung dengan mempertimbangkan tren perkembangan penduduk yang mempengaruhi kebutuhan pangan per kapita, sehingga dapat diketahui kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan produktivitas lahan. Luas lahan pertanian dan produktivitas lahan pertanian sebagai *supply* (penyedia/ketersediaan pangan), sedangkan perkembangan penduduk sebagai *demmand* (kebutuhan pangan). Pada Tahun 2024, luas panen sawah di Kabupaten Karanganyar seluas 52.116 ha dengan luas panen terbesar berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu seluas 5.881 ha. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.6.

Luas Tanam dan Luas Panen Beras Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (ha)

No	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Bukan Sawah		Total	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Jatipuro	3.087	3.082	-	-	3.087	3.082
2	Jatiyoso	3.374	3.450	-	-	3.374	3.450
3	Jumapolo	2.664	2.575	-	-	2.664	2.575
4	Jumantono	2.635	2.609	-	-	2.635	2.609
5	Matesih	3.210	3.154	-	-	3.210	3.154
6	Tawangmangu	697	622	-	-	697	622
7	Ngargoyoso	619	751	-	-	619	751
8	Karangpandan	4.443	4.524	-	-	4.443	4.524
9	Karanganyar	4.523	4.356	-	-	4.523	4.356
10	Tasikmadu	4.087	3.479	-	-	4.087	3.479
11	Jaten	4.073	2.899	-	-	4.073	2.899
12	Colomadu	1.384	1.309	-	-	1.384	1.309
13	Gondangrejo	3.694	3.748	-	-	3.694	3.748
14	Kebakkramat	5.894	5.881	-	-	5.894	5.881
15	Mojogedang	4.709	4.330	-	-	4.709	4.330
16	Kerjo	3.318	3.519	-	-	3.318	3.519
17	Jenawi	1.794	1.827	-	-	1.794	1.827
Kabupaten Karanganyar		54.205	52.116	-	-	54.205	52.116

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2025, BPS

Tahun 2021 berada pada **KATEGORI BAIK** hingga Tahun 2029. Data yang digunakan terkait luas tanam dan luas panen pada Tahun 2021 menggunakan data BPS, sedangkan pada Tahun 2029 diasumsikan bahwa luasan KP2B di dalam RTRW Kabupaten Karanganyar merupakan luas tanam yang dipertahankan hingga Tahun 2029. Luas panen pada Tahun 2029 diasumsikan sebesar 3 x (tiga kali) luas tanam.

Adapun dilihat dari sebarannya, daya dukung pangan pada Tahun 2021 tidak sepenuhnya berada pada kategori baik, karena terdapat beberapa kecamatan yang berada pada **KATEGORI BURUK** yaitu Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, dan Colomadu. Namun, walaupun ada beberapa kecamatan yang berada pada kategori buruk, namun **secara total Kabupaten Karanganyar memiliki daya dukung pangan yang baik**. Hal ini juga sama dengan kondisi daya dukung

pangan pada Tahun 2029, hampir seluruh kecamatan berada pada kategori baik, hanya Kecamatan Tawangmangu, Colomadu, dan Ngargoyoso, yang berada pada kondisi buruk. Hal tersebut karena di Kecamatan Colomadu dan Ngargoyoso pengembangan wilayahnya diarahkan pada kegiatan perkotaan, sedangkan Kecamatan Tawangmangu memiliki karakteristik sebagai kawasan perlindungan bagi kawasan di bawahnya/resapan air, hal ini juga terlihat pada Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di tiga kecamatan tersebut didominasi oleh Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kelas Rendah dan Sangat Rendah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Daya Dukung Pangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2029

No	Kecamatan	2021					2029				
		Luas Tanam	Luas Panen	Jumlah Penduduk	DD Pangan	Kategori	Jumlah Penduduk	Luas KP2B	Luas Panen (asumsi 3x dlm 1 thn)	DD Pangan	Kategori
1	Jatipuro	2.487,30	2.409,60	34.186	2,39	Surplus	73.271	2.251,03	2.963,86	2,33	Surplus
2	Jatiyoso	3.051,00	3.064,60	39.622	2,62	Surplus	57.274	2.463,20	2.823,30	2,28	Surplus
3	Jumapolo	3.094,30	2.883,00	42.456	2,3	Surplus	87.826	3.051,91	4.355,80	2,57	Surplus
4	Jumantono	2.809,70	2.767,20	49.520	1,89	Surplus	94.848	2.665,81	3.751,01	2,02	Surplus
5	Matesih	2.798,20	3.017,00	44.712	2,29	Surplus	69.281	2.400,19	3.167,36	2,16	Surplus
6	Tawangmangu	537	595,1	47.249	0,43	Defisit	62.594	533,27	837,87	0,54	Defisit
7	Ngargoyoso	590,9	580,2	36.990	0,53	Defisit	63.116	599,26	903,40	0,65	Defisit
8	Karangpandan	4.207,90	4.106,10	43.802	3,18	Surplus	66.921	3.499,93	4.111,59	2,91	Surplus
9	Karanganyar	4.079,20	4.105,40	85.592	1,62	Surplus	124.602	3.314,10	3.843,14	1,42	Surplus
10	Tasikmadu	5.127,20	4.980,20	66.430	2,54	Surplus	109.925	4.184,30	4.751,85	2,22	Surplus
11	Jaten	3.479,30	3.419,20	84.414	1,37	Surplus	98.923	2.855,09	3.301,24	1,28	Surplus
12	Colomadu	1.333,10	1.319,60	75.357	0,59	Defisit	85.768	1.062,96	1.179,10	0,52	Defisit
13	Gondangrejo	3.769,10	3.769,20	88.178	1,45	Surplus	157.196	2.968,64	3.252,33	1,18	Surplus
14	Kebakkramat	5.949,10	5.958,70	64.683	3,12	Surplus	81.936	4.971,40	5.997,76	2,97	Surplus
15	Mojogedang	4.663,40	4.469,60	70.233	2,16	Surplus	125.245	4.045,64	4.996,45	2,07	Surplus
16	Kerjo	3.228,10	3.007,20	37.909	2,69	Surplus	57.493	2.688,06	3.056,36	2,49	Surplus
17	Jenawi	1.638,30	1.546,30	27.475	1,91	Surplus	36.248	1.331,56	1.468,21	1,72	Surplus
Kab. Karanganyar		52.843,10	51.998,20	938.808	1,88	Baik	1.452.468	44.886,31	54.760,61	1,78	Baik

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

4) Daya Dukung Air

Kebutuhan air di Kabupaten Karanganyar dihitung dari kebutuhan air domestik dan non domestik yang kemudian diakumulasi menjadi data kebutuhan air total berbasis penggunaan lahan. Kebutuhan air nantinya dibuat melalui pendekatan *system grid* dengan resolusi 5" x 5" ($\pm 0,150 \times 0,150$ km).

Dari analisis tersebut diketahui bahwa terjadi kenaikan kebutuhan air di Kabupaten Karanganyar yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 2.014.475.533 m³/tahun menjadi 2.204.623.860 m³/tahun atau sekitar 9,44%. Peningkatan terbesar terdapat pada Kecamatan Jumapolo dan Jumantono. Sedangkan Kecamatan Jaten dan Colomadu mengalami penurunan kebutuhan air. Untuk kecamatan yang memiliki kebutuhan air terbanyak pada tahun 2029 adalah Kecamatan Matesih sebesar 206.148.420 m³/tahun.

Ketersediaan air pada suatu lahan merupakan hal yang sangat penting, mengingat fungsi air tanah sebagai sumber pasokan air bersih untuk berbagai kebutuhan, terutama di saat kemarau panjang dimana air permukaan tidak mencukupi. Perhitungan ketersediaan air juga dilakukan melalui pendekatan *system grid* dengan resolusi 5" x 5" ($\pm 0,150 \times 0,150$ km). Perhitungan ketersediaan air menggunakan metode rasional yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung LH dalam Penataan Ruang Wilayah. Hal ini dilakukan karena keterbatasan data debit DAS di wilayah Kabupaten Karanganyar. Adapun dari limpasan air hujan tersebut, volume ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan diasumsikan sebesar 30% dari volume total. Adapun ketersediaan air diasumsikan menggunakan air permukaan dan bukan air tanah, yang berarti kegiatan pemanfaatan ruang secara eksisting mendayagunakan sumber air terbarukan yang lebih cepat dibandingkan air tanah dengan risiko keberlanjutan yang lebih besar.

Pada tahun 2022, total ketersediaan air di Kabupaten Karanganyar mencapai 18,57 miliar m³ dengan distribusi yang tidak merata antar kecamatan. Kecamatan Ngargoyoso (12,13%) dan Jatiyoso (11,45%) menjadi penyumbang terbesar, sementara Colomadu memiliki kontribusi terendah hanya 1,08%. Dominasi kecamatan-kecamatan di wilayah atas menunjukkan potensi sumber daya air yang lebih besar di daerah pegunungan, yang penting untuk pengelolaan air berkelanjutan dan pemerataan pemanfaatannya di seluruh wilayah kabupaten.

Tabel 2.8.
Ketersediaan Air Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Persentase (%)
1	Jatipuro	860.998.931	4,64
2	Jatiyoso	2.126.120.023	11,45
3	Jumapolo	1.251.290.837	6,74
4	Jumantono	1.050.552.826	5,66
5	Matesih	775.376.931	4,18
6	Tawangmangu	1.925.658.022	10,37
7	Ngargoyoso	2.252.601.113	12,13
8	Karangpandan	1.047.152.272	5,64
9	Karanganyar	809.497.855	4,36
10	Tasikmadu	476.773.264	2,57
11	Jaten	405.537.744	2,18
12	Colomadu	199.679.533	1,08
13	Gondangrejo	996.217.137	5,37
14	Kebakkramat	631.681.705	3,40
15	Mojogedang	996.634.513	5,37
16	Kerjo	1.162.991.337	6,26
17	Jenawi	1.598.204.737	8,61
Kabupaten Karanganyar		18.566.968.780	100,00

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Kebutuhan air di Kabupaten Karanganyar dihitung dari kebutuhan air domestik dan non domestik. Status daya dukung air merupakan perbandingan antara ketersediaan air (SA) dengan kebutuhan air (DA), semakin besar kebutuhan air maka ketersediaan air semakin lama semakin berkurang. Berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan D3TLH Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Bila ketersediaan air (SA) > kebutuhan air (DA), maka daya dukung air dinyatakan surplus (baik);
- Bila ketersediaan air (SA) < kebutuhan air (DA), maka daya dukung air dinyatakan defisit (buruk)

Berikut merupakan kebutuhan air di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 dan 2029.

Tabel 2.9.
Kebutuhan Air Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2029

No	Kecamatan	Tahun (m3)		Perubahan Meningkat (m3)	Persentase Perubahan
		2022	2029		
1.	Jatipuro	83.595.710,82	144.506.492	23.822.181	19,74%
2.	Jatiyoso	108.072.093,07	105.911.785	12.384.879	13,24%
3.	Jumapolo	109.215.306,88	109.994.695	12.392.440	12,70%
4.	Jumantono	120.684.310,68	104.825.813	16.364.511	18,50%
5.	Matesih	93.526.906,16	206.148.420	27.452.678	15,36%
6.	Tawangmangu	98.837.636,36	71.856.374	4.282.957	6,34%
7.	Ngargoyoso	88.461.301,90	177.867.370	27.478.514	18,27%
8.	Karangpandan	97.602.254,36	133.911.180	4.779.243	3,70%
9.	Karanganyar	168.421.427,71	170.474.786	2.053.358	1,22%
10.	Tasikmadu	129.131.937,14	106.111.404	9.920.780	10,31%
11.	Jaten	157.643.567,23	133.619.500	24.404.194	22,35%
12.	Colomadu	130.199.632,52	105.983.157	22.387.447	26,78%
13.	Gondangrejo	178.695.741,79	116.213.649	8.141.556	7,53%
14.	Kebakkramat	136.234.809,84	155.778.263	-1.865.304	-1,18%
15.	Mojogedang	150.388.856,05	136.263.952	29.142	0,02%
16.	Kerjo	96.190.624,10	118.033.785	-12.165.848	-9,34%
17.	Jenawi	67.573.416,19	107.123.233	8.285.597	8,38%
Kabupaten Karanganyar		2.014.475.532,78	2.204.623.860	190.148.327	9,44%

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Tabel 2.10.
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Karanganyar

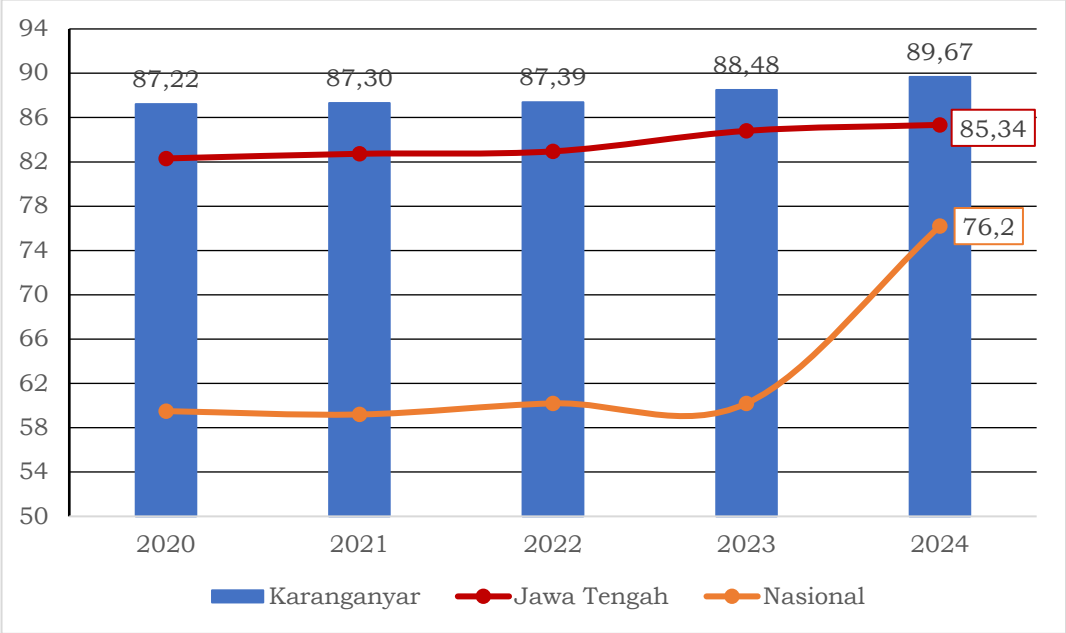
No	Kecamatan	Kebutuhan Air Tahun 2022 (m3)	Nilai	Kebutuhan Air Tahun 2029 (m3)	Nilai	Ketersediaan Air	Status
1	Jatipuro	83.595.710,82	10,30	105.983.157,46	8,12	860.998.931	belum terlampaui
2	Jatiyoso	108.072.093,07	19,67	116.213.649,18	18,29	2.126.120.023	belum terlampaui
3	Jumapolo	109.215.306,88	11,46	133.619.500,41	9,36	1.251.290.837	belum terlampaui
4	Jumantono	120.684.310,68	8,70	144.506.491,97	7,27	1.050.552.826	belum terlampaui
5	Matesih	93.526.906,16	8,29	105.911.784,86	7,32	775.376.931	belum terlampaui
6	Tawangmangu	98.837.636,36	19,48	107.123.233,00	17,98	1.925.658.022	belum terlampaui
7	Ngargoyoso	88.461.301,90	25,46	104.825.813,16	21,49	2.252.601.113	belum terlampaui
8	Karangpandan	97.602.254,36	10,73	109.994.694,60	9,52	1.047.152.272	belum terlampaui
9	Karanganyar	168.421.427,71	4,81	170.474.786,04	4,75	809.497.855	belum terlampaui
10	Tasikmadu	129.131.937,14	3,69	133.911.180,40	3,56	476.773.264	belum terlampaui
11	Jaten	157.643.567,23	2,57	155.778.263,18	2,60	405.537.744	belum terlampaui
12	Colomadu	130.199.632,72	1,53	118.033.784,83	1,69	199.679.533	belum terlampaui
13	Gondangrejo	178.695.741,79	5,57	206.148.420,09	4,83	996.217.137	belum terlampaui
14	Kebakkramat	136.234.809,84	4,64	136.263.952,10	4,64	631.681.705	belum terlampaui
15	Mojogedang	150.388.856,05	6,63	177.867.370,33	5,60	996.634.513	belum terlampaui
16	Kerjo	96.190.624,10	12,09	106.111.404,42	10,96	1.162.991.337	belum terlampaui
17	Jenawi	67.573.416,19	23,65	71.856.373,53	22,24	1.598.204.737	belum terlampaui
Kab. Karanganyar		2.014.475.533,00	9,22	2.204.623.859,56	8,42	18.566.968.780	belum terlampaui

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

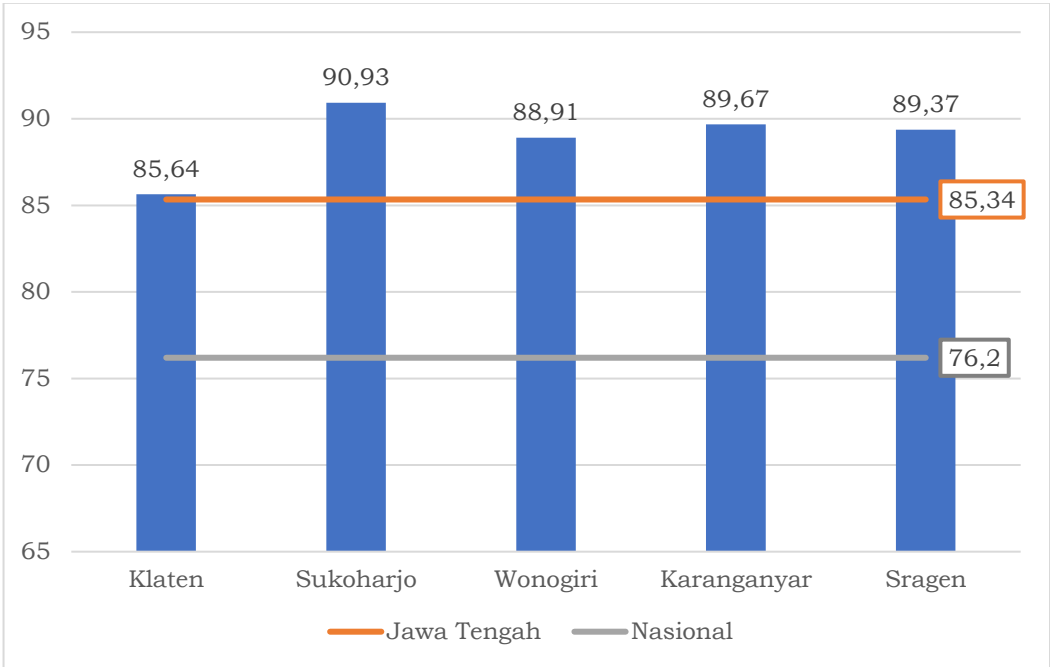
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Karanganyar dalam kurun Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren yang konsisten meningkat sepanjang tahun 2020–2024, dari 87,22 menjadi 89,67. Nilai ini secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional, yang masing-masing pada tahun 2024 tercatat sebesar 85,34 dan 76,2. Kenaikan tajam indeks nasional pada 2024 mengindikasikan adanya perbaikan signifikan di tingkat pusat, namun Karanganyar tetap unggul secara relatif, mencerminkan kinerja daerah yang kuat dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Konsistensi kinerja Karanganyar menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan pangan daerah berjalan efektif, dan daerah ini dapat berperan sebagai contoh dalam praktik ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Jawa Tengah, IKP Kabupaten Karanganyar masih berada di atas. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

IKP Kabupaten Karanganyar tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian IKP Kabupaten di sekitarnya masih di bawah capaian Kabupaten Sukoharjo (90,93%), namun masih di atas capaian Kabupaten Klaten (85,64%), Kabupaten Wonogiri (88,91%), dan Kabupaten Sragen (89,37%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

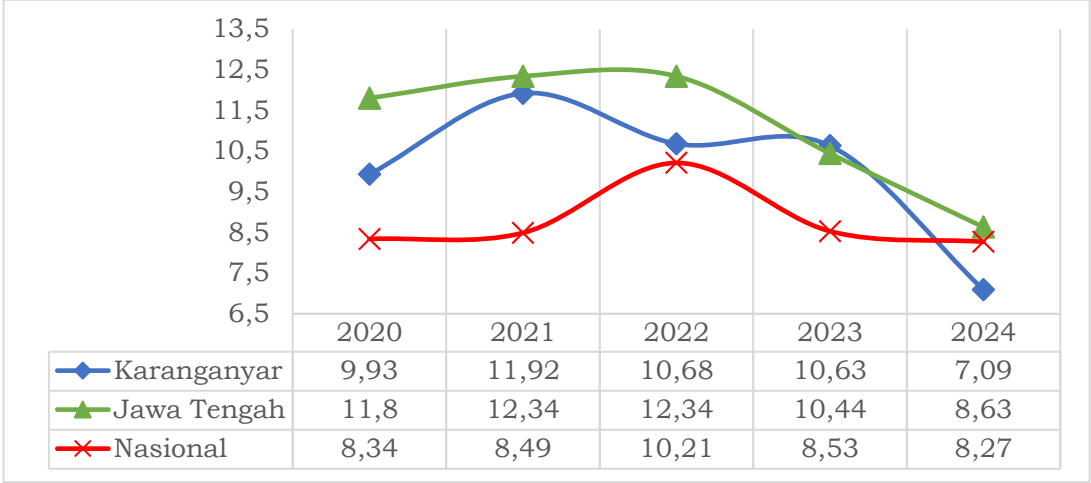


Gambar 2.2.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase, atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhannya.

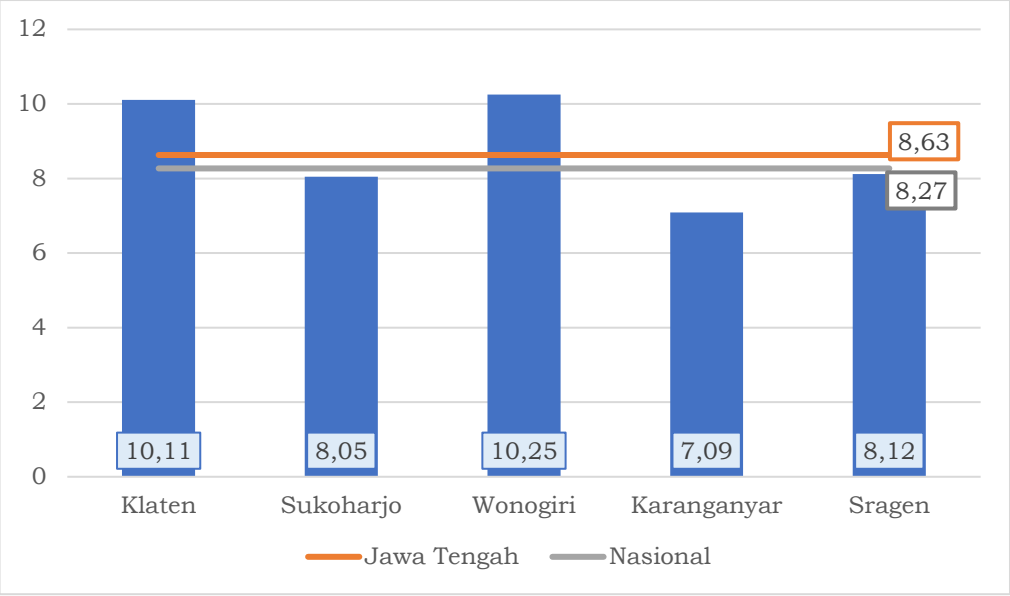
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data PoU Kabupaten Karanganyar mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2024. Tahun 2020 ke tahun 2020 cenderung meningkat dari 9,86% menjadi 9,93%. angka PoU di Karanganyar mengalami fluktuasi, meningkat dari 9,93% pada tahun 2020 ke puncaknya 11,92% pada tahun 2021, lalu menurun secara bertahap hingga mencapai 7,09% pada tahun 2024. Tren serupa juga terlihat di Jawa Tengah yang sempat meningkat hingga 12,34% pada tahun 2022 sebelum menurun tajam ke 8,63% pada tahun 2024. Sementara itu, angka nasional menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan fluktuasi kecil dan penurunan dari 10,21% pada tahun 2022 ke 8,27% pada tahun 2024.



Gambar 2.3.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) Kabupaten Karanganyar, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) Kabupaten Karanganyar tahun 2024 jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya capaiannya masih berada di bawah capaian Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

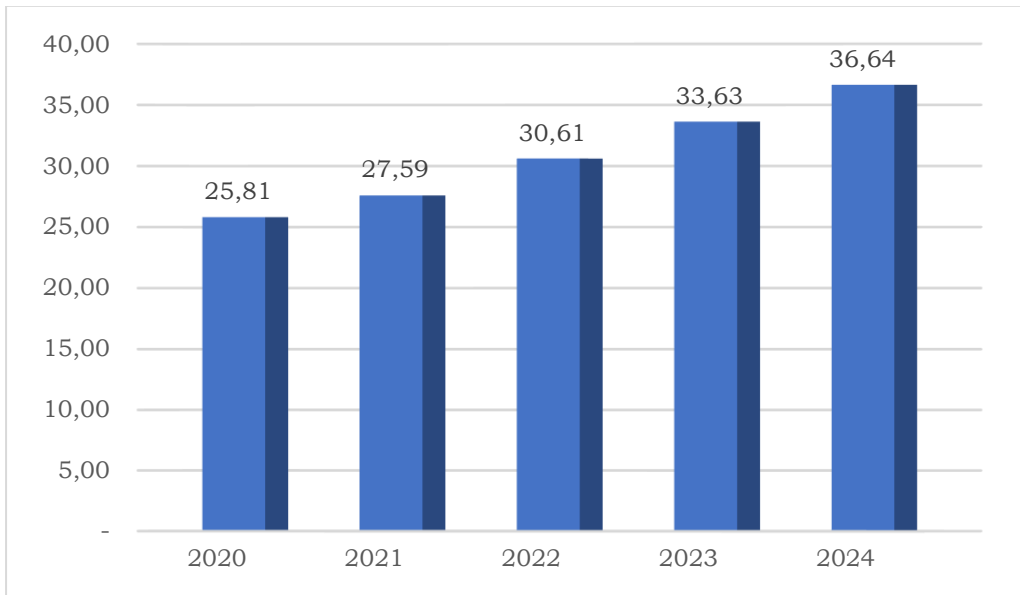


Gambar 2.4.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

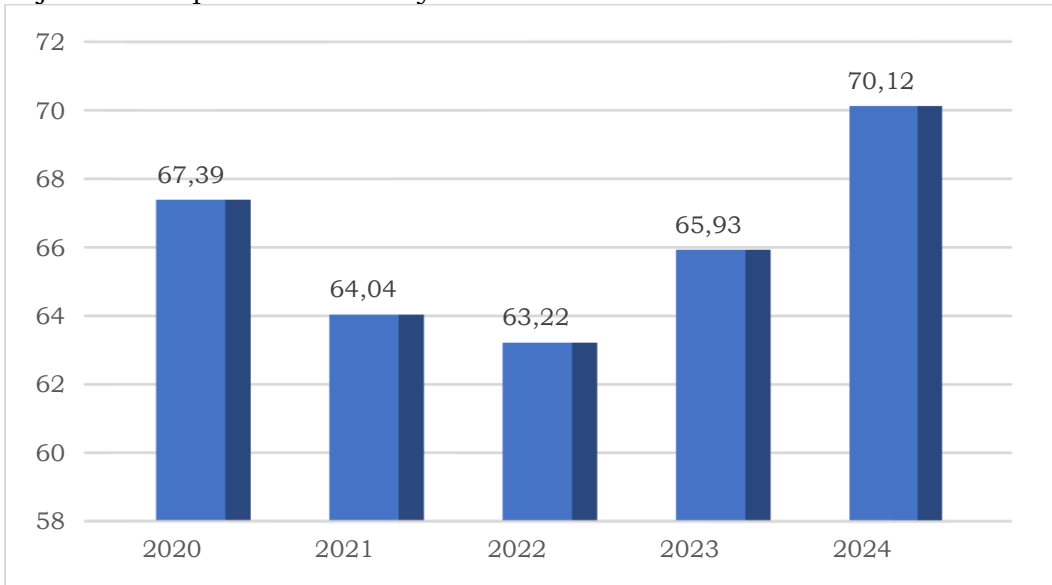
Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Karanganyar mengalami tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan akses tercatat sebesar 25,81% dan meningkat secara bertahap menjadi 27,59% pada 2021, 30,61% pada 2022, 33,63% pada 2023, hingga mencapai 36,64% pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 10,83 poin persentase dalam kurun waktu lima tahun ini mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam memperluas jaringan perpipaan dan meningkatkan kualitas layanan air minum di wilayah perkotaan. Tren ini juga mengindikasikan adanya perbaikan aksesibilitas terhadap layanan dasar yang esensial bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya terkait Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.5.
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas PUPR dan PDAM Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Karanganyar menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan dan upaya perbaikan kualitas lingkungan. Setelah mencapai 67,39 pada tahun 2020, IKLH mengalami penurunan menjadi 64,04 di tahun 2021 dan 63,22 di tahun 2022, yang mengindikasikan adanya permasalahan lingkungan seperti tekanan aktivitas manusia dan kurang optimalnya program pelestarian. Namun, pada tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 65,93, sesuai konversi berdasarkan Surat Sekditjen PPKL Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024. Sedangkan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 70,12, hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan dan peran aktif masyarakat.



Gambar 2.6.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Komposit Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan di antara tiga komponen penyusunnya: Indeks Kualitas Air (IKA),

Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). IKA mengalami penurunan konsisten dari 69,41 pada tahun 2020 menjadi 50,00 pada tahun 2024, mencerminkan penurunan kualitas sumber daya air yang perlu menjadi perhatian serius. Sebaliknya, IKU mengalami tren peningkatan cukup tajam dari 80,00 menjadi 91,21, menandakan perbaikan signifikan dalam kualitas udara, yang dapat disebabkan oleh pengurangan polusi atau perbaikan tata kelola emisi. IKTL yang sempat menurun pada tahun 2022, kembali meningkat hingga mencapai 65,68 pada tahun 2024, menunjukkan pemulihan kondisi tutupan lahan, yang kemungkinan terkait dengan upaya reboisasi atau pengendalian alih fungsi lahan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbaikan pada aspek udara dan tutupan lahan, penurunan kualitas air menjadi tantangan utama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Karanganyar secara komprehensif.

Tabel 2.11.
Komposit Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Komposit IKLH	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	69,41	56,67	55,71	53,68	50,00
IKU	80,00	72,36	80,71	84,37	91,21
IKTL	42,02	63,33	43,79	52,85	65,68

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Neraca pengelolaan sampah Kabupaten Karanganyar tahun 2024 menunjukkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh. Dari total timbulan sampah sebesar 139.444,94 ton per tahun, hanya 95,84 ton (0,07%) yang berhasil dikurangi melalui upaya pembatasan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang, sementara penanganan sampah mencapai 51.100 ton atau 36,64%. Namun, seluruh volume penanganan tersebut hanya melalui pemrosesan akhir, tanpa didahului oleh pengangkutan atau pengolahan seperti pemilahan atau pemanfaatan sebagai energi maupun bahan baku lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih sangat bergantung pada sistem buang-angkut-buang, tanpa pendekatan ekonomi sirkular. Sebaliknya, sampah yang tidak terkelola tercatat sangat tinggi, yakni 139.351,10 ton atau 99,93%, mengindikasikan rendahnya efektivitas sistem pengelolaan sampah daerah. Kondisi ini memerlukan intervensi serius melalui peningkatan fasilitas pengolahan, edukasi masyarakat, regulasi yang tegas, serta penguatan kelembagaan dan pembiayaan agar pengelolaan sampah di Karanganyar dapat lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

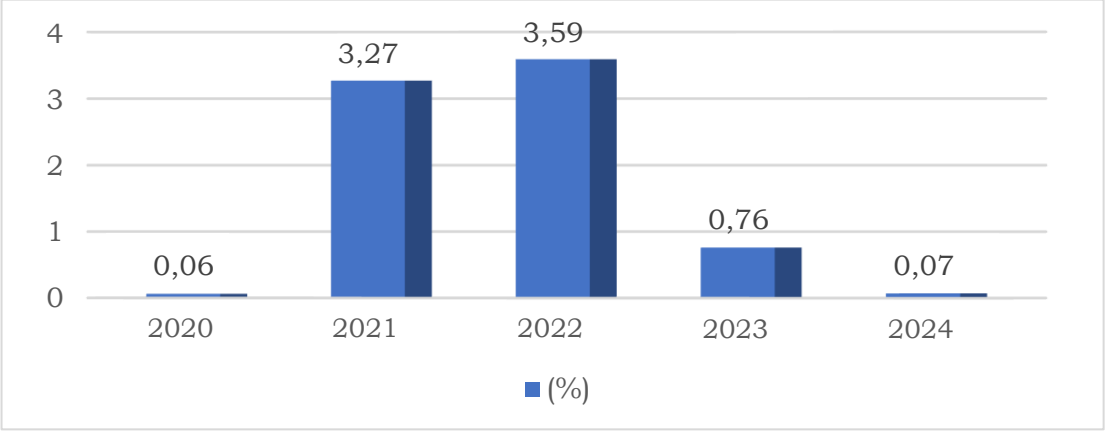
Tabel 2.12.
Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

No.	Keterangan	Nilai (Ton/Tahun)
A.	Jumlah Timbulan Sampah	139.444,94
B.	Jumlah Pengurangan Sampah	95,84
Persentase pengurangan sampah		0,07
1	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0,00
2	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	87,00
3	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	8,84
C.	Jumlah Penanganan Sampah	51.100,00
Persentase penanganan sampah		36,64
4	Pemilahan/Pengumpulan	
5	Pengangkutan*)	0,00
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	

No.	Keterangan	Nilai (Ton/Tahun)
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
6	Pengolahan	0,00
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan <i>upcycle</i>)	0,00
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi Pemrosesan akhir	0,00
7	Pemrosesan Akhir	51.100,00
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	51.100,00
D.	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	95,84
Persentase sampah terkelola		0,07
E.	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	139.351,10
Persentase sampah tidak terkelola		99,93

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

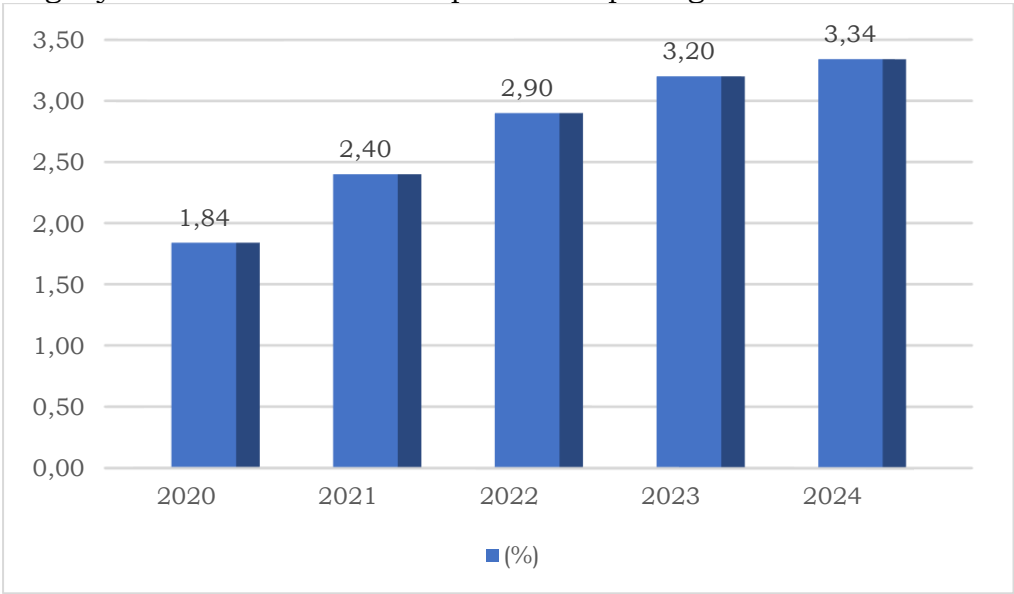
Kualitas lingkungan hidup di suatu daerah juga dilihat dari pengelolaan sampah. Persampahan telah menjadi permasalahan penting di wilayah Kabupaten Karanganyar, khususnya pada kawasan permukiman perkotaan. Volume sampah yang semakin meningkat, tempat pembuangan sampah yang semakin sempit dan sulitnya mencari tempat pembuangan sampah baru merupakan permasalahan utama yang mendesak untuk segera dijadikan alternatif solusinya. Indikator kinerja terkait pengelolaan sampah meliputi : persentase pengurangan sampah, persentase pengangkutan sampah, persentase sampah yang tertangani dan persentase pengoperasian TPA. Data timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Karanganyar menunjukkan perkembangan persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Karanganyar selama periode tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase sampah terolah sangat rendah yaitu hanya 0,06%, namun mengalami lonjakan signifikan menjadi 3,27% pada tahun 2021 dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2022 sebesar 3,59%. Namun demikian, tren ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2023 persentasenya menurun drastis menjadi 0,76%, dan kembali turun menjadi 0,07% pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan ketidakstabilan dalam sistem pengelolaan sampah di daerah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan kapasitas fasilitas, kendala teknis, atau penurunan dukungan operasional. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.



Gambar 2.7.
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Rumah tangga di Kabupaten Karanganyar dengan akses sanitasi aman menunjukkan tren peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Karanganyar selama periode tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, hanya 1,84% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman. Angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahun, yakni menjadi 2,40% pada tahun 2021, 2,90% pada tahun 2022, 3,20% pada tahun 2023, dan mencapai 3,34% pada tahun 2024. Meskipun peningkatannya relatif konsisten, capaian ini masih tergolong rendah secara proporsional terhadap total rumah tangga, sehingga menunjukkan bahwa akses sanitasi aman masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Upaya perbaikan infrastruktur sanitasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi aman perlu terus ditingkatkan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan lingkungan. Selengkapnnya terkait perkembangan rumah tangga akses sanitasi aman di Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.8.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur yang ada di Kabupaten Karanganyar, selama tahun 2024 hari hujan terbanyak adalah 23,67 hari di bulan Januari dengan curah hujan sebesar 599,50 mm, sedangkan hari hujan terendah adalah 1,17 hari pada bulan Agustus dengan curah hujan 25,33 mm. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Karanganyar dapat diidentifikasi ke dalam 3 kawasan yaitu :

- 1) Kawasan rawan bencana gerakan tanah
Sangat rendah, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Colomadu, sebagian wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Jaten, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Jumantono dan Kecamatan Matesih.
Rendah, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kerjo,

Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jatipuro Dan Kecamatan Tawangmangu

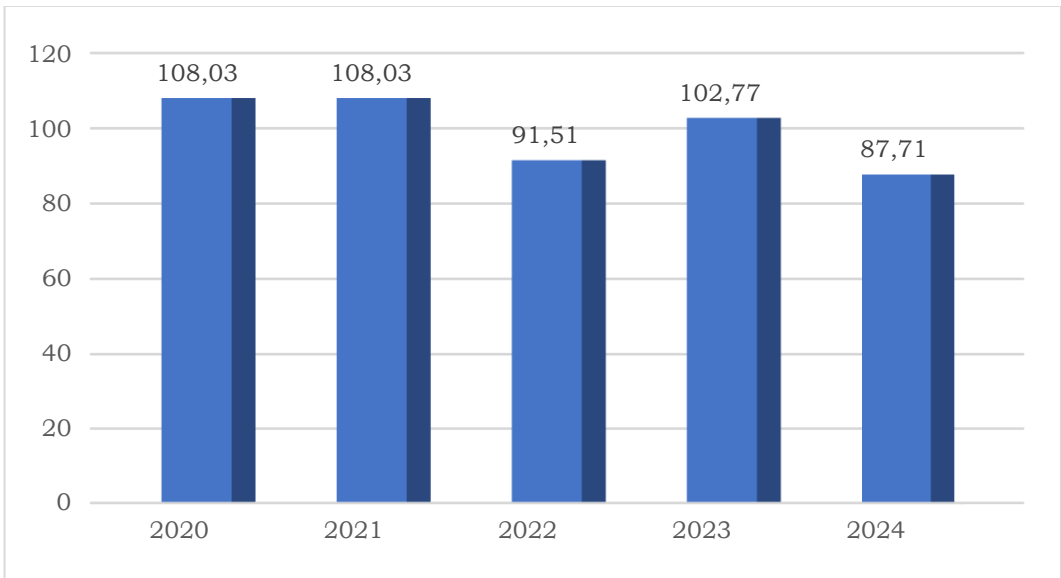
Menengah, meliputi wilayah Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Karanganyar Dan Kecamatan Gondangrejo

Tinggi, meliputi wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu Dan Kecamatan Jatiyoso.

- 2) Kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Jaten, Kebakkramat dan Gondangrejo.
- 3) Kawasan rawan puting beliung meliputi Kecamatan Mojogedang, Ngargoyoso, Jumapolo, Gondangrejo, Kebakkramat dan Tasikmadu.

Berdasarkan gambaran kondisi ekosistem, menunjukkan adanya tingkat kerawanan terhadap bencana terutama banjir dan longsor pada musim hujan tetapi mengalami kekeringan pada musim kemarau serta terganggunya iklim mikro. Selain itu kemampuan purifikasi air kotor secara alami telah relatif rendah. Hal ini juga ditambah dengan faktor menurunnya kualitas air sungai di Kabupaten Karanganyar. Implikasi dari kondisi ini pemerintah dan masyarakat perlu memprioritaskan pembangunan fisik dan pendidikan masyarakat yang bernilai tangguh bencana, sebagai upaya mengantisipasi risiko bencana yang mungkin terjadi.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren penurunan selama periode tahun 2020–2024. Pada tahun 2020 dan tahun 2021, indeks berada pada angka yang sama, yaitu 108,03, yang mencerminkan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 91,51, diikuti oleh kenaikan lagi di tahun 2023 menjadi 102,77 dan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 87,71. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang semakin baik, seperti peningkatan kapasitas tanggap bencana, penguatan infrastruktur, serta edukasi masyarakat terkait risiko bencana. Meski demikian, indeks yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa Karanganyar tetap menghadapi potensi bencana yang signifikan, sehingga perlu memperkuat strategi pengurangan risiko, termasuk optimalisasi sistem peringatan dini, pelatihan kebencanaan, dan perbaikan tata ruang berbasis mitigasi bencana. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga tren penurunan risiko ini dan menciptakan wilayah yang lebih tangguh terhadap bencana.

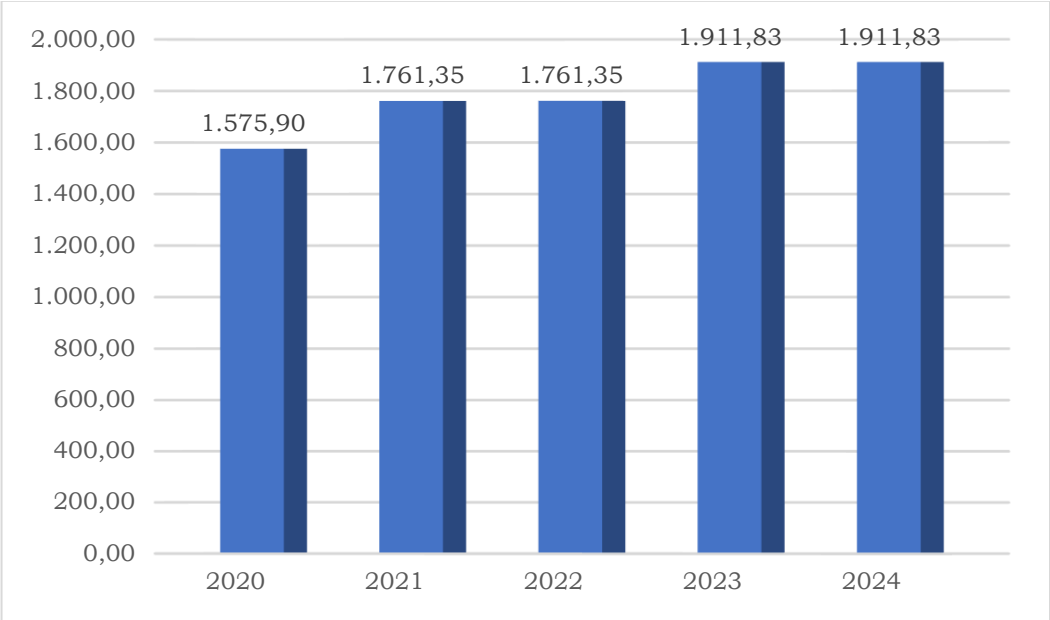


Gambar 2.9.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah, yang berkontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global. Beberapa GRK utama termasuk karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), dan gas-gas berfluorinasi seperti *hidrofluorokarbon* (HFCs), *perfluorokarbon* (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF₆). Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.

Ketika intensitas emisi GRK menurun, ini menunjukkan bahwa ekonomi atau sektor tertentu menjadi lebih efisien dalam menggunakan energi dan menghasilkan lebih sedikit emisi GRK per unit *output*. Namun, penurunan intensitas emisi tidak selalu berarti bahwa total emisi GRK juga menurun, terutama jika ekonomi atau sektor tersebut tumbuh dengan cepat. Meski intensitas emisi bisa menurun, total emisi GRK dapat tetap meningkat jika ada pertumbuhan ekonomi yang cepat. Misalnya, jika produk domestik regional bruto meningkat dengan laju yang lebih cepat dibandingkan dengan penurunan intensitas emisi, maka emisi total tetap bisa meningkat.

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, penurunan emisi tercatat sebesar 1.575,90 ton CO₂e, kemudian meningkat signifikan menjadi 1.761,35 ton CO₂e pada tahun 2021 dan stabil pada angka yang sama hingga tahun 2022. Selanjutnya, terjadi peningkatan kembali menjadi 1.911,83 ton CO₂e pada tahun 2023 yang bertahan hingga 2024. Data ini mencerminkan adanya konsistensi dan peningkatan efektivitas program penurunan emisi GRK di Karanganyar, khususnya setelah tahun 2022, yang mengindikasikan penguatan kebijakan atau implementasi aksi mitigasi perubahan iklim yang lebih optimal di tingkat daerah.

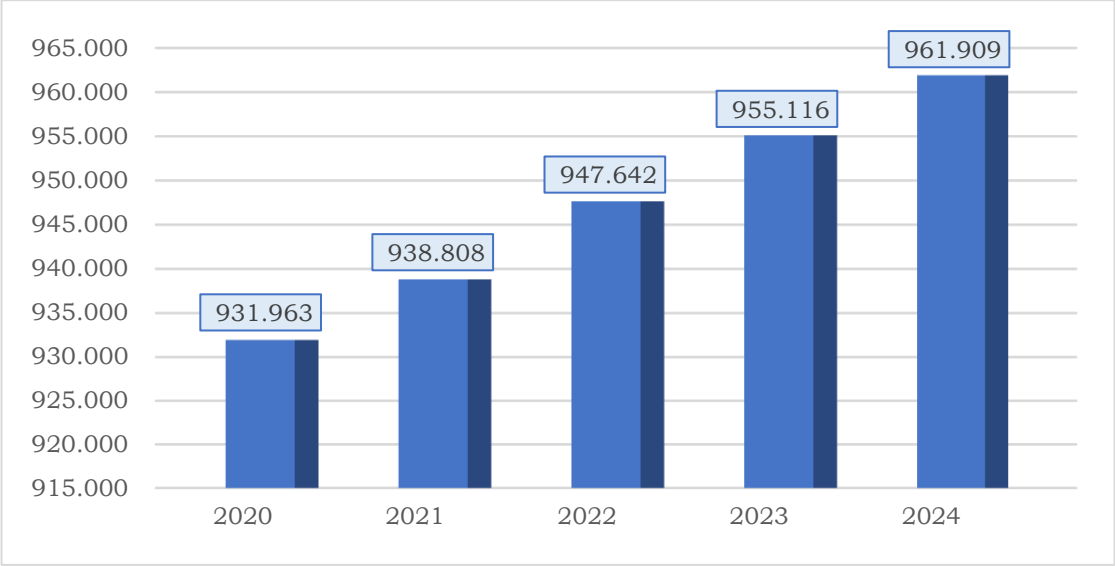


Gambar 2.10.
Kontribusi Penurunan Emisi GRK Komulatif Karanganyar
Tahun 2020-2024 (TonCO2eq)
Sumber : Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Tahun 2025

7. Aspek Demografi

Kondisi demografi menunjukkan potensi sumber daya manusia yang merupakan aspek strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan sumber daya pembangunan dan partisipasinya sangat diperlukan agar kinerja pembangunan daerah makin pesat. Kondisi demografi menyangkut jumlah dan persebaran, laju pertumbuhan, dinamika serta komposisi penduduk lainnya.

Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar dari tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren yang stabil, meskipun dengan laju pertumbuhan yang cenderung melambat. Pada tahun 2021, kenaikan penduduk sebesar 6.845 jiwa dibanding tahun sebelumnya, sementara pada tahun 2022 kenaikannya lebih tinggi, yakni 8.834 jiwa. Namun, setelah itu, laju kenaikan mulai menurun. Pada tahun 2023, kenaikan penduduk menjadi 7.474 jiwa, dan pada tahun 2024 kenaikannya kembali turun menjadi 6.793 jiwa.



Gambar 2.11.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024
Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, 2025

Fenomena ini dapat mengindikasikan potensi perlambatan pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi perlambatan ini antara lain keberhasilan program keluarga berencana (KB), peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, atau mulai berkurangnya angka kelahiran. Di sisi lain, angka migrasi keluar juga bisa menjadi faktor yang berkontribusi. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, kecenderungan perlambatan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan kependudukan dan pembangunan, terutama untuk memastikan ketersediaan layanan publik yang memadai seiring dengan pertumbuhan populasi.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren kenaikan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,79% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,94%, yang kemungkinan mencerminkan mulai pulihnya mobilitas dan aktivitas masyarakat pascapandemi COVID-19. Sementara itu, pertumbuhan penduduk tahun-tahun berikutnya sedikit melambat namun tetap positif, yaitu 0,79% pada 2023 dan 0,71% pada 2024. Pola pertumbuhan ini mencerminkan dinamika demografi yang relatif terkendali, di mana pertambahan penduduk berlangsung secara moderat. Stabilitas ini penting untuk mendukung perencanaan pembangunan, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Data kependudukan Kabupaten Karanganyar tahun 2024 menunjukkan distribusi penduduk yang bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Jaten mencatat jumlah penduduk tertinggi, yaitu 72.604 jiwa (7,55% dari total penduduk kabupaten), diikuti oleh Tasikmadu dan Karanganyar. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki daya tarik tinggi, kemungkinan karena perkembangan ekonomi, ketersediaan fasilitas publik, dan peluang kerja yang lebih baik. Sebaliknya, Kecamatan Jenawi memiliki jumlah penduduk terendah dengan 38.171 jiwa (3,97%), yang bisa disebabkan oleh kondisi geografis dan keterbatasan akses infrastruktur.

Dari segi kepadatan penduduk, Kabupaten Karanganyar memiliki rata-rata 1.253 jiwa/km². Kecamatan Jaten menempati posisi tertinggi dengan kepadatan 3.378 jiwa/km², menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi. Di sisi lain, Kecamatan Jatiyoso mencatat kepadatan terendah sebesar 599 jiwa/km², yang mengindikasikan wilayah dengan karakteristik lebih pedesaan dan kondisi topografi yang kurang mendukung pemukiman padat.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Kabupaten Karanganyar adalah 99,37%, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih rendah dibandingkan perempuan. Kecamatan Gondangrejo mencatat *sex ratio* tertinggi (102,41%), sedangkan Kecamatan Colomadu memiliki rasio terendah (97,84%).

Rasio ketergantungan di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan nilai sebesar 43,16 berdasarkan Sensus Penduduk, lalu sedikit meningkat menjadi 44,12 dan 44,5 menurut proyeksi penduduk BPS. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43–45 penduduk usia nonproduktif. Angka tersebut masih tergolong rendah, yang mencerminkan dominasi penduduk usia produktif dan memberikan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan lapangan kerja.

Tren data ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan ruang dan penyediaan fasilitas umum, sedangkan wilayah dengan jumlah

penduduk rendah perlu didorong pengembangannya melalui peningkatan akses dan potensi ekonomi lokal.

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Penduduk (jiwa)			%	Sex Ratio (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
1. Jatipuro	17.797	17.852	35.649	3,71	99,69	1.037
2. Jatiyoso	20.246	19.967	40.213	4,18	101,40	599
3. Jumapolo	22.182	21.977	44.159	4,59	100,93	793
4. Jumantono	25.610	25.613	51.223	5,33	99,99	957
5. Matesih	22.803	22.781	45.584	4,74	100,10	1.735
6. Tawangmangu	23.985	24.020	48.005	4,99	99,85	685
7. Ngargoyoso	19.003	18.972	37.975	3,95	100,16	581
8. Karangpandan	22.113	22.503	44.616	4,64	98,27	1.308
9. Karanganyar	43.257	43.668	86.925	9,04	99,06	2.020
10. Tasikmadu	34.528	34.908	69.436	7,22	98,91	2.516
11. Jaten	42.679	43.693	86.372	8,98	97,68	3.381
12. Colomadu	37.737	38.887	76.624	7,97	97,04	4.899
13. Gondangrejo	45.963	44.883	90.846	9,44	102,41	1.599
14. Kebakkramat	32.345	33.194	65.539	6,81	97,44	1.798
15. Mojogedang	36.053	36.283	72.336	7,52	99,37	1.357
16. Kerjo	19.257	19.339	38.596	4,01	99,58	824
17. Jenawi	13.875	13.936	27.811	2,89	99,56	496
Kabupaten Karanganyar	479.433	482.476	961.909	100,00	99,37	1.253

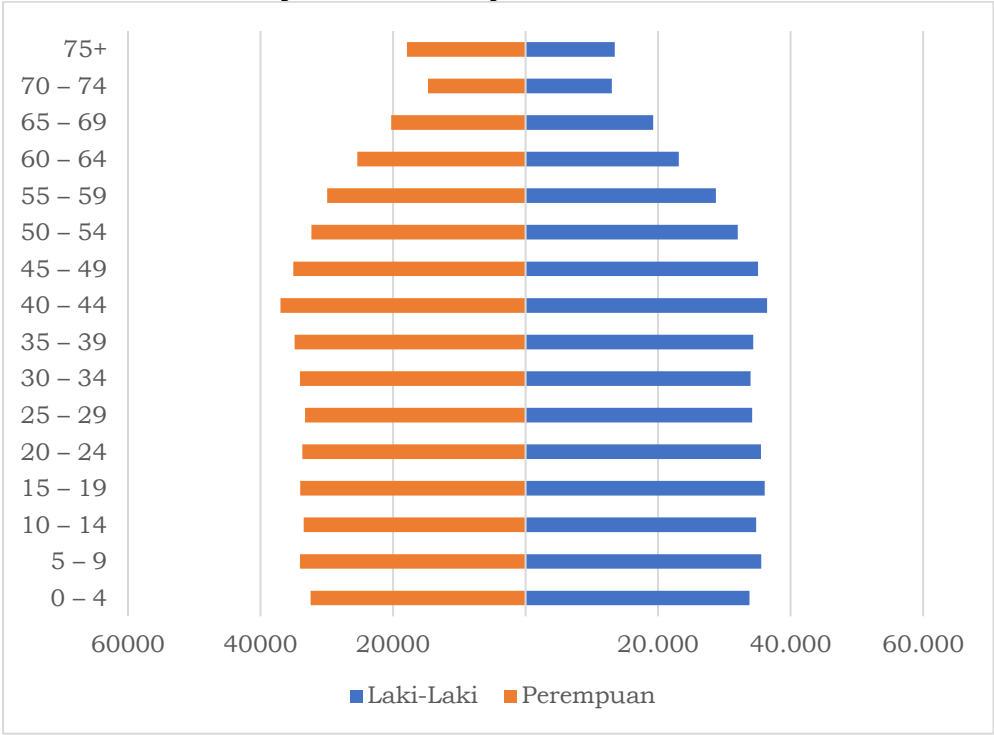
Sumber : Kabupaten Karanganyar dalam Angka, 2025

Struktur penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2024, berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, memperlihatkan bentuk piramida penduduk yang relatif seimbang, meskipun menunjukkan kecenderungan menuju piramida stasioner. Kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi jumlah penduduk, dengan porsi yang cukup besar baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Jumlah penduduk usia muda (0–14 tahun) juga cukup signifikan, yang menandakan potensi regenerasi penduduk di masa mendatang. Namun, tingginya jumlah penduduk usia muda ini juga memerlukan perhatian dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan anak, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, kelompok penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) mulai menunjukkan peningkatan, meskipun jumlahnya masih lebih kecil dibanding kelompok usia lainnya. Peningkatan ini mengindikasikan bertambahnya harapan hidup penduduk di Kabupaten Karanganyar, yang dapat dikaitkan dengan membaiknya layanan kesehatan dan kualitas hidup.

Dari segi jenis kelamin, distribusi antara laki-laki dan perempuan terlihat cukup seimbang di hampir semua kelompok umur. Perempuan cenderung lebih dominan pada kelompok usia lanjut, yang sejalan dengan tren umum bahwa perempuan memiliki harapan hidup lebih tinggi dibanding laki-laki. Struktur penduduk seperti ini menuntut perencanaan pembangunan yang berimbang, dengan perhatian pada kebutuhan masing-masing kelompok usia. Pemerintah daerah perlu memastikan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi penduduk usia muda, peluang kerja dan pelatihan bagi kelompok usia produktif, serta jaminan sosial dan layanan kesehatan bagi penduduk lanjut usia. Dengan strategi yang tepat, potensi

demografis Kabupaten Karanganyar dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.12.
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan
Kelompok Umur Tahun 2024
Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, 2025

Pertumbuhan penduduk tidak hanya mengubah jumlah penduduk yang ada tetapi juga mempengaruhi struktur kependudukan (transisi demografi) di mana jumlah penduduk usia produktif terus mengalami peningkatan sedangkan jumlah kelahiran (fertilitas) dan angka kematian mengalami penurunan, sejalan dengan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Dengan demikian maka perhatian akan peningkatan pendidikan, keterampilan dan standardisasi keahlian bagi tenaga kerja usia produktif semakin penting di masa mendatang.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Kesejahteraan Ekonomi

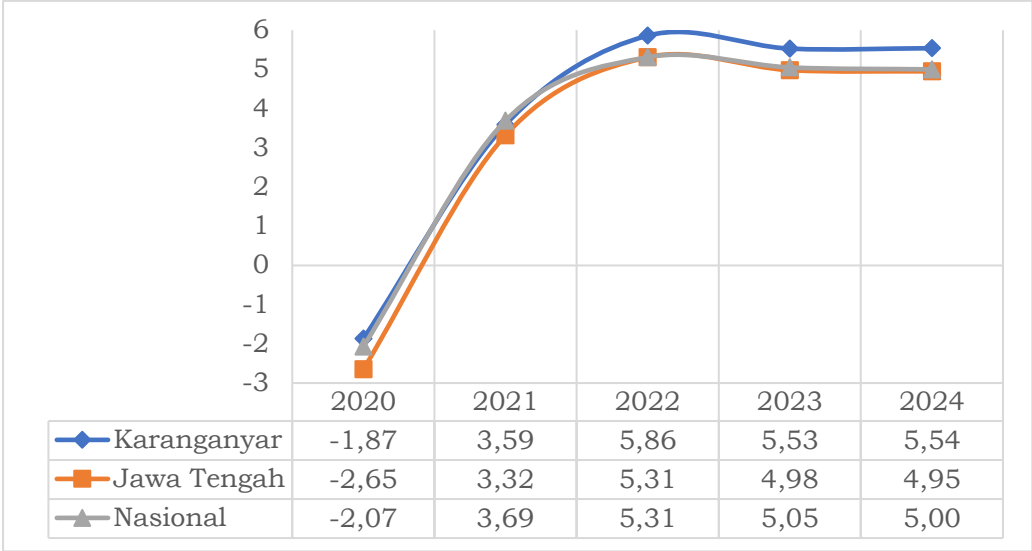
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika pemulihan yang cukup baik setelah masa kontraksi pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Karanganyar mengalami penurunan sebesar -1,87%, meskipun kontraksi ini lebih ringan dibandingkan Jawa Tengah (-2,65%) dan tingkat nasional (-2,07%). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Karanganyar memiliki ketahanan yang lebih baik di tengah tekanan eksternal.

Memasuki tahun 2021, Karanganyar berhasil bangkit dengan pertumbuhan sebesar 3,59%, melampaui Jawa Tengah (3,32%) dan nasional (3,69%). Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana Karanganyar mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,86%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (5,31%) dan nasional (5,31%). Kinerja ini menunjukkan efektivitas upaya pemulihan ekonomi di tingkat daerah, yang kemungkinan didorong oleh pemulihan sektor-sektor utama seperti industri, perdagangan, dan pertanian.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi Karanganyar cenderung stabil di kisaran 5,53% hingga 5,54%. Meski tetap lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan nasional, laju pertumbuhan yang melambat ini dapat menjadi indikasi perlunya strategi baru untuk menjaga

momentum pertumbuhan, seperti melalui peningkatan investasi, pengembangan UMKM, dan diversifikasi sektor ekonomi.

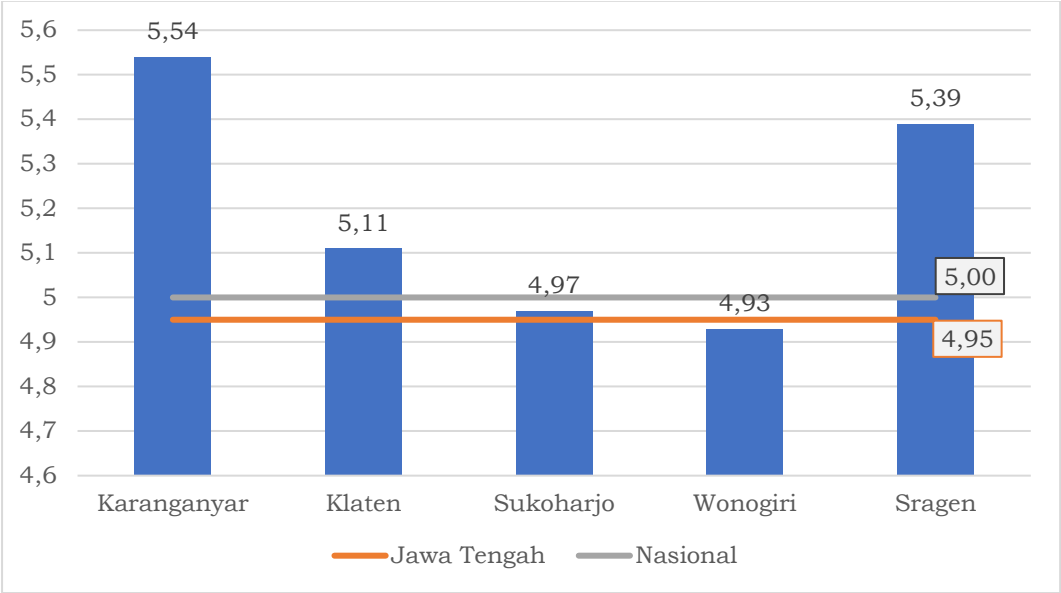
Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Karanganyar yang konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional mencerminkan potensi besar daerah ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung iklim investasi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ini dapat berkelanjutan.



Gambar 2.13.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Perbandingan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 antara Kabupaten Karanganyar dan kabupaten tetangganya (Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, dan Sragen) menunjukkan bahwa Karanganyar menempati posisi tertinggi bersama Sragen, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Capaian ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional, yang berada di kisaran 4,9% hingga 5%. Selain Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sebaliknya, Sukoharjo dan Wonogiri mencatat pertumbuhan yang lebih rendah, menunjukkan tantangan yang mungkin terkait dengan struktur ekonomi atau pemulihan pasca pandemi yang lebih lambat. Dominasi Karanganyar dan Sragen dalam hal pertumbuhan ekonomi ini mengindikasikan adanya potensi kuat di sektor-sektor produktif, seperti industri, perdagangan, dan pariwisata, yang berkontribusi signifikan pada perekonomian daerah. Keberhasilan ini juga bisa mencerminkan kebijakan pembangunan yang tepat, iklim investasi yang kondusif, serta ketersediaan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi.



Gambar 2.14.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tetangga, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan, sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat dengan adanya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan stabil. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan nilai ekonomi secara nominal (ADHB) tetapi juga pertumbuhan riil yang mengacu pada harga konstan (ADHK).

Dari sisi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), terlihat peningkatan yang cukup signifikan dari Rp39,7 juta per kapita pada tahun 2020 menjadi Rp53,3 juta per kapita pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan nilai transaksi barang dan jasa di Karanganyar, yang kemungkinan dipengaruhi oleh inflasi, peningkatan harga, dan aktivitas ekonomi yang semakin bergeliat. Namun, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih riil, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menjadi indikator yang lebih relevan. Peningkatan ADHK dari Rp28 juta pada tahun 2020 menjadi Rp33,1 juta pada tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh inflasi, Karanganyar tetap mencatatkan pertumbuhan produksi dan output ekonomi yang positif. Ini berarti peningkatan aktivitas ekonomi di kabupaten ini bukan hanya disebabkan oleh kenaikan harga, tetapi juga oleh peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi.

Tabel 2.14.
PDRB Per Kapita Tahun 2020-2024

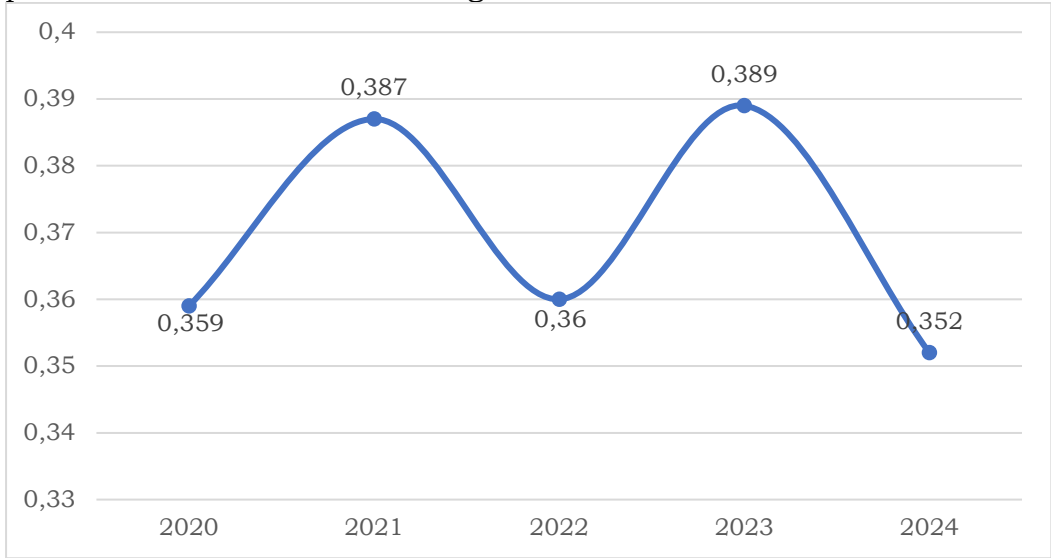
Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	
				ADHB	ADHK
2020	37.023.453.390,00	26.103.228.360,00	931.963	39.726,31	28.008,87
2021	39.157.212.600,00	27.039.607.960,00	938.808	41.709,50	28.802,06

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	
				ADHB	ADHK
2022	43.087.760.280,00	28.624.989.890,00	947.642	45.468,39	30.206,54
2023	47.203.554.400,00	30.208.236.040,00	955.116	49.421,80	31.627,82
2024	51.331.500.000,00	31.883.100.000,00	961.909	53.364,20	33.145,65

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Indeks Gini Kabupaten Karanganyar pada periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, Indeks Gini tercatat sebesar 0,359, kemudian meningkat cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 0,387. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin melebar pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2022, Indeks Gini mengalami penurunan menjadi 0,360, yang berarti terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan. Sayangnya, tren ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2023 indeks kembali naik ke titik tertinggi selama periode ini, yaitu 0,389. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Karanganyar semakin menguat kembali. Pada tahun 2024, Indeks Gini turun cukup signifikan menjadi 0,352, yang merupakan angka terendah dalam periode lima tahun tersebut. Penurunan ini menjadi sinyal positif dalam upaya pemerataan pendapatan dan pengurangan ketimpangan ekonomi di Karanganyar.

Fluktuasi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan dalam mengurangi ketimpangan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, peningkatan kesempatan kerja, serta akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan strategi yang tepat, diharapkan tren penurunan ketimpangan pendapatan dapat dipertahankan di masa mendatang.



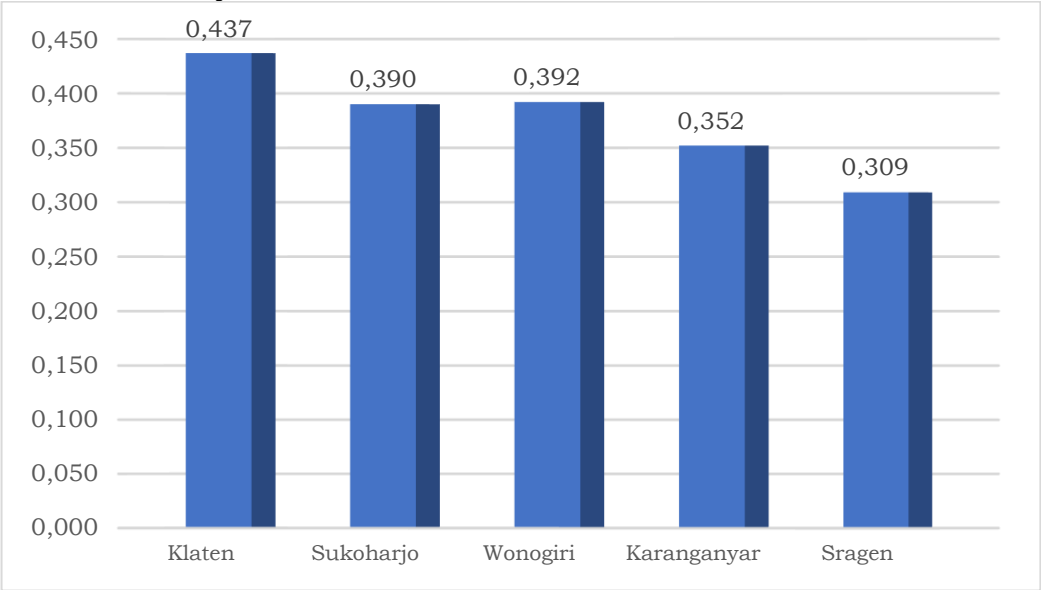
Gambar 2.15.
Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Grafik berikut menyajikan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar dan kabupaten sekitarnya pada tahun 2024, yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang rendah (pemerataan pendapatan yang baik), sementara semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Dari grafik tersebut, Kabupaten Klaten memiliki Indeks Gini tertinggi sebesar 0,437, menunjukkan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sukoharjo dan Wonogiri memiliki Indeks Gini yang hampir sama, masing-

masing sebesar 0,390 dan 0,392, menandakan ketimpangan pendapatan yang sedang. Sementara itu, Kabupaten Karanganyar mencatat Indeks Gini sebesar 0,352, yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten tetangga seperti Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri. Kabupaten Sragen memiliki Indeks Gini terendah sebesar 0,309, yang berarti distribusi pendapatan di wilayah ini lebih merata.

Data ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Karanganyar berada dalam posisi yang cukup baik dalam hal pemerataan pendapatan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Untuk menjaga dan meningkatkan pemerataan tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan yang inklusif, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah..



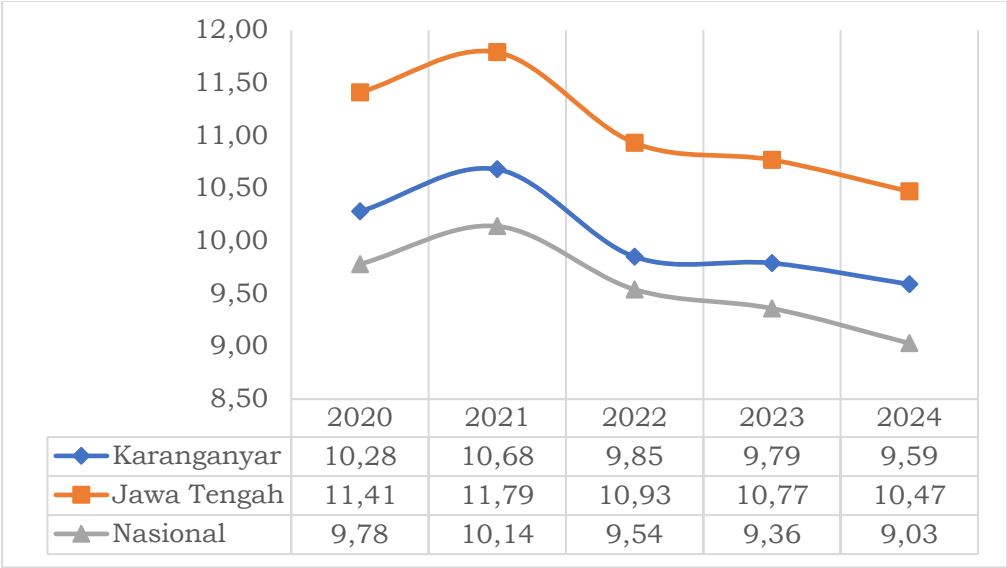
Gambar 2.16.
Indeks Gini Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sekitarnya
Tahun 2024

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Tingkat Kemiskinan miskin di Kabupaten Karanganyar pada periode 2020-2024 menunjukkan tren penurunan, meskipun dengan fluktuasi kecil. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,28% dan sempat naik sedikit pada tahun 2021 menjadi 10,68%. Namun, pada tahun 2022 angka ini turun menjadi 9,85% dan terus menurun hingga mencapai 9,59% pada tahun 2024.

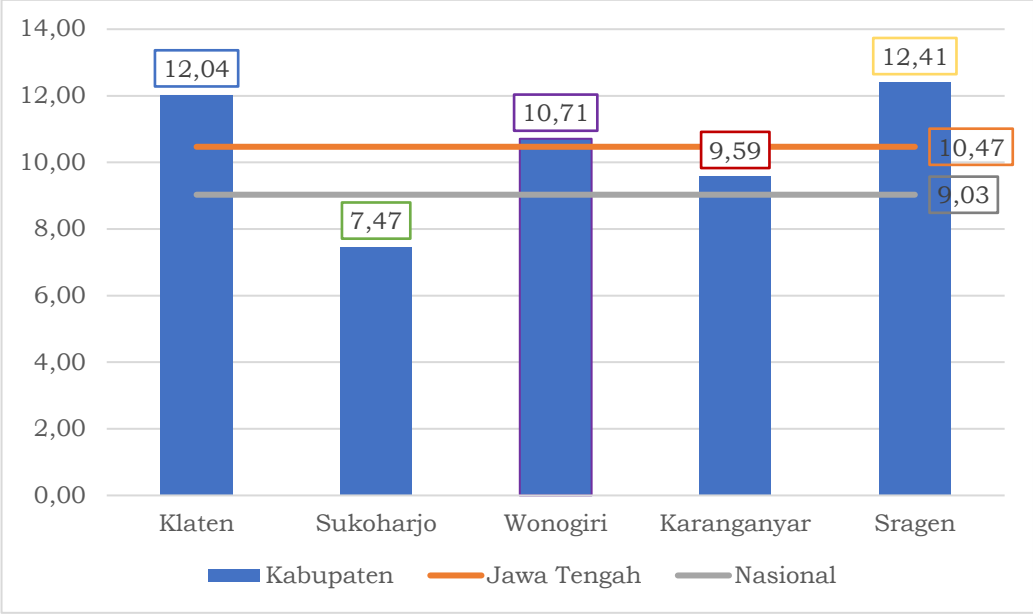
Jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, Kabupaten Karanganyar secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Jawa Tengah mencatat persentase penduduk miskin tertinggi selama periode tersebut, dengan angka 11,41% di tahun 2020 dan 10,47% pada tahun 2024. Di sisi lain, tingkat kemiskinan nasional juga menunjukkan tren penurunan, dari 9,78% pada tahun 2020 menjadi 9,03% di tahun 2024.

Penurunan tingkat kemiskinan di Karanganyar yang lebih stabil dan konsisten dibandingkan Jawa Tengah menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini berjalan cukup baik. Hal ini bisa jadi merupakan hasil dari berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, serta akses yang lebih baik terhadap layanan dasar. Namun, meskipun tren ini positif, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perhatian dan dukungan, agar angka kemiskinan terus menurun dengan lebih signifikan.



Gambar 2.17.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024 (%)
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

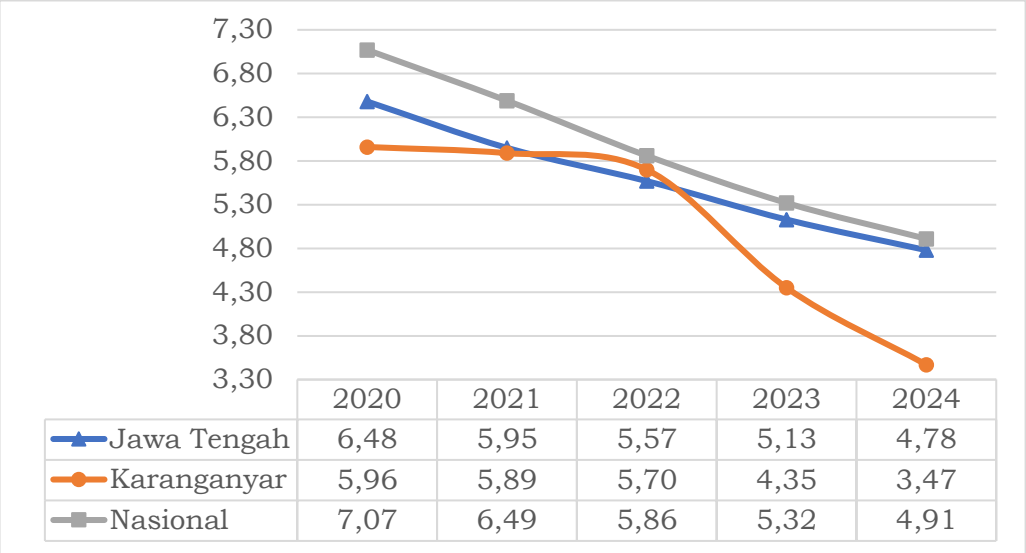
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar tahun 2024 sebesar 9,59% menunjukkan posisi yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa kabupaten sekitarnya, tetapi masih lebih tinggi daripada Kabupaten Sukoharjo yang hanya mencapai 7,47%. Kabupaten Sragen dan Klaten memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 12,41% dan 12,04%. Sementara itu, Wonogiri juga mencatat angka yang cukup tinggi, yaitu 10,71%. Dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah sebesar 10,47% dan nasional sebesar 9,03%, Kabupaten Karanganyar menunjukkan kinerja yang cukup baik, karena berada di bawah rata-rata provinsi meskipun masih sedikit di atas angka nasional. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Karanganyar cukup efektif, meskipun masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendekati atau bahkan melampaui rata-rata nasional.



Gambar 2.18.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar Dibandingkan
Dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional,
Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Karanganyar. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren menurun selama periode 2020–2024. TPT Karanganyar tahun 2020 sebesar 5,96% dan mengalami penurunan menjadi 3,47% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2024 TPT Kabupaten Karanganyar berada di bawah tingkat provinsi dan nasional.

Penurunan TPT di Karanganyar mengindikasikan adanya upaya yang cukup baik dalam penyerapan tenaga kerja dan pengembangan lapangan kerja. Program pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan langkah strategis tersebut, diharapkan TPT Karanganyar bisa semakin menurun.

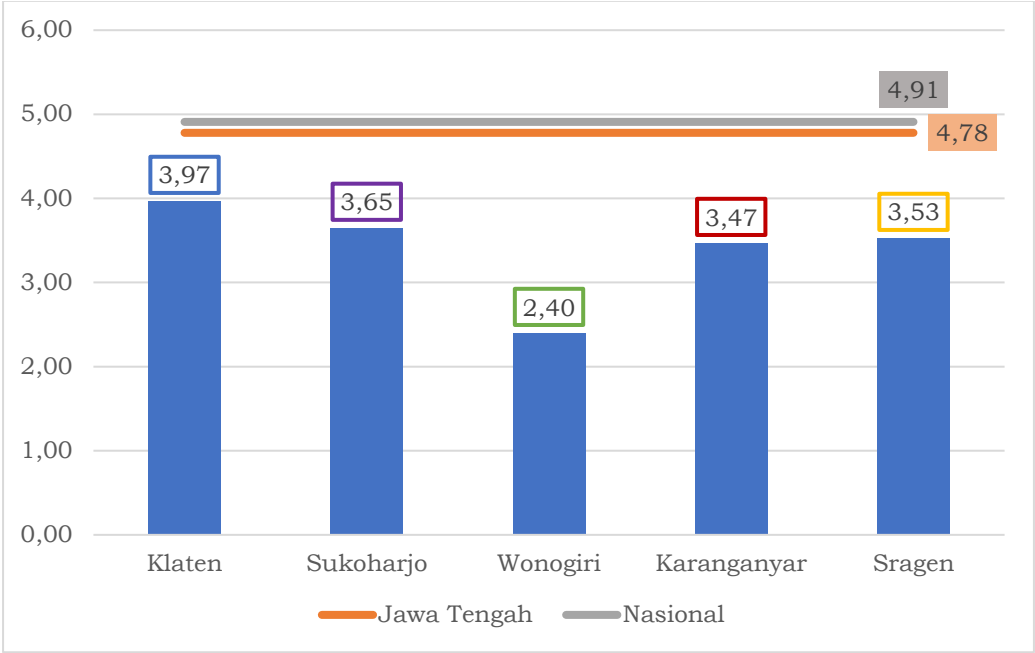


Gambar 2.19.
Persentase TPT Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

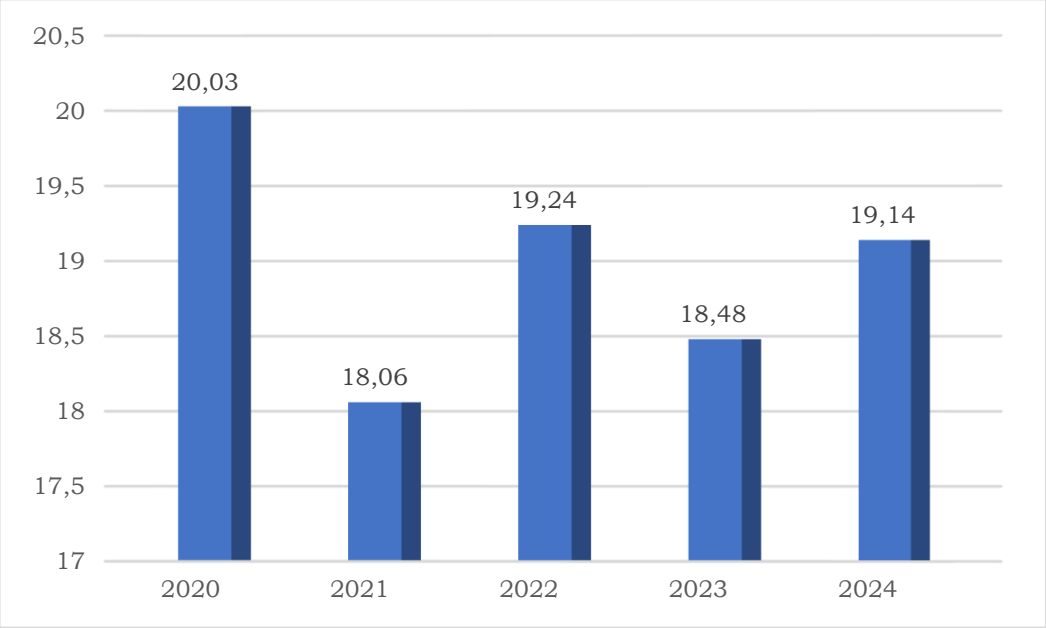
Gambar di atas menunjukkan tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan tingkat nasional selama periode 2020–2024. Kabupaten Karanganyar menunjukkan penurunan TPT yang paling signifikan, dari 5,96% pada tahun 2020 menjadi 3,47% pada 2024. Penurunan ini lebih tajam dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang turun dari 6,48% menjadi 4,78%, serta tingkat nasional yang menurun dari 7,07% menjadi 4,91% dalam periode yang sama. Capaian Karanganyar yang konsisten berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, terutama sejak tahun 2022, mengindikasikan keberhasilan daerah dalam menciptakan lapangan kerja atau memperkuat sektor ekonomi lokal. Tren ini merupakan sinyal positif terhadap pemulihan ekonomi dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar pasca pandemi.

Angka TPT yang relatif lebih rendah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar telah mampu mengelola pasar tenaga kerja dengan cukup baik. Hal ini mengindikasikan adanya efektivitas dalam program penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Meski demikian, perlu upaya berkelanjutan agar angka pengangguran bisa terus ditekan, terutama dengan memperluas kesempatan kerja di sektor formal dan informal, serta mendukung kewirausahaan bagi masyarakat.



Gambar 2.20.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (%)
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Berdasarkan distribusi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah, terjadi fluktuasi di Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase pengeluaran kelompok ini mencapai titik tertinggi yaitu 20,03 persen, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 18,06 persen. Meskipun sempat meningkat kembali menjadi 19,24 persen pada tahun 2022, angka tersebut kembali menurun pada 2023 menjadi 18,48 persen, sebelum akhirnya naik sedikit ke angka 19,14 persen pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran masih cukup dinamis dan mencerminkan belum stabilnya daya beli kelompok penduduk terbawah, sehingga perlu perhatian berkelanjutan dalam kebijakan pemerataan ekonomi dan penguatan jaring pengaman sosial.

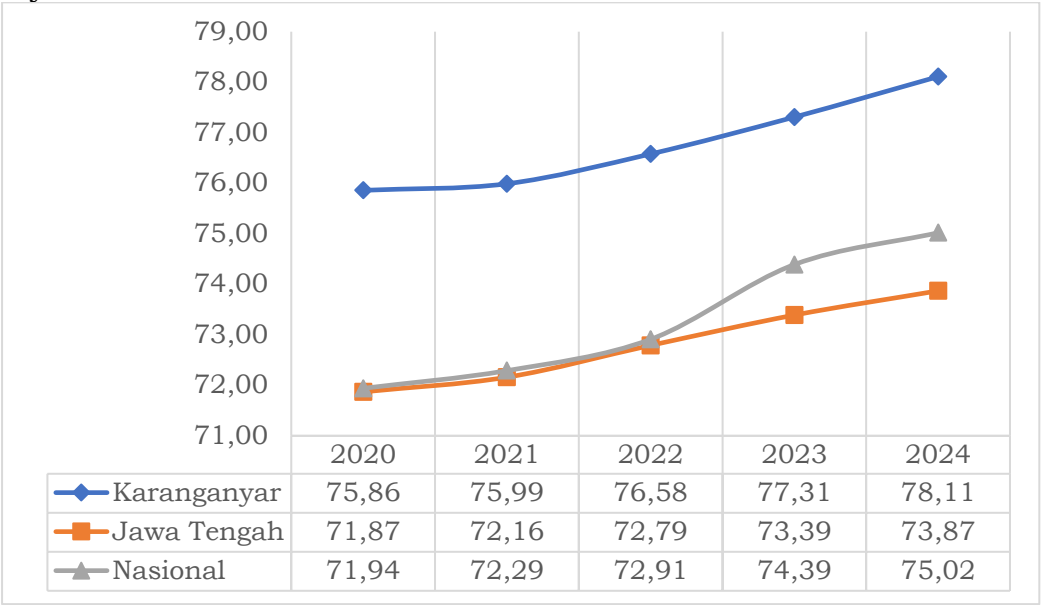


Gambar 2.21.
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia pada Persentase Pengeluaran Kelompok 40 Persen Penduduk Terbawah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, naik dari 75,86 pada tahun 2020 menjadi 78,11 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Karanganyar cukup baik dan terus mengalami perbaikan. Dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah dan nasional, Karanganyar selalu berada di posisi yang lebih tinggi, menegaskan bahwa kabupaten ini memiliki performa pembangunan manusia yang relatif baik.

Kenaikan IPM ini menunjukkan peningkatan dalam tiga dimensi utama, yaitu (1) kesehatan; (2) pendidikan; dan (3) standar hidup layak. Namun, meskipun IPM Karanganyar meningkat, kesenjangan dengan IPM nasional yang pada 2024 mencapai 75,02 tetap menunjukkan adanya potensi pengembangan lebih lanjut. Hal ini terutama terkait dengan upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah, kualitas layanan kesehatan, dan akses terhadap lapangan kerja yang layak.

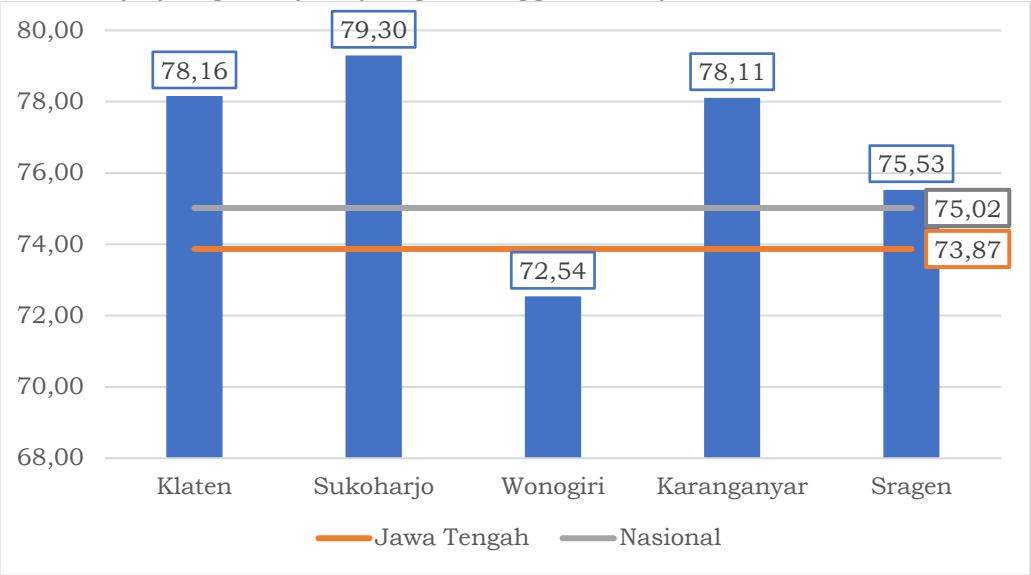
Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IPM, Karanganyar perlu terus memperkuat program pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru dan penyediaan fasilitas belajar yang memadai, akan mendorong peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Di sektor kesehatan, penguatan layanan kesehatan primer dan promosi kesehatan preventif menjadi kunci untuk memperbaiki angka harapan hidup. Selain itu, pengembangan ekonomi lokal yang mendukung penciptaan lapangan kerja produktif juga akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.



Gambar 2.22.
Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar tahun 2024 mencapai 78,11, yang menunjukkan posisi cukup baik dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Sukoharjo mencatatkan IPM tertinggi di 79,30, sedangkan Wonogiri memiliki IPM terendah di 72,54. Kabupaten Sragen dan Klaten masing-masing mencatat IPM sebesar 75,53 dan 78,16. Jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah yang berada di 73,87, hampir semua kabupaten di sekitar Karanganyar memiliki IPM yang lebih tinggi, kecuali Wonogiri. Sementara itu, rata-rata nasional mencapai 75,02, menunjukkan bahwa Klaten, Sukoharjo, dan Karanganyar sudah melampaui angka nasional.

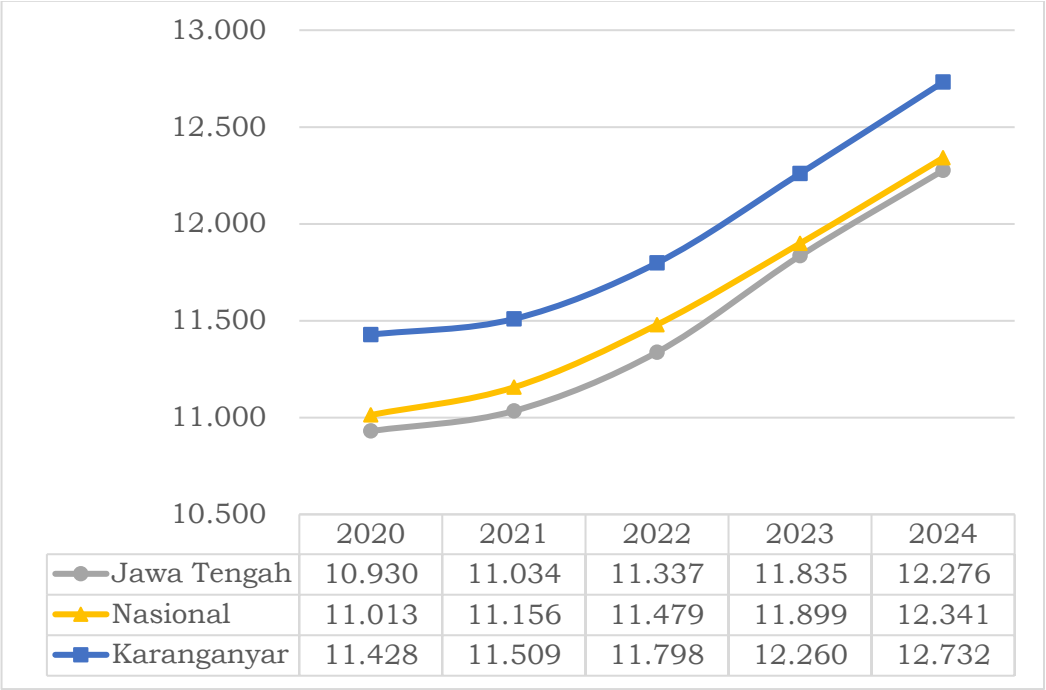
Pencapaian IPM Karanganyar yang cukup tinggi ini mengindikasikan adanya perkembangan positif di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, tetap perlu perhatian lebih untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, terutama dalam mendekati atau melampaui IPM Sukoharjo yang menjadi yang tertinggi di wilayah ini.



Gambar 2.23.
Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, 2025

Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita di Karanganyar tercatat sebesar 11.428 ribu rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah yang hanya mencapai 10.913 ribu rupiah dan nasional sebesar 11.013 ribu rupiah. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana pengeluaran per kapita di Karanganyar meningkat signifikan hingga 12.732 ribu rupiah, sementara Provinsi Jawa Tengah dan nasional masing-masing mencapai 12.126 ribu rupiah dan 12.341 ribu rupiah.

Meskipun pengeluaran per kapita di tingkat nasional juga mengalami pertumbuhan yang stabil, Karanganyar tetap menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan pembangunan yang efektif, serta peningkatan daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan adanya perkembangan ekonomi yang positif di Kabupaten Karanganyar, dengan tingkat pengeluaran per kapita yang terus meningkat dan melampaui rata-rata provinsi serta nasional.

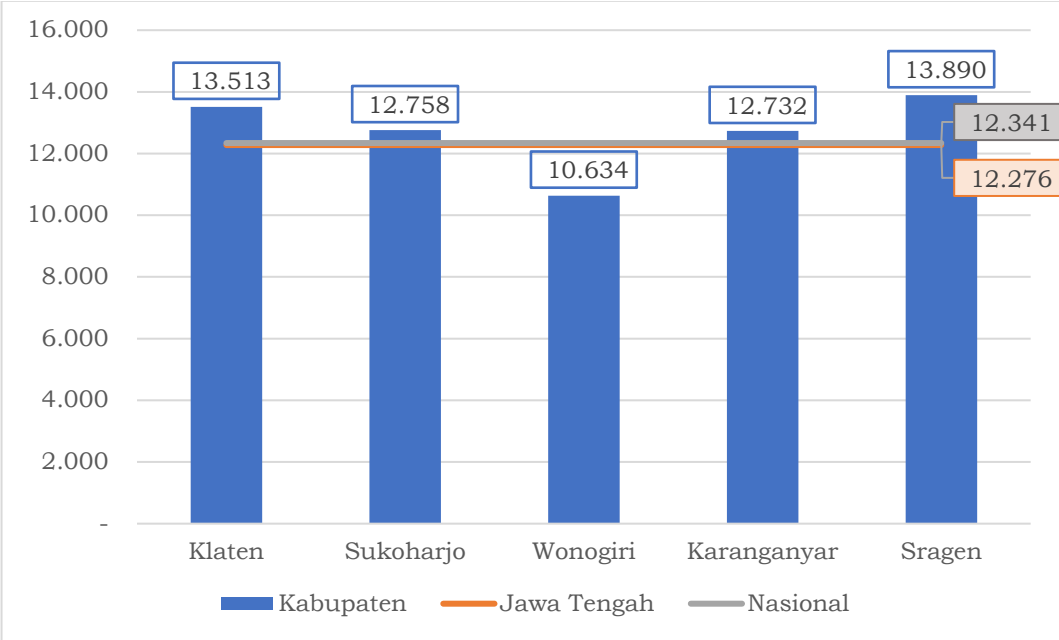


Gambar 2.24.
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya, Kabupaten Sragen memiliki pengeluaran per kapita tertinggi, yaitu sebesar 13.890 ribu rupiah, diikuti oleh Klaten dengan 13.513 ribu rupiah. Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar memiliki angka yang relatif mirip, masing-masing sebesar 12.758 ribu rupiah dan 12.732 ribu rupiah. Sementara itu, Wonogiri memiliki pengeluaran per kapita terendah di antara kabupaten yang dibandingkan, yakni sebesar 10.634 ribu rupiah.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 12.341 ribu rupiah, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan Sragen memiliki pengeluaran per kapita di atas rata-rata provinsi. Sebaliknya, Wonogiri berada di bawah rata-rata provinsi. Sementara itu, rata-rata nasional tercatat sebesar 12.276 ribu rupiah, yang juga lebih rendah dibandingkan dengan Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan Sragen, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Wonogiri.

Dari data ini, terlihat bahwa Kabupaten Sragen dan Klaten memiliki tingkat pengeluaran per kapita yang paling tinggi, mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Sementara itu, Wonogiri memiliki angka yang lebih rendah, menggambarkan kondisi ekonomi atau daya beli masyarakat yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam perbandingan ini.



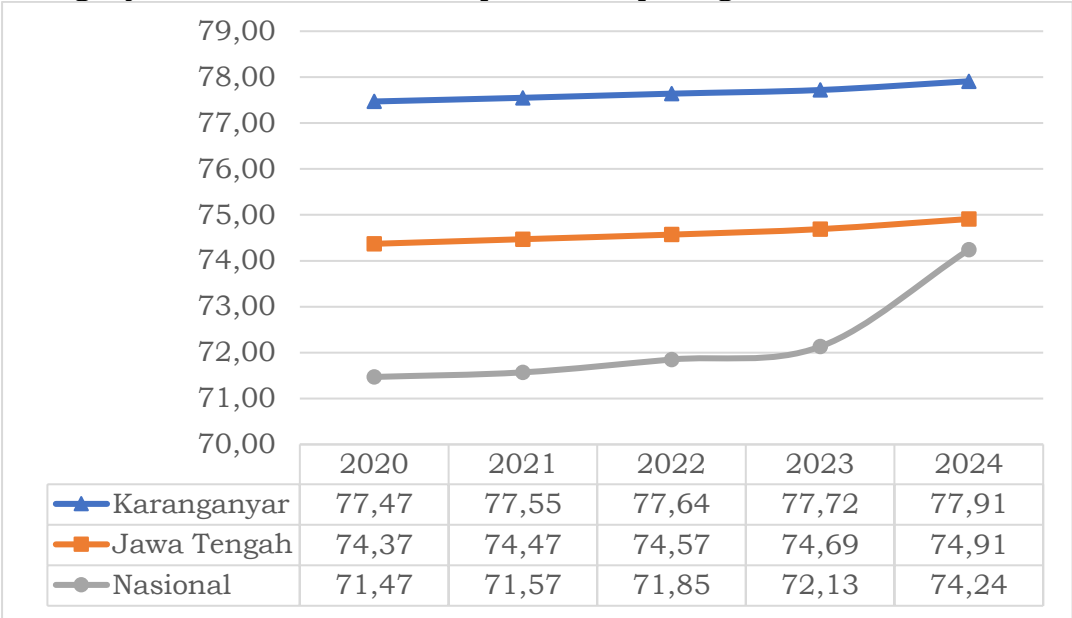
Gambar 2.25.
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga 2024 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

2. Kesehatan Untuk Semua

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, AHH Karanganyar tercatat 77,47 tahun dan meningkat menjadi 77,91 tahun di 2024. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah, yang pada tahun 2024 mencapai 74,91 tahun, serta rata-rata nasional sebesar 74,24 tahun.

Meningkatnya AHH ini mencerminkan kualitas layanan kesehatan dan upaya promotif preventif yang cukup baik di Karanganyar. Namun, tetap penting untuk mempertahankan dan meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, demi menjaga tren positif ini. Selengkapnya terkait perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

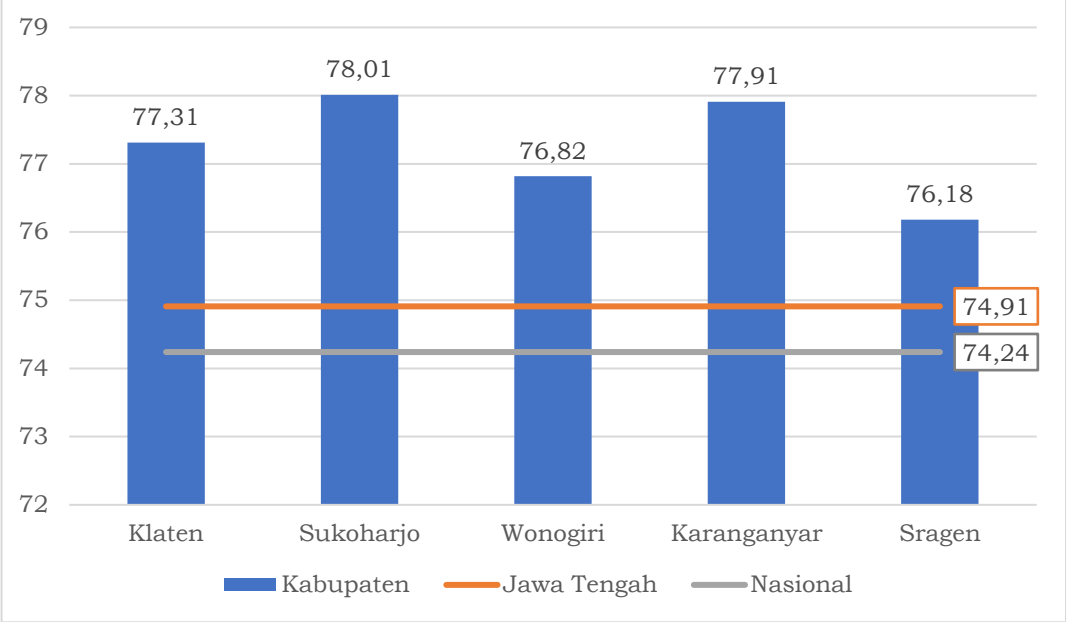


Gambar 2.26.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Pada tahun 2024, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Karanganyar tercatat sebesar 77,91 tahun, menunjukkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (74,91 tahun) dan nasional (74,24 tahun). Kabupaten tetangga seperti Sukoharjo bahkan mencatat AHH lebih tinggi, yaitu 78,01 tahun, sedangkan Klaten juga cukup tinggi dengan 77,31 tahun. Di sisi lain, Wonogiri dan Sragen masing-masing mencatat AHH 76,82 tahun dan 76,18 tahun, masih di atas rata-rata provinsi dan nasional.

Data ini menunjukkan bahwa wilayah eks Karesidenan Surakarta memiliki kualitas hidup yang cukup baik, terlihat dari AHH yang lebih tinggi dibandingkan angka provinsi dan nasional. Namun tetap perlu diperhatikan, terutama dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, penyuluhan gizi, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.



Gambar 2.27.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Pembangunan kesehatan dalam rangka terciptanya kualitas sumber daya manusia yang baik harus dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupannya mulai dari dalam kandungan bahkan jauh sebelumnya yaitu dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan para calon ibu, kemudian sebagai bayi, balita, usia sekolah, remaja, pemuda, usia produktif, sampai kepada usia lanjut. Dengan demikian pembangunan kesehatan mempunyai peranan yang amat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, idealnya satu puskesmas melayani maksimal 30.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 sebanyak 952.132 jiwa, maka secara ideal dibutuhkan sekitar 32 puskesmas. Namun, saat ini Karanganyar baru memiliki 21 puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar rasio ideal pelayanan kesehatan dasar. Sebagai pelengkap layanan kesehatan tingkat pertama, terdapat pula klinik pratama yang tersebar di beberapa kecamatan, berperan membantu menjangkau pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau puskesmas secara optimal.

Tabel 2.15.
Rasio Ketersediaan Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk (Per 30.000 Penduduk) Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah			Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Rasio Ketersediaan (Per 30.000 Penduduk)	Existing Puskesmas
			Desa	Kelurahan	Desa + Kelurahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jatipuro	40,37	10	0	10	35.589	881,7	1	1
2	Jatiyoso	67,16	9	0	9	42.932	639,2	1	1
3	Jumapolo	55,67	12	0	12	44.859	805,8	1	1
4	Jumantono	53,55	11	0	11	52.187	974,6	2	1
5	Matesih	26,27	9	0	9	46.095	1754,9	2	1
6	Tawangmangu	70,03	7	3	10	49.110	701,3	2	1
7	Ngargoyoso	65,34	9	0	9	38.455	588,5	1	1
8	Karangpandan	34,11	11	0	11	45.461	1332,7	2	1
9	Karanganyar	43,03	0	12	12	89.189	2072,9	3	1
10	Tasikmadu	27,60	10	0	10	66.437	2407,4	2	1
11	Jaten	25,55	8	0	8	81.988	3209,2	3	2
12	Colomadu	15,64	11	0	11	69.098	4417,4	2	2
13	Gondangrejo	56,80	13	0	13	85.032	1497,2	3	1
14	Kebakkramat	36,46	10	0	10	66.866	1834,1	2	2
15	Mojogedang	53,31	13	0	13	72.997	1369,3	2	2
16	Kerjo	46,82	10	0	10	39.087	834,8	1	1
17	Jenawi	56,08	9	0	9	28.314	504,9	1	1
Kabupaten/Kota		773,8	162	15	177	953.696	1232,5	32	21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Tabel 2.16.
Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

No	Unit Kerja	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi			Dokter Gigi Spesialis			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Jatipuro	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
2	Jatiyoso	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumapolo	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
4	Jumantono	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	2	2	0	0	0	0	2	2
5	Matesih	0	0	0	1	2	3	1	2	3	1	1	2	0	0	0	1	1	2
6	Tawangmangu	0	0	0	2	1	3	2	1	3	1	0	1	0	0	0	1	0	1
7	Ngargoyoso	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
8	Karangpandan	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9	Karanganyar	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1
10	Tasikmadu	0	0	0	1	3	4	1	3	4	1	0	1	0	0	0	1	0	1
11	Jaten I	0	0	0	1	2	3	1	2	3	1	0	1	0	0	0	1	0	1
12	Jaten II	0	0	0	0	2	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
13	Colomadu I	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
14	Colomadu II	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	2	2	0	0	0	0	2	2
15	Gondangrejo	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1
16	Kebakkramat I	0	0	0	3	0	3	3	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	1
17	Kebakkramat II	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	2	2	0	0	0	0	2	2
18	Mojogedang I	0	0	0	1	2	3	1	2	3	1	0	1	0	0	0	1	0	1
19	Mojogedang II	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
20	Kerjo	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
21	Jenawi	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
1	RS Umum Daerah Kartini Karanganyar	17	16	33	6	12	18	23	28	51	1	2	3	1	1	2	2	3	5
2	RSAU dr. Siswanto Kartini Karanganyar	10	5	15	12	12	24	22	17	39	1	0	1	0	0	0	1	0	1

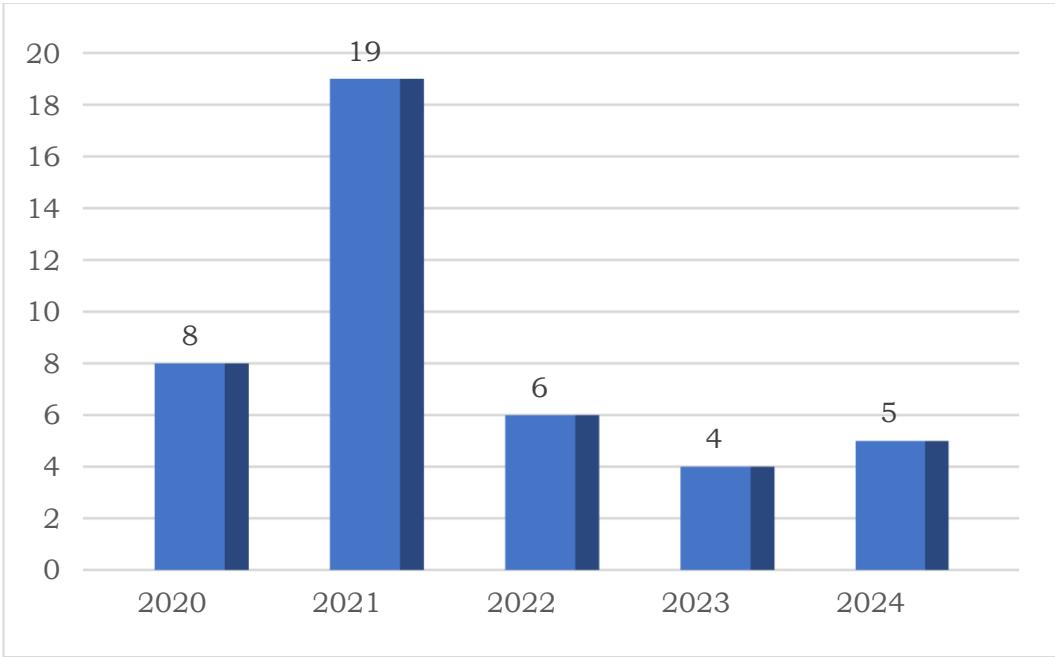
No	Unit Kerja	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi			Dokter Gigi Spesialis			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
3	RS PKU Muhammadiyah Karanganyar	18	24	42	7	15	22	25	39	64	0	2	2	0	0	0	0	2	2
4	RS Umum Jati Husada Karanganyar	9	12	21	5	12	17	14	24	38	2	2	4	0	1	1	2	3	5
5	RS Umum Indo Sehat Karanganyar	5	4	9	2	5	7	7	9	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	RS Umum Jafar Medika Karanganyar	9	2	11	6	4	10	15	6	21	1	0	1	0	0	0	1	0	1
7	RS Umum Mojosongo 2	6	1	7	3	2	5	9	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	RS Mangesti Rahayu	2	6	8	2	2	4	4	8	12	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9	RS Ibu dan anak Dian Pertiwi	2	2	4	0	2	2	2	4	6	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Sarana Pelayanan Kesehatan Lain		8	9	17	84	112	196	92	121	213	8	29	0	0	0	0	8	29	37
Jumlah (KAB/Kota)		70	65	135	140	194	334	210	259	469	20	53	73	2	2	4	22	55	77
Rasio Terhadap 100.000 Penduduk				14,2			35,1			49,3			7,7			0,4			8,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah tenaga medis di fasilitas kesehatan Kabupaten Karanganyar tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa rasio total tenaga medis terhadap 100.000 penduduk masih tergolong rendah, yaitu hanya 49,3 tenaga medis per 100.000 penduduk. Jumlah dokter umum mencapai 334 orang, namun distribusinya tidak merata, dengan sebagian besar terkonsentrasi di rumah sakit, sedangkan puskesmas di kecamatan hanya memiliki 2–4 dokter dan umumnya tidak memiliki dokter spesialis sama sekali. Jumlah dokter gigi dan dokter gigi spesialis juga masih sangat terbatas, masing-masing hanya 73 dan 4 orang di seluruh kabupaten, dengan rasio hanya 8,1 per 100.000 penduduk. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya pemerataan distribusi tenaga medis, terutama spesialis, agar pelayanan kesehatan primer hingga rujukan dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Karanganyar.

Jumlah kasus kematian ibu merupakan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Jumlah kasus kematian ibu merupakan ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 sebanyak 6 kasus kematian. Kasus kematian ibu meningkat pada tahun 2021 sebanyak 19 kasus. Meningkatnya kasus kematian ibu hamil selain disebabkan adanya pandemi covid-19, juga disebabkan oleh keterlambatan dalam mendapatkan perawatan yang dibutuhkan selama kehamilan, persalinan, atau setelah melahirkan sehingga meningkatkan risiko komplikasi yang fatal. Beberapa kondisi kesehatan yang bisa berisiko, seperti hipertensi, diabetes, anemia, atau infeksi, tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan baik selama kehamilan. Dukungan dari keluarga, termasuk suami, dalam memastikan ibu hamil mendapatkan perawatan yang diperlukan sangat penting. Kurangnya dukungan ini dapat meningkatkan risiko kematian ibu.

Pada tahun 2020 tercatat 8 kasus kematian ibu hamil, yang kemudian melonjak tajam menjadi 19 kasus pada tahun 2021. Setelah itu, terjadi penurunan signifikan menjadi 6 kasus pada tahun 2022, 4 kasus pada tahun 2023, dan sedikit meningkat menjadi 5 kasus pada tahun 2024. Kenaikan tajam pada 2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu akses dan kualitas layanan kesehatan ibu. Namun, tren penurunan setelahnya mencerminkan perbaikan dalam pelayanan kesehatan maternal dan upaya penanganan risiko kehamilan. Meskipun demikian, keberadaan kasus kematian ibu hamil setiap tahun menunjukkan bahwa intervensi kesehatan ibu masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal deteksi dini, pemantauan kehamilan risiko tinggi, dan pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas.



Gambar 2.28.
Jumlah Kematian Ibu Hamil Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

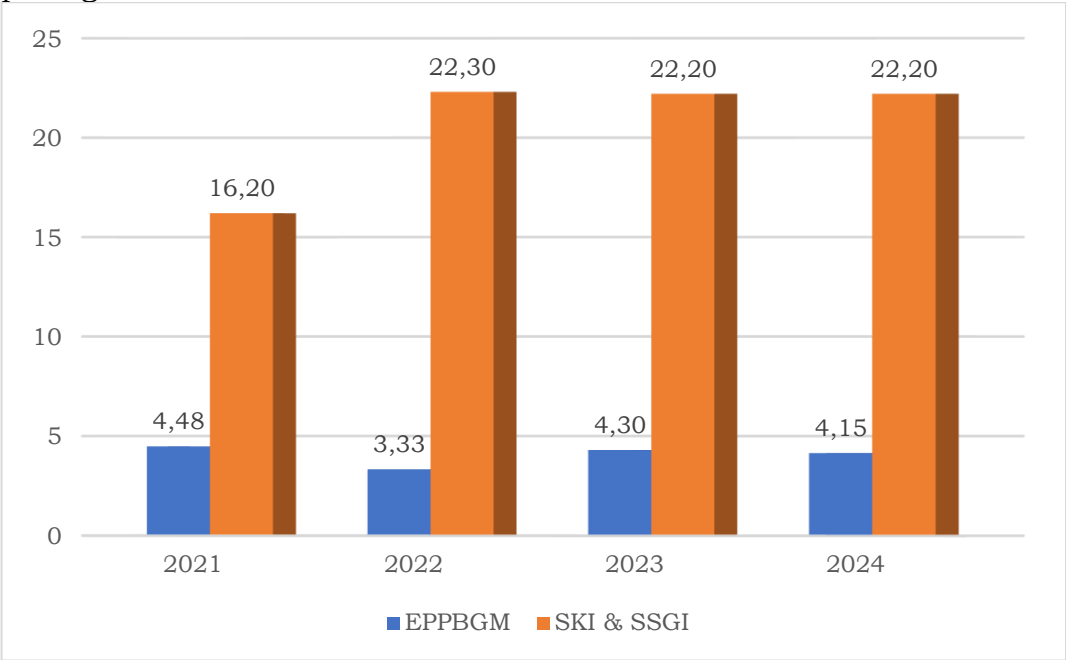
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Masalah stunting menjadi perhatian khusus dalam mencerminkan kesejahteraan sosial budaya di Kabupaten Karanganyar. Peningkatan prevalensi balita stunting disebabkan karena program stunting yang belum terfokus dan belum maksimalnya peran serta lintas program dan lintas sektoral. Penurunan ini disebabkan pula kondisi gizi saat remaja dan ibu hamil KEK di Kabupaten Karanganyar cukup tinggi. Dampaknya melahirkan anak stunting pada generasi berikutnya. Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan pada umumnya, yang disebabkan kurangnya asupan gizi pada masa janin/bayi (dalam kandungan) dan saat anak sudah lahir, tetapi anak baru nampak stunting pada usia 2 tahun. Hal ini berdampak adanya gagal tumbuh kembang kognitif berkurang, berisiko sakit, fungsi tubuh tidak seimbang, postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Berdasarkan indikator Tinggi Badan/Panjang Badan dibandingkan Umur (TB/U, PB/U), dimana TB anak < 3 SD (sangat pendek), dan -3 SD sampai < -2 SD (pendek).

Prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Karanganyar tahun 2021–2024 menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara data e-PPGBM dengan data SKI/SSGI. Data e-PPGBM memperlihatkan tren penurunan, dari 4,48% pada tahun 2021 menjadi 4,15% pada 2024, menunjukkan perbaikan status gizi balita yang tercatat dalam layanan kesehatan. Sebaliknya, data SKI/SSGI cenderung stabil tinggi, yakni di kisaran 22,30% pada tahun 2022 dan sedikit turun menjadi 22,20% pada tahun 2023 dan tahun 2024, yang menunjukkan bahwa secara populasi umum, stunting masih menjadi masalah serius. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan cakupan dan metodologi pengumpulan data, di mana e-PPGBM bersifat rutin berbasis layanan, sementara SKI/SSGI merupakan survei nasional yang lebih representatif. Hal ini menegaskan perlunya integrasi dan sinkronisasi data sebagai dasar intervensi yang tepat sasaran dalam percepatan penurunan stunting di daerah.

Peningkatan prevalensi stunting di Kabupaten Karanganyar disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor sosial dan ekonomi. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kualitas asupan gizi pada ibu hamil dan anak-anak, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Faktor lain yang turut berperan adalah praktik pemberian makanan pendamping ASI yang kurang tepat, yang menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan gizi

seimbang. Selain itu, kondisi sanitasi dan akses terhadap air bersih yang masih kurang memadai di beberapa wilayah memperburuk situasi, menyebabkan anak-anak rentan terkena infeksi berulang seperti diare. Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat juga memperparah permasalahan ini. Faktor kemiskinan yang masih cukup tinggi di sejumlah daerah di Karanganyar membuat keluarga sulit untuk menyediakan makanan bergizi yang cukup bagi anak-anak mereka, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan stunting. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

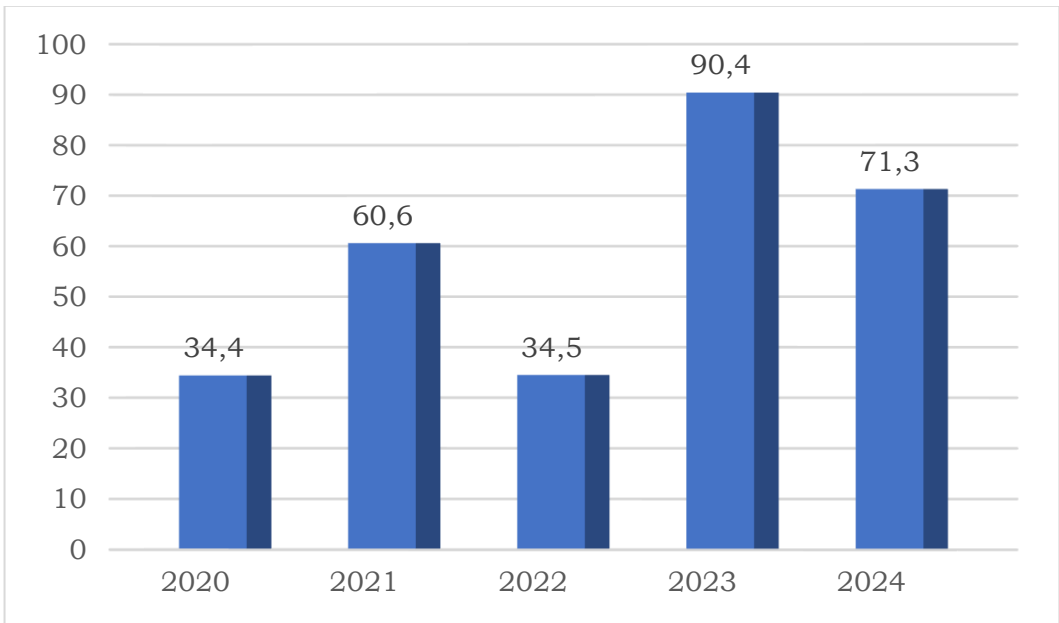


Gambar 2.29.
Prevalensi Stunting pada Balita Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021-2024

Sumber : e-PPBGM dan SKI/SSGI, Tahun 2025

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis merupakan persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan.

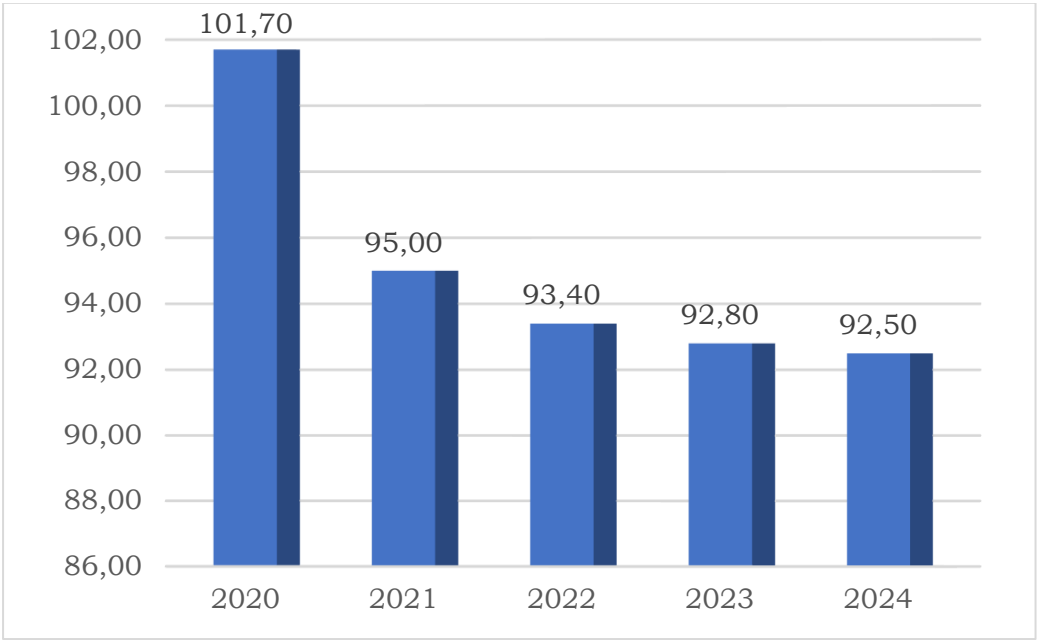
Cakupan pada tahun 2020 berada di angka 34,4%, kemudian meningkat signifikan menjadi 60,6% pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 34,5%, sebelum melonjak tajam mencapai puncaknya di tahun 2023 sebesar 90,4%. Pada 2024, cakupan mengalami sedikit penurunan menjadi 71,3%. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam upaya deteksi dan pengobatan TB, yang bisa dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan program, sumber daya, serta dampak pandemi pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tajam pada tahun 2023 mencerminkan upaya intensif dalam memperkuat layanan TB, namun penurunan pada 2024 menjadi sinyal perlunya konsistensi dalam pelaksanaan program agar cakupan tetap tinggi dan berkelanjutan.



Gambar 2.30.
Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis merupakan persentase pasien tuberkulosis yang sembuh menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

Pada tahun 2020, tercatat angka keberhasilan pengobatan sangat tinggi yakni 101,7%, yang kemungkinan disebabkan oleh kekeliruan pelaporan atau rekonsiliasi data kasus lama. Setelahnya, terjadi penurunan berturut-turut: 95,0% pada 2021, 93,4% pada tahun 2022, 92,8% pada tahun 2023, dan 92,5% pada tahun 2024. Meskipun masih berada di atas ambang batas target nasional sebesar 90%, tren penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas dan kesinambungan pengobatan TB. Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh faktor seperti ketidakpatuhan pasien dalam menjalani terapi, keterbatasan dalam pelacakan kasus, atau masalah koordinasi antar fasilitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan sistem pendampingan pasien, pencatatan yang akurat, dan pemantauan rutin sangat penting untuk menjaga keberhasilan pengobatan TB di masa mendatang.

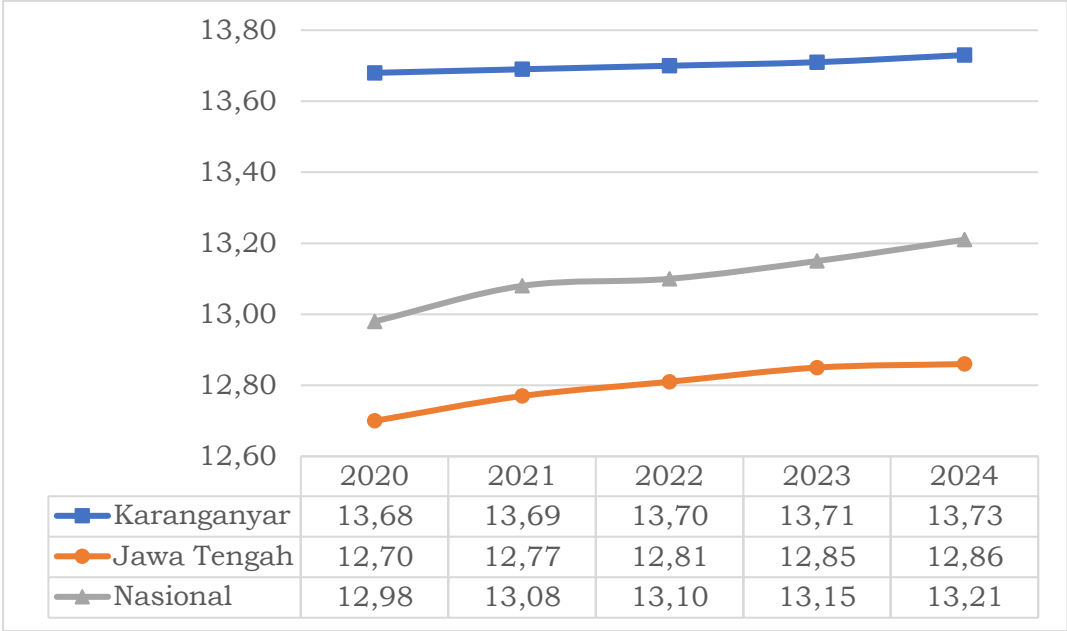


Gambar 2.31.
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren yang stabil dan tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional sepanjang tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, HLS Karanganyar mencapai 13,73 tahun, jauh di atas rata-rata Jawa Tengah (12,86 tahun) dan nasional (13,21 tahun).

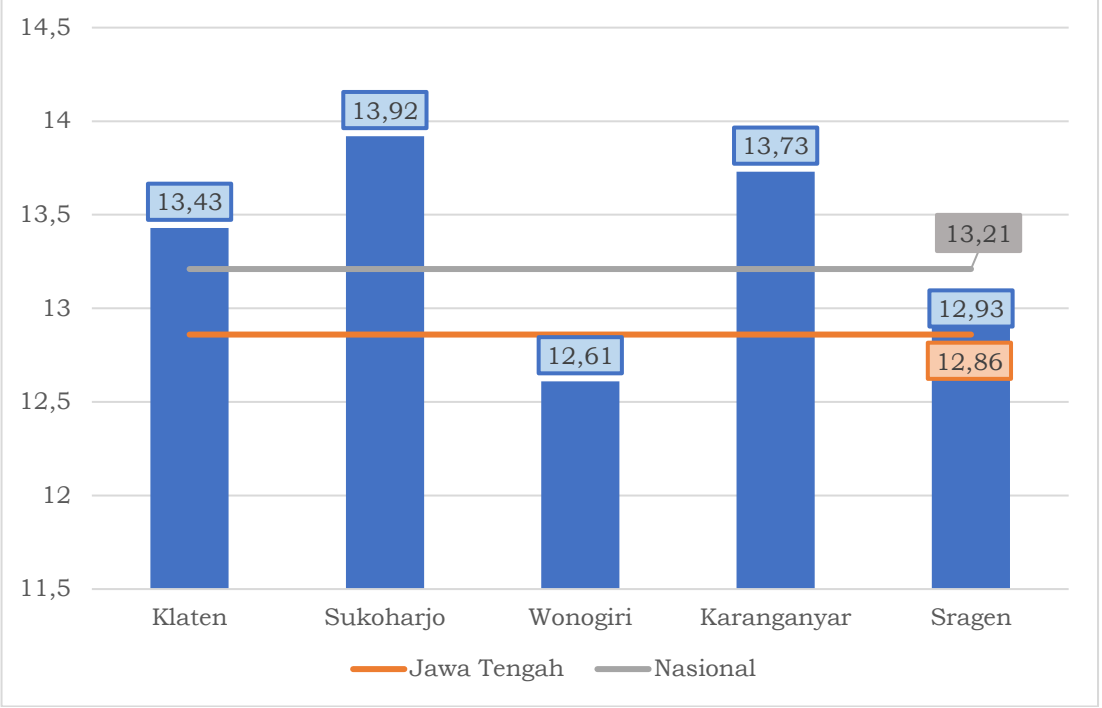
Peningkatan HLS ini mengindikasikan bahwa masyarakat Karanganyar memiliki akses pendidikan yang baik dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, meskipun trennya positif, peningkatan HLS di Karanganyar terbilang lambat, hanya naik 0,05 tahun dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, mencegah putus sekolah, dan meningkatkan fasilitas pendidikan.



Gambar 2.32.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 mencapai 13,73 tahun. Angka ini menunjukkan capaian yang cukup baik dibandingkan dengan beberapa kabupaten di sekitarnya. Kabupaten Klaten memiliki HLS sebesar 13,43 tahun, Wonogiri sebesar 12,61 tahun, dan Sragen sebesar 12,93 tahun. Di antara kabupaten yang dibandingkan, hanya Kabupaten Sukoharjo yang memiliki HLS lebih tinggi, yaitu 13,92 tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12,86 tahun dan rata-rata nasional sebesar 13,21 tahun, Kabupaten Karanganyar menunjukkan performa yang lebih baik. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang baik dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Meskipun HLS Kabupaten Karanganyar sudah melampaui rata-rata provinsi dan nasional, masih terdapat peluang untuk meningkatkan angka tersebut agar dapat menyamai atau melampaui Kabupaten Sukoharjo. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penguatan program wajib belajar, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, dan pemberian dukungan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan.

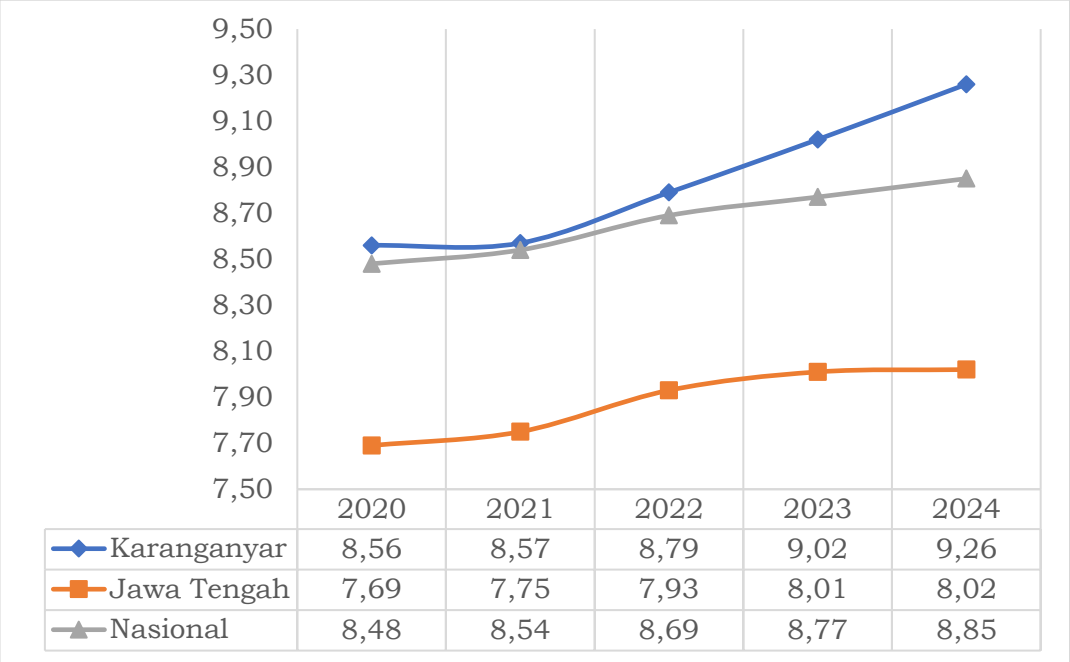


Gambar 2.33.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024 (Tahun)
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai RLS Kabupaten Karanganyar terus mengalami peningkatan dari 8,56 tahun pada 2020 menjadi 9,26 tahun pada 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang pada 2024 mencapai 8,02 tahun. Tren peningkatan ini menunjukkan komitmen yang baik dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, RLS nasional juga mengalami kenaikan dari 8,48 tahun pada 2020 menjadi 8,85 tahun pada 2024. Meski Kabupaten Karanganyar telah melampaui capaian provinsi dan nasional, upaya untuk terus meningkatkan angka ini tetap perlu diperhatikan agar mendekati atau menyamai target pendidikan nasional yang lebih tinggi.

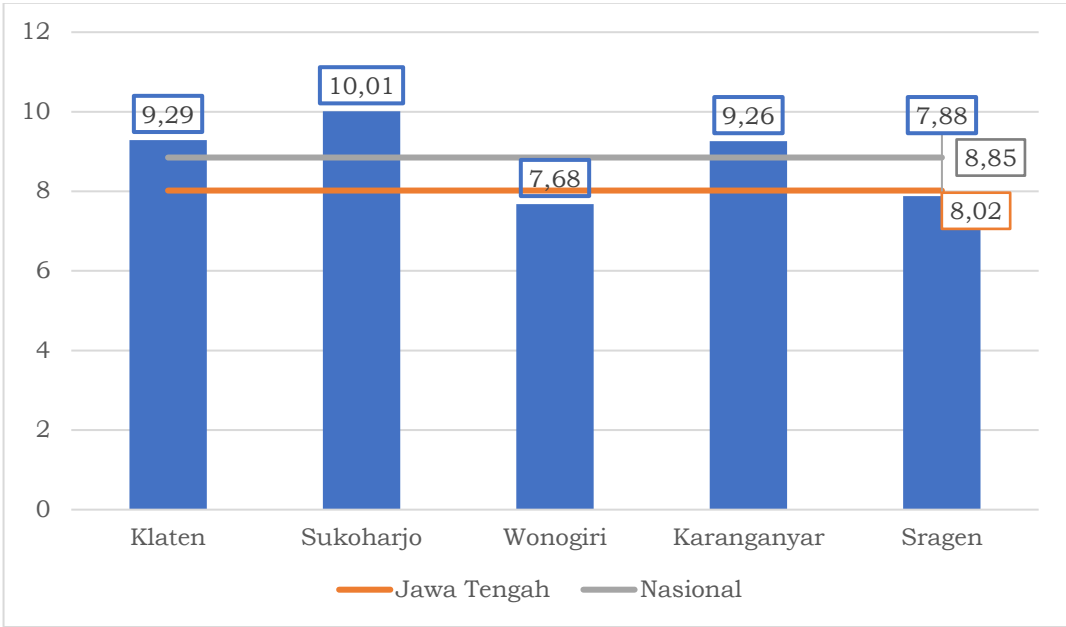
Peningkatan RLS ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk yang menempuh pendidikan lebih lama, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten

Karanganyar. Keberhasilan ini perlu didukung dengan program-program pendidikan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah kabupaten.



Gambar 2.34.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan tingkat pendidikan di Kabupaten Karanganyar dan kabupaten sekitarnya. Kabupaten Sukoharjo mencatat RLS tertinggi, yaitu 10,01 tahun, jauh melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,02 tahun dan rata-rata nasional sebesar 8,85 tahun. Kabupaten Klaten dan Karanganyar juga memiliki RLS yang cukup baik, masing-masing 9,29 tahun dan 9,26 tahun, menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini rata-rata mengenyam pendidikan lebih lama dibandingkan angka nasional. Di sisi lain, Kabupaten Sragen mencatat RLS sebesar 7,88 tahun, yang masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Kabupaten Wonogiri mencatat angka terendah dengan RLS 7,68 tahun, menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam bidang pendidikan di wilayah tersebut. Perbedaan ini mencerminkan disparitas akses dan kualitas pendidikan antar-kabupaten, di mana wilayah dengan RLS tinggi menunjukkan kemajuan lebih baik dalam pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan RLS di wilayah dengan capaian yang masih rendah, seperti Wonogiri dan Sragen, agar kualitas sumber daya manusia semakin merata di tingkat regional.



Gambar 2.35.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten
Tetangga 2024 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Pendidikan yang berkualitas dan merata dapat dilihat salah satunya dari kualitas pendidikan yang diukur salah satunya dengan dengan Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional Literasi Membaca. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan. Indikator ini menggambarkan kualitas pendidikan terutama dalam literasi dan numerasi. Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

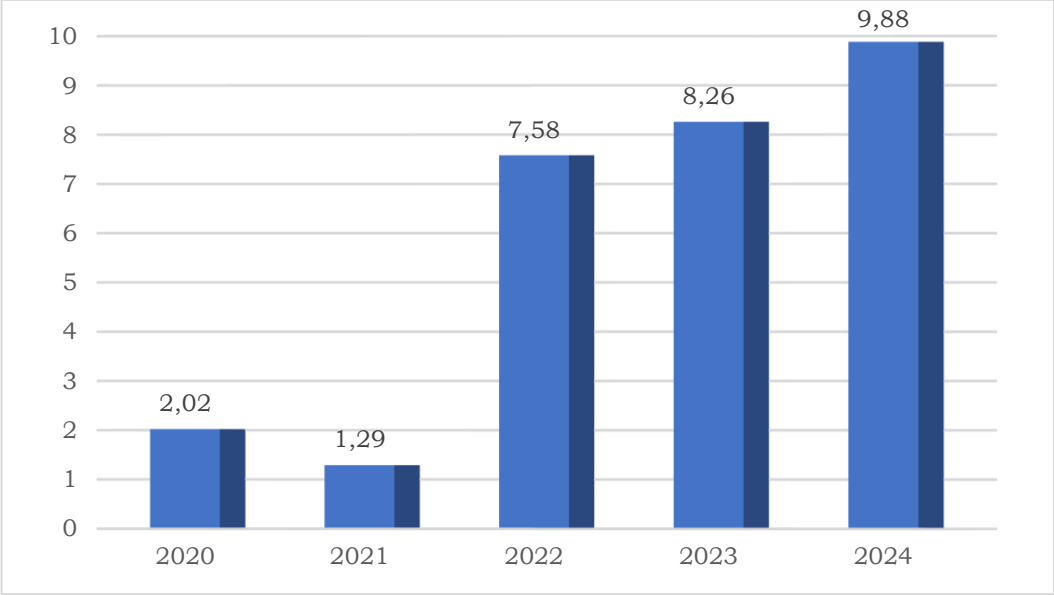
Tabel 2.17.
Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada
Assessment Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang)
Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2024

Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional (seluruh jenjang):	Satuan	2022	2023	2024
a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	59,06	59,86	73,37
b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	55,29	56,69	80,90
c) Numerasi SD/Sederajat	%	43,6	45,45	80,04
d) Numerasi SMP/Sederajat	%	29,45	31,75	86,70

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar 9,94%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 10,97%. Semakin meningkatnya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi maka dapat menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

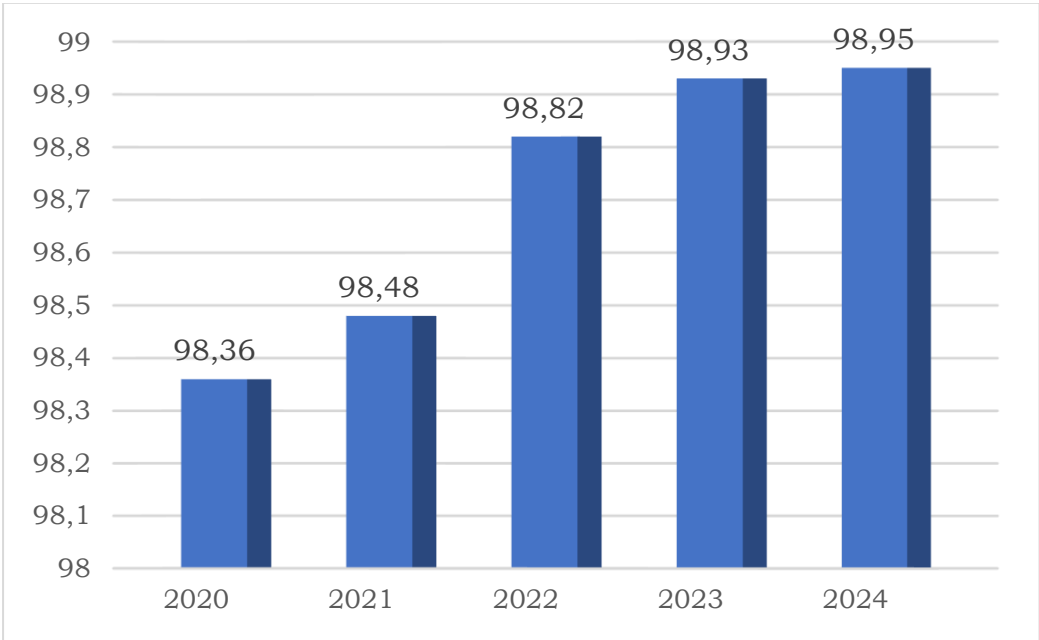
Taman baca sebagai wisata literasi merupakan suatu tempat yang mewadahi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan rekreasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Pemanfaatan taman baca ini dapat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan kegiatan untuk menunjang budaya literasi. Data tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama setelah tahun 2021. Pada tahun 2020, tingkat pemanfaatan tercatat sebesar 2,02%, kemudian menurun menjadi 1,29% pada 2021 yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pembatasan akses selama pandemi COVID-19. Namun, mulai tahun 2022 terjadi lonjakan pemanfaatan menjadi 7,58%, dan terus meningkat menjadi 8,26% pada 2023 serta 9,88% pada 2024. Kenaikan tajam ini mengindikasikan keberhasilan upaya revitalisasi perpustakaan, peningkatan akses layanan, atau peningkatan kesadaran literasi masyarakat. Capaian ini menjadi sinyal positif terhadap minat baca masyarakat dan efektivitas program peningkatan literasi di daerah.



Gambar 2.36.
Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Sumber : Disarpus Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun merupakan cakupan penduduk usia 5-6 th yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, APS tercatat sebesar 98,36% dan terus mengalami kenaikan kecil namun konsisten setiap tahunnya, hingga mencapai 98,95% pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan pada kelompok usia ini. Meskipun peningkatannya relatif kecil, pencapaian APS yang mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 5–6 tahun di Karanganyar telah mengenyam pendidikan, yang menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas SDM di masa depan.

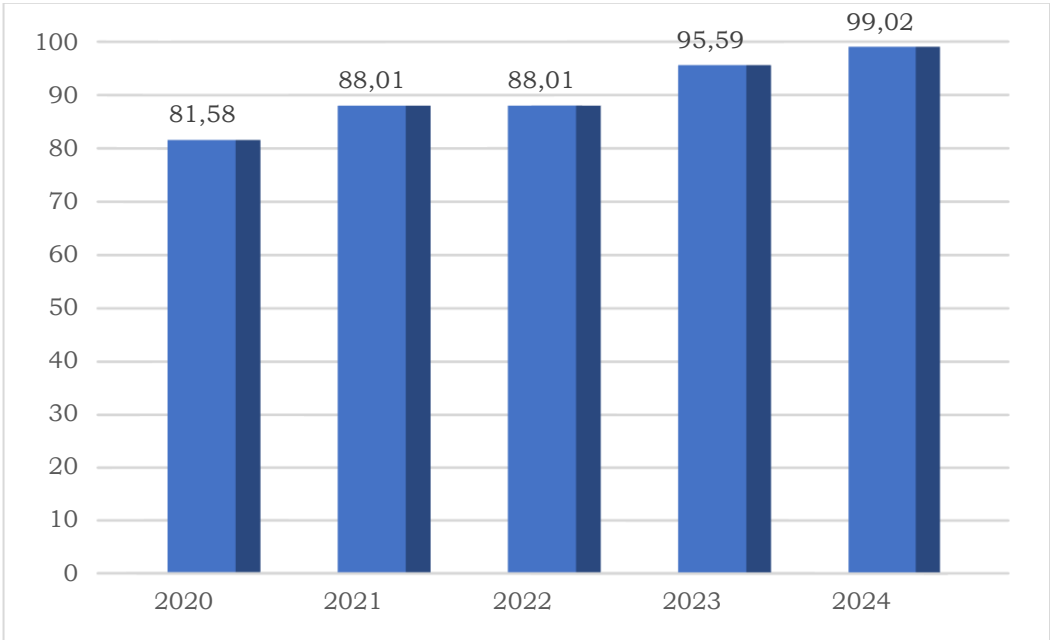


Gambar 2.37.
Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Setiap warga Kabupaten Karanganyar memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Hal tersebut diwujudkan melalui cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting yaitu Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan; Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas; Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional; dan Pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*: Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*, yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

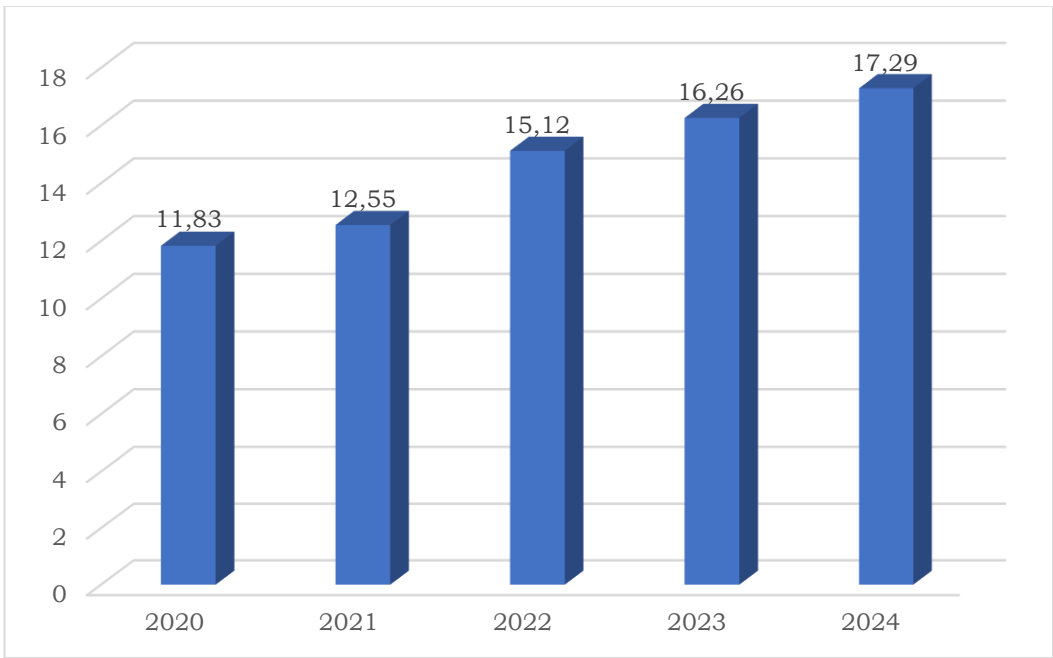
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Karanganyar menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, cakupan kepesertaan berada di angka 81,58%, kemudian meningkat menjadi 88,01% pada 2021 dan bertahan di angka yang sama hingga 2022. Peningkatan tajam terjadi pada 2023 dengan cakupan mencapai 95,59%, dan kembali naik pada 2024 hingga mencapai 99,02%. Tren ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, baik melalui integrasi program JKN dengan layanan daerah maupun peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan. Capaian mendekati *universal coverage* pada tahun 2024 merupakan indikator positif terhadap komitmen penyediaan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Karanganyar.



Gambar 2.38.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik, namun angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan potensi jumlah angkatan kerja. Peningkatan dari 11,83% pada tahun 2020 menjadi 17,29% pada tahun 2024 memang menunjukkan adanya progres dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja, tetapi angka ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Karanganyar belum tercover oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

Upaya peningkatan cakupan ini memerlukan strategi yang lebih terarah, seperti kampanye edukasi tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, penyederhanaan proses pendaftaran, dan insentif bagi pemberi kerja yang mendaftarkan pekerjanya. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pelaku usaha juga menjadi kunci dalam memperluas cakupan perlindungan sosial ini. Dengan tren yang positif ini, diharapkan target cakupan kepesertaan yang lebih luas bisa tercapai di tahun-tahun mendatang, sehingga kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar dapat terjamin dengan lebih baik.



Gambar 2.39.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.

Dalam rangka pemajuan kebudayaan salah satu unsurnya adalah satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian pada satuan pendidikan Sekolah Dasar pada di Kabupaten Karanganyar tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan Guru pada Sekolah Dasar ditugaskan sebagai guru kelas serta mengajar berbagai mata pelajaran mulai dari Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Matematika, termasuk Mulok Bahasa Daerah. Sedangkan persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang mengajar mulok bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sudah mencapai 87%.

Pemajuan kebudayaan terkait dengan obyek cagar budaya dapat dilihat dari kelestarian cagar budaya. Kondisi ini dilihat dari jumlah bangunan, benda, struktur, situs dan kawasan budaya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya. Terkait dengan warisan budaya tak benda dapat dilihat dari kelestarian budaya tak benda. Kondisi ini dilihat dari jumlah warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan menjadi budaya daerah. Jumlah kunjungan di tempat/lokasi yang mengandung nilai budaya atau sejarah adalah hal yang penting untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang ingin memahami budaya daerah dan sejarah sebuah wilayah.

Cakupan Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan, sedangkan definisi/makna dilestarikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB). Indikator ini menggambarkan sejauhmana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Karanganyar beserta nilai pentingnya.

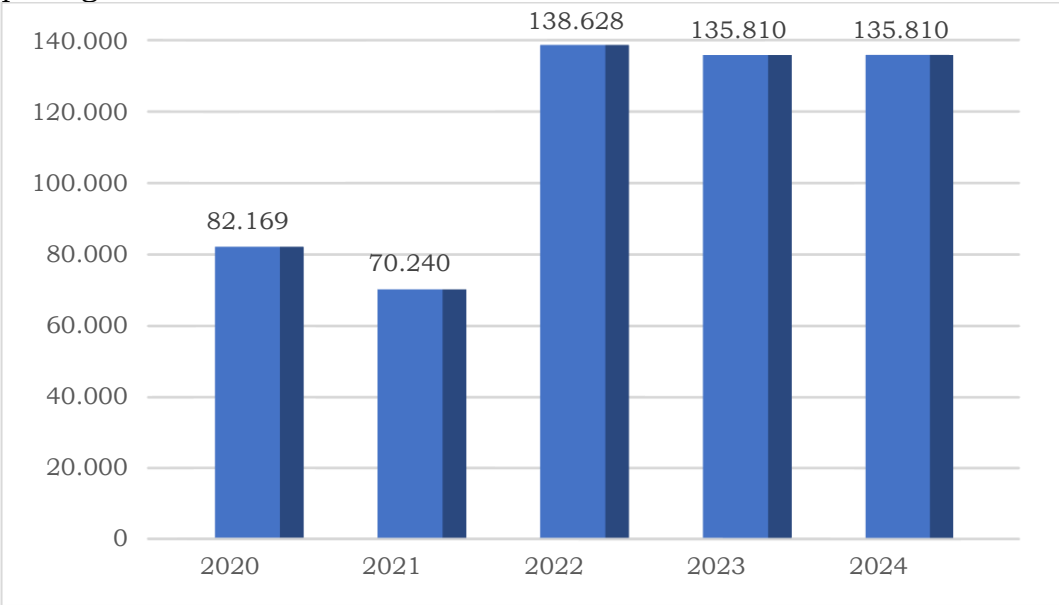
Cakupan CB dan WBTB yang dilestarikan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar 30%. Indikator ini menggambarkan sejauhmana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Karanganyar beserta nilai pentingnya. Jadi, semakin tinggi

cakupan CB dan WBTB yang dilestarikan maka upaya pelestarian yang dilakukan oleh Kabupaten Karanganyar juga semakin tinggi.

Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian di Kabupaten Karanganyar selama periode 2022–2024 tercatat masih rendah, yakni hanya sekitar 20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok kesenian belum optimal dalam berkontribusi terhadap pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah. Rendahnya tingkat partisipasi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap panggung pertunjukan, minimnya dukungan fasilitasi, serta tantangan regenerasi pelaku seni di tingkat lokal.

Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya. Indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat mempunyai kepedulian dan mengapresiasi warisan budaya dan sejarah Jawa Tengah.

Jumlah pengunjung tempat bersejarah di kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 sebanyak 182.058 pengunjung. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya pandemi covid-19, dimana pengunjung hanya sebesar 82.169 pengunjung. Pada tahun 2022 pasca pandemi covid-19, pengunjung tempat bersejarah mulai meningkat kembali menjadi 135.810 pengunjung di tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



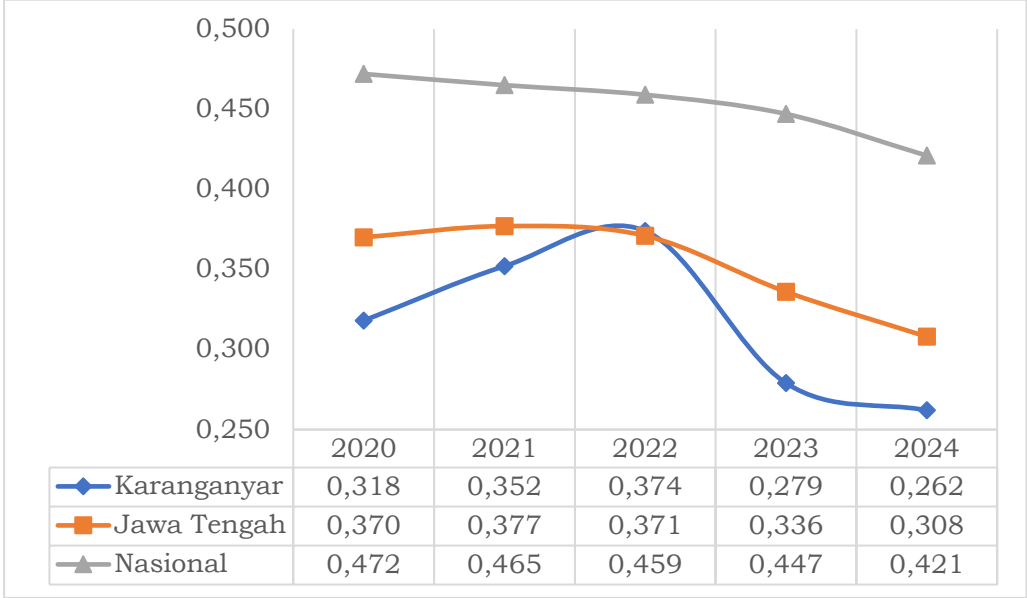
Gambar 2.40.
Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan setelah sempat meningkat pada awal periode. IKG Karanganyar naik dari 0,318 pada tahun 2020 menjadi 0,374 pada tahun 2022, kemudian menurun tajam menjadi 0,279 pada tahun 2023 dan semakin membaik menjadi 0,262 pada tahun 2024. Penurunan ini

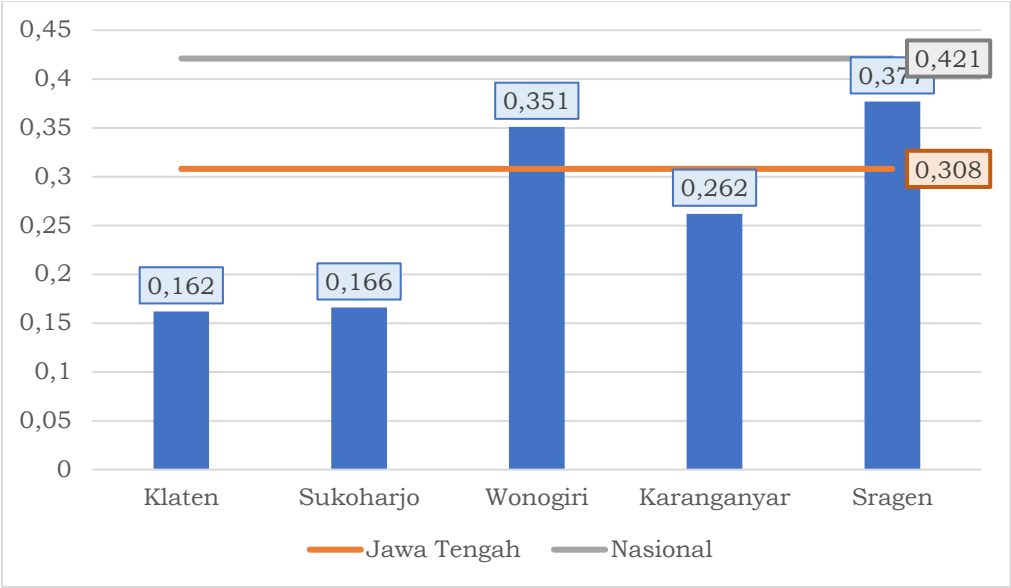
mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan gender, khususnya dalam dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Jika dibandingkan, nilai IKG Karanganyar secara konsisten lebih baik (lebih rendah) daripada rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Karanganyar relatif berhasil dalam mengurangi ketimpangan gender, yang dapat menjadi landasan penting dalam pencapaian pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Angka tersebut menunjukkan kesetaraan antara pria dan perempuan semakin meningkat di Kabupaten Karanganyar. Artinya, ketimpangan gender semakin mengecil. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.41.
Perkembangan IKG Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : BPS kabupaten Karanganyar Tahun 2025

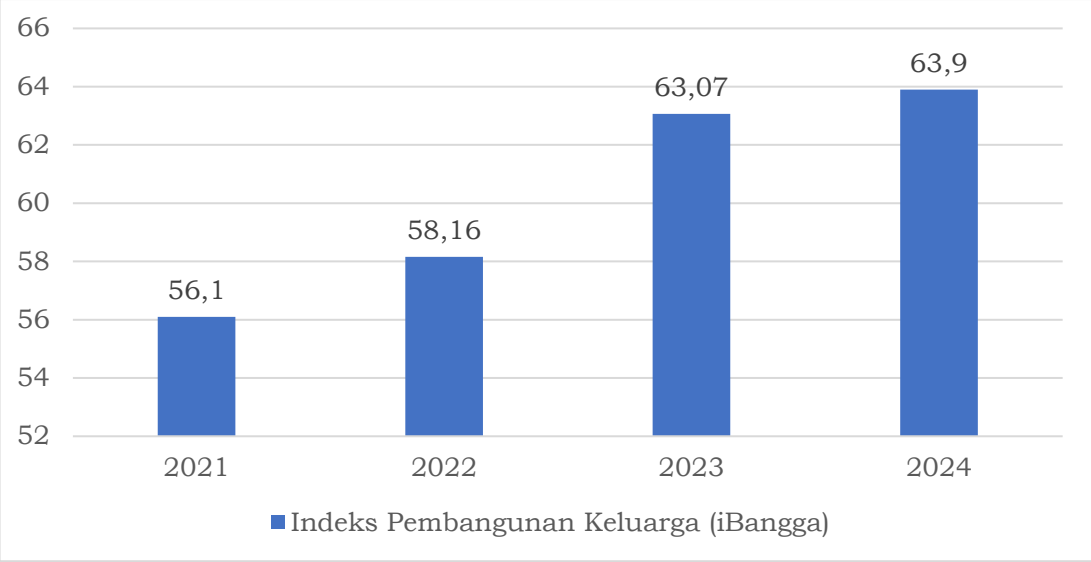
Data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar (0,262) memiliki tingkat ketimpangan gender yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,308) dan nasional (0,421), menandakan kondisi yang relatif lebih setara dalam aspek kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitarnya, Karanganyar memiliki IKG yang lebih baik daripada Sragen (0,377) dan Wonogiri (0,351), namun masih berada di atas Klaten (0,162) dan Sukoharjo (0,166) yang mencatatkan ketimpangan gender terendah di wilayah tersebut. Posisi Karanganyar yang berada di tengah menunjukkan capaian yang cukup baik, tetapi masih memiliki ruang untuk perbaikan agar dapat mengejar daerah-daerah dengan ketimpangan gender yang lebih rendah. Selengkapnya terkait IKG Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten lain di sekitarnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.42.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2025

Kualitas kesejahteraan keluarga digambarkan melalui indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks ini dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, serta mencerminkan peran dan fungsi keluarga. Indeks ini memberikan gambaran mengenai kondisi keluarga di Kabupaten Karanganyar dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan serta program peningkatan kesejahteraan keluarga.

Nilai iBangga Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 56,1 pada tahun 2021, naik menjadi 58,16 pada tahun 2022, lalu meningkat signifikan menjadi 63,07 pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 63,9 pada tahun 2024. Nilai iBangga yang semakin besar menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Kabupaten Karanganyar semakin meningkat.



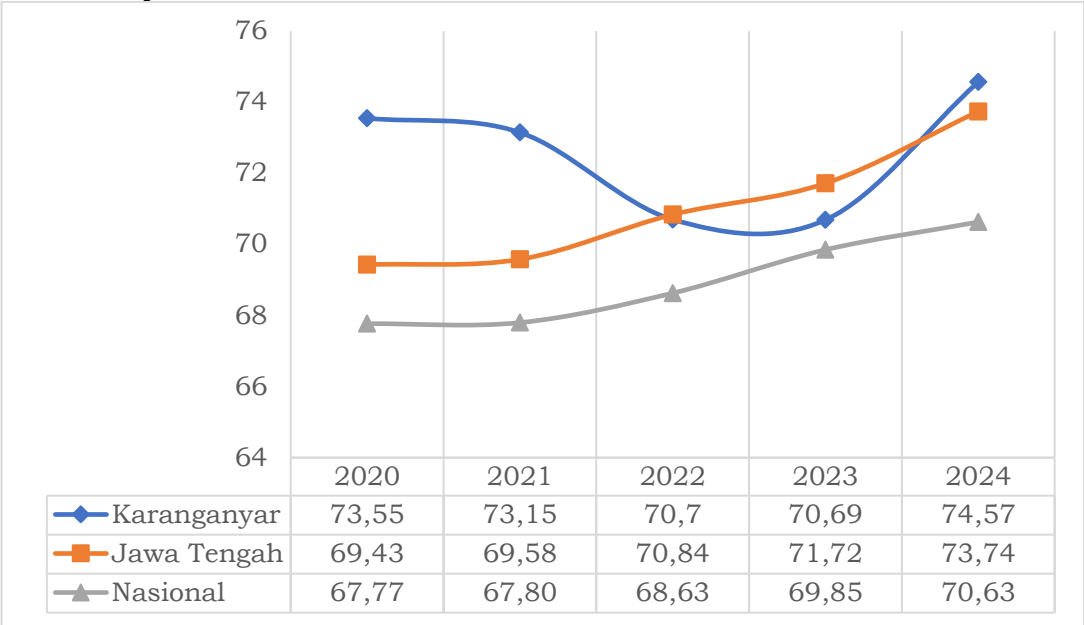
Gambar 2.43.
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Besarnya TPAK menunjukkan kondisi yang baik dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren yang cukup fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, TPAK Karanganyar tercatat sebesar 73,55%, kemudian sedikit menurun menjadi 73,15% di 2021 dan mencapai titik terendah pada 2022 sebesar 70,7%. Namun, setelah itu TPAK Karanganyar kembali menurun menjadi 70,69% di 2023 dan melonjak cukup signifikan pada 2024 menjadi 74,57%.

Dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah dan nasional, Karanganyar secara konsisten memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi. TPAK Jawa Tengah meningkat dari 69,43% pada 2020 menjadi 73,74% pada 2024, sedangkan TPAK nasional juga mengalami kenaikan dari 67,77% di 2020 menjadi 70,63% di 2024.

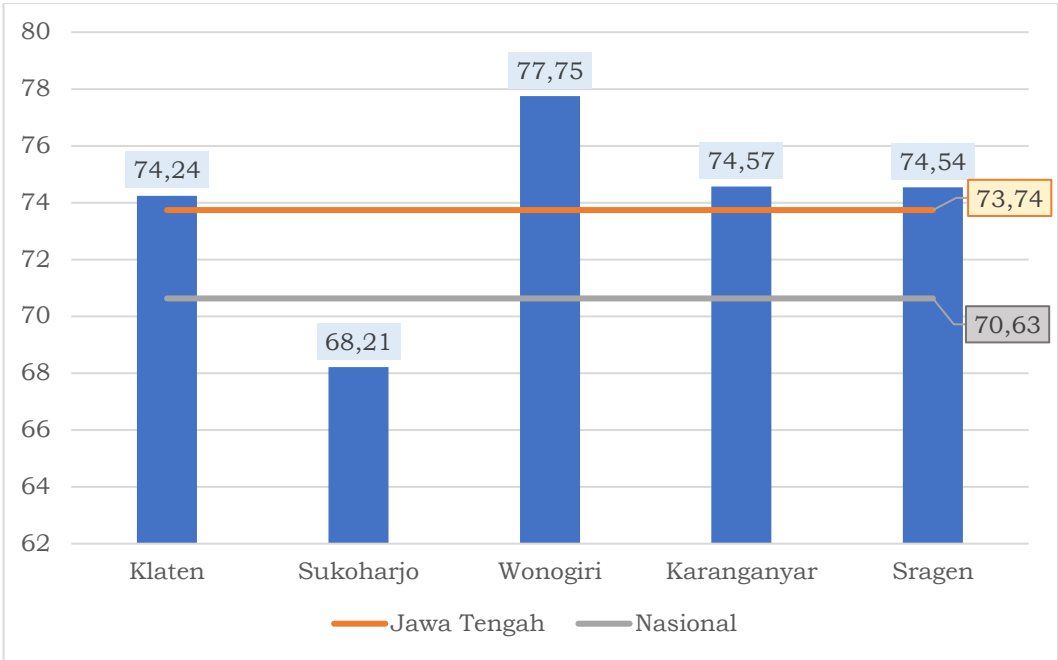


Gambar 2.44.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

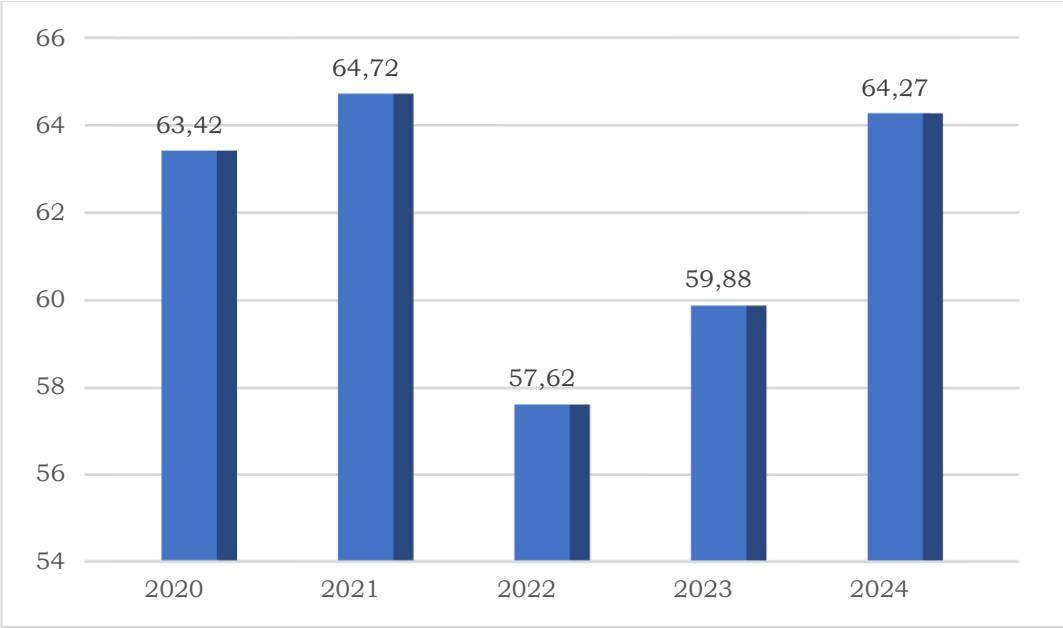
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 mencapai 74,57%, yang menunjukkan posisi cukup baik dibandingkan rata-rata TPAK Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,74% dan nasional sebesar 70,63%. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Karanganyar berada pada posisi yang cukup kompetitif. Wonogiri tercatat memiliki TPAK tertinggi dengan 77,75%, diikuti oleh Sragen sebesar 74,54% dan Klaten sebesar 74,24%. Sementara itu, Sukoharjo mencatat TPAK terendah dengan 68,21%. Tingginya TPAK Karanganyar mengindikasikan potensi angkatan kerja yang aktif di wilayah ini, namun tetap perlu diiringi dengan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja yang memadai agar kontribusi angkatan kerja terhadap pembangunan daerah semakin optimal.



Gambar 2.45.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

TPAK perempuan menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja perempuan (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Karanganyar menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, TPAK perempuan mencapai 63,42% dan meningkat menjadi 64,72% pada tahun 2021, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 57,62%, diikuti kenaikan kembali pada tahun 2023 menjadi 59,88%. Pada tahun 2024, TPAK perempuan kembali naik cukup tajam hingga mencapai 64,27%.

Pergerakan ini mencerminkan dinamika partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, serta peran perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tetap menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 2.46.
TPAK Perempuan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

2. Produktivitas Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren pertumbuhan dari tahun 2020 hingga 2024, baik dalam nilai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 37.023,45 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 51.331,50 miliar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi secara nominal, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti inflasi, peningkatan harga barang dan jasa, serta pertumbuhan sektor usaha di Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, PDRB ADHK yang mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dengan menghilangkan pengaruh inflasi juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB ADHK tercatat sebesar 26.103,23 miliar rupiah dan terus bertumbuh hingga mencapai 31.883,10 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang nyata di Kabupaten Karanganyar, bukan hanya karena kenaikan harga tetapi juga karena peningkatan produksi barang dan jasa di berbagai sektor usaha.

Peningkatan yang cukup stabil pada PDRB ADHB dan ADHK menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Karanganyar berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi ini dapat didorong oleh berbagai faktor seperti investasi, ekspansi sektor industri dan jasa, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap sektor-sektor yang berkontribusi paling besar terhadap PDRB serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Tabel 2.18.
PDRB ADHB & ADHK Kabupaten Karanganyar
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

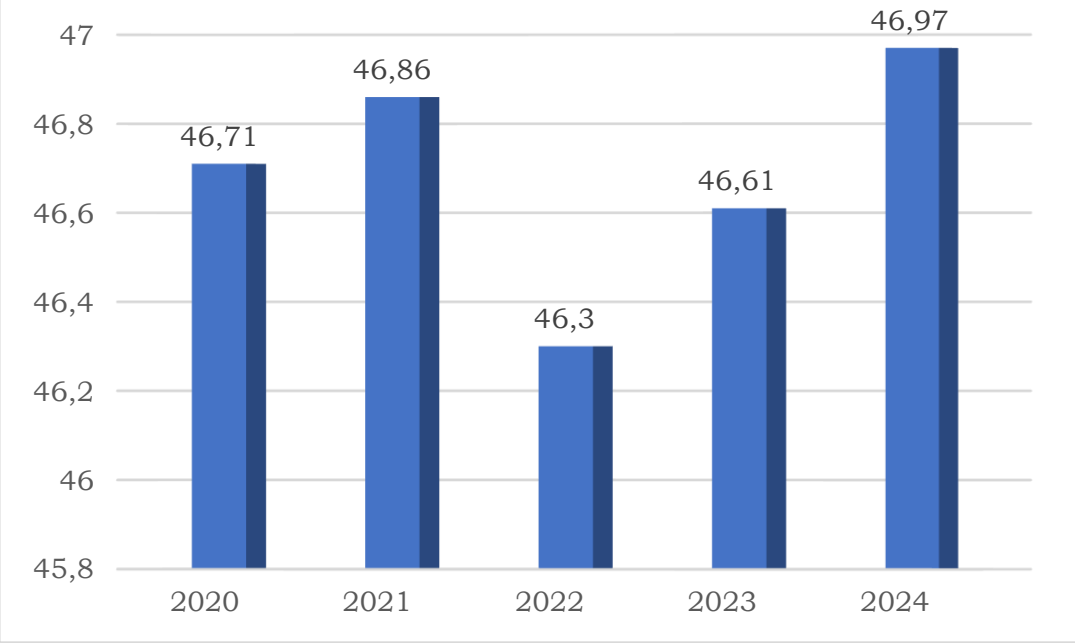
Tahun	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)
2020	37.023,45	26.103,23
2021	39.157,21	27.039,61
2022	43.087,76	28.624,99
2023	47.203,55	28.624,99
2024	51.331,50	31.883,10

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB.

Grafik pada Gambar 2.47 menunjukkan rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, rasio ini mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2020, rasio PDRB industri pengolahan tercatat sebesar 46,71%. Kemudian, mengalami peningkatan menjadi 46,86% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 46,3%, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi, gangguan rantai pasok, atau perubahan dalam struktur ekonomi daerah. Setelah mengalami penurunan di tahun 2022, rasio PDRB industri pengolahan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 46,61%. Tren ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana rasio mencapai titik tertinggi dalam periode ini, yaitu 46,97%. Peningkatan tersebut bisa mencerminkan adanya pemulihan industri pengolahan serta pertumbuhan sektor manufaktur di Kabupaten Karanganyar.

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama dalam perekonomian daerah. Peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa sektor ini kembali menguat, yang mungkin didukung oleh investasi, kebijakan pemerintah daerah, serta peningkatan permintaan terhadap produk industri lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan masih memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Karanganyar..



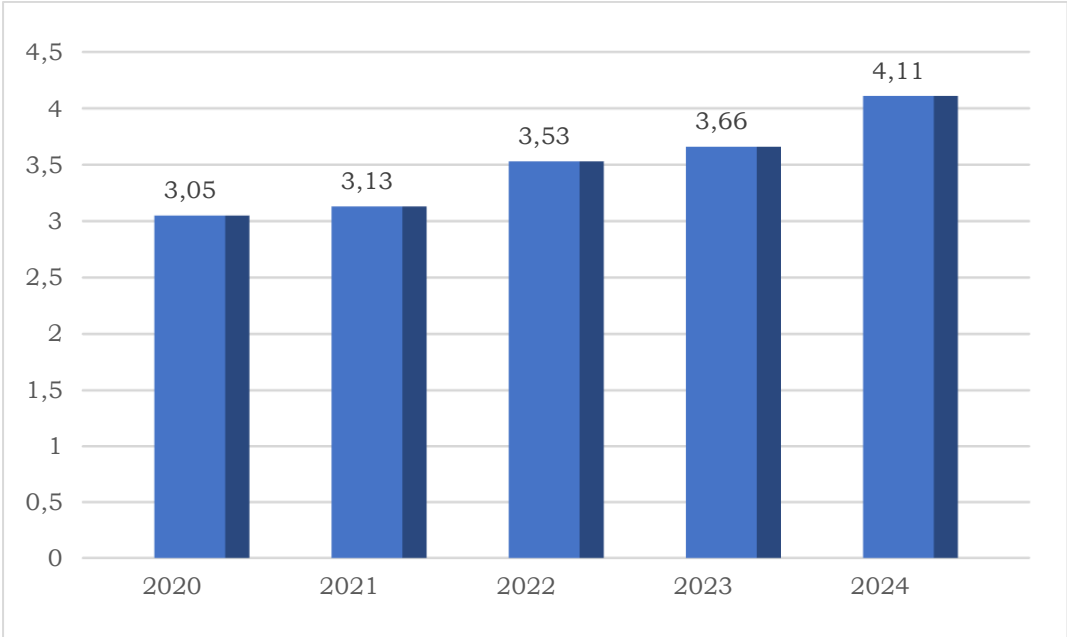
Gambar 2.47.
Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Grafik pada Gambar 2.48 menunjukkan perkembangan kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum di Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024. Terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang mencerminkan pertumbuhan sektor ini dalam mendukung perekonomian daerah. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini sebesar 3,05% dan mengalami kenaikan perlahan menjadi 3,13% pada tahun 2021. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada

tahun 2022 dengan angka 3,53%, yang kemudian terus meningkat menjadi 3,66% pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 4,11%.

Peningkatan ini dapat mengindikasikan membaiknya iklim usaha di bidang penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman di Kabupaten Karanganyar. Faktor-faktor seperti peningkatan jumlah wisatawan, bertambahnya usaha kuliner dan penginapan, serta meningkatnya daya beli masyarakat kemungkinan besar menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. Selain itu, perbaikan infrastruktur dan promosi pariwisata yang efektif juga dapat mendukung perkembangan sektor ini. Dengan tren positif ini, sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman berpotensi menjadi salah satu kontributor penting dalam struktur PDRB Kabupaten Karanganyar di masa mendatang. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas layanan sektor ini agar pertumbuhan yang terjadi dapat berkelanjutan dan berdampak positif pada perekonomian lokal secara keseluruhan.



Gambar 2.48.
PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)
Sumber : BPS kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang sangat kaya. Posisi geografisnya yang berada di lereng Gunung Lawu menjadikan Karanganyar sebagai destinasi yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keberagaman jenis daya tarik wisata (DTW) yang tersebar di berbagai kecamatan menjadi modal penting dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Berikut adalah daftar daya tarik wisata di Kabupaten Karanganyar :

Tabel 2.19.
Data Daya Tarik Wisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

No	Nama DTW	Alamat	Alam	Buatan	Budaya
1	AGRO WISATA AMANAH	Jl. Karang Wetan, Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah		√	
2	NEW BALEKAMBANG TAWANGMANGU	Jl. Balaikambang, Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792		√	
3	DE TJOLOMADOE	Jl. Adi Sucipto No.354, Nanasan, Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57177		√	

No	Nama DTW	Alamat	Alam	Buatan	Budaya
4	EDUPARK INTANPARI	Jl. Jend. Gatot Subroto, Beningrejo, Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57722		√	
5	BUKIT SEKIPAN KAMPUNG HALLOWEEN	Jl. Sekipan, Kramat, Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792		√	
6	RUMAH ATSIRI INDONESIA	Jl. Watusambang, Watusambang, Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792		√	
7	THE LAWU PARK	Bulakrejo, Gondosuli Kidul, Gondosuli Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792		√	
8	SENDANG PLESUNGAN	Jl. Mayjend Sutoyo, Samirukun, Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah		√	
9	TIRTA ROGOZA	Jl. Jend. Gatot Subroto, Beningrejo, Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57722		√	
10	JEEP ADVANTURE, CAMPING GROUNG DAN OUTBOUND KAZUKO KEMUNING	Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793		√	
11	MASJID AGUNG MADANIYAH KARANGANYAR	Jl. Lawu No.387, Badran Asri, Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716		√	
12	MUSEUM KERIS BROJOBUWONO	Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57188		√	
13	EDUPARK ALASKA	Jl. Karanganyar, Sukorejo, Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57752		√	
14	DOLPHIN TUGU WATERPARK	Bulakrejo, Tugu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah		√	
15	KEMUNING SKY HILLS	Jl. Karangpandan- Ngargoyoso, Sumbersari, Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57794		√	
16	KOLAM RENANG PESONA TAMANSARI	Babadan, RT.02/RW.05, Taman, Tamansari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57753		√	
17	TELAGA KUSUMA AGROWISATA WATERPARK	Tawun, Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57782		√	
18	WISATA THE LAWU FRESH	Drojo, Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793		√	
19	AGROWISATA JAMBU HELENA	Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793		√	
20	AGROWISATA JAMBU MERAH PUJA	Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793		√	
21	PITIK CILIK WATERBOOM	Kedungjeruk, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57752		√	
22	SUMBER MULYO WATERPARK	Pondok, Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793		√	
23	EDUPARK PATUNG SEMAR	Gedangan, Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57791		√	

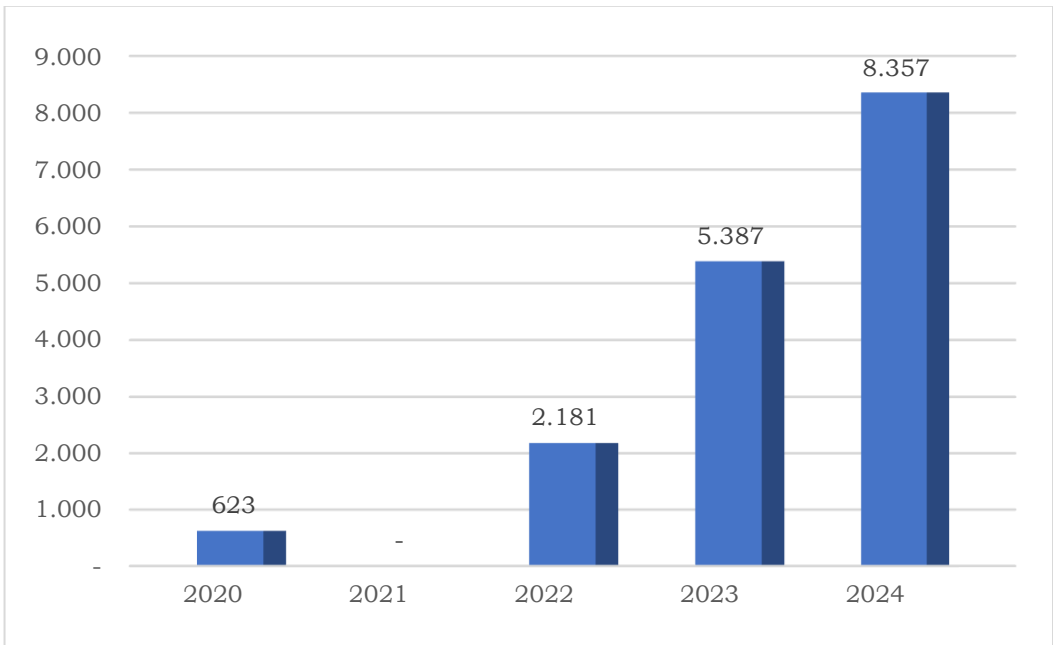
No	Nama DTW	Alamat	Alam	Buatan	Budaya
24	KOLAM RENANG TIRTA GUWA INDAH	Kadipeso, Plandokan, Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57753		√	
25	KOLAM RENANG KALIBOTO WATERBOOM	Bendungan, Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57752		√	
26	PASAR WISATA TAWANGMANGU	Jl. Raya Matesih-Tawangmangu No.16, Nano, Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792		√	
27	KAMPUNG KECEH UMBUL SEJURANG	Tagung RT/01/RW02, Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793		√	
28	EMBUNG PLALAR	Lajer. Kedongrejo, Jomblang, Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57762		√	
29	AIR TERJUN JUMOG	Gandu, Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793	√		
30	AIR TERJUN SEWAWAR SEDINDING	Sekarang, Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57794	√		
31	GROJOGAN SEWU	Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792	√		
32	KEBUN TEH KEMUNING	Jl. Kadipekso, Sumbersari, Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57794	√		
33	SENATAH TUBING ADVENTURE	Gadungan, Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793	√		
34	SITUS WATUKANDANG	Jalan Raya Matesih Tawangmangu, Karangbangun, Matesih, Area Sawah, Karangbangun, Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57781	√		
35	NEW SEKIPAN TAWANGMANGU	Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57792	√		
36	TAMAN SAKURA HILLS	Jl. Tawangmangu- Plaosan, Gondosuli Kidul, Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792	√		
37	TUBING MUSLIM 06	Pondok, RT.01/RW.01, Area Hutan, Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57785	√		
38	AIR TERJUN PARANG IJO	Jl. Munggur Raya, Mlinggur, Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793	√		
39	WANA WISATA PRINGGODANI	Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792	√		
40	PUNCAK LAWU VIA CEMORO KANDANG	Area Hutan, Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792	√		
41	BUKIT PARALAYANG	Segorogunung, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793	√		
42	TAWANGMANGU WONDER PARK	Jl. Ombang-ombang No. 32 Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	√		
43	PENDAKIAN LAWU VIA CETHO	Cetho, Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57794	√		
44	TELAGA MADIRDA	Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 57793	√		

No	Nama DTW	Alamat	Alam	Buatan	Budaya
45	SAPTA TIRTA PABLENGAN	Jl. TP Joko Songo, Bt. Argotiloso, Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57781	√		
46	TAHURA (Taman Hutan Raya) KGPA. Mangkunagoro I	Dusun Sukuh, Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Tambak, Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793	√		
47	GUNUNG GAMPING	Gamping, Bandardawung, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	√		
48	BUKIT MONGKRANG	Area Hutan, Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	√		
49	BASECAMP LAWU VIA TAMBAK	Tambak, Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793	√		
50	EMBUN LAWU	Jl. Raya Matesih-Tawangmangu No.16, Area Hutan, Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792	√		
51	TENG GIR PARK	Tambak, Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793	√		
52	KALI PUCUNG ADVENTURE	Spranten, Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793	√		
53	KALIMAS KEMUNING	Jl. Raya Kemuning, Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793	√		
54	KALI PRING KUNING RIVER TUBING	Dusun Sayoran, Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793	√		
55	WANA WISATA GUNUNG BROMO	Pelet, Gedong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	√		
56	GOA TLORONG	Kebun, Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57794	√		
57	PETILASAN KRENDOWAHONO	Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	√		
58	NGARGOYOSO WATERFALL	Surodadi, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	√		
59	ASTANA GIRIBANGUN	Jl. Astana GiriBangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57781			√
60	ASTANA GIRILAYU	Jl. Giribangun-Girilayu, Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57781			√
61	ASTANA MENGADEG	Jl. Astana Giri Bangun, Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57781			√
62	CANDI CETHO	Cetho, Gumeng, Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah			√
63	SITUS MENGGUNG	Jl. Nglurah, Nglurah, Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792			√
64	CANDI PLANGGATAN	Karanganyar, Tambak, Tagung, Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793			√
65	CANDI SUKUH	Jl. Candi Sukuh, Tambak, Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793			√
66	PURA PEMACEKAN	Jl. Raya Solo - Tawangmangu, Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57791			√
67	PURI TAMAN SARASWATI	Cetho, Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57794			√

No	Nama DTW	Alamat	Alam	Buatan	Budaya
68	SITUS CANDI KETHEK	Anggrasmanis, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57794			√
69	MUSEUM KAMPUNG PURBA DAYU	Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57188			√
70	AGROWISATA KAMPUNG KARET	Punthukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	√		
71	SITUS PERJANJIAN GIYANTI	Kerten, Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716			√
72	JABAL KANIL	Dawung, Bandardawung, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah			√
73	MONUMEN TANAH KRITIS	Soko, Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57782	√		
74	GANESHA SENDANG SALJU & RESTO	Karang, RT.01/RW.02, Kecamatan Jatiyoso , Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57782		√	
75	BUMI PERKEMAHAN WONOMAKMUR	Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	√		
76	TAMAN SATWA KEMUNING	Spranten, Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793		√	
77	GOA SARI RIVER TUBING	Jl. Ngranten Wetan No.Rt 04, Puntuk, Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	√		
78	BUMI PERKEMAHAN SEGOROGUNUNG	Sedonorejo, Segorogunung, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57793	√		
79	BUMI PERKEMAHAN PLESERAN	Jalan Candi Menggung Nglurah, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792	√		
80	THE NICE PARK SOLO	Jl. Mayor Achmadi, Kedunggong, Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah		√	

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Jumlah wisatawan mancanegara dihitung dari data jumlah tamu Mancanegara yang menginap di setiap hotel yang berada di Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 623 orang, namun terjadi penurunan drastis pada tahun 2021, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi global yang membatasi mobilitas internasional. Memasuki tahun 2022, jumlah wisatawan mancanegara mulai pulih dengan 2.181 kunjungan, menunjukkan adanya pemulihan sektor pariwisata seiring pelonggaran kebijakan perjalanan. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan peningkatan signifikan menjadi 5.387 wisatawan, dan akhirnya melonjak tajam pada tahun 2024 dengan 8.357 wisatawan.



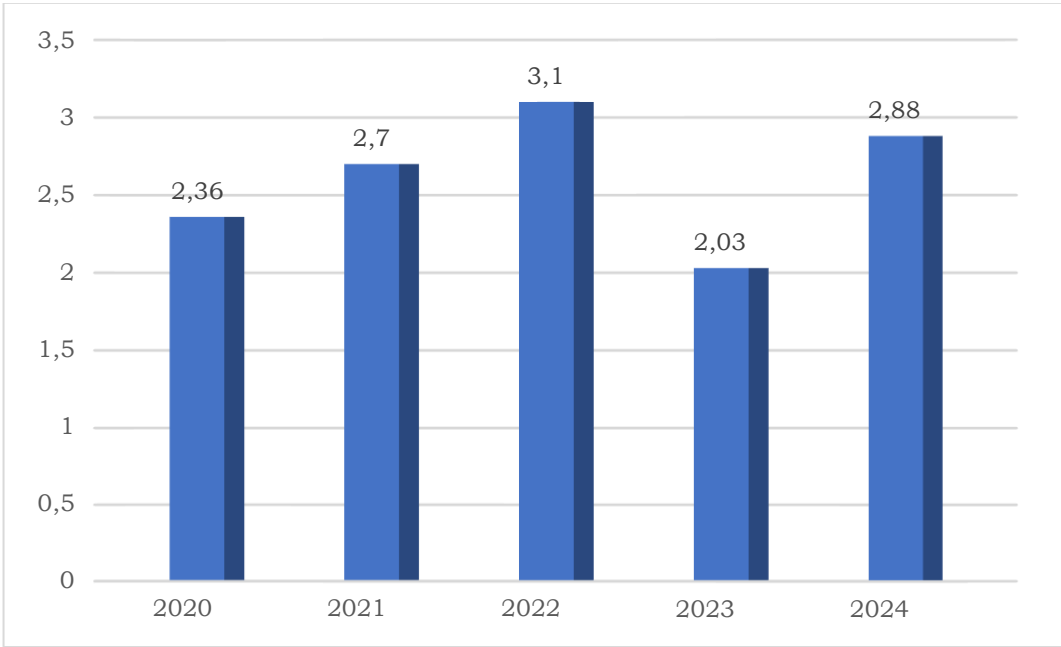
Gambar 2.49.
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Kenaikan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Karanganyar semakin menarik perhatian wisatawan mancanegara yang kemungkinan didukung oleh promosi pariwisata yang efektif, perbaikan infrastruktur, dan pengembangan destinasi wisata yang berkualitas. Untuk menjaga momentum ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan layanan pariwisata, memperkenalkan atraksi baru, serta memperkuat kerja sama dengan agen perjalanan dan media promosi internasional..

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap.

Rasio kewirausahaan daerah di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio kewirausahaan daerah di Kabupaten Karanganyar sebesar 2,36%, kemudian mengalami fluktuasi sampai di tahun 2023 menjadi 2,03%. Namun di tahun 2024 rasio kewirausahaan kembali meningkat menjadi 2,88*. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Selain itu, dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah juga turut mendorong semangat kewirausahaan di berbagai sektor, khususnya UMKM, melalui pembiayaan yang inklusif dan prinsip usaha yang berkeadilan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



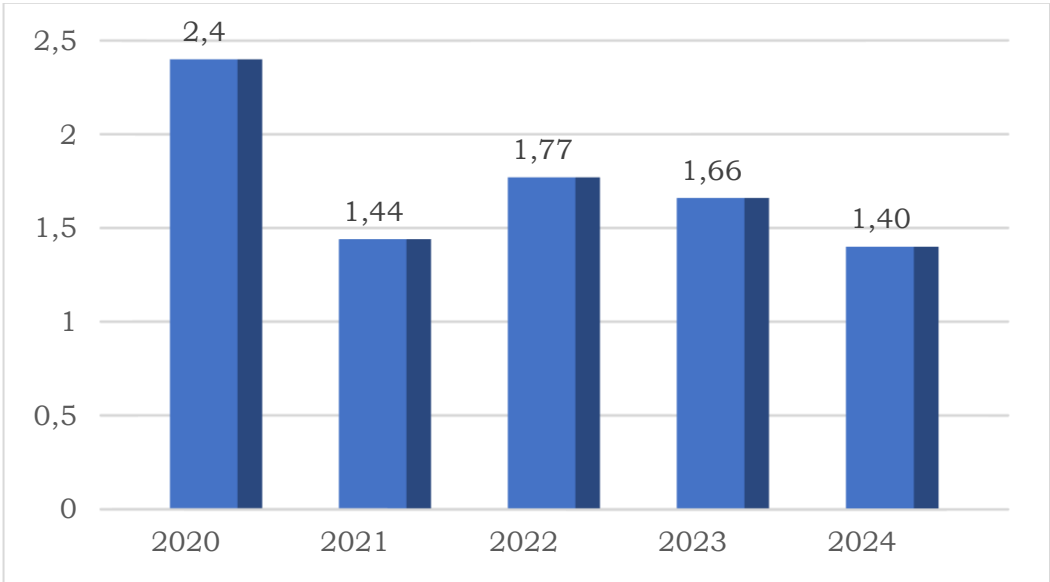
Gambar 2.50.
Rasio Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Sampai dengan tahun 2025, dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Karanganyar tidak hanya tercermin dari aspek pembiayaan dan prinsip usaha berkeadilan, tetapi juga diwujudkan melalui sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Tercatat telah diterbitkan kurang lebih 3.811 sertifikasi halal, yang mencakup berbagai jenis usaha, antara lain UMKM sebanyak 3.718 buah, rumah potong ayam dan rumah potong hewan sebanyak 40 buah, kantin 22 buah, rumah makan dan katering 14 buah, penggilingan padi 9 buah, serta pabrik es dan usaha lainnya sebanyak 8 buah. Jumlah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun ekosistem usaha yang sesuai dengan nilai-nilai syariah sekaligus meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan lokal. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong UMKM naik kelas dan memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional.

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Data rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 2,4%, namun turun tajam menjadi 1,44% pada 2021. Rasio sempat meningkat menjadi 1,77% pada 2022, tetapi kembali menurun menjadi 1,66% pada 2023 dan turun lebih lanjut menjadi 1,40% pada 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah cenderung melemah, baik karena pertumbuhan usaha koperasi yang stagnan maupun karena laju pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi daripada peningkatan volume usaha koperasi. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat peran koperasi sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Selengkapnya terkait rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar berikut.



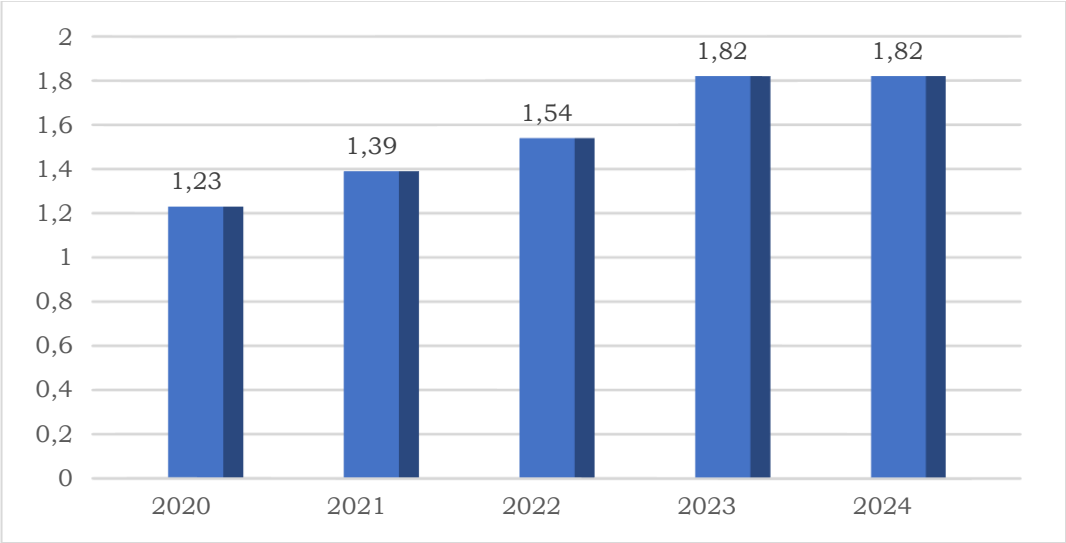
Gambar 2.51.
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : DiskuktransESDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Karanganyar tahun 2024 tercatat sebesar 4,33, yang mencerminkan tingkat akses keuangan masyarakat berada pada kategori sedang. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal, baik karena keterbatasan infrastruktur, distribusi lembaga keuangan yang belum merata, maupun tingkat literasi keuangan yang masih rendah.

Capaian IKAD ini menjadi perhatian penting dalam mendorong inklusi keuangan di Karanganyar. Diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan pelaku industri jasa keuangan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, meningkatkan edukasi keuangan masyarakat, serta mempercepat digitalisasi layanan keuangan berbasis teknologi, khususnya di wilayah perdesaan.

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset (ROA)* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024, dari 1,23% pada tahun 2020 menjadi 1,82% pada 2023, dan stabil di angka tersebut hingga 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kinerja keuangan dan efisiensi pengelolaan aset BUMD dalam menghasilkan laba. Namun, stagnasi RoA pada dua tahun terakhir mengindikasikan bahwa optimalisasi aset mulai mencapai batas maksimal atau belum ada perluasan usaha yang signifikan. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BUMD untuk melakukan inovasi, memperluas lini usaha, serta mengembangkan kemitraan strategis guna mendorong kinerja yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.



Gambar 2.52.
ROA BUMD di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan tren penurunan rasio meskipun nilai nominal PDRB terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2020, rasio DPK terhadap PDRB sebesar 1,77%, kemudian naik tipis menjadi 1,79% pada 2021. Setelah itu, rasio ini mengalami penurunan berturut-turut menjadi 1,72% (2022), 1,61% (2023), dan 1,45% pada 2024. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga, seperti tabungan dan deposito masyarakat di lembaga keuangan, tidak seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat mencerminkan melemahnya fungsi intermediasi perbankan, rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat, atau kecenderungan masyarakat untuk menempatkan dananya di luar lembaga formal. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal menjadi penting untuk mendorong penghimpunan dana domestik yang mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20.
Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Dana Pihak Ketiga (Juta Rupiah)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
2020	37.023.453,39	654.094,60	1,77
2021	39.157.212,60	702.515,50	1,79
2022	43.087.760,28	739.701,00	1,72
2023	47.203.554,40	758.849,40	1,61
2024	51.331.500,00	745.729,70	1,45

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Total Kredit/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Perkembangan total kredit terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar pada periode 2020–2024 menunjukkan tren relatif stabil dengan sedikit peningkatan rasio secara keseluruhan. Pada tahun 2020, rasio kredit terhadap PDRB sebesar 11,07% dan meningkat berturut-turut hingga mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 12,50%. Setelah itu, terjadi sedikit penurunan pada 2023 menjadi 11,92%, kemudian

naik tipis menjadi 11,94% pada 2024. Meskipun rasio ini tidak menunjukkan lonjakan yang tajam, tren tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan aktivitas pembiayaan di sektor ekonomi, khususnya melalui penyaluran kredit. Stabilitasnya rasio ini mencerminkan peran sektor perbankan yang cukup konsisten dalam mendukung kegiatan ekonomi daerah. Namun, perlu perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan tepat sasaran dan produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

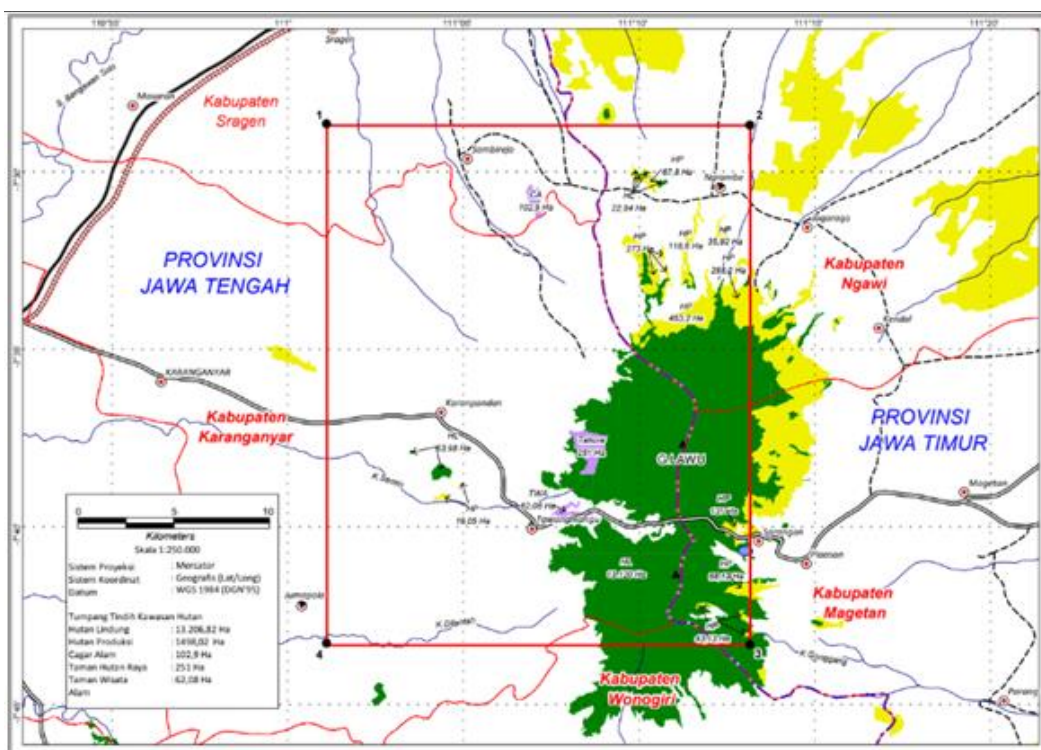
Tabel 2.21.
Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2025

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Total Kredit (Juta Rupiah)	Total Kredit/PDRB (%)
2020	37.023.453,39	4.099.594,00	11,07
2021	39.157.212,60	4.652.675,00	11,88
2022	43.087.760,28	5.387.972,00	12,50
2023	47.203.554,40	5.627.929,00	11,92
2024	51.331.500,00	6.129.338,00	11,94

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Pengelolaan panas bumi di Kabupaten Karanganyar terkait dengan potensi panas bumi di wilayah Gunung Lawu, yang mencakup sebagian Kabupaten Karanganyar dan beberapa kabupaten lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu memiliki potensi energi panas bumi yang diperkirakan mencapai sekitar 165 MW hingga 195 MW. Hingga tahun 2024 potensi panas bumi di Kabupaten Karanganyar masih berfokus pada kawasan Gunung Lawu. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi panas bumi cukup signifikan di Jawa Tengah, utamanya di sekitar area Gunung Lawu. Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Lawu mencakup bagian Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen (Jawa Tengah), serta Ngawi dan Magetan (Jawa Timur). Luas total area WKP Gunung Lawu: sekitar 60.030 hektar. Namun, area ini terbagi lintas lima kabupaten dan dua provinsi. Bagian wilayah Karanganyar yang masuk pengawasan potensi panas bumi hanya sebesar 385.050.000 m2 atau 38.505 ha yang terletak di kecamatan lereng Gunung Lawu seperti Tawangmangu, Matesih, dan Karangpandan. Sampai 2024, eksplorasi panas bumi Lawu lebih banyak pada tahapan survei dan verifikasi lapangan. Pengawasan aktif dilakukan Pemerintah Kabupaten dan Badan Geologi melalui survei periodik area manifestasi panas bumi. Profil Area Prospek Panas Bumi Gunung Lawu tergambar pada gambar berikut ini :



Sumber : DiskuktransESDM Kabupaten Karanganyar, Tahun 2025

Data potensi energi terbarukan di Kabupaten Karanganyar tahun 2024 menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peluang besar dalam pengembangan energi ramah lingkungan, terutama dari sumber angin dan surya. Potensi angin *onshore* mencapai 221,6 MW, menunjukkan bahwa wilayah daratan Karanganyar cukup mendukung instalasi turbin angin, meskipun potensi *offshore* tidak tersedia. Di sektor energi surya, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di darat sebesar 6,1 GWp dan PLTS terapung sebesar 6,0 MW menunjukkan prospek yang menjanjikan untuk pemanfaatan sinar matahari, baik di lahan maupun perairan. Sementara itu, potensi energi hidro, meskipun relatif lebih kecil, tetap dapat dimanfaatkan melalui skema PLTA *run of river* (2,3 MW) dan PLTA bendungan (1,0 MW). Potensi ini menunjukkan bahwa Karanganyar memiliki basis awal yang kuat untuk transisi menuju energi bersih, dengan peluang investasi dan pengembangan teknologi yang beragam, terutama dalam pemanfaatan tenaga angin dan surya.

Tabel 2.22.
Potensi Angin, Surya dan Hidro Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Potensi Angin		Potensi Surya			Potensi Hidro
Onshore	Offshore	PLTS	PLTS Terapung	PLTA RoR	PLTA Bendungan
MW	MW	GWp	MW	MW	MW
221,6	-	6,1	6,0	2,3	1,0

Sumber : Kementerian ESDM, Tahun 2025

Berdasarkan data potensi panas bumi Kabupaten Karanganyar tahun 2024, total potensi energi panas bumi mencapai 332 MW, yang seluruhnya berasal dari kategori cadangan spekulatif (137 MW) dan hipotetik (195 MW). Tidak terdapat data untuk kategori cadangan "mungkin", "terduga", maupun "terbukti", yang menunjukkan bahwa potensi panas bumi di Karanganyar masih berada pada tahap awal eksplorasi dan belum masuk dalam tahap pengembangan komersial. Hal ini mencerminkan perlunya riset

lebih lanjut, survei geologi, dan investasi eksploratif agar potensi panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Jika berhasil dikembangkan, panas bumi dapat menjadi sumber energi bersih yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan energi daerah serta menurunkan emisi gas rumah kaca.

Tabel 2.23.
Potensi Panas Bumi Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Potensi Panas Bumi					
Cadangan					Total Potensi Panas Bumi
Spekulatif	Hipotetik	Mungkin	Terduga	Terbukti	
MW	MW	MW	MW	MW	MW
-	137,0	195,0	-	-	332,0

Sumber : Kementerian ESDM, Tahun 2025

Potensi bioenergi Kabupaten Karanganyar tahun 2024 menunjukkan peluang yang masih terbatas namun strategis untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Potensi terbesar berasal dari sampah kota, dengan potensi teknis sebesar 3,8 MW dan potensi teoritis mencapai 12,5 MW, yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi solusi ganda dalam hal energi dan lingkungan. Selain itu, terdapat potensi biomassa dari limbah industri gula sebesar 1,3 MW, yang menjadi satu-satunya potensi tercatat dari sektor limbah industri. Sementara itu, potensi biomassa dari produk utama seperti kayu, kelapa sawit, padi, pulp dan kertas, serta tapioka belum tersedia atau masih sangat kecil. Luasan hutan produksi kritis yang tercatat hanya 1,0 hektare, mengindikasikan keterbatasan lahan untuk pengembangan biomassa berbasis kehutanan. Secara keseluruhan, pengembangan bioenergi di Karanganyar masih perlu ditopang oleh inovasi teknologi dan dukungan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi sampah kota dan limbah industri yang sudah ada.

Tabel 2.24.
Potensi Bioenergi Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Potensi Bioenergi								
Potensi Biomassa Existing Limbah Industri						Potensi Biomassa Existing Produk Utama		Potensi Biomassa Pengembangan
Gula	Kayu	Kelapa Sawit	Padi	Pulp dan Kertas	Tapioka	Sampah Kota Teknis	Sampah Kota Teoritis	Hutan Produksi Kritis
MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	Ha
1,3	-	-	-	-	-	3,8	12,5	1,0

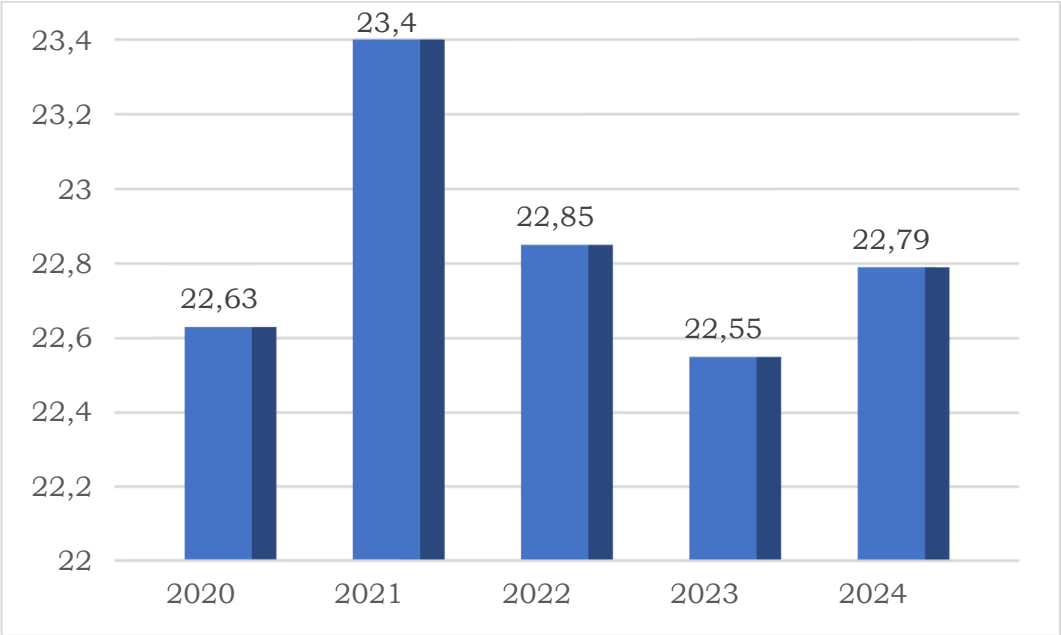
Sumber : Kementerian ESDM, Tahun 2025

4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang di budidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Data proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, proporsi PMTB tercatat sebesar 22,63%,

meningkat menjadi 23,4% pada 2021, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode tersebut. Namun, pada 2022 dan 2023, proporsi ini mengalami sedikit penurunan masing-masing menjadi 22,85% dan 22,55%, sebelum kembali naik tipis menjadi 22,79% pada 2024. Secara umum, angka ini mencerminkan kontribusi investasi terhadap pembentukan output ekonomi daerah yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun stabil, peningkatan proporsi PMTB yang lebih signifikan dibutuhkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama melalui investasi sektor produktif yang mampu mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing daerah. Selengkapnya terkait perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



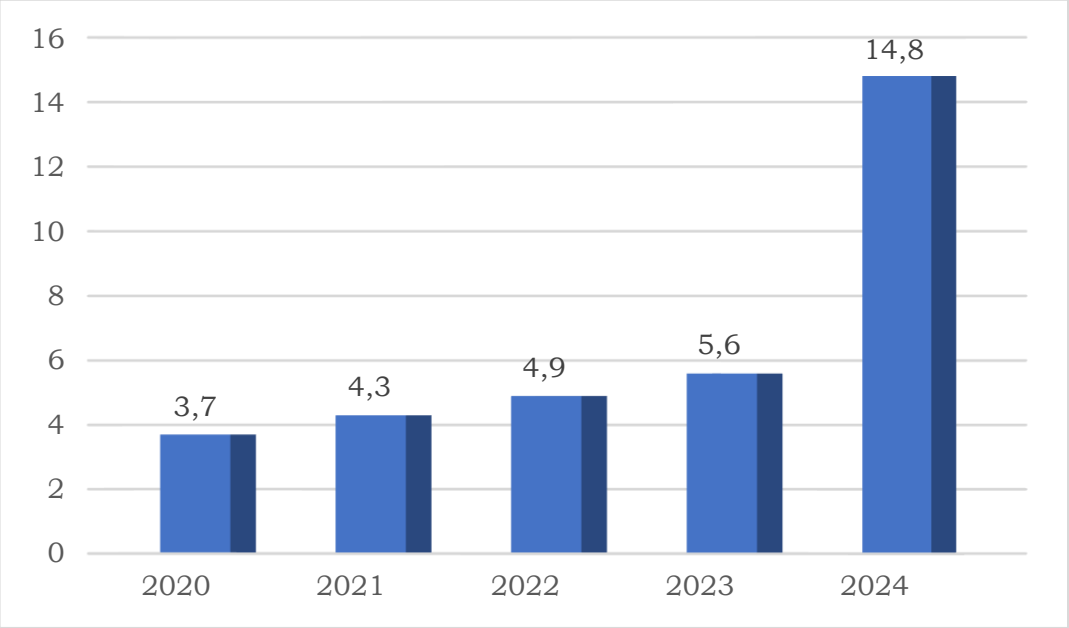
Gambar 2.54.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan desa menjadi penting dilakukan agar desa menjadi desa mandiri, yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

Desa Mandiri merupakan Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Persentase desa mandiri di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, dengan lonjakan signifikan terjadi pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, hanya 3,7% desa yang berstatus mandiri, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 4,3% pada 2021, 4,9% pada 2022, dan 5,6% pada 2023. Namun, pada 2024, persentase desa mandiri melonjak tajam menjadi 14,8%, yang menandakan adanya percepatan kemajuan pembangunan desa, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun layanan pemerintahan. Capaian ini menunjukkan efektivitas berbagai program pemberdayaan dan penguatan kapasitas desa yang dijalankan, serta semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan desa. Meski demikian, masih dibutuhkan upaya berkelanjutan agar seluruh desa dapat bergerak menuju kemandirian secara merata dan berkelanjutan. Selengkapnya terkait

perkembangan persentase desa mandiri di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.55.
Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024 (%)

Sumber : Dispermasdes Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai IDM tercatat sebesar 0,6919 dan terus meningkat menjadi 0,6937 pada 2021, kemudian naik signifikan menjadi 0,7078 pada 2022, 0,7162 pada 2023, hingga mencapai 0,7378 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan pembangunan desa, baik dari aspek ketahanan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kenaikan IDM secara berkelanjutan juga mengindikasikan efektivitas intervensi pembangunan desa dan meningkatnya kapasitas desa-desa di Karanganyar menuju status desa berkembang, maju, dan mandiri.

Tabel 2.25.
Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

Tahun	Data Indeks Desa Membangun (IDM)
2020	0,6919
2021	0,6937
2022	0,7078
2023	0,7162
2024	0,7378

Sumber : Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Perubahan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa yang baru akan memerlukan penyesuaian di berbagai tingkatan, baik pada level kebijakan, teknis pengukuran, maupun implementasi di lapangan. Pergantian indikator ini diperkirakan mencakup penyesuaian metodologi, struktur indikator, serta sistem pelaporan dan pengolahan data perkembangan desa. Bagi Kabupaten Karanganyar, perubahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas dalam menilai capaian pembangunan desa secara lebih menyeluruh. Dengan pengukuran yang lebih mutakhir, diharapkan kebijakan pembangunan desa dapat disusun secara lebih tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.

Perkembangan BUMDes/BUMDesma di Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan tren positif dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Jumlah BUMDes meningkat dari 117 unit pada tahun 2020 menjadi 162 unit pada tahun 2024, mencerminkan adanya upaya konsisten dalam mendorong kemandirian dan pemberdayaan ekonomi desa. Peningkatan signifikan juga tampak pada pembentukan BUMDesma LKD (Lembaga Keuangan Desa) yang mulai muncul pada 2023 sebanyak 14 unit dan stagnan hingga 2024, menunjukkan adanya fokus baru terhadap layanan keuangan desa yang potensial mendukung inklusi keuangan lokal. Sementara itu, jumlah BUMDesma Kawasan mengalami kenaikan terbatas dari 1 unit pada 2020 menjadi 3 unit pada 2022 dan stabil hingga 2024, yang mengindikasikan bahwa kolaborasi antardesa dalam pengelolaan potensi kawasan masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan arah kebijakan yang progresif dalam pengembangan ekonomi desa, meskipun akselerasi pada bentuk kelembagaan lintas desa masih perlu diperkuat.

Tabel 2.26.

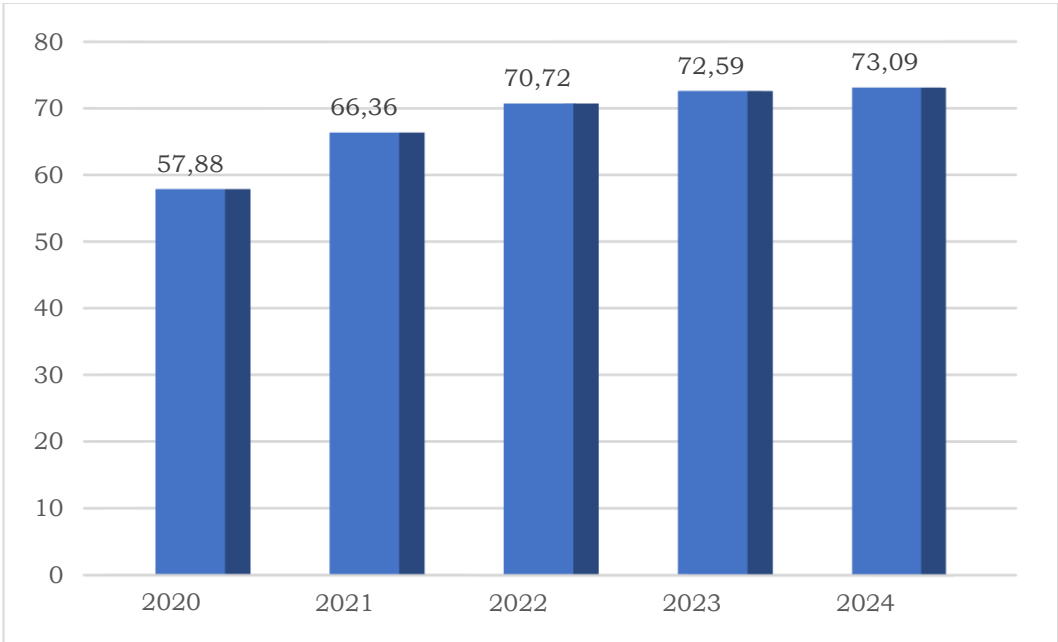
Data BUMDes/BUMDesma Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Jenis BUMDes	2020	2021	2022	2023	2024
BUMDES	117	154	160	160	162
BUNDESMA KAWASAN	1	1	3	3	3
BUMDESMA LKD	0	0	0	14	14

Sumber : Dispermasdes Kabupaten Karanganyar tahun 2025

Sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa, Kabupaten Karanganyar juga telah membentuk Koperasi Merah Putih sebanyak 177 unit hingga tahun 2024. Koperasi ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi pelengkap peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa. Keberadaan Koperasi Merah Putih menunjukkan komitmen daerah dalam mendorong kolaborasi antar pelaku ekonomi lokal, serta membuka akses yang lebih luas terhadap layanan usaha dan permodalan, terutama bagi pelaku UMKM dan kelompok rentan di pedesaan. Dengan sinergi antara BUMDes dan koperasi, ekosistem ekonomi desa di Karanganyar memiliki fondasi yang semakin kokoh untuk tumbuh secara mandiri dan berdaya saing.

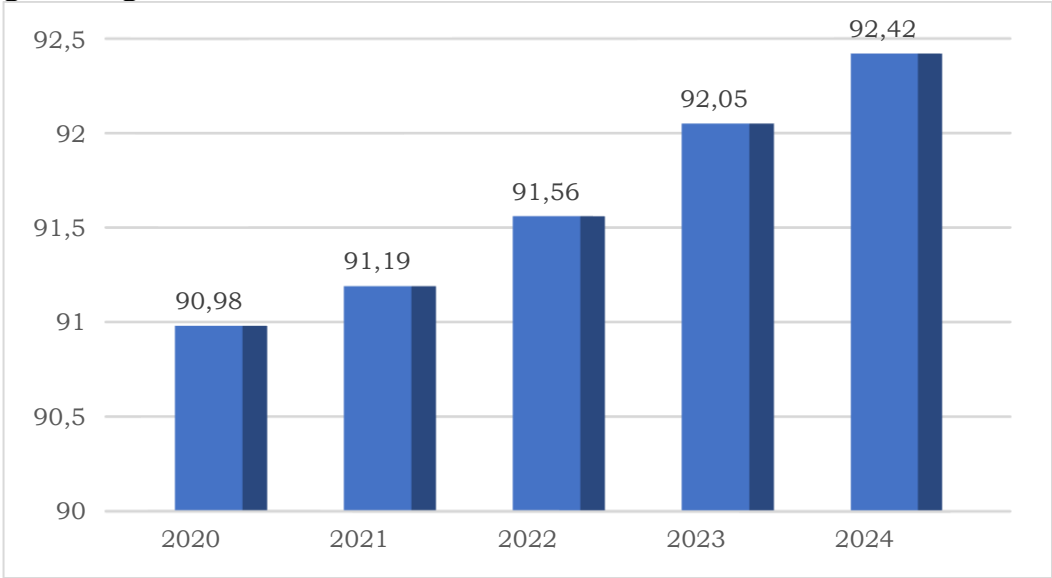
Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Data persentase rumah tangga dengan akses internet atau persentase penduduk yang mengakses internet di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase akses internet berada pada angka 57,88% dan terus mengalami kenaikan menjadi 66,36% (2021), 70,72% (2022), 72,59% (2023), hingga mencapai 73,09% pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan ketersediaan infrastruktur digital, penetrasi layanan internet, serta kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan layanan berbasis digital. Capaian ini mendukung transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan layanan publik. Namun demikian, masih ada sekitar 26% penduduk yang belum terjangkau akses internet, sehingga perlu upaya lanjutan untuk memperkecil kesenjangan digital dan mewujudkan inklusi teknologi yang merata. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.56.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, sebesar 90,83% rumah tangga telah menempati hunian layak, dan angkanya melonjak cukup tajam menjadi 92,42% pada 2024. Capaian ini mencerminkan perbaikan kondisi tempat tinggal masyarakat, yang mencakup aspek konstruksi bangunan, sanitasi, air bersih, dan kepadatan hunian. Tren ini menunjukkan keberhasilan program perumahan dan peningkatan kualitas permukiman, serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Selengkapnya terkait perkembangan rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Gambar 2.57.
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fokus utama pada peningkatan kualitas rumah dibandingkan pembangunan baru. Selama dua tahun awal (2020–2021), tidak ada pembangunan rumah baru yang dilakukan, sementara peningkatan kualitas rumah mencapai 874 unit pada 2020 dan menurun drastis menjadi 363 unit pada 2021. Tahun 2022 menjadi titik balik, dengan dimulainya pembangunan baru sebanyak 84 unit dan peningkatan kualitas mencapai angka tertinggi kedua, yaitu 1.005 unit. Ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut terdapat alokasi anggaran atau program khusus untuk intervensi lebih menyeluruh dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak.

Selanjutnya, pada tahun 2023 tidak ada pembangunan baru, namun peningkatan kualitas rumah tetap dilanjutkan sebanyak 950 unit. Pada tahun 2024, peningkatan kualitas kembali mengalami kenaikan signifikan menjadi 1.089 unit, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pola ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi RTLH di Karanganyar cenderung lebih mengutamakan perbaikan rumah yang sudah ada ketimbang membangun rumah baru, yang mungkin disesuaikan dengan keterbatasan lahan, anggaran, atau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak pada peningkatan kondisi rumah yang telah dihuni. Konsistensi dan peningkatan jumlah rumah yang direhabilitasi setiap tahun mencerminkan adanya komitmen daerah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui intervensi sektor perumahan.

Tabel 2.27.
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

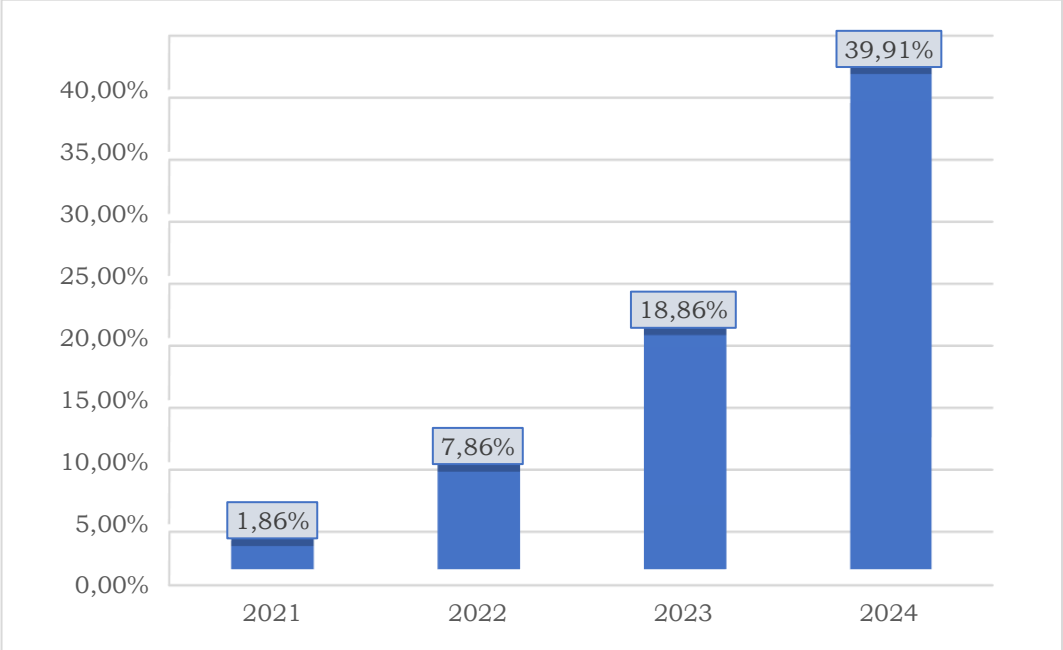
Tahun	Pembangunan Baru	Peningkatan Kualitas
2020	0	874
2021	0	363
2022	84	1.005
2023	0	950
2024	0	1.089

Sumber : DPUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Permasalahan di kawasan kumuh merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Kawasan kumuh biasanya ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan kondisi hidup yang buruk. Overpopulasi menyebabkan penggunaan ruang yang tidak efisien, memperburuk kualitas hidup, meningkatkan risiko penularan penyakit, dan menyulitkan penyediaan fasilitas umum. Selain itu, kawasan kumuh umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap air bersih, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan memperbesar risiko penyakit menular seperti diare dan kolera.

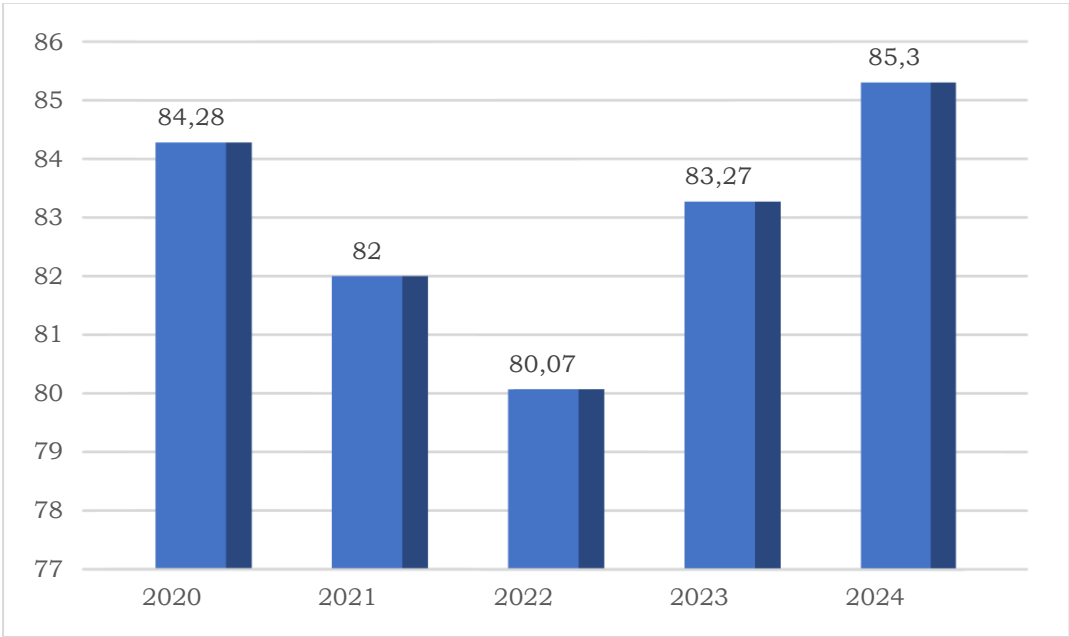
Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat tujuh kriteria untuk mengidentifikasi kawasan kumuh, yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa penanganan kawasan kumuh kurang dari 10 hektare di Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan yang sangat signifikan sepanjang periode 2021–2024. Pada awalnya, capaian penanganan kawasan kumuh masih rendah yaitu 1,86% pada tahun 2021, namun dalam tiga tahun berikutnya angkanya

melonjak tajam hingga mencapai 39,91% pada tahun 2024. Tren peningkatan yang konsisten ini menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam mempercepat program perbaikan permukiman kumuh melalui berbagai intervensi fisik maupun nonfisik. Peningkatan yang hampir 20% pada 2023 dan melonjak dua kali lipat pada 2024 juga mengindikasikan adanya percepatan program yang lebih masif, baik melalui kolaborasi lintas sektor maupun optimalisasi sumber pembiayaan. Dengan demikian, capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam menurunkan luas kawasan kumuh, tetapi juga menjadi indikasi meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.



Gambar 2.58.
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Kurang dari 10 Ha Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024
Sumber : DPUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Persentase panjang jalan dengan kondisi permukaan mantap yang menjadi kewenangan Kabupaten Karanganyar menunjukkan fluktuasi selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase jalan mantap tercatat sebesar 84,28 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 82 persen dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 80,07 persen. Penurunan tersebut diduga disebabkan oleh faktor teknis maupun cuaca ekstrem yang berdampak terhadap kualitas permukaan jalan. Namun demikian, mulai tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 83,27 persen dan kembali naik menjadi 85,3 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan, yang diharapkan dapat terus dipertahankan guna mendukung aksesibilitas, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 2.59.
Persentase Jalan Mantap Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024 (%)

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten / kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pada tahun 2024, kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten Karanganyar sebesar 49,37%.

Secara keseluruhan, kondisi jalan yang baik dan kelengkapan jalan yang memadai merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan menurunkan angka kecelakaan. Jumlah kecelakaan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28.
Jumlah dan Golongan Kecelakaan di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Tol	Berat	Sedang	Ringan
2017	940	1	125	808	6
2018	846	0	110	733	3
2019	1.466	0	110	1.350	6
2020	1.075	0	86	984	5
2021	1.141	0	99	1.036	6
2022	929	0	15	911	3

Sumber : Polres Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Rasio konektivitas memiliki hubungan yang signifikan dengan perekonomian, terutama dalam konteks bagaimana sistem ekonomi terhubung dan beroperasi. Konektivitas yang baik dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, seperti efisiensi pasar, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan inovasi. Rasio konektivitas Kabupaten Karanganyar tahun 2024 sebesar 0,67. Jumlah angkutan trayek (angkutan perdesaan) di Kabupaten Karanganyar tahun 2024 sebanyak 14 trayek, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Angkutan Trayek (Angkutan Perdesaan) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

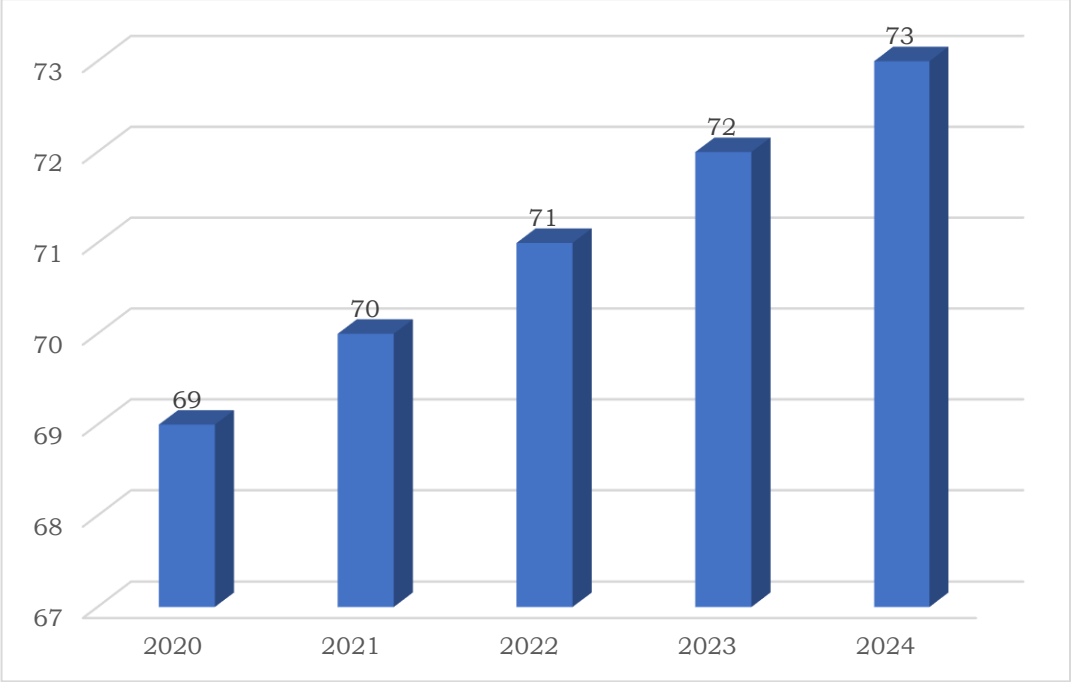
No	Trayek	Rute Trayek	Kapasitas	Jumlah Kendaraan	Nama Perusahaan
1	Jalur A	Bejen-Papahan-Palur	12	63	Kop Karanganyar Jaya
2	Jalur B	Bejen-Jongke-Tasikmadu-Nlarang-Kebakkramat-Palur	12	5	Kop Karanganyar Jaya
3	Jalur D	Bejen-Jongke-Pegadaian-RSU. Jengglong-Beji-Kelijirak-Gunung Watu-Mojoroto-Mojogedang-Sambirejo-Karangpandan	12	1	Kop Karanganyar Jaya
4	Jalur E	Jongke-Pegadaian-Bejen-Ngrawoh-Nongo-Gantiwarno-Klangon-Jloko-Matesih	12	12	Kop Karanganyar Jaya
5	Jalur F	Jongke-Pegadaian-Siwaluh-Songglong-Gembong-Sambirejo-Jumantono-Sringin-Matesih	12	2	Kop Karanganyar Jaya
6	Jalur G	Karangpandan-Gerdu-Gribangun-Matesih-Plaosan	12	8	Kop Roda Manunggal
7	Jalur G2	Matesih-Plaosan	12	1	Kop Roda Manunggal
8	Jalur L	Jongke-Jengglong-Dawon-Gaum-Bejen-Popongan-Delingan-Ngepos SDN 1 Bangsri-SMAN Karangpandan	12	1	Kop Sari Jati
9	Jalur N	Karangpadan-Jikut-Pandanamon-Dukuh	12	21	Kop Sari Jati
10	Perdesaan	Karanganyar (Terminal Tegal Gede-Terminal Bejen)-Jumapolo-Jatioso/Jatipuro	16	7	Koppakar
11	Perdesaan	Karangpandan-Kemuning-Ngargoyoso-Batujamus/Kerjo	16	53	Kop Sarwo Rukun dan Koppakar
12	Perdesaan	Karanganyar-Tunggal-Matesih-Karanglo-Tawangamangu	16	20	Kop Roda Manunggal
13	Perdesaan	Karanganyar-Mojogedang-Batu Jamus-Sambirejo	16	19	Koppakar
14	Perdesaan	Jenawi (Bolong)-Sambirejo-Sragen	16	17	Kop Ageng Wahyu

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks ini berada di angka 69, kemudian naik menjadi 70 pada tahun 2021 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 73 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya

berkelanjutan dalam perbaikan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Karanganyar, yang kemungkinan melibatkan peningkatan infrastruktur, pemeliharaan rutin, serta optimalisasi distribusi air untuk sektor pertanian. Sistem irigasi yang semakin baik sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian, mengingat Kabupaten Karanganyar memiliki sektor pertanian yang cukup dominan.

Konsistensi peningkatan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan dan efisiensi pengairan, yang berdampak positif pada stabilitas produksi pangan dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Dengan capaian ini, diharapkan Kabupaten Karanganyar dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas sistem irigasi dalam jangka panjang..



Gambar 2.60.
Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

6. Stabilitas Ekonomi Makro

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Disparitas harga penting bagi ekonomi daerah karena mempengaruhi daya beli, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi antar wilayah. Perbedaan harga yang besar dapat menciptakan ketimpangan ekonomi, mengurangi daya saing daerah, dan memperburuk akses masyarakat terhadap barang dan jasa penting. Selain itu, disparitas harga sering menunjukkan inefisiensi distribusi yang disebabkan oleh hambatan logistik dan kurangnya infrastruktur, yang pada akhirnya dapat menghambat investasi. Mengatasi masalah ini melalui peningkatan infrastruktur dan efisiensi pasar dapat mendorong integrasi ekonomi antar daerah, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata di seluruh wilayah.

Terdapat 13 Komoditas Bapok (Barang Pokok) yaitu Beras Medium, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan Sederhana, Minyak Goreng Kemasan Sederhana, Daging Sapi Paha Belakang, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Tepung Terigu, Kedelai Impor, Cabe Merah Keriting, Cabe Rawit Merah, Bawang Merah, Bawang Putih Impor Kating, Ikan Kembung. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi

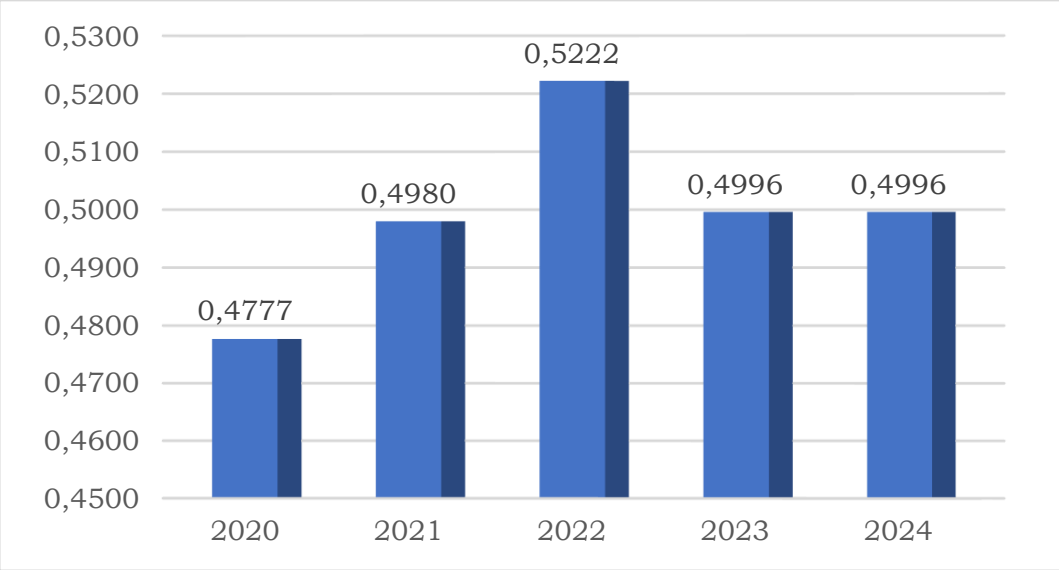
sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah.

Tabel 2.30.
Disparitas Harga 13 Komoditas Barang Pokok
Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2024

No	Komoditas	2022	2023	2024
1	Beras Medium	±0,01	±0,01	±0,01
2	Gula Pasir	±0,02	±0,03	±0,03
3	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	±0,08	±0,07	±0,07
4	Daging Sapi Paha Belakang	±0,04	±0,06	±0,06
5	Daging Ayam Ras	±0,04	±0,05	±0,05
6	Telur Ayam Ras	-	-	-
7	Tepung Terigu	-	-	-
8	Kedelai Impor	±0,05	±0,07	±0,07
9	Cabe Merah Keriting	±0,01	±0,09	±0,09
10	Cabe Rawit Merah	±0,05	±0,06	±0,06
11	Bawang Merah	±0,09	±0,06	±0,06
12	Bawang Putih Kating	±0,05	±0,04	±0,04
13	Beras Medium	±0,01	±0,01	±0,01

Sumber : DISDAGPERINNAKER Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan pada awal periode. Rasio ini naik dari 0,4777% pada 2020 menjadi 0,4980% pada 2021, kemudian mencapai puncaknya di 0,5222% pada 2022. Namun, pada 2023 dan 2024, rasio tersebut kembali menurun ke angka 0,4996%. Meskipun fluktuasinya tidak besar, secara umum kontribusi pajak daerah terhadap PDRB masih tergolong rendah, mengindikasikan potensi yang belum sepenuhnya tergarap dalam optimalisasi pendapatan asli daerah. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pemungutan pajak, memperluas basis pajak, dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2.61.
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

Sumber : BKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Karanganyar menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun

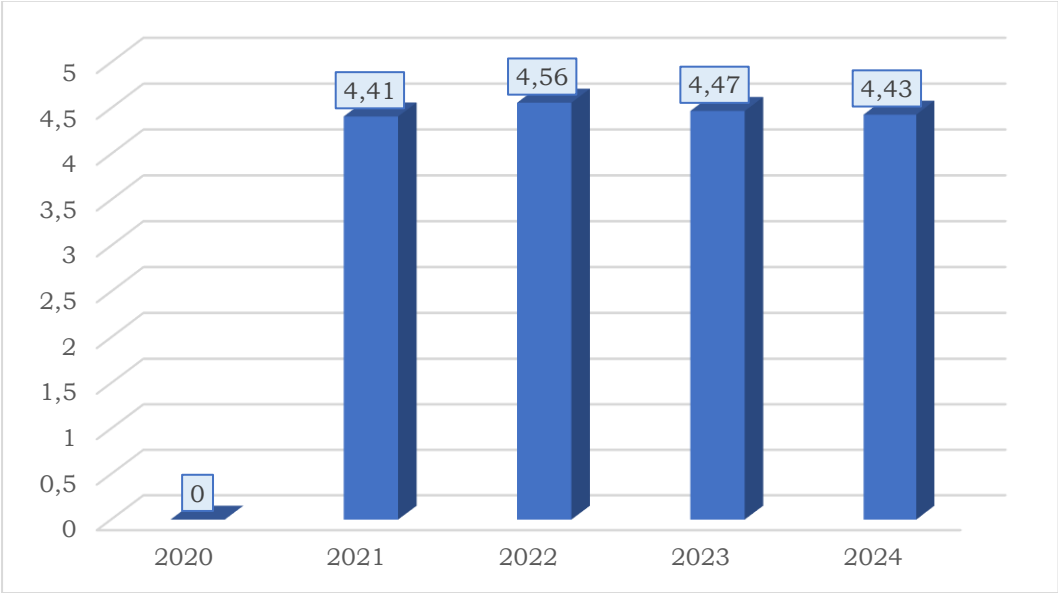
2022, indeks ini tercatat sebesar 49,66, kemudian meningkat menjadi 66,55 pada tahun 2023, dan mencapai angka 99,50 pada tahun 2024. Peningkatan yang drastis ini mencerminkan adanya upaya yang intensif dalam perbaikan sistem hukum, baik dari segi regulasi, transparansi, maupun efektivitas penegakan hukum di daerah tersebut.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap lonjakan indeks ini kemungkinan meliputi perbaikan dalam kebijakan hukum, peningkatan kapasitas aparatur hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung reformasi hukum. Selain itu, inovasi dalam pelayanan hukum dan penerapan kebijakan yang lebih inklusif serta berbasis teknologi juga dapat menjadi pendorong utama. Dengan pencapaian indeks yang mendekati sempurna pada tahun 2024, Kabupaten Karanganyar telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Karanganyar berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pelayanan publik memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk aspek transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Indeks ini digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan, mengidentifikasi kendala atau kelemahan dalam sistem pelayanan, serta merumuskan kebijakan yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya indeks ini, pemerintah dapat mengetahui sektor pelayanan mana yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, indeks ini tercatat sebesar 4,41 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,56, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2023, indeks sedikit menurun menjadi 4,47 dan kembali mengalami penurunan kecil pada tahun 2024 dengan angka 4,43.

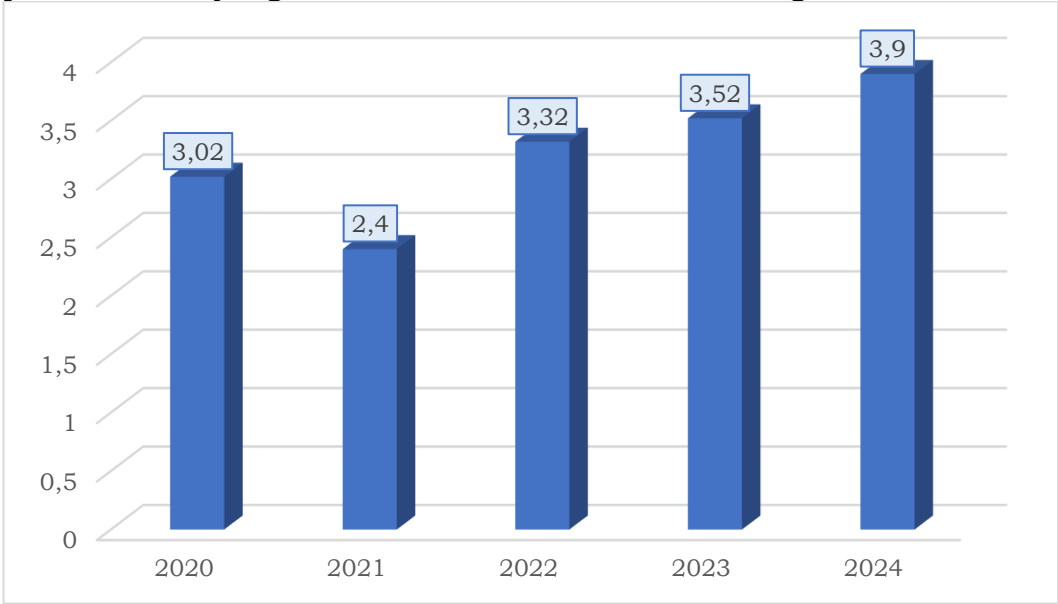
Meskipun terdapat sedikit fluktuasi dalam dua tahun terakhir, secara keseluruhan indeks pelayanan publik tetap berada pada angka yang tinggi, mencerminkan adanya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Kenaikan pada tahun 2022 dapat menunjukkan keberhasilan berbagai inisiatif dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, seperti digitalisasi layanan atau peningkatan kapasitas aparatur. Penurunan kecil pada tahun 2023 dan 2024 perlu menjadi perhatian agar tren peningkatan dapat dipertahankan. Evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi ini perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan publik terus berkembang secara optimal di masa mendatang.



Gambar 2.62.
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : Setda Kabupaten Karanganyar, 2025

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks ini tercatat sebesar 3,02, namun mengalami penurunan menjadi 2,4 pada tahun 2021. Setelah itu, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 3,32, kemudian naik lagi menjadi 3,52 pada tahun 2023, dan mencapai 3,9 pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Perbaikan indeks ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi, serta implementasi kebijakan yang mendukung digitalisasi layanan pemerintahan. Dengan tren positif ini, Kabupaten Karanganyar menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan berbasis teknologi.



Gambar 2.63.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024
Sumber : Kominfo Kabupaten Karanganyar, 2025

Indeks Integritas Nasional Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, indeks ini berada pada angka 75,5, kemudian meningkat menjadi 78 pada tahun 2022, dan mencapai 79,07 pada tahun 2023.

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Kenaikan indeks dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penguatan regulasi antikorupsi, peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat sipil negara terhadap pentingnya integritas, serta implementasi sistem pengawasan yang lebih efektif. Dengan tren positif ini, Kabupaten Karanganyar menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Stabilitas ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kondusifitas wilayah. Kondusifitas wilayah dilihat dari konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Karanganyar. Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Konflik tersebut dilatarbelakangi karena adanya sekelompok masyarakat yang hidup di daerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung sehingga memicu munculnya konflik antara kelompok masyarakat dengan budaya berbeda. Upaya penanganan/pengendalian konflik SARA ada berbagai macam, diantaranya ada tindak pidana yang masuk kedalam tahap penghentian, dan program penguatan pendidikan karakter yang masuk ke dalam tahap pencegahan. Konflik sara di Kabupaten Karanganyar yang terjadi pada tahun 2018-2019 sebanyak satu kasus. Selanjutnya sampai di tahun 2022 tidak ditemukan lagi adanya kasus sara di Kabupaten Karanganyar.

Kasus konflik SARA di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2020 hingga 2024, tidak ditemukan kasus SARA. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar kelompok telah berjalan dengan baik.

Penurunan kasus ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberagaman, efektivitas program sosialisasi dan edukasi mengenai toleransi, serta langkah preventif yang diambil oleh pihak berwenang dalam meredam potensi konflik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar telah berhasil menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan kondusif, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas sosial guna mencegah potensi konflik di masa depan.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 mencapai skor 3,43, yang mencerminkan tingkat daya saing daerah berdasarkan beberapa pilar utama. Dari skor tersebut, terdapat variasi skor dalam berbagai aspek yang memengaruhi daya saing. Pilar dengan skor tertinggi adalah Pilar 10 (4,57), yang menunjukkan kekuatan Karanganyar dalam aspek pasar, sementara pilar dengan skor terendah adalah Pilar 9 (2,24), yang mengindikasikan tantangan dalam sektor tersebut. Selain itu, ekosistem inovasi (Pilar 12) memiliki skor 3,36, yang cukup baik tetapi masih bisa ditingkatkan untuk mendorong inovasi yang lebih kuat di daerah tersebut. Nilai kapabilitas inovasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 mencapai **2,61** yang berada dalam kategori **cukup**. Capaian ini mencerminkan bahwa daerah memiliki kemampuan dasar dalam mendorong dan mengelola inovasi, meskipun masih diperlukan

penguatan di berbagai aspek, seperti peningkatan kualitas SDM, kolaborasi antarsektor, serta pemanfaatan teknologi informasi. Upaya berkelanjutan tetap dibutuhkan agar kapabilitas inovasi dapat meningkat menuju kategori baik, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan pelayanan publik yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, skor IDSD 3,43 menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar berada pada tingkat daya saing yang cukup baik, tetapi masih memerlukan perbaikan di beberapa sektor, terutama dalam lingkungan pendukung dan aspek pasar yang memiliki skor relatif rendah. Upaya peningkatan dapat difokuskan pada penguatan kebijakan inovasi, perbaikan lingkungan bisnis, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas guna meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

4. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah
1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a. Pendidikan

Capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat positif dan konsisten. Tingkat partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam PAUD terus berada di atas 98%, menandakan akses pendidikan usia dini yang luas dan merata. Sementara itu, partisipasi pendidikan dasar (usia 7–12 tahun) dan menengah pertama (usia 13–15 tahun) mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut, mencerminkan keberhasilan dalam menjamin pendidikan dasar yang wajib dan merata. Selain itu, partisipasi warga usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam program pendidikan kesetaraan juga mengalami peningkatan signifikan, dari 79,34% pada 2020 menjadi 90,82% pada 2024. Capaian ini menunjukkan upaya nyata pemerintah daerah dalam menjangkau kelompok rentan dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan layanan pendidikan, baik formal maupun non-formal.

Tabel 2.31.
Capaian Pembangunan Pendidikan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	98,00	98,85	98,93	98,82	98,95
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	%	79,34	84,92	90,38	90,81	90,82

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						

Sumber : Disdikbud Kabupaten Karanganyar, Tahun 2025

b. Kesehatan

Capaian pembangunan kesehatan Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten dalam penyediaan layanan kesehatan esensial bagi seluruh kelompok penduduk. Seluruh indikator pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah, serta kelompok usia produktif dan lanjut usia mengalami capaian mendekati atau mencapai 100%, mencerminkan komitmen kuat terhadap pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup. Selain itu, cakupan pelayanan terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, serta pelayanan kesehatan jiwa dan penyakit menular seperti TBC dan HIV juga menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan yang maksimal. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan tetap di atas 1, yang menunjukkan kecukupan kapasitas fasilitas, dan persentase rumah sakit rujukan terakreditasi meningkat signifikan dari 87,5% pada 2020 menjadi 100% pada 2024. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan sistem pelayanan kesehatan di Karanganyar yang solid, merata, dan berkualitas, serta siap mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Tabel 2.32.
Capaian Pembangunan Kesehatan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1,01	1,04	1,00	1,10	1,10
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	87,50	87,50	87,50	88,89	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang	%	97,44	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	88,98	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	96,46	100,00	100,00	100,00
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	96,59	100,00	100,00	100,00
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinkes Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Capaian pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek infrastruktur dasar dan pengelolaan ruang. Akses rumah tangga terhadap air minum layak melalui SPAM dan sumber bukan jaringan perpipaan terlindungi meningkat dari 98,74% (2020) menjadi 99,9% (2024), mencerminkan perbaikan pelayanan air bersih. Begitu pula dengan layanan pengolahan air limbah domestik yang stabil di atas 98%. Tingkat kemantapan jalan meningkat dari 72% menjadi 85,3%, menunjukkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang berkelanjutan. Rasio kepatuhan IMB serta pengawasan proyek tanpa kecelakaan konstruksi yang konsisten di angka 100% menandakan kepatuhan tinggi terhadap regulasi tata ruang dan

keselamatan kerja. Selain itu, kompetensi SDM teknis juga mengalami peningkatan, dengan rasio tenaga bersertifikat naik dari 91% pada 2021 menjadi 93% pada 2024. Rasio cakupan jaringan irigasi yang mulai terdata pada 2024 sebesar 73% juga menunjukkan arah positif terhadap pengelolaan sumber daya air. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan tata kelola infrastruktur yang makin tertata, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memperhatikan aspek keberlanjutan.

Tabel 2.33.
Capaian Pembangunan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	NA	NA	NA	NA	73,00
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98,74	99,24	96,00	99,38	99,40
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,74	99,24	99,38	99,4	99,38
4	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	72,00	87,15	80,24	83,00	85,30
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	NA	91,00	91,00	92,00	93,00
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	NA	NA	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

d. Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Capaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan arah yang progresif, terutama dalam penanganan kawasan kumuh dan pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH). Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare yang ditangani meningkat dari 1,86% pada 2021 menjadi 39,91% pada 2024, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas permukiman. Penurunan jumlah unit RTLH juga

menunjukkan tren positif, meskipun perlahan, dari 4,7% pada 2021 menjadi 3,93% pada 2024. Selain itu, respons cepat dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana telah mencapai 100% sejak 2021. Sampai tahun 2024, Kabupaten Karanganyar telah memberi kontribusi untuk penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 1.089 unit.

Secara umum, capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang layak dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.34.
Capaian Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	NA	NA
			Tidak ada masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota				
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	NA	1,86	7,86	18,86	39,91
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,90	2,80	2,90	3,18	3,88

Sumber : DPUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Capaian pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan konsisten. Seluruh indikator layanan—mulai dari penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada, hingga layanan kebencanaan seperti informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta evakuasi korban bencana dan kebakaran—mencapai angka 100% setiap tahun. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah mampu menjaga stabilitas wilayah serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Selain itu, waktu tanggap penanganan kebakaran terus menunjukkan perbaikan signifikan dari 15 menit pada tahun 2020 menjadi hanya 11,02 menit pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan darurat. Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan tingginya kesiapsiagaan dan respons pelayanan publik dalam menjaga keamanan serta mitigasi risiko bencana di Karanganyar.

Tabel 2.35.
Capaian Pembangunan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan
Pelindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	15,00	13,49	14,46	12,73	11,02

Sumber : Satpol PP & BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

f. Sosial

Capaian pembangunan sosial di Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan. Sejak tahun 2021 hingga 2024, pemerintah daerah berhasil memastikan bahwa seluruh korban bencana alam dan sosial, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya secara penuh (100%). Meskipun data tahun 2020 tidak tersedia, konsistensi capaian 100% selama empat tahun berturut-turut mencerminkan keseriusan dan efektivitas pemerintah dalam perlindungan sosial serta tanggap darurat bencana di tingkat lokal. Capaian ini juga menjadi indikator penting atas komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada warga yang terabaikan, terutama dalam situasi darurat maupun kondisi sosial rentan.

Tabel 2.36.
Capaian Pembangunan Sosial Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota						
2	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinsos Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

2) **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**
a. **Tenaga Kerja**

Berdasarkan data capaian bidang ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan pada beberapa indikator strategis. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tenaga kerja mengalami kenaikan signifikan dari 75% (2020–2023) menjadi 100% pada tahun 2024. Begitu pula dengan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang meningkat dari sekitar 95% menjadi 98,80% pada 2024, menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal. Tingkat produktivitas tenaga kerja juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun sempat menurun sedikit pada tahun 2024.

Namun demikian, terdapat penurunan drastis pada indikator penting, yaitu persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak. Angka yang sebelumnya stabil di kisaran 84% turun menjadi hanya 8,30% pada tahun 2024. Penurunan ini cukup mencolok dan kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan dalam pelaporan data. Selain itu, persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan melalui layanan antar kerja juga mengalami penurunan dari sekitar 91% menjadi 79,74% pada tahun 2024. Meskipun beberapa capaian menunjukkan kemajuan, konsistensi dalam pencatatan dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan perlu diperkuat agar pembangunan bidang ketenagakerjaan tetap inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.37.
Capaian Pembangunan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	95,48	95,40	95,48	95,48	98,80
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	53.885.199,51	55.492.047,53	60.026.191,35	59.454.974,16	58.345.121,39

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	84,10	84,38	84,43	84,54	8,30
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	91,79	91,15	91,20	91,77	79,74

Sumber : Disdagperinaker Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

b. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Capaian pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam belanja langsung APBD mengalami peningkatan dari 7,75% pada tahun 2021 menjadi 8,7% pada tahun 2024, mencerminkan komitmen daerah dalam mengarusutamakan gender dalam pembangunan. Penanganan terhadap anak korban kekerasan menunjukkan hasil maksimal dengan capaian 100% sejak tahun 2021 hingga 2024, menandakan respons cepat dan efektif dari instansi terkait. Sementara itu, rasio kekerasan terhadap perempuan relatif stabil di kisaran 4 kasus per 100.000 penduduk perempuan, yang meskipun masih menunjukkan adanya kasus, tetap berada pada tingkat yang relatif rendah. Capaian ini mengindikasikan upaya perlindungan perempuan dan anak di Karanganyar telah berjalan dengan cukup baik dan terus diarahkan pada penguatan sistem perlindungan serta pengarusutamaan gender.

Tabel 2.38.
Capaian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	NA	7,75	8,04	8,69	8,7
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	NA	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per	/100.000 penduduk	NA	4,02	4,0	3,97	4,2

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	100.000 penduduk perempuan)						

Sumber : DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

c. Pangan

Capaian pembangunan pangan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 sebesar 17,90%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya ketahanan pangan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh intervensi program strategis atau perbaikan sistem distribusi dan penyimpanan pangan di Kabupaten Karanganyar. Capaian tahun 2024 ini dapat menjadi indikator awal keberhasilan kebijakan pembangunan pangan.

Tabel 2.39.
Capaian Pembangunan Pangan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Cadangan Pangan	%	NA	NA	NA	NA	17,90

Sumber : Dispertanpp Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

d. Pertanahan

Capaian pembangunan bidang pertanahan di Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan performa yang sangat baik dan konsisten. Seluruh indikator capaian sejak tahun 2021 hingga 2024 mencapai angka 100%, mencakup pemanfaatan tanah sesuai peruntukan, penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, penyediaan tanah untuk masyarakat, serta penanganan sengketa tanah melalui mediasi. Hal ini mencerminkan tata kelola pertanahan yang efektif, kepatuhan terhadap rencana tata ruang, serta komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk kepentingan umum dan pelayanan masyarakat. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi potensi konflik pertanahan di masa mendatang.

Tabel 2.40.
Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

e. Lingkungan Hidup

Capaian pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2020–2024 menunjukkan tren perbaikan meskipun masih memerlukan penguatan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami fluktuasi, sempat menurun pada 2021 dan 2022, namun berhasil meningkat signifikan menjadi 70,12 pada 2024. Capaian pengelolaan sampah meningkat secara konsisten setiap tahun, dari 36% pada 2020 menjadi 40% pada 2024, mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam pengelolaan limbah. Sementara itu, tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan juga mengalami peningkatan dari 70,5% (2020) menjadi 76,9% (2024). Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan, namun masih diperlukan intervensi lebih kuat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kepatuhan lingkungan secara menyeluruh.

Tabel 2.41.
Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	67,39	64,04	63,22	65,93	70,12
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	70,50	74,20	72,90	76,60	76,90

Sumber : DLH Kabupaten Karanganyar tahun 2025

f. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Capaian pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, khususnya dalam pencatatan dokumen vital seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang seluruhnya telah mencapai angka 100% secara konsisten. Capaian perekaman KTP elektronik juga tergolong tinggi, berada di atas 97% setiap tahun, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan layanan dasar identitas penduduk tetap tersedia secara luas. Terkait penguatan transformasi digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah mendorong peningkatan Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pelayanan aktivasi IKD langsung di tingkat

desa/kelurahan oleh Admin Paklay. Setiap pengguna layanan yang mengurus dokumen kependudukan secara offline pun diwajibkan untuk melakukan aktivasi IKD, sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan.

Sementara itu, capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan lonjakan signifikan, dari 33,06% pada tahun 2020 menjadi 69,23% pada 2024, melampaui target nasional sebesar 60%. Cakupan ini telah masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Karanganyar dan menjadi salah satu indikator keberhasilan utama. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, Disdukcapil telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi seperti perbankan, objek wisata, dan sekolah agar KIA dapat dimanfaatkan secara fungsional. Selain itu, pelayanan pendaftaran KIA kini dapat dilakukan tidak hanya di kantor Disdukcapil, tetapi juga melalui Admin Paklay di desa/kelurahan serta pelayanan langsung di kecamatan se-Kabupaten Karanganyar. Meskipun secara umum kinerja sangat baik, namun perlu menjadi perhatian bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah mengalami tren penurunan sejak 2021 dan stagnan di angka 64,28% pada 2023–2024. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam hal penguatan integrasi dan interoperabilitas data kependudukan lintas sektor pemerintahan.

Tabel 2.42.
Capaian Pembangunan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,58	99,36	99,37	97,89	99,50
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	33,06	66,13	65,2	66,38	69,23
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	93,82	96,33	95,55	98,94	99,21
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	70,73	70,73	66,67	64,28	64,28
5	Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Kepemilikan Akta Perceraian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kepemilikan Akta Kematian Terlapor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan tren positif yang signifikan, khususnya dalam peningkatan status desa mandiri. Persentase desa mandiri meningkat dari 3,70% pada tahun 2020 menjadi 14,8% pada tahun 2024, mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan desa yang berkelanjutan dan efektif. Lonjakan terbesar terjadi antara tahun 2023 dan

2024, yang mengindikasikan adanya intervensi strategis atau percepatan program yang berhasil mendorong kemajuan kapasitas desa dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih menyeluruh.

Tabel 2.43.

Capaian Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Status Desa Mandiri	%	3,70	4,30	4,90	5,56	14,8

Sumber : Dispermasdes Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

h. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Capaian pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Karanganyar pada periode 2020–2024 menunjukkan arah yang cukup menggembirakan, terutama dalam penurunan angka kelahiran total (TFR). TFR menurun signifikan dari 2,53 pada tahun 2020 menjadi 1,94 pada tahun 2024, yang berarti rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa suburnya semakin mendekati angka ideal. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan program pengendalian penduduk yang diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga. Namun, capaian pada indikator lainnya menunjukkan dinamika yang perlu dicermati. Meskipun persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) berhasil ditekan dari 12,51 persen menjadi 8,94 persen, penggunaan kontrasepsi modern (mCPR) justru mengalami fluktuasi dan menurun dari 75,15 persen pada 2021 menjadi 70,22 persen pada 2024. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh preferensi metode kontrasepsi tradisional atau hambatan akses terhadap layanan KB.

Tabel 2.44.

Capaian Pembangunan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,53	2,46	2,22	2,16	1,94
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	74,74	75,15	71,57	73,22	70,22
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	12,51	12,21	13,12	12,19	8,94

Sumber : DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

i. Perhubungan

Capaian pembangunan perhubungan di Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Rasio konektivitas pada tahun 2020 hingga 2023 tetap stabil di angka 67, kemudian mengalami peningkatan menjadi 68,00 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan atau penurunan efisiensi dalam keterhubungan jaringan transportasi, yang dapat berdampak pada mobilitas penduduk dan distribusi barang. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena konektivitas yang baik merupakan salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, nilai V/C Ratio (*Volume to Capacity Ratio*) pada jalan kabupaten/kota menunjukkan

tren fluktuatif. Penurunan rasio dari 0,80 pada 2020 menjadi 0,44 pada 2023 sempat menggambarkan berkurangnya kepadatan lalu lintas, namun pada tahun 2024 kembali naik ke angka 0,87. Kenaikan ini mengindikasikan potensi kemacetan yang mulai muncul kembali, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan atau manajemen lalu lintas yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera meninjau penyebab menurunnya konektivitas serta meningkatnya V/C Ratio, dan merumuskan kebijakan transportasi yang adaptif dan terintegrasi untuk mendukung kelancaran lalu lintas di masa mendatang.

Tabel 2.45.
Capaian Pembangunan Perhubungan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas	indeks	67,00	67,00	67,00	67,00	68,00
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	ratio	0,80	0,73	0,66	0,44	0,87

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

j. Komunikasi dan Informatika

Capaian pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2020–2024 menunjukkan stabilitas yang cukup baik, khususnya dalam aspek infrastruktur jaringan. Seluruh perangkat daerah tercatat 100 persen terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kesiapan infrastruktur digital yang merata di lingkungan pemerintahan daerah, yang menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis elektronik. Sementara itu, indikator keterjangkauan informasi publik kepada masyarakat juga menunjukkan capaian yang tinggi, meskipun fluktuatif dalam kisaran sempit. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi dan memahami kebijakan serta program prioritas pemerintah selalu berada di atas 92 persen, menandakan bahwa komunikasi publik telah berjalan dengan cukup efektif.

Tabel 2.46.
Capaian Pembangunan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	92,01	93,07	92,52	93,19	92,91

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

k. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Capaian pembangunan sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Karanganyar mulai menunjukkan kemajuan yang dapat diukur sejak tahun 2023. Pada tahun tersebut, persentase koperasi yang berkualitas mencapai 64,52 persen dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 64,77 persen pada tahun 2024. Ini mengindikasikan adanya upaya konsisten untuk memperbaiki tata kelola, transparansi, dan daya saing koperasi di daerah. Meskipun peningkatannya belum signifikan, tren positif ini mencerminkan adanya intervensi atau pembinaan yang mulai membuahkan hasil. Sementara itu, capaian dalam mendorong usaha mikro menjadi wirausaha juga memperlihatkan tren yang menjanjikan. Pada tahun 2023, 23,65 persen usaha mikro tercatat berkembang menjadi wirausaha, dan naik menjadi 26,85 persen di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha kecil yang mampu naik kelas, baik dari sisi kapasitas produksi, pemasaran, maupun legalitas usaha.

Tabel 2.47.

**Capaian Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024**

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	NA	NA	NA	64,52	64,77
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	NA	NA	NA	23,65	26,85

Sumber : Diskuktransesdm Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

1. Penanaman Modal

Capaian pembangunan penanaman modal di Kabupaten Karanganyar mulai dapat dievaluasi sejak tahun 2022, ketika data persentase peningkatan investasi tersedia. Pada tahun 2022, peningkatan investasi tercatat sebesar 6,36 persen, kemudian melonjak tajam menjadi 18,20 persen di tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 16,98 persen pada tahun 2024. Meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun terakhir, tren ini secara umum menunjukkan geliat positif dalam iklim investasi daerah, yang kemungkinan didorong oleh perbaikan layanan perizinan, promosi investasi, dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung. Kenaikan tajam pada tahun 2023 bisa mencerminkan keberhasilan program percepatan investasi, termasuk penguatan kemudahan berusaha dan digitalisasi layanan di sektor penanaman modal. Meski demikian, penurunan pada tahun 2024 perlu dicermati agar tidak menjadi tren berkelanjutan.

Tabel 2.48.

**Capaian Pembangunan Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024**

No.	Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	NA	NA	6,36	18,20	16,98

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri melonjak tajam dari hanya 0,50 persen pada tahun 2020 menjadi lebih dari

51 persen pada 2021 dan 2022, yang kemudian relatif stabil hingga 2023. Namun, pada 2024 mengalami penurunan menjadi 48,62 persen. Penurunan ini perlu menjadi perhatian, karena bisa mencerminkan menurunnya minat atau terbatasnya akses dan dukungan terhadap kewirausahaan pemuda. Sementara itu, partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial juga memperlihatkan fluktuasi tajam. Setelah mengalami peningkatan drastis dari 5,62 persen pada tahun 2020 menjadi 70,20 persen di 2023, angka ini justru anjlok ke 8,58 persen di 2024. Penurunan ini patut dicermati, karena keterlibatan pemuda dalam organisasi sangat penting untuk pembangunan karakter, kepemimpinan, dan jaringan sosial. Di sisi lain, prestasi olahraga menunjukkan tren positif hingga puncaknya pada 2023 dengan 194 medali/unit, meskipun menurun menjadi 81 pada 2024. Hal ini tetap menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan awal periode, dan mencerminkan hasil dari pembinaan atlet serta peningkatan sarana olahraga yang telah dilakukan.

Tabel 2.49.
Capaian Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,50	51,64	51,64	51,75	48.62
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	5,62	51,30	52,00	70,20	8.58
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Unit/Medali	4,00	23,00	139,00	194,00	81,00

Sumber : Disparpora Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

n. Statistik

Capaian pembangunan statistik di Kabupaten Karanganyar pada periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang baik. Meski belum semua perangkat daerah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah maupun dalam melakukan evaluasi pembangunan selama lima tahun berturut-turut, namun dari tahun 2020 hingga 2024 terlihat peningkatan persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah maupun dalam melakukan evaluasi tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen tinggi pemerintah daerah terhadap penggunaan data yang berbasis bukti (*evidence-based planning*) dalam proses perencanaan pembangunan.

Tabel 2.50.
Capaian Pembangunan Statistik Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	60	62	65	68	70
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan	%	60	62	65	68	70

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah						

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

o. Persandian

Capaian pembangunan urusan persandian di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan. Hal tersebut membuktikan semakin baiknya tingkat keamanan indormasi pemerintah daerah.

Tabel 2.51.
Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	55	61,2	63	63	62,3

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

p. Perpustakaan dan Kearsipan

Capaian pembangunan urusan perpustakaan di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2020–2024 menunjukkan tren positif dalam beberapa aspek utama. Tingkat kegemaran membaca masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari nilai 67,31 pada 2020 menjadi 71,25 di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan akses dan minat baca masyarakat, yang kemungkinan didukung oleh fasilitas perpustakaan, program literasi, serta kegiatan promosi membaca. Namun, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dengan penurunan signifikan pada 2023 (66,57) setelah mencapai puncak di 2022 (89,99), dan naik kembali di 2024 (75,43). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan program literasi yang lebih stabil dan merata.

Di bidang kearsipan, capaian menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua indikator penting. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja telah mencapai 100 persen sejak 2021, yang berarti pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kearsipan secara optimal. Selain itu, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip juga mengalami kenaikan dari 50 persen di 2021 menjadi 83,33 persen di tahun 2023 dan 2024. Ini menandakan perbaikan tata kelola arsip sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan dokumentasi nasional.

Tabel 2.52.
Capaian Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	67,31	68,41	69,06	69,84	71,25
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	83,66	77,67	89,99	66,57	75,43
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan						
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	NA	50,00	58,30	83,33	83,33

Sumber : Disarpus Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

3) Urusan Pemerintahan Pilihan
a. Kelautan dan Perikanan

Capaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif. Total produksi perikanan—baik dari penangkapan maupun budidaya terus meningkat setiap tahunnya, dari 2.353.553 kg pada tahun 2020 menjadi 2.467.977 kg pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya keberhasilan dalam mempertahankan produktivitas sektor perikanan melalui penguatan budidaya, pengelolaan sumber daya perairan yang baik, serta dukungan terhadap pelaku usaha perikanan lokal.

Tabel 2.53.

Capaian Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Kg	2.353.553	2.388.247	2.419.713	2.453.016	2.467.977

Sumber : Dispertanpp Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

b. Pariwisata

Capaian pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar pada periode 2020–2024 menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan pascapandemi COVID-19. Pada awal periode, angka pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara mengalami penurunan tajam, masing-masing hingga -92,93% dan -39,94% pada tahun 2020. Namun, sejak 2022, kedua indikator tersebut menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan wisatawan mancanegara melonjak hingga 226,8%, dan wisatawan nusantara tumbuh sebesar 28,67%. Meskipun pada tahun 2024 laju pertumbuhannya menurun, tren ini tetap mencerminkan arah yang positif. Tingkat hunian akomodasi juga menunjukkan perbaikan pada 2022 dan 2023, meski kembali menurun di 2024 menjadi 30,58%, yang dapat menjadi perhatian khusus dalam menjaga minat tinggal wisatawan.

Dari sisi ekonomi, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD mulai menunjukkan dampak yang nyata pada dua tahun terakhir. Pada 2023, sektor ini menyumbang 3,66% terhadap PDRB harga berlaku dan

meningkat menjadi 4,11% di tahun 2024. Sementara itu, kontribusinya terhadap PAD juga melonjak tajam dari 0,34% pada 2023 menjadi 7,81% di 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata mulai menjadi penggerak ekonomi lokal yang potensial.

Tabel 2.54.
Capaian Pembangunan Pariwisata Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-92,93	-98,39	226,8	136,48	55,13
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-39,94	2,13	28,67	8,08	16,71
3	Tingkat hunian akomodasi	%	38,08	NA	NA	NA	30,58
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	NA	NA	NA	3,66	4.11
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	NA	NA	NA	0,34	7,81

Sumber : Disparpora Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

c. Pertanian

Capaian pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan adanya kemajuan, meskipun data yang tersedia belum sepenuhnya lengkap pada awal periode. Produktivitas pertanian yang baru tercatat pada tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 7,69 ton per hektar per tahun untuk berbagai komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, dan lainnya. Angka ini dapat menjadi titik awal evaluasi produktivitas pertanian daerah dan menunjukkan potensi yang cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata nasional untuk beberapa komoditas.

Sementara itu, penanganan penyakit hewan menular memperlihatkan dinamika yang sangat fluktuatif. Pada 2020 dan 2022, terjadi penurunan kejadian penyakit secara signifikan (48,72% dan 51,60%), tetapi tahun 2021 dan 2023 justru menunjukkan peningkatan jumlah kasus (ditandai dengan angka negatif -46,55% dan -59,57%). Namun, pada tahun 2024, terlihat lonjakan capaian sebesar 236,84%, yang menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam pengendalian penyakit hewan menular. Hal ini dapat mencerminkan keberhasilan intervensi, peningkatan kewaspadaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan vaksinasi atau karantina hewan yang lebih efektif.

Tabel 2.55.
Capaian Pembangunan Pertanian Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi,	Ton/Ha/Tahun	NA	NA	NA	NA	7,69

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, porang)						
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	48,72	-46,55	51,60	-59,57	236,84

Sumber : Dispertanpp Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

d. Perdagangan

Capaian pembangunan sektor perdagangan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang konsisten dan positif. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan terus meningkat dari 87,66% pada 2020 hingga mencapai 100% pada 2023 dan 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha serta efektivitas pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi indikator penting dalam menciptakan iklim usaha yang tertib, transparan, dan berdaya saing.

Di sisi lain, kinerja realisasi pupuk juga menunjukkan stabilitas yang tinggi dengan angka yang terus meningkat secara bertahap dari 95,87% di tahun 2020 menjadi 97,20% pada 2024. Ini mengindikasikan distribusi pupuk yang relatif lancar dan sesuai kebutuhan. Selain itu, persentase alat ukur bertanda tera sah juga mengalami peningkatan kecil namun konsisten dari 87,25% menjadi 88,03% selama periode lima tahun. Meskipun peningkatannya terbatas, keberlanjutan dalam tera ulang alat ukur ini penting untuk menjamin perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi perdagangan. Perlu upaya lanjutan untuk menjaga dan mempercepat kemajuan ini, terutama dalam pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen.

Tabel 2.56.
Capaian Pembangunan Perdagangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	87,66	89,41	89,43	100,00	100,00
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	95,87	96,70	97,10	97,10	97,20
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	87,25	87,52	87,85	87,92	88,03

Sumber : Disdagperinaker Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

e. Perindustrian

Capaian pembangunan perindustrian di Kabupaten Karanganyar selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) mengalami fluktuasi tajam, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 76,50 persen, namun menurun drastis menjadi 28,85 persen pada tahun 2021 dan berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 34,68 persen di tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan IKM, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak pandemi COVID-19 serta tantangan dalam peningkatan daya saing industri lokal. Sementara itu, persentase pencapaian sasaran pembangunan industri menunjukkan tren positif, meningkat dari 60 persen pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 92,73 persen pada tahun 2024, yang mencerminkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pembangunan industri sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RIPIN dan RPIK.

Kinerja pengawasan dan pemantauan izin usaha industri juga menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian 100 persen untuk pengawasan Izin Usaha Industri (IUI) besar dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) selama sebagian besar periode tersebut. Namun demikian, untuk pengawasan terhadap IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah dalam satu kabupaten/kota, data capaian baru tersedia pada tahun 2024 dengan angka 76,9 persen, yang menunjukkan perlunya penguatan pengawasan pada aspek ini. Di sisi lain, penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini sempat tercapai 100 persen selama tahun 2020 hingga 2023, namun menurun menjadi 72,48 persen pada tahun 2024. Hal ini menjadi catatan penting bahwa pengelolaan data dan transparansi informasi industri perlu diperkuat kembali untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik. Secara umum, meskipun capaian pembangunan sektor industri menunjukkan kemajuan di beberapa aspek strategis, tetap diperlukan peningkatan pada aspek pertumbuhan IKM dan pengelolaan informasi industri secara berkelanjutan.

Tabel 2.57.
Capaian Pembangunan Perindustrian Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	76,50	28,85	61,54	33,26	34,68
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	60,00	60,00	70,00	70,00	92,73
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	73,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	NA	NA	NA	76,9
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100,00	100,00	100,00	100,00	72,48

Sumber : Disdagperinnaker Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

4) Urusan Penunjang Urusan Pemerintah
a. Perencanaan dan Keuangan

Capaian pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan mengalami fluktuasi signifikan, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2022 (22,73), yang kemudian menurun di tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan belanja pegawai yang perlu dievaluasi lebih lanjut terkait efektivitasnya terhadap pelayanan publik. Sementara itu, Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung stabil dengan sedikit peningkatan dari 2,63% di tahun 2021 menjadi 3,17% pada tahun 2024, menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal meskipun pertumbuhannya masih terbatas. Beberapa indikator tata kelola keuangan daerah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai SAKIP terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mengalami peningkatan signifikan dari 58,94 pada tahun 2020 menjadi 85,74 di tahun 2024, yang menandakan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun, kapabilitas APIP justru mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan fungsi pengawasan internal. Meskipun begitu, opini laporan keuangan tetap konsisten memperoleh predikat WTP, yang mencerminkan bahwa laporan keuangan daerah disusun sesuai standar dan dianggap wajar oleh auditor.

Tabel 2.58.
Capaian Pembangunan Perencanaan dan Keuangan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	10,85	9,97	10,05	9,46	8,55
2	Rasio PAD	%	10,56	11,19	22,73	12,8	18,01
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,02	2,63	2,88	3,16	3,17
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,00	3,00	2,24	3,00	3,00
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Nilai	0,71	0,72	0,69	0,69	0,66
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	SAKIP	Nilai	67,00	68,13	68,67	68,98	69,31
8	IRB	Nilai	58,94	59,00	62,01	70,91	85,74
9	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	Nilai	68,88	66,74	51,85	78,46	(belum ada data)

Sumber : BKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

b. Pengadaan

Capaian pembangunan bidang pengadaan di Kabupaten Karanganyar tahun 2024 menunjukkan mulai diterapkannya pengukuran indikator kinerja secara lebih terstruktur. Pada tahun ini, sebesar 68,59% pengadaan dilakukan dengan metode kompetitif, yang mencerminkan upaya peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan mencapai 43,40%, menunjukkan bahwa hampir setengah dari total belanja daerah telah melalui proses pengadaan yang dapat diawasi dan dievaluasi secara sistematis. Sementara itu, persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta produk dari usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKM) tercatat sebesar 13,70%. Meskipun angkanya masih relatif rendah, capaian ini menjadi langkah awal yang positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta mendorong pelaksanaan kebijakan pengadaan yang berpihak pada produk dalam negeri dan pelaku usaha kecil. Secara keseluruhan, capaian tahun 2024 mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memperkuat sistem pengadaan yang kompetitif, akuntabel, dan inklusif.

Tabel 2.59.
Capaian Pembangunan Pengadaan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	NA	NA	NA	NA	68,59
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	NA	NA	NA	NA	43,40

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	NA	NA	NA	NA	13,70

Sumber : Setda Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

c. Kepegawaian

Capaian pembangunan kepegawaian di Kabupaten Karanganyar pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, khususnya dalam peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) di luar guru dan tenaga kesehatan. Rasio pegawai berpendidikan tinggi terhadap menengah/dasar mengalami peningkatan dari 154 pada tahun 2020 menjadi 182,4 pada tahun 2023 dan stabil di tahun 2024, mencerminkan peningkatan kualitas SDM secara umum. Namun, rasio pegawai fungsional justru mengalami penurunan drastis dari 82 persen di tahun 2020 menjadi hanya sekitar 21 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya strategi redistribusi atau reposisi pegawai agar struktur organisasi lebih efektif. Di sisi lain, rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi mengalami peningkatan sangat signifikan dari hanya 11 persen pada tahun 2020 menjadi hampir 98 persen pada tahun 2024, menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan kompetensi ASN melalui sertifikasi dan pelatihan teknis. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada tantangan dalam struktur jabatan, kualitas dan kompetensi individu ASN terus mengalami peningkatan positif.

Tabel 2.60.
Capaian Pembangunan Kepegawaian Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Angka	154	181	180,1	182,4	182,4
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	82,00	26,50	20,73	21,01	21,99
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11,00	62,89	78,57	82,44	97,89

Sumber : BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

d. Manajemen Keuangan

Capaian pembangunan manajemen keuangan Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang relatif stabil dan cukup baik. Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam APBD (*budget execution*) sebagian besar berada di atas 90%, yang menandakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja cukup optimal. Meski sempat menurun pada 2023 menjadi 84,77%, capaian ini kembali

meningkat di 2024 menjadi 93,9%, mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Di sisi lain, pengelolaan pendapatan asli daerah menunjukkan performa positif dengan realisasi PAD yang melebihi target anggaran, terutama pada tahun 2022 yang mencapai 116,74%.

Pengelolaan aset daerah juga menunjukkan konsistensi yang baik, dengan capaian 100% selama lima tahun berturut-turut, yang mencerminkan tata kelola aset yang tertib dan terdokumentasi dengan baik. Untuk aspek *cash management*, rasio anggaran sisa terhadap total belanja dari tahun sebelumnya menunjukkan kecenderungan menurun hingga 2023, yang bisa diartikan sebagai peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Namun, sedikit kenaikan pada 2024 menjadi 7,87% tetap perlu dimonitor agar tidak mengindikasikan sisa anggaran yang tidak terserap secara optimal. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar telah berupaya menjaga disiplin fiskal dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.61.
Capaian Pembangunan Manajemen Keuangan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	Indikator Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	92,02	91,98	93,4	84,77	93,9
2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	112,57	99,85	116,74	108,74	103,88
3	Assets Management	%	100	100	100	100	100
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,97	8,96	7,26	5,76	7,87

Sumber : BKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun anggaran berkenaan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

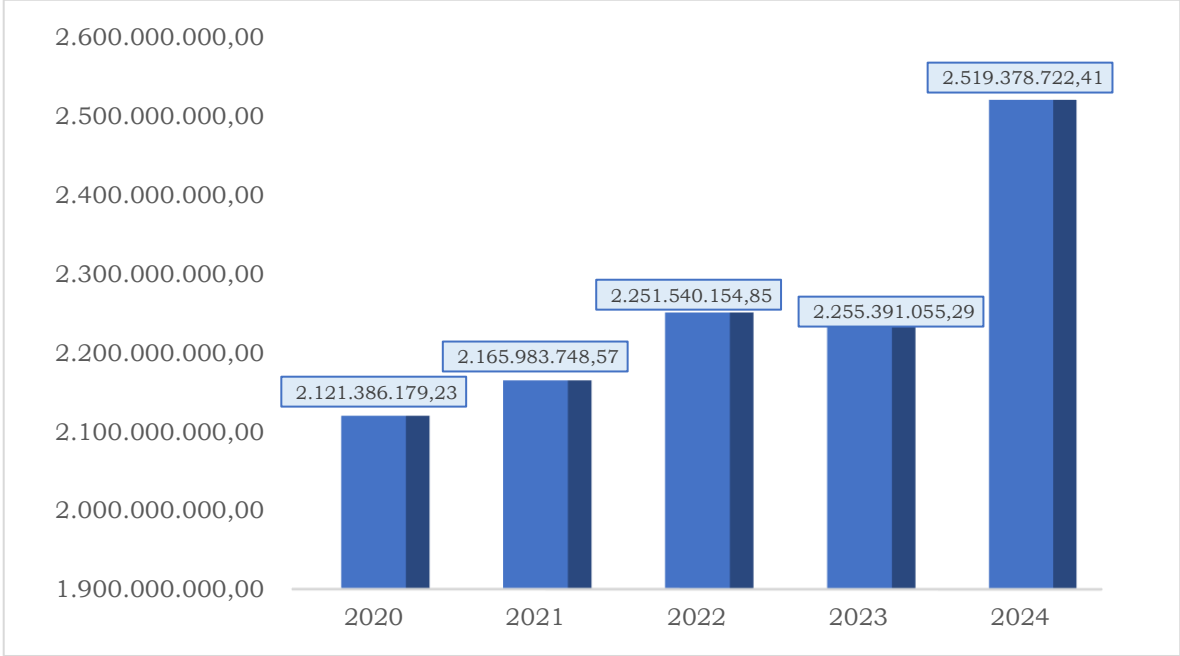
Analisis keuangan daerah merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada, diantaranya berupa analisis perbandingan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Analisis perkembangan keuangan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu perlu dilakukan analisis ratio keuangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Dengan analisis ini diharapkan dapat mengetahui kondisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

Analisis keuangan Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Besarnya kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan pelaksanaan APBD atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2.5.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, fluktuatif dari sebesar Rp. 2.121.386.179,23 pada Tahun 2020, menjadi Rp. 2.519.378.722,41 pada Tahun 2024. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar terlihat pada gambar berikut :



Gambar 2.64.
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024 (Rupiah)
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2025

Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 3,05 persen. Kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh rata-rata 3,82 persen, yang mencerminkan masih terbatasnya kemandirian fiskal daerah. Meski beberapa komponen PAD seperti pendapatan pajak daerah menunjukkan pertumbuhan moderat dan konsisten, pendapatan retribusi daerah mengalami lonjakan ekstrem sebesar 1.286,44 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kebijakan intensifikasi atau ekstensifikasi pemungutan retribusi tertentu atau adanya penerimaan besar bersifat non-reguler (misalnya, dari penyesuaian tarif atau penagihan tunggakan), sehingga tidak mencerminkan perbaikan struktural. Sebaliknya, kategori lain-lain PAD yang sah menunjukkan tren penurunan tajam sejak 2023, bahkan minus 76,04 persen di 2024, yang menunjukkan adanya ketidakpastian dalam sumber-sumber PAD alternatif. Kondisi ini mempertegas bahwa struktur PAD Karanganyar masih rentan dan belum stabil sebagai sumber pembiayaan daerah yang berkelanjutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar tahun 2024 telah mencakup pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ke depan, pada periode 2025–2029, hal ini akan menjadi salah satu strategi utama dalam upaya peningkatan PAD, melalui penguatan koordinasi dan sinergi antarpihak terkait guna mengoptimalkan pemungutan opsen PKB dan BBNKB secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tetap menjadi tulang punggung pendanaan daerah, meskipun juga mengalami volatilitas. Dana perimbangan tumbuh positif, tetapi komponen seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik berhenti disalurkan sejak 2022, yang dapat mengindikasikan perubahan kebijakan pusat, perubahan skema pembiayaan, atau penyesuaian berdasarkan kinerja dan kebutuhan daerah. Dana Insentif Daerah (DID) sempat anjlok tajam hingga -73,71% di 2023, namun melonjak 455,12% pada 2024, yang menunjukkan ketergantungan daerah terhadap performa indikator nasional atau *reward based* transfer yang tidak selalu dapat diprediksi. Transfer dari pemerintah provinsi bahkan mencatatkan pertumbuhan negatif drastis hingga -100% pada 2023, yang memperlihatkan menurunnya dukungan fiskal antar level pemerintahan. Secara umum, ketergantungan terhadap transfer tetap tinggi, namun tidak menjamin stabilitas anggaran karena sifatnya sangat bergantung pada alokasi dari pusat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Karanganyar untuk memperkuat basis PAD secara struktural dan berkelanjutan, sembari tetap menjaga kinerja pelayanan publik agar tetap layak mendapatkan insentif pusat.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 - 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

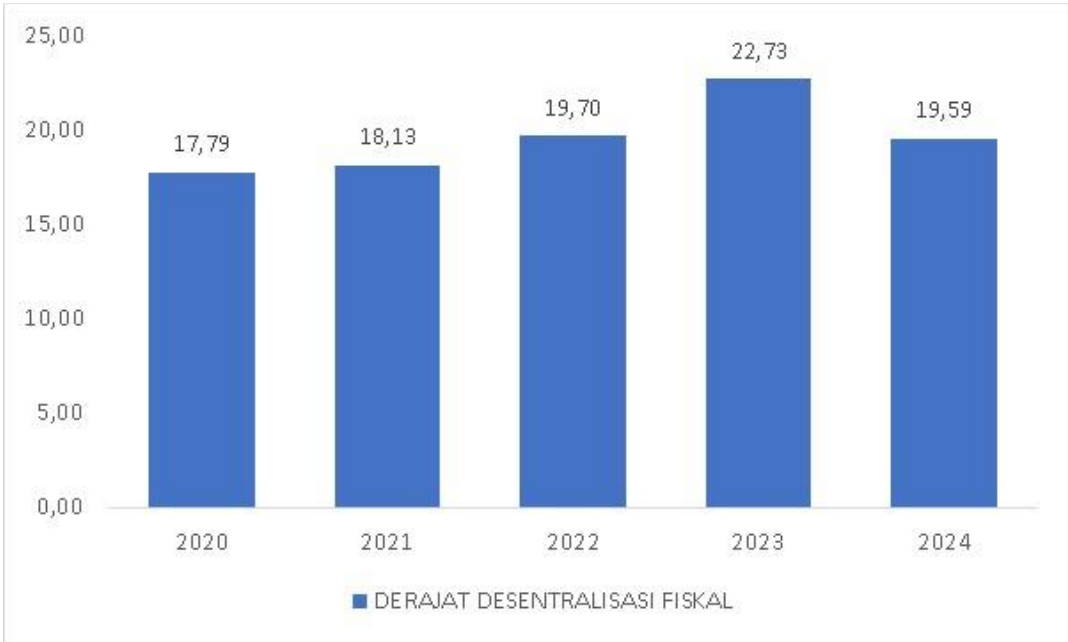
Tabel 2.62.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

Uraian	Pertumbuhan (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-0,79	10,91	19,94	-13,65	2,71	3,82
Pendapatan Pajak Daerah	-4,56	10,25	15,39	4,81	4,23	6,02
Pendapatan Retribusi Daerah	26,71	-20,08	-21,96	20,14	1286,44	258,25
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-0,10	-3,68	23,09	6,14	12,23	7,54
Lain-lain PAD yang Sah	1,40	15,22	26,29	-32,14	-76,04	-13,06

Uraian	Pertumbuhan (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN TRANSFER	-4,30	1,05	4,96	4,33	14,23	4,05
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-3,41	-15,49	6,68	5,56	13,10	1,29
Dana Bagi Hasil	-8,17	-95,88	-5,10	4,67	21,13	-16,67
Dana Alokasi Umum	34,90	2166,44	-0,23	3,70	8,68	442,70
Dana Alokasi Khusus	-9,92	-66,19	28,73	9,88	-100,00	-27,50
-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	- 100,00	-	-	-100,00
-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	- 100,00	-	-	-100,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-6,52	-27,02	-9,28	-3,22	15,14	-6,18
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-47,44	-73,71	455,12	111,32
Dana Desa	-	-	0,33	6,08	0,76	2,39
Transfer Pemerintah Provinsi	30,42	-30,69	9,91	- 100,00	-	-22,59
Pendapatan Bahi Hasil Pajak	-	-	7,12	- 100,00	-	-46,44
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	74,99	- 100,00	-	-12,50
Pendapatan Transfer Antar Daerah	- 17,05	-100,00	-	-	-	-58,53
Pendapatan Bagi Hasil	- 13,38	-100,00	-	-	-	-56,69
Bantuan Keuangan	- 90,86	-100,00	-	-	-	-95,43
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21,71	-13,95	-91,22	-15,19	-77,62	-35,25
Pendapatan Hibah	21,71	-91,73	-8,61	-15,19	-77,62	-34,29
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN DAERAH	-2,66	2,10	3,95	0,17	11,70	3,05

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2025

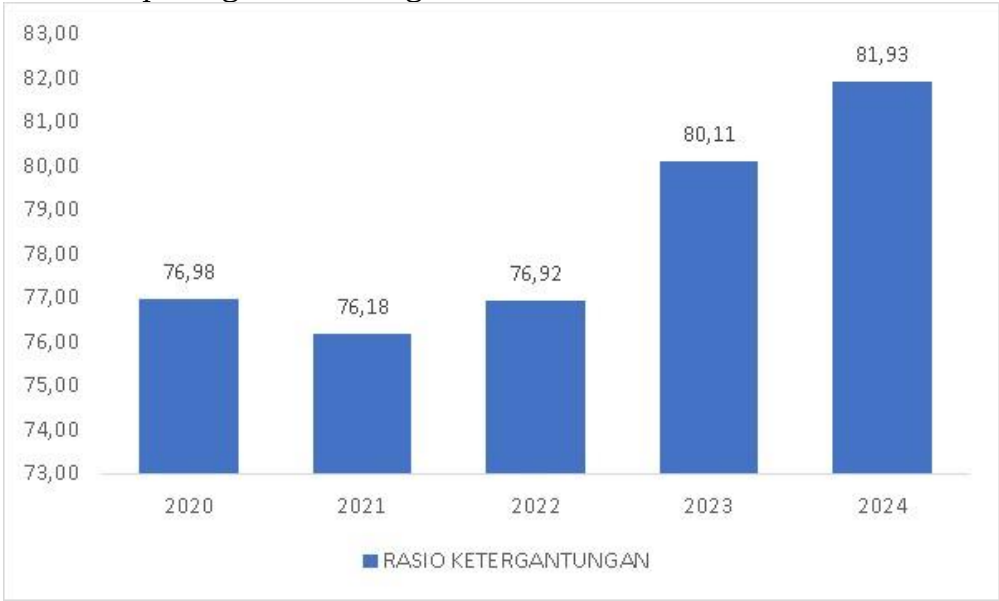
Derajat desentralisasi fiskal selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 17,79%-22,73%. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi Tahun 2022 sebesar 22,73%, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten Karanganyar termasuk pada tingkat desentralisasi fiskal kurang. Perkembangan derajat desentralisasi Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.65.
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2025

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Tahun 2024 rasio ketergantungan keuangan sebesar 80,11% meningkat dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar 78,30%. Meskipun menurun rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Karanganyar terhadap pemerintah pusat dan provinsi termasuk kategori sangat tinggi dengan rasio diatas 50%. Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Karanganyar selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.66.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2024

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah, unsur-unsur pendapatan daerah dengan proporsi terbesar adalah dana perimbangan dengan kisaran antara 76,18% hingga 80,11% antara Tahun 2020 hingga 2024. Sementara itu pendapatan asli daerah berkisar antara 17,79% hingga 22,73%. Adapun lain-lain pendapatan yang sah berkisar antara 0,35% hingga 4,89%. Secara rinci perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.67.
Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2024

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63.
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp. 000)

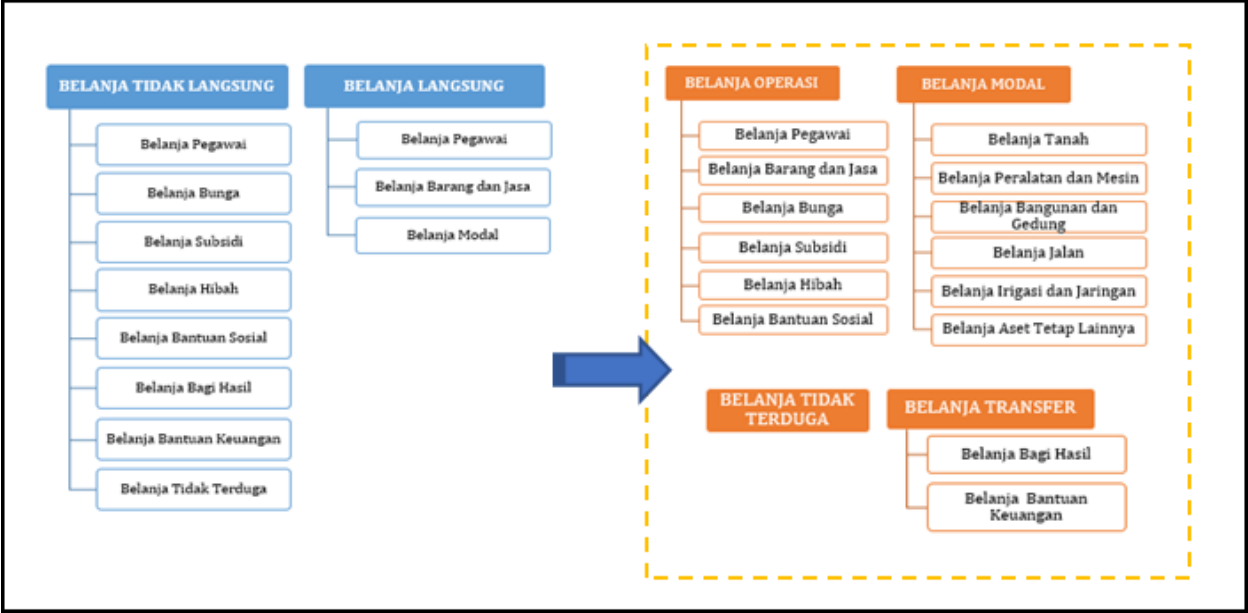
URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN DAERAH	2.121.386.179,23	2.165.983.748,57	2.251.540.154,85	2.255.391.055,29	2.519.378.722,41	1,33
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	384.682.993,53	426.649.591,41	511.737.349,88	441.862.394,42	453.827.906,42	5,88
Pendapatan Pajak Daerah	176.873.002,21	194.996.239,46	225.008.130,13	235.835.863,17	245.820.209,49	7,35
Pendapatan Retribusi Daerah	13.878.450,82	11.091.427,28	8.656.292,27	10.399.890,01	144.188.257,93	-8,36
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.262.591,95	14.701.590,40	18.096.196,75	19.207.774,40	21.556.721,99	6,88
Lain-lain PAD yang Sah	178.668.948,56	205.860.334,26	259.976.730,73	176.418.866,85	42.262.717,01	7,07
PENDAPATAN TRANSFER	1.632.940.401,70	1.650.042.337,16	1.731.961.804,98	1.806.878.660,87	2.064.062.816,00	1,46
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.497.208.670,57	1.265.238.854,30	1.349.700.295,98	1.424.783.248,63	1.611.403.963,53	-1,11
Dana Bagi Hasil	1.247.805.559,57	51.368.507,40	48.748.872,03	51.024.807,74	61.804.369,64	-20,40
Dana Alokasi Umum	39.870.047,37	903.630.027,00	901.571.566,68	934.937.369,77	1.016.100.904,32	436,17
Dana Alokasi Khusus	917.524.339,00	310.240.319,90	399.379.857,27	438.821.071,13	-	-6,68
-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.573.076,03	59.084.548,24			202.719.247,17	32,56
-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	245.838.097,17	251.155.771,65			330.779.442,40	2,16
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	290.411.173,20	211.948.761,00	192.281.648,00	186.096.860,50	214.275.180,00	-9,05
Dana Insentif Daerah (DID)	44.573.076,03	42.634.697,00	22.407.052,00	5.890.883,50	32.701.326,00	-41,83
Dana Desa	245.838.097,17	169.314.064,00	169.874.596,00	180.205.977,00	181.573.854,00	-8,24
Transfer Pemerintah Provinsi	249.403.111,00	172.854.721,86	189.979.861,00	0,00	173.655.484,47	-19,60
Pendapatan Bahi Hasil Pajak	83.272.655,00	165.757.129,86	177.559.691,00	0,00	173.655.484,47	2,06
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	166.130.456,00	7.097.592,00	12.420.170,00	0,00	-	-40,25

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.731.731,13	0,00	0,00	195.998.551,73	64.728.188,00	-38,08
Pendapatan Bagi Hasil	129.054.883,13	0,00	0,00	184.436.831,73	-	-36,26
Bantuan Keuangan	676.848,00	0,00	0,00	11.561.720,00	64.728.188,00	-71,42
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103.762.783,99	89.291.820,00	7.841.000,00	6.650.000,00	1.488.000,00	-19,87
Pendapatan Hibah	103.762.783,99	8.580.000,00	7.841.000,00	6.650.000,00	1.488.000,00	-18,90
Pendapatan lainnya		80.711.820,00	0,00	0,00	-	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2025

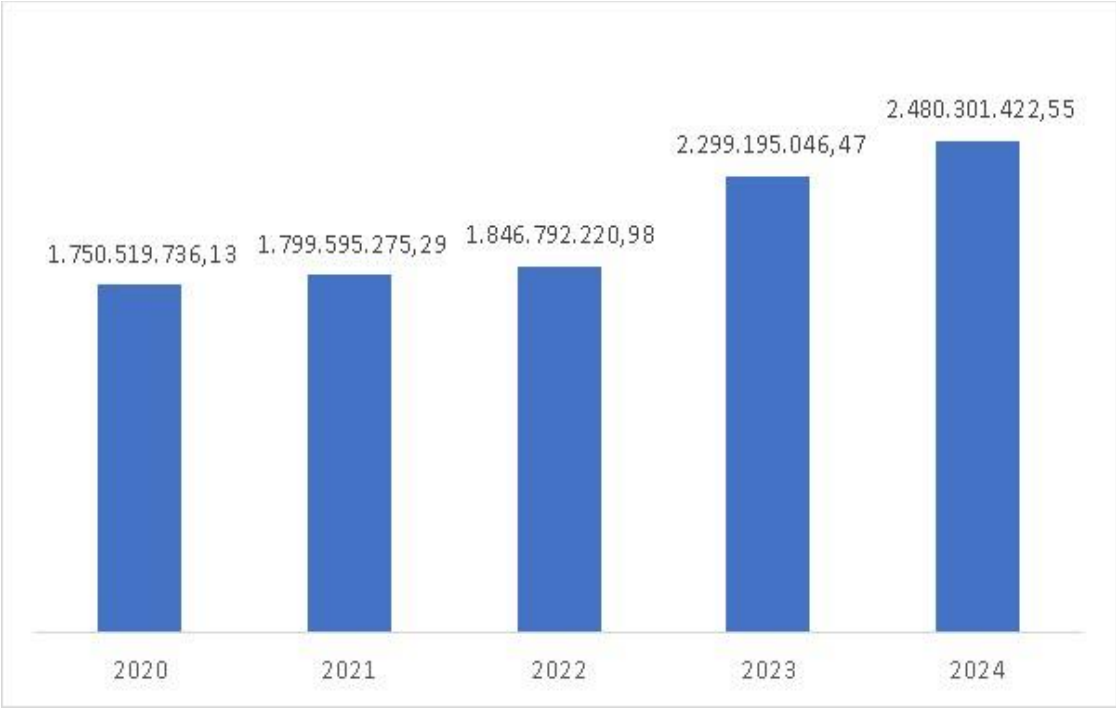
2. Kinerja Belanja Daerah

Penyajian belanja daerah sebelum tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada Tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.



Gambar 2.68.
Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Karanganyar menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu Tahun 5 Tahun terakhir (2020-2024). Pada Tahun 2020 sebesar Rp 1.750.519.736,13 meningkat menjadi Rp 2.480.301.422,55 pada Tahun 2024. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.69.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2025

Rata-rata peningkatan belanja Kabupaten Karanganyar dalam 5 Tahun terakhir sebesar 6,21%. Persentase kenaikan belanja tertinggi terjadi di Tahun 2023 yaitu sebesar 24,50%, dan terendah Tahun 2020 sebesar -8,06%. Komponen Belanja Operasi selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2019 – 2023 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Tertinggi Tahun 2019 sebesar 9,13%. Selama 5 Tahun terakhir rata-rata belanja Operasi sebesar 2,55%. Komponen Belanja Modal menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Belanja Modal tertinggi di Tahun 2021 sebesar 30,47%. Rata-rata pertumbuhan belanja Modal sebesar 4,52%.

Perkembangan persentase belanja daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

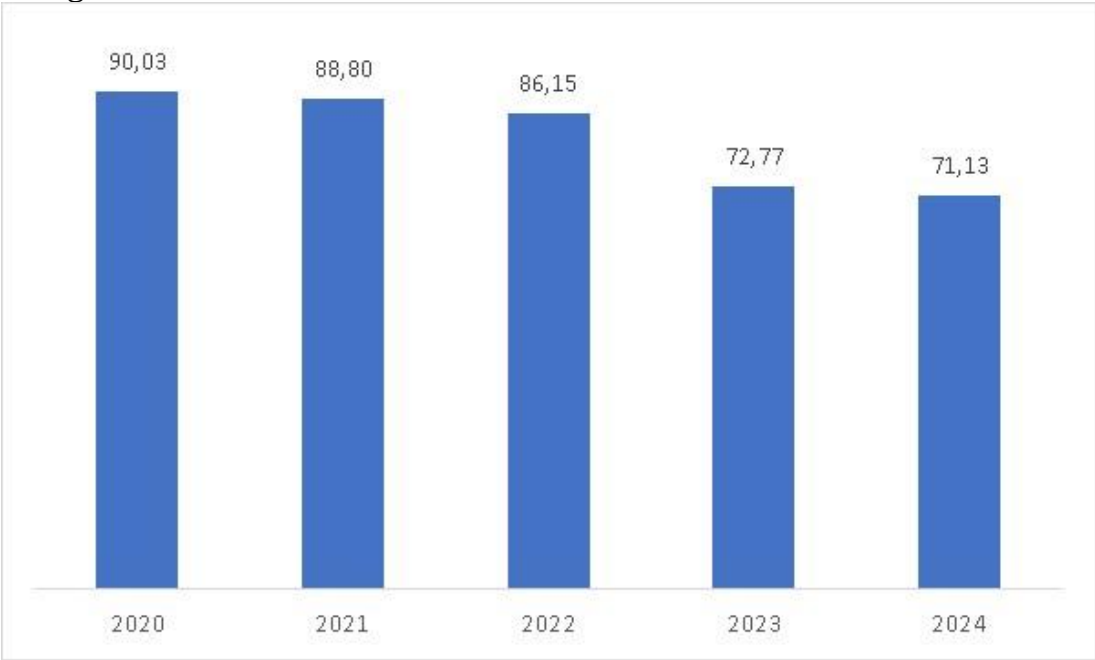
Tabel 2.64.
Persentase Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (%)

Uraian	Pertumbuhan (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA OPERASI	-2,50	1,40	-0,45	5,16	5,45	1,81
Belanja Pegawai	-3,61	6,87	-2,66	0,42	6,31	1,47
Belanja Barang dan Jasa	-3,19	2,40	0,86	8,16	1,84	2,01
Belanja Bunga	-	-39,14	-85,74	-100,00	-	-74,96
Belanja Hibah	7,47	-38,73	16,57	46,22	16,45	9,60
Belanja Bantuan Sosial	-9,29	-54,49	85,01	-41,87	-1,58	-4,44
BELANJA MODAL	-48,22	30,47	30,54	0,28	31,56	8,93
Belanja Modal Tanah	-85,70	-92,69	1335,08	161,35	100,00	243,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-9,76	-6,51	79,32	-38,93	39,32	12,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-48,37	123,17	-4,26	13,72	-63,59	4,13
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-84,61	24,96	117,23	34,11	262,77	70,89

Uraian	Pertumbuhan (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-8,67	-34,36	-4,48	45,65	-67,57	-13,89
Belanja Modal Aset Lainnya					-53,81	-53,81
BELANJA TIDAK TERDUGA	4114,98	-70,44	-62,95	-27,22	5,81	792,04
Belanja Tidak Terduga	4114,98	-70,44	-62,95	-27,22	5,81	792,04
BELANJA TRANSFER	-4,64	-0,63	5,10	3,85	2,63	1,26
Belanja Bagi Hasil	-6,81	1931,68	5,10	-93,95	5,65	368,33
Bagi Hasil Pajak	-	-	8,75	8,34	5,67	7,59
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-0,22	-3,59	5,17	0,45
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	4,91	-100,00	-	-47,54
Belanja Bantuan Keuangan	-4,52	-100,00			2,44	-34,03
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa	-	-	-	-	- 100,00	-100,00
BELANJA DAERAH	-8,06	2,80	2,62	24,50	7,88	5,95

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2025

Jika dilihat rasio Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa selama kurun waktu Tahun 2020-2024 berkisar antara 71,13% - 90,03%. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja di luar program dan kegiatan pembangunan proporsinya relatif besar, namun menunjukkan ke arah lebih positif, karena adanya penurunan persentase kalau di sisi lain ada kenaikan belanja modal. Perkembangan selengkapnya rasio belanja operasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

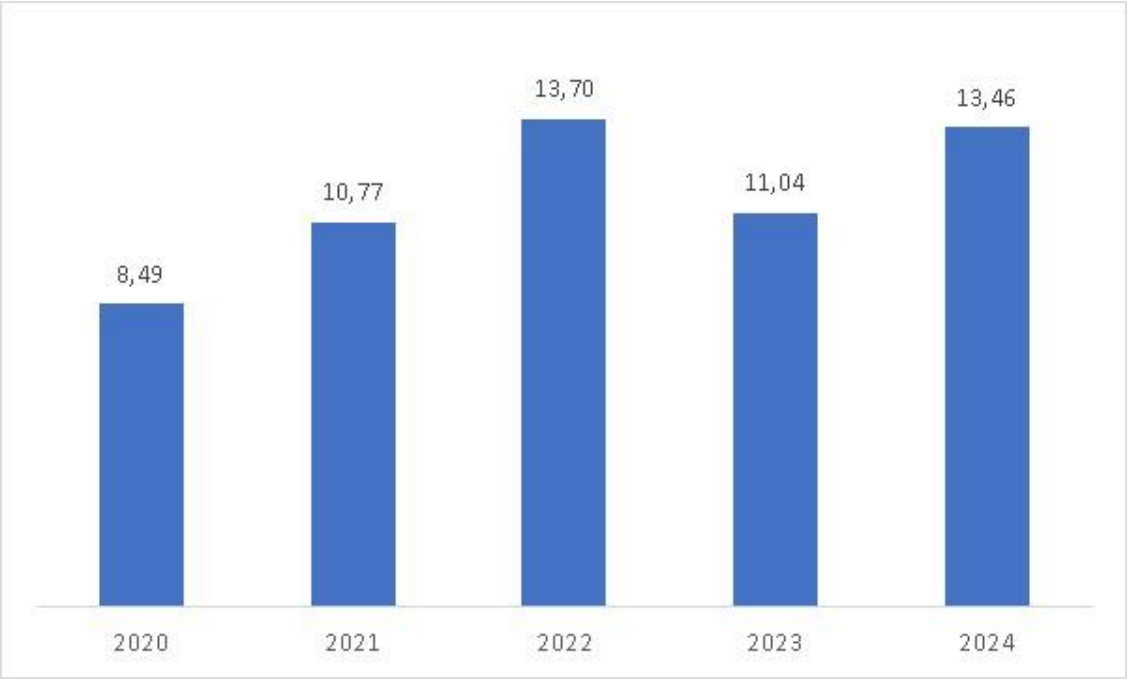


Gambar 2.70.
Proporsi Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2025

Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Karanganyar menunjukkan perkembangan fluktuatif. Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah Tahun 2024 sebesar 13,46%, cenderung

meningkat dibandingkan Tahun 2022 yang hanya sebesar 11,04%. Perkembangan rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah di Kabupaten Karanganyar selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.71.
Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Tahun 2020-2024 (%)
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2024

Perincian belanja daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp.000)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
BELANJA DAERAH	2.092.032.552,16	2.138.939.585,09	2.203.430.151,18	2.299.195.046,47	2.480.301.422,55	4,37
BELANJA OPERASI	1.576.031.073,07	1.598.110.006,73	1.590.938.004,73	1.673.035.410,31	1.764.196.985,29	1,81
Belanja Pegawai	916.916.841,22	979.911.016,41	953.878.284,21	957.879.515,70	1.018.327.815,11	1,47
Belanja Barang dan Jasa	525.901.451,70	538.515.921,23	543.169.427,46	587.494.441,85	598.278.919,53	2,01
Belanja Bunga	4.491.725,22	2.733.790,77	389.705,07	-	-	-74,96
Belanja Hibah	116.516.504,92	71.394.673,32	83.224.021,30	121.687.378,12	141.710.544,65	9,60
Belanja Bantuan Sosial	12.204.550,00	5.554.605,01	10.276.566,68	5.974.074,64	5.879.706,00	-4,44
BELANJA MODAL	148.559.342,37	193.819.710,16	253.014.014,90	253.727.694,80	333.811.443,57	8,93
Belanja Modal Tanah	263.418,10	19.259,68	276.392,40	722.350,23	-	243,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.987.005,03	52.344.671,11	93.866.393,06	57.323.831,23	79.861.835,46	12,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.505.391,92	101.554.104,71	97.226.667,70	110.570.961,07	40.257.196,30	4,13
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.472.178,57	19.334.579,10	41.999.788,43	56.325.661,84	204.332.803,07	70,89
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.331.348,75	20.567.095,55	19.644.773,32	28.612.040,44	9.279.770,10	-13,89
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	172.850,00	79.838,65	-53,81
BELANJA TIDAK TERDUGA	25.929.320,69	7.665.558,40	2.840.201,35	2.067.038,88	2.187.166,09	792,04
Belanja Tidak Terduga	25.929.320,69	7.665.558,40	2.840.201,35	2.067.038,88	2.187.166,09	792,04
BELANJA TRANSFER	341.512.816,03	339.344.309,80	356.637.930,20	370.364.902,48	380.105.827,60	1,26
Belanja Bagi Hasil	16.702.671,60	339.344.309,80	356.637.930,20	21.566.767,08	22.785.826,90	368,33
Bagi Hasil Pajak		17.485.000,00	19.015.000,00	20.601.000,00	21.770.093,00	7,59
Bagi Hasil Retribusi		1.003.988,80	1.001.732,80	965.767,08	1.015.733,90	0,45
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		320.855.321,00	336.621.197,40	0,00	-	-47,54

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Belanja Bantuan Keuangan	324.810.144,43	0,00	0,00	348.798.135,40	357.320.000,70	-34,03
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten		0,00	0,00	540.000,00	357.320.000,70	
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa		0,00	0,00	348.258.135,40	-	-100,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2025

3. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara, yang merupakan realisasi APBD 2 (dua) Tahun anggaran sebelumnya dari Tahun anggaran yang direncanakan. Gambaran kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.66.
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp.000)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah		2.121.386.179,23	2.165.983.748,57	2.251.540.154,85	2.255.391.055,29	2.519.378.722,41
A	Belanja Operasi	1.442.818.292,92	1.518.426.937,63	1.497.047.711,67	1.545.373.957,55	1.616.606.734,64
	Belanja Gaji dan Tunjangan	916.916.841,22	979.911.016,41	953.878.284,21	957.879.515,70	1.018.327.815,11
	Belanja Barang dan Jasa	525.901.451,70	538.515.921,23	543.169.427,46	587.494.441,85	598.278.919,53
B.	Belanja Modal	15.472.178,57	19.334.579,10	41.999.788,43	56.325.661,84	204.332.803,07
	Belanja Program Prioritas Bupati	15.472.178,57	19.334.579,10	41.999.788,43	56.325.661,84	204.332.803,1
C	Pembiayaan	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	10.750.230,00	22.000.000,00
	Penyertaan Modal	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	10.750.230,00	22.000.000,00
TOTAL A+B+C		1.487.490.471,49	1.547.261.516,73	1.550.047.500,10	1.612.449.849,39	1.842.939.537,71
Kemampuan Keuangan Daerah		633.895.707,74	618.722.231,84	701.492.654,76	642.941.205,90	676.439.184,70

Sumber : Data diolah dari LRA 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kemampuan riil keuangan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 fluktuatif cenderung meningkat, namun pada Tahun 2021 kemampuan riil turun menjadi sebesar Rp 618.722.231,84. Nilai tersebut termasuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi bagi daerah Kabupaten/Kota, karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar telah melebihi Rp 550.000.000.000,00, sebagaimana pasal 5 ayat 2 huruf a Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.

4. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
- b. Pencairan Dana Cadangan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
- f. Penerimaan Piutang Daerah.
- g. Penerimaan Dana Bergulir.
- h. Penerimaan Hasil Penarikan.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa :

- a. Pembentukan dana cadangan.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

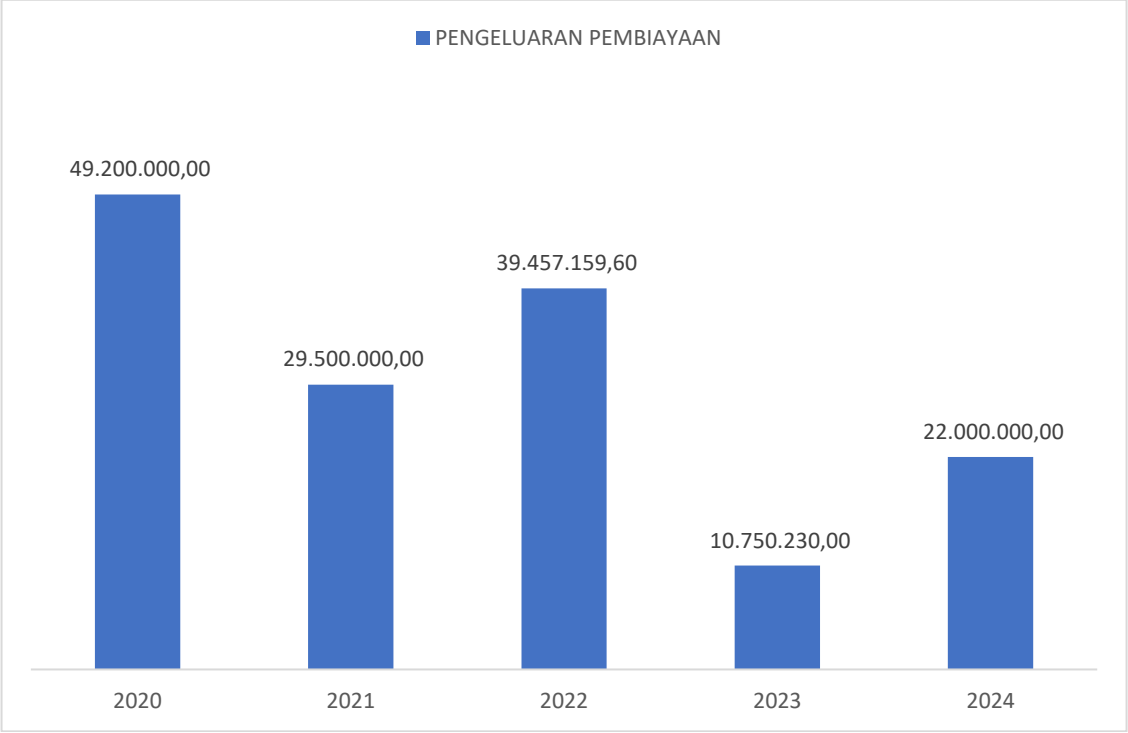
Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Karanganyar menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Penerimaan Piutang Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar menunjukkan perkembangan fluktuatif, tertinggi Tahun 2020 sebesar Rp. 197.608.653,26, tetapi Tahun 2024 turun menjadi Rp 129.907.601,72. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.72.
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp. 000,00)
Sumber : Data diolah dari LRA 2020-2024

Pengeluaran pembiayaan Daerah merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Karanganyar berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp 10 milyar dan pada Tahun 2023 naik menjadi Rp 10,75 milyar. Perkembangan Pengeluaran pembiayaan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.73.
Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp. 000,0)
Sumber : Data diolah dari LRA 2020-2024

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

U R A I A N	REALISASI (Rp.000)				
	2019	2020	2021	2022	2023
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	290.053.215,65	197.608.653,26	177.880.886,33	175.834.409,81	184.418.202,89
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	221.485.431,05	197.446.953,26	177.762.280,33	175.629.729,81	184.335.562,89
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	68.457.159,60	161.700,00	118.606,00	204.680,00	82.640,00
Penarikan dari AMU Bank Jateng	110.625,00	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000,00	49.200.000,00	29.500.000,00	39.457.159,60	10.750.230,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000,00	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	10.750.230,00
Pembayaran Pokok Hutang	-	20.000.000,00	20.000.000,00	28.457.159,60	0,00
Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual	-	-	-	-	-
Pembayaran Hutang Talangan LUEP kepada Propinsi	-	-	-	-	-
Pembayaran Hutang Belanja	-	-	-	-	-
Pembayaran Hutang Retensi	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	280.053.215,65	148.408.653,26	148.380.886,33	136.377.250,21	173.667.972,89

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2024

5. Neraca

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset pemerintah Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2020-2024 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 26,48%. Pada Tahun 2020, aset yang dimiliki mencapai Rp. 2.763.481.985.690,28, meningkat menjadi sebesar Rp. 6.152.794.982.625,25 pada Tahun 2024. Keberadaan aset daerah ini memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat.

Kewajiban merupakan sebuah gambaran tentang kondisi utang Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah Kabupaten Karanganyar dalam lima Tahun terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 26,48%. Pada Tahun 2020 kewajiban daerah sebesar Rp. 2.763.481.985.690,28, naik sebesar Rp. 6.152.794.982.625,25 di tahun 2024. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Jumlah kewajiban jangka panjang sampai Tahun 2024 tidak ada atau 0. Sedangkan jumlah kewajiban jangka pendek terbesar adalah Pendapatan Dibayar Dimuka dan Utang Belanja.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam lima Tahun terakhir, ekuitas dana di Kabupaten Karanganyar mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 11,47%. Dilihat dari besarnya, ekuitas dana Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 2.736.173.057.891,44 meningkat di tahun 2024 menjadi Rp 6.095.539.280.459,34.

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, di mana terdapat 2 jenis Rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas. Selengkapnya dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.68.
Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kabupaten Karanganyar

No	Uraian	Tahun					Rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio Likuiditas :						
	Rasio Lancar (rasio)	11,32	10,82	9,14	7,43	4,45	7,0
	Rasio Quick (rasio)	8,78	8,81	7,75	5,95	3,73	5,6
2	Solvabilitas:						
	Rasio Total Hutang terhadap Total asset	0,99	0,93	0,49	0,50	0,93	-0,3

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2025

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk

mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan tabel di atas, nilai rasio perhitungan dengan analisis rasio lancar pada Tahun 2020 sangat besar, hal ini dikarenakan Kabupaten Karanganyar tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan rasio lancar Kabupaten Karanganyar termasuk kategori baik. Nilai rasio pada perhitungan Rasio *Quick* mencapai sebesar 8,78%, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Karanganyar dalam kondisi baik.

2) Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang.

Berdasarkan tabel di atas, rasio kewajiban terhadap aset di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 sangat rendah hanya 0,49%. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sementara itu pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga rendah, yaitu sebesar 0,01%, yang menunjukkan bahwa nilai total utang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian, kondisi kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

Tabel 2.69.
Neraca Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	ASET						
1	ASET LANCAR						
a	Kas dan Setara Kas	170.885.143.205,71	159.978.997.375,22				-0,53
	Kas di Kas Daerah	31.398.678.041,00	40.873.869.060,00	132.522.476.091,00	111.116.051.216,00	138.386.383.333,00	0,66
	Kas di Bendahara Penerimaan	1.245.000,00	0	21.098.921,00	76.366.325,00	89.517.292,00	0,60
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0	0,00	
	Kas di BLUD	87.941.770.167,46	105.668.596.284,97	51.756.151.257,00	16.224.911.196,00	7.562.391.871,00	-0,38
	Kas Lainnya	1.543.449.997,25	13.436.532.030,25	0,00	1.000.000,00	0,00	
	Kas di Puskesmas	0			2.443.214.928,00	946.564.084,00	
	Setara Kas	50.000.000.000,00	0				-1,00
	Kas di Bendahara BOS			35.836.624,00	1.993.261,00	44.996,00	
b	Investasi Jangka Pendek	68.421.524.918,77	0				
c	Piutang Pendapatan	68.421.524.918,77	86.867.595.492,46				-0,37
d	Piutang Pajak Daerah	7.180.110.242,00	9.090.715.032,67				-0,37
	Piutang Pajak Daerah	21.327.992.218,00	24.791.585.893,00	78.245.530.733,00	59.925.807.497,00	65.483.866.146,00	0,54
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-14.147.881.976,00	-15.700.870.860,33				-0,45
e	Piutang Retribusi	488.111.105,36	240.442.048,14				-0,75
	Piutang Retribusi	497.035.680,36	241.943.772,00	138.373.785,00	145.536.305,00	17.242.489.293,00	29,15
	Penyisihan Piutang Retribusi	-8.924.575,00	-1.501.723,86				-0,92
f	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	55.885.874.147,41	64.796.989.257,65				-0,42

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	58.764.945.398,45	68.670.096.147,15	4.334.937.792,51	3.930.418.457,99	10.630.001.030,64	0,21
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-2.879.071.251,04	-3.873.106.889,50				-0,33
g	Piutang Transfer	4.619.147.774,00	12.174.867.450,00				0,32
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi	4.619.147.774,00	12.174.867.450,00	0,00	448.783,00	3.379.942.000,00	2510,33
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			3.423.815.966,00	7.261.739.588,00	12.265.080.047,00	
h	Piutang Lain-lain	248.281.650,00	137.743.000,00				-0,72
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	720.242.500,00	738.092.500,00				-0,49
	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.900.000,00	4.500.000,00				-0,67
	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-478.860.850,00	-604.849.500,00				-0,37
	Piutang Lainnya			5.459.255.109,00	15.081.677.139,00	0,00	0,38
i	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	426.838.704,00				
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		426.838.704,00				
j	Penyisihan Piutang			-59.292.273.175,39	-39.777.657.744,35	-43.182.084.670,97	-0,12
k	Beban Dibayar Dimuka	599.671.372,00	827.482.529,45	37.459.625,00	40.999.428,75	613.139.587,01	3,37

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
l	Persediaan	69.272.706.322,76	56.336.003.739,11	38.829.975.635,32	43.911.537.167,62	41.474.750.596,33	-0,11
m	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0					
	Jumlah Aset Lancar	309.179.045.819,24	304.010.079.136,24	255.512.638.363,44	220.384.043.548,01	254.892.085.605,01	-0,04
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	73.219.229.463,86	71.343.633.933,41				-0,51
a	Investasi Non Permanen	48.400.000,00	0				-1,00
	Investasi dalam Pinjaman Dana Bergulir	48.400.000,00	0				-1,00
	Jumlah Investasi Non Permanen	48.400.000,00	0				-1,00
b	Investasi Permanen	73.170.829.463,86	71.343.633.933,41	276.858.272.715,04	292.886.777.520,72	327.997.170.158,17	0,76
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	73.170.829.463,86	71.343.633.933,41				-0,51
	Jumlah Investasi Permanen	73.170.829.463,86	71.343.633.933,41				-0,51
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	73.219.229.463,86	71.343.633.933,41	276.858.272.715,04	292.886.777.520,72	327.997.170.158,17	0,76
3	ASET TETAP	2.354.154.800.039,53	2.613.128.199.566,94				-0,44
a	Tanah	784.555.690.876,03	795.960.216.227,03	2.918.522.998.096,00	3.121.942.977.249,00	3.081.216.372.028,00	0,68
b	Peralatan dan Mesin	554.256.665.843,04	611.861.631.678,63	666.605.252.547,82	738.098.501.274,02	814.626.327.876,02	0,10
c	Gedung dan Bangunan	858.626.369.619,13	996.762.409.554,69	1.321.304.777.172,00	1.404.700.284.773,00	1.438.711.861.709,00	0,14
d	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.160.089.266.677,00	1.312.625.664.823,68	1.285.610.495.064,00	1.374.849.333.667,00	1.567.956.904.482,00	0,08
s	Aset Tetap Lainnya	113.286.852.645,01	127.487.566.236,01	287.180.689.953,05	301.033.992.827,05	315.086.823.838,05	0,37
f	Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.207.412.803,86	21.092.404.184,41	29.185.768.661,00	12.305.530.652,00	20.060.799.306,00	0,07

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
g	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.141.867.458.424,53	1.252.661.693.137,51	-1.375.302.657.740,77	-1.555.657.792.180,18	-1.750.172.752.893,50	-0,44
	Jumlah aset tetap			5.133.107.323.753,10	5.397.272.828.261,89	5.487.486.336.345,57	0,03
4	PROPERTI INVESTASI						
	Properti investasi			1.139.070.000,00	11.188.779.200,00	52.042.792.950,00	6,24
	Akumulasi Penyusutan Properti investasi			0	-1.536.737.044,00	-1.755.784.628,00	0,14
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI			1.139.070.000,00	9.652.042.156,00	50.287.008.322,00	5,84
5	DANA CADANGAN						
a	ASET LAINNYA	26.928.910.367,65	32.198.994.181,49				-0,40
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	153.050.000,00	153.050.000,00	1.189.073.649,00	1.189.073.649,00	1.189.073.649,00	1,69
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	979.000.000,00	979.000.000,00	6.457.500.000,00	7.480.170.000,00	7.399.850.000,00	1,44
	Aset tidak berwujud:	1.786.267.333,87	1.938.292.922,65				-0,46
	Aset tidak berwujud	6.360.953.721,66	7.581.874.659,01	5.879.399.563,00	6.493.181.563,00	6.718.320.877,00	0,03
	Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud	-4.574.686.387,79	-5.643.581.736,36				-0,38
b	Aset Lain-Lain:	24.010.593.033,78	29.128.651.258,84				-0,39
	Aset Lain-Lain	56.451.267.905,11	63.750.510.174,10	90.689.417.873,55	69.685.743.311,50	58.138.878.202,50	0,04
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			-4.526.241.886,00	-5.099.509.657,00	-5.699.233.017,00	0,12
	Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain	-32.440.674.871,33	-34.621.858.915,26	-58.542.319.412,00	-37.934.169.487,00	-35.614.507.517,00	0,09
	Jumlah Aset Lainnya			41.146.829.787,55	41.814.489.379,50	32.132.382.194,50	-0,11

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	JUMLAH ASET	2.763.481.985.690,28	3.020.680.906.818,08	5.707.764.134.619,13	5.962.010.180.866,12	6.152.794.982.625,25	0,26
B	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA						
1	KEWAJIBAN	27.308.927.798,84					
a	Kewajiban Jangka Pendek :	27.308.927.798,84					
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	0	0	0	0	
	Utang Bunga	0	0				
	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0	0				
	Pendapatan Dibayar Dimuka	621.824.659,00	755.085.706,00	2.862.338.188,07	3.288.765.734,14	3.227.047.229,91	0,78
	Utang Belanja	6.047.183.263,57	7.198.578.922,00	23.229.800.320,00	22.558.986.576,98	50.170.875.936,00	0,90
	Utang BLUD	15.725.467.446,27	20.148.624.950,18				-0,36
	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.914.452.430,00	0	1.858.528.731,00	3.812.069.954,00	3.857.779.000,00	0,02
	Utang Lain-lain	0					
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	27.308.927.798,84	28.102.289.578,18	27.950.667.239,07	29.659.822.265,12	57.255.702.165,91	0,25
b	Kewajiban Jangka Panjang	0	0				
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0				
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0				
	Jumlah Kewajiban	27.308.927.798,84	28.102.289.578,18	27.950.667.239,07	29.659.822.265,12	57.255.702.165,91	0,25
2	EKUITAS	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90				-0,45
a	Ekuitas	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90				-0,45
	Ekuitas	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90	5.679.813.467.380,06	5.932.350.358.601,00	6.095.539.280.459,34	0,27

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Ekuitas SAL		0	0	0		
	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	0		0	0		
	Jumlah Ekuitas	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90	5.679.813.467.380,06	5.932.350.358.601,00	6.095.539.280.459,34	0,27
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.763.481.985.690,28	3.020.680.906.818,08	5.707.764.134.619,13	5.962.010.180.866,12	6.152.794.982.625,25	0,26

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 2025

6. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu Tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam implementasinya, APBD Kabupaten Karanganyar anggaran Tahun 2018-2022, penyusunannya telah mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Secara berkesinambungan, sistem evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pemerintah menerbitkan UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang pertama Tahun 2022 dimasa Omicron ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. UU ini mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung terwujudnya layanan publik yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan itu tentunya, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan dari semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan yang dituangkan dalam UU HKPD ini. Urusan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah di danai dari dan atas beban APBN. Dalam praktiknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah, dengan adanya UU nomor 1 Tahun 2022 Pemerintah kabupaten/

kota mendapatkan keuntungan, karena **dapat mengoptimalkan penerimaan pajak secara lebih mandiri**. Contoh pajak motor, pembagiannya 70 persen provinsi dan 30 persen kabupaten kota.

1) Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Karanganyar pada periode Tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

2) Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Karanganyar Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan, terutama pada Belanja Operasi mengalami fluktuasi. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) Tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.70.

**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp. 000,00)**

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Belanja	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1.	2020	916.916.841,22	2.092.032.552,16	43,83
2.	2021	979.911.016,41	2.138.939.585,09	45,81
3.	2022	953.878.284,21	2.203.430.151,18	43,29
4.	2023	957.879.515,70	2.299.195.046,47	41,66
5	2024	1.018.327.815,11	2.480.301.422,55	41,06

Sumber : Data diolah dari LPKD 2020-2024 diolah

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah cenderung menurun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, Tahun 2020 persentasenya sebesar 43,83% dan Tahun 2024 sebesar 41,06%.

3) Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu Tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.71.

Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (Rp.000)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah		2.121.386.179,23	2.165.983.748,57	2.251.540.154,85	2.255.391.055,29	2.519.378.722,41
A	BELANJA OPERASI	1.442.818.292,92	1.518.426.937,63	1.497.047.711,67	1.545.373.957,55	1.616.606.734,64
	Belanja Gaji dan Tunjangan	916.916.841,22	979.911.016,41	953.878.284,21	957.879.515,70	1.018.327.815,11
	Belanja Barang dan Jasa	525.901.451,70	538.515.921,23	543.169.427,46	587.494.441,85	598.278.919,53
B.	Belanja Modal	15.472.178,57	19.334.579,10	41.999.788,43	56.325.661,84	204.332.803,07
	Belanja Program Prioritas Bupati	15.472.178,57	19.334.579,10	41.999.788,43	56.325.661,84	204.332.803,07
C	Pembiayaan	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	10.750.230,00	22.000.000,00
	Penyertaan Modal	29.200.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	10.750.230,00	22.000.000,00
Pengeluaran wajib dan Mengikat		1.487.490.471,49	1.547.261.516,73	1.550.047.500,10	1.612.449.849,39	1.842.939.537,71
Kemampuan Keuangan Daerah		633.895.707,74	618.722.231,84	701.492.654,76	642.941.205,90	676.439.184,70

Sumber : Data diolah dari LPKD 2020-2024 diolah

4) **Lesson Learn Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa yang Akan Datang**

Arah kebijakan pengelolaan keuangan pada Tahun 2020-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa menimbulkan *high-cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.
- b. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah meningkat dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, Tahun 2020 persentasenya sebesar 43,83% dan Tahun 2024 sebesar 41,06%.

Pada periode Tahun 2025-2030 kebijakan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan melakukan berbagai upaya antara lain:
 - 1) Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dapat menetapkan target pajak daerah mendekati potensi riil.
 - 2) Melakukan identifikasi ulang dan pemutakhiran data setiap Tahun dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi dan menetapkan wajib pajak prioritas berdasarkan potensi kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah.
 - 3) Melakukan kebijakan *reward and punishment* kepada wajib pajak dan petugas yang melakukan pemungutan pajak.
 - 4) Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi agar mereka melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
 - 5) Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dilakukan upaya *cashless* dengan aplikasi dan *e money* sehingga meminimalisir kebocoran.
- b. Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke dalam PAD.
- c. Pemanfaatan asset daerah untuk meningkatkan PAD.
- d. Belanja daerah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah.
- e. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan menerapkan basis akrual.
- f. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada pencapaian visi dan misi daerah.
- g. Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
- h. Proporsi belanja modal ditingkatkan untuk memenuhi proporsi di atas 20% dari total belanja.
- i. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

2.5.2. **Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2030**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima)

Tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada Tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2020-2024 di atas, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030 disusun dengan berbasis pada asumsi:

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD Tahun 2018-2023 dan perilaku potensi masing-masing sumber PAD.
2. Dana tranfer menyesuaikan kebijakan pemerintah berdasarkan pada kebijakan keuangan RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam proyeksi pendapatan transfer Tahun 2025-2030 diasumsikan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami peningkatan yang moderat dengan pertumbuhan kurang lebih 8,9% dengan baseline dana transfer pada APBD Tahun 2024 penetapan. Pendapatan Transfer dari dana DAK diasumsikan sesuai dengan rencana program/kegiatan/sub kegiatan DAK Tahun 2025-2030, yang dilakukan dengan menggunakan alokasi setiap sumber dana atas setiap kegiatan/sub kegiatan yang berpotensi akan didanai melalui sumber pendanaan DAK.
3. Asumsi Inflasi Kabupaten Karanganyar yang digunakan untuk proyeksi adalah 2% - 4%.
4. Proyeksi pendapatan daerah diproyeksikan selama Tahun 2025-2030 sebesar 1% - 3% per Tahun.
5. Pada Tahun 2025 dan lima Tahun ke depan kondisi keuangan negara semakin membaik sehingga transfer ke daerah berimbas meningkat.
6. Optimalisasi sumber pendanaan lain, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), hibah, dan pinjaman dari pihak ketiga, terus diupayakan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Hingga tahun 2024, pemanfaatan dana CSR untuk mendukung kegiatan pembangunan tercatat sebesar Rp. 4.462.810.464, yang digunakan untuk berbagai sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2025-2030 didasarkan atas asumsi dari masing-masing komponen PAD.

- a) Proyeksi pajak daerah Tahun 2025-2030, didasarkan atas baseline Tahun 2022-2024, semakin baik dengan pertumbuhan rata-rata 2%, karena kondisi perekonomian dan kemampuan membayar sudah meningkat. Kabupaten Karanganyar memiliki komitmen untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui peningkatan PAD dengan mengimplementasi UU Nomor 1 Tahun 2022. Optimalisasi peningkatan pajak akan dilakukan pada 3 Tahun yang akan datang.

- b) Proyeksi Retribusi daerah Tahun 2025-2030. Beberapa pos retribusi daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain penghapusan retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan penyesuaian model atas Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Diperkirakan penerimaan retribusi mengalami trend yang meningkat rata-rata 2% per Tahun, khususnya atas retribusi jasa usaha yang bersumber dari retribusi IMB dan retribusi pelayanan pasar tradisional. Sebagai *benchmarking* realisasi retribusi daerah Tahun 2022 sebesar Rp 8.656.292.270 dan baseline retribusi daerah Tahun 2024 sebesar Rp 144.188.257,93.
- c) Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Perusda yang ada di Kabupaten Karanganyar didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi yang tinggi, maka hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 2% per Tahun pada periode 2025-2030, dengan baseline pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 19.207.774.395,00
- d) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama Tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan 2%. Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD. Sumber pendapatan BLUD rata-rata diproyeksikan tumbuh 2% per Tahun. Kontribusi terbesar pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan RSUD Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Puskesmas, namun demikian pendapatan ini, selanjutnya digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan BLUD menuju pada kemandirian BLUD.

2) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi Tahun 2022-2024 serta memperhitungkan kebijakan APBN Tahun 2025-2030. Termasuk dalam proyeksi, dimasukkan asumsi perekonomian nasional dan global yang berdampak terhadap Penerimaan Dalam Negeri Netto (PMDN). Kecermatan dan kehati-hatian terhadap asumsi dan proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, mengingat pembagian pendapatan transfer pusat dan provinsi tidak dapat di proyeksi secara tepat. Sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar memiliki proporsi pendapatan transfer sebesar 81,93% terhadap total pendapatan daerah, yang ini dapat diartikan daerah memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional. DAU pada Tahun 2025 sampai 2030

diproyeksikan sama dengan postur pendapatan DAU Tahun 2024. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat DAU dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu DAU dan DAU tematik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pengkajian P3K)

Pendapatan DAK telah dimasukkan dalam model, dengan asumsi baseline DAK Tahun 2024. Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat, yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID), dalam proyeksi Tahun 2025-2030 diasumsikan meningkat, per Tahun dengan baseline DID Tahun 2024. Termasuk dalam hal ini, kebijakan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai stimulan bagi daerah dengan peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan DID Tahun 2025-2030.

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Proyeksi pendapatan transfer antar daerah, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi Tahun 2022-2024. Pendapatan tranfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, sangat dipengaruhi dari asumsi dan potensi pendapatan DBH pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota Tahun 2025 – 2030. Sedangkan proyeksi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota akan disinkronkan dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah ke depan. Proyeksi pendapatan transfer antar daerah menggunakan baseline APBD Tahun 2024.

4) Lain-lain pendapatan yang Sah.

Proyeksi lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025-2030 didasarkan pada dana hibah dengan baseline pada Tahun 2022-2024.

b. Proyeksi Belanja Daerah

Kenaikan atau penurunan pendapatan daerah akan berdampak pada belanja daerah, sehingga kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2025-2030 akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Karanganyar, selama kurun waktu 2025-2030 ;
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, maupun Urusan Penunjang Lainnya;
- c. Memenuhi pelaksanaan program yang sudah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;
- d. Mengakomodir program pembangunan yang dijangkit melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia);
- f. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
- g. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan.

- h. Pada Tahun 2030 alokasi belanja harus memperhatikan kebutuhan pelaksanaan pemilu.
- i. Dalam rangka mencapai proporsi belanja pegawai sebesar 30%, strategi yang ditempuh meliputi: (1) meningkatkan pendapatan daerah untuk memperbesar kapasitas fiskal, (2) menerapkan kebijakan moratorium penerimaan ASN secara selektif, (3) melaksanakan audit Sumber Daya Manusia (SDM) guna memastikan efisiensi dan efektivitas kebutuhan pegawai, serta (4) menyesuaikan pemberian tunjangan berbasis kinerja agar lebih proporsional dan mendorong produktivitas aparatur.

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada Tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja daerah di Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2025-2030 diproyeksikan meningkat dibandingkan Tahun-Tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga Tahun 2024, dengan mempertimbangkan komitmen dan dinamika kebijakan nasional. Kebutuhan belanja boleh melebihi pendapatan, selama masih memenuhi ketentuan defisit anggaran dan ada dana yang akan digunakan untuk mencukupinya.

c. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan daerah pada masa yang akan datang dari sisi penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan menggunakan prakiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya dan penerimaan dari pinjaman daerah.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pinjaman, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban, serta membentuk dana cadangan jika kemampuan anggaran tersedia. Memperhatikan besarnya kebutuhan belanja di tahun-tahun sebelumnya, sehingga penyediaan dana cadangan, dilakukan penundaan (ditiadakan), untuk mengurangi defisit belanja yang masih sangat besar.

Tabel 2.72.
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2030

Nomor Urut	Uraian	Rencana Anggaran					
		APBD 2025	APBD 2026	APBD 2027	APBD 2028	APBD 2029	APBD 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	2.245.744.025.100	2.233.184.948.210	2.243.924.288.623	2.280.200.518.843	2.291.373.728.608	2.302.770.402.569
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	526.438.255.510	536.967.020.620	547.706.361.033	558.660.488.253	569.833.698.018	581.230.371.979
4.1.01	Pajak Daerah	316.668.063.000	323.001.424.260	329.461.452.745	336.050.681.800	342.771.695.436	349.627.129.345
4.1.02	Retribusi Daerah	186.144.234.088	189.867.118.770	193.664.461.145	197.537.750.368	201.488.505.375	205.518.275.483
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.228.683.122	19.613.256.784	20.005.521.920	20.405.632.359	20.813.745.006	21.230.019.906
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.397.275.300	4.485.220.806	4.574.925.222	4.666.423.727	4.759.752.201	4.854.947.245
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.719.305.769.590	1.696.217.927.590	1.696.217.927.590	1.721.540.030.590	1.721.540.030.590	1.721.540.030.590
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.606.617.652.000	1.606.215.477.000	1.606.215.477.000	1.631.537.580.000	1.631.537.580.000	1.631.537.580.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.688.117.590	90.002.450.590	90.002.450.590	90.002.450.590	90.002.450.590	90.002.450.590
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	2.256.919.025.100	2.296.796.059.321	2.250.590.955.289	2.291.867.185.510	2.314.429.284.164	2.327.770.402.568
5.1	BELANJA OPERASI	1.762.547.437.928	1.772.176.058.937	1.775.550.383.806	1.784.567.615.668	1.792.481.741.255	1.801.893.830.642
5.1.01	Belanja Pegawai	1.103.811.434.068	1.107.439.696.548	1.110.208.295.790	1.115.983.816.529	1.122.108.568.498	1.129.854.796.365
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.817.277.360	564.221.820.553	565.632.375.105	570.046.456.043	572.471.572.183	573.902.751.113
5.1.03	Belanja Bunga	-	3.353.518.519	2.305.787.037	889.907.407	10.046.296	-
5.1.05	Belanja Hibah	91.746.326.500	91.975.692.316	92.205.631.547	92.436.145.626	92.667.235.990	92.898.904.080
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.172.400.000	5.185.331.000	5.198.294.328	5.211.290.063	5.224.318.288	5.237.379.084
5.2	BELANJA MODAL	130.007.955.772	159.748.493.640	108.892.877.764	139.864.718.515	153.214.380.311	155.833.757.799

Nomor Urut	Uraian	Rencana Anggaran					
		APBD 2025	APBD 2026	APBD 2027	APBD 2028	APBD 2029	APBD 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.271.000.000	5.000.000.000	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.411.675.512	51.537.704.701	51.666.548.963	54.462.382.002	57.598.537.957	57.742.534.302
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.206.337.000	25.269.352.843	25.332.526.225	28.395.857.540	31.466.847.184	31.545.514.302
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.867.492.000	72.676.856.209	26.616.061.239	51.715.543.282	58.844.832.140	61.228.285.757
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.955.176.260	4.967.564.201	4.979.983.111	4.992.433.069	5.004.914.152	5.017.426.437
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	296.275.000	297.015.688	297.758.227	298.502.622	299.248.879	299.997.001
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.752.533.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.752.533.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	351.611.098.400	354.871.506.744	356.147.693.720	357.434.851.328	358.733.162.597	360.042.814.128
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.793.177.000	22.229.040.540	22.673.621.351	23.127.093.778	23.589.635.653	24.061.428.366
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	329.817.921.400	332.642.466.204	333.474.072.369	334.307.757.550	335.143.526.944	335.981.385.761
	SURPLUS/DEFISIT	-11.175.000.000	-63.611.111.111	-6.666.666.667	-11.666.666.667	-23.055.555.556	-25.000.000.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.175.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.175.000.000	30.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	70.000.000.000	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	36.388.888.889	43.333.333.333	38.333.333.333	6.944.444.444	5.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	-	-
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		21.388.888.889	23.333.333.333	23.333.333.333	1.944.444.444	-

Nomor Urut	Uraian	Rencana Anggaran					
		APBD 2025	APBD 2026	APBD 2027	APBD 2028	APBD 2029	APBD 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
	(LKB)-BUMD-Jangka Menengah						
	PEMBIAYAAN NETTO	11.175.000.000	63.611.111.111	6.666.666.667	11.666.666.667	23.055.555.556	25.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0	0

Sumber : Data Pendapatan Hasil Proyeksi Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar

2. Perhitungan Kerangka Pendanaan
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi Tahun 2025 sampai dengan 2030 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2020-2024. Direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.73.

Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2025-2030 (Rp)

No.	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Kemampuan Keuangan Daerah	2.276.516.850.100	2.263.184.948.210	2.293.924.288.623	2.330.200.518.843	2.321.373.728.608	2.332.770.402.569
1	Pendapatan Daerah	2.245.341.850.100	2.233.184.948.210	2.243.924.288.623	2.280.200.518.843	2.291.373.728.608	2.302.770.402.569
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.175.000.000	30.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
II	Pengeluaran	1.787.697.266.036	1.794.699.972.096	1.797.683.358.148	1.810.632.893.167	1.807.036.975.386	1.815.068.120.093
	Prioritas I	1.567.570.605.036	1.574.573.311.096	1.577.556.697.148	1.590.506.232.167	1.586.910.314.386	1.594.941.459.093
1	Belanja Pegawai	1.103.811.434.068	1.107.439.696.548	1.110.208.295.790	1.115.983.816.529	1.122.108.568.498	1.129.854.796.365
2	Belanja operasional kantor (listrik, air, telpon dan internet)	46.258.881.000	47.385.857.580	47.600.644.390	59.774.658.670	60.053.988.920	60.338.905.760
3	Dana Desa	178.732.306.000	178.732.306.000	178.732.306.000	178.732.306.000	178.732.306.000	178.732.306.000
4	Dana Kelurahan	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
5	Belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
6	Dana Cadangan	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	-	-
7	Belanja tidak terduga	12.752.533.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
8	BLUD	177.322.464.088	177.322.464.088	177.322.464.088	177.322.464.088	177.322.464.088	177.322.464.088
9	Honor GTT/PTT GURU PAUD, SD, SMP NEGERI	29.392.986.880	29.392.986.880	29.392.986.880	29.392.986.880	29.392.986.880	29.392.986.880
	Prioritas 2	220.126.661.000	220.126.661.000	220.126.661.000	220.126.661.000	220.126.661.000	220.126.661.000
	Belanja prioritas kepala daerah	220.126.661.000	220.126.661.000	220.126.661.000	220.126.661.000	220.126.661.000	220.126.661.000
	Kapasitas Riil	489.221.759.064	468.484.976.114	496.240.930.475	519.567.625.676	514.336.753.222	517.702.282.476

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2025, diolah

2.3. Permasalahan dan Analisis Isu-Isu Strategis

2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan uraian pada gambaran umum kondisi daerah dan identifikasi berdasarkan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, maka rumusan permasalahan pembangunan daerah masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam

Penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya investasi dalam mitigasi bencana dan ketidakseimbangan ekosistem lingkungan. Penyajian data dan informasi rawan bencana belum efektif, sarana prasarana evakuasi serta pemanfaatan teknologi dan anggaran mitigasi belum optimal, dan kejadian bencana meningkat akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim yang tidak menentu. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan SDM dan perbedaan fokus prioritas dalam penanganan kebencanaan.

2. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar terus mengalami penurunan akibat meningkatnya alih fungsi lahan, pertumbuhan permukiman dan aktivitas usaha di wilayah sensitif seperti daerah aliran sungai, serta belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah, baik domestik maupun industri. Kerusakan ekosistem, berkurangnya ruang terbuka hijau, tingginya penggunaan kantong plastik, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan memperparah kondisi ini. Selain itu, keterbatasan sarana, prasarana, dan personel pengelola lingkungan turut menghambat upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.

3. Belum optimalnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan

- a. Kenaikan harga pangan yang terus meningkat menyebabkan masyarakat mengutamakan bahan pokok, sehingga keragaman konsumsi pangan masyarakat menurun. Hal ini diperburuk dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang B2SA, belum tercukupinya kebutuhan pangan di daerah, serta rendahnya produktivitas tanaman pangan. Selain itu, keamanan pangan belum terjamin karena masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menyadari pentingnya aspek tersebut.
- b. Terbatasnya kewenangan kabupaten dalam urusan energi, yang menghambat pengelolaan sumber daya energi secara optimal.

4. Belum optimalnya lingkungan hidup berkualitas

- a. Pemilahan sampah dari sumber, pengelolaan di tingkat desa, dan keberadaan bank sampah belum berjalan maksimal. Sistem pengangkutan dan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga belum efektif. Bertambahnya jumlah permukiman dan aktivitas di sepanjang daerah aliran sungai meningkatkan volume sampah dan tekanan terhadap lingkungan, yang tidak diimbangi dengan fasilitas pengelolaan yang memadai.
- b. Masih tingginya penggunaan kantong plastik, belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan seperti RDF, serta minimnya pengelolaan limbah domestik oleh

perusahaan menunjukkan lemahnya upaya pengurangan dan pengolahan sampah berbasis teknologi dan tanggung jawab produsen. Selain itu, konsep pengelolaan seperti *Sampah Tuntas Desa* belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM.

- c. Rendahnya kepedulian masyarakat, pola perilaku yang belum mendukung perlindungan lingkungan, serta minimnya edukasi menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah. Salah satu langkah penting yang perlu diperkuat adalah pemberian edukasi peduli kebersihan dan pengelolaan sampah sejak usia dini agar tercipta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

5. Belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi

- a. Bonus demografi yang sedang dihadapi Kabupaten Karanganyar belum dimanfaatkan secara optimal karena belum meratanya kualitas pendidikan dan keterampilan angkatan kerja usia produktif, masih tingginya angka pengangguran terbuka, serta terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi penduduk usia kerja. Di sisi lain, rendahnya kewirausahaan, keterbatasan akses terhadap pelatihan vokasi dan pembinaan usaha, serta belum meratanya literasi keuangan dan digital turut menghambat potensi ekonomi dari kelompok usia produktif. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi ini berisiko menjadi beban ketimbang peluang bagi pembangunan daerah.
- b. Pengelolaan administrasi kependudukan belum optimal ditandai dengan rendahnya kesadaran dan kepemilikan dokumen kependudukan, serta masih ditemukannya ketidaksesuaian database dalam pelayanan pencatatan sipil. Akses data dari Kemendagri yang terbatas, perubahan format Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari tahun ke tahun, serta belum optimalnya penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) turut menghambat layanan. Kurangnya kaderisasi inovator dan belum lengkapnya sarana prasarana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) di desa, diperparah dengan minimnya partisipasi desa/kelurahan dalam memberikan data balikan pencatatan BPP, juga menjadi kendala dalam perbaikan sistem layanan administrasi kependudukan secara menyeluruh.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Menurunnya kesejahteraan ekonomi

- a. Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Karanganyar masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya air tawar akibat keterbatasan lahan dan teknologi. Tingginya biaya produksi, terutama harga pakan ikan, masih menjadi hambatan utama bagi pembudidaya skala kecil. Selain itu, kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, termasuk dalam hal manajemen usaha dan penerapan teknologi budidaya modern, masih perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana pendukung, seperti jaringan irigasi kolam, unit pembenihan, dan akses pemasaran hasil perikanan, juga belum sepenuhnya memadai untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing sektor perikanan daerah.

- b. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata (DTW) yang memenuhi standar pelayanan, terutama dari sisi infrastruktur, amenitas, dan atraksi wisata. Promosi wisata belum dilakukan secara masif dan terintegrasi, sehingga belum mampu meningkatkan kunjungan wisatawan secara signifikan. Selain itu, belum terdapat penataan dan pembagian klaster wisata secara jelas seperti wisata budaya dan sejarah, religi, alam, serta edukasi yang menyebabkan pengembangan potensi wisata belum terarah dan kurang berkelanjutan. Infrastruktur penunjang kepariwisataan, seperti ketersediaan kantong parkir, fasilitas umum, serta aksesibilitas jalan menuju lokasi wisata, juga masih perlu mendapat perhatian serius agar mampu menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan. Di sisi lain, pengelolaan tempat wisata belum sepenuhnya memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, sehingga berisiko menimbulkan kerusakan alam jika tidak dikelola secara berkelanjutan.
- c. Pelaku usaha ekonomi kreatif (Ekraf) belum seluruhnya memiliki legalitas dan perlindungan hukum, seperti pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI), serta masih terbatasnya pembinaan dan akses pasar untuk pengembangan produk unggulan yang berdaya saing.
- d. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian seperti bibit berkualitas, alat pertanian berteknologi, pupuk, embung, dan irigasi. Minat generasi penerus terhadap dunia pertanian masih rendah, dan SDM pertanian belum berkembang menjadi petani modern. Selain itu, masih ditemukan hama dan penyakit tanaman, serta penyakit ternak, yang menghambat optimalisasi produksi peternakan.

2. Belum meratanya kesehatan untuk semua

- a. Masih terdapat tantangan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Karanganyar, antara lain ditunjukkan oleh masih adanya kasus kematian ibu dan anak, serta kematian akibat penyakit menular seperti demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis (TBC), dan HIV-AIDS yang belum dapat ditanggulangi secara optimal. Selain itu, tren peningkatan kasus kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) atau penyakit degeneratif juga menjadi perhatian. Permasalahan lain yang turut berkontribusi adalah masih adanya pasien yang menolak pengobatan atau putus berobat. Meskipun cakupan Jaminan Kesehatan Nasional melalui *Universal Health Coverage* (UHC) telah mencapai lebih dari 95%, tingkat keaktifan peserta masih tergolong rendah, yakni sebesar 76%.
- b. Di sisi pelayanan kesehatan, masih terdapat dua rumah sakit yang belum mengajukan survei akreditasi, yang berimplikasi pada mutu layanan. Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) juga menghadapi kendala, khususnya pada definisi operasional Pilar 4 dan Pilar 5 yang belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan di lapangan. Di tingkat layanan primer, masih terdapat dua puskesmas yang belum memenuhi kriteria ketersediaan sembilan jenis tenaga kesehatan strategis,

yang berdampak terhadap efektivitas layanan. Selain itu, masalah gizi juga masih menjadi isu penting, terutama pada kelompok ibu hamil dan balita, yang memerlukan penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar perlu terus didorong guna mendukung pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

3. Belum optimalnya pendidikan berkualitas yang merata

- a. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar, disertai dengan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik pada jenjang SD dan SMP sederajat. Selain itu, masih terdapat anak usia 5–6 tahun yang belum mengakses pendidikan anak usia dini, serta anak usia 7–15 tahun yang belum mendapatkan pendidikan formal, yang mencerminkan belum meratanya cakupan layanan pendidikan dasar.
- b. Sarana dan prasarana pendidikan juga perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam penyediaan fasilitas belajar yang memadai, akses pendidikan yang murah, terjangkau, berkualitas, dan tidak jauh dari tempat tinggal siswa. Hal ini penting untuk memastikan pemerataan kesempatan belajar serta mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terutama di wilayah terpencil dan perdesaan.
- c. kebutuhan akan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mencukupi baik dari segi jumlah maupun kompetensi juga harus menjadi fokus utama, terutama untuk mengisi kekurangan di daerah-daerah yang masih mengalami ketimpangan distribusi guru dan tenaga kependidikan. Upaya perencanaan dan pemenuhan formasi guru yang berbasis kebutuhan riil sangat penting dalam mendukung peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan.

4. Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif

Belum optimalnya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban hidup masyarakat miskin, yang diperburuk oleh ketergantungan kelompok miskin pada bantuan pemerintah dan kerentanan sosial, serta kurangnya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan sendiri. Selain itu, belum semua PPKS memperoleh perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial, data tunggal untuk penanganan PPKS belum terbentuk, dan sarana prasarana TMP yang masih belum sesuai dengan standar.

5. Belum optimalnya pemajuan masyarakat yang beragama dan berbudaya

Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda, pengelolaan serta pengembangan kesenian tradisional, dan pengelolaan tempat bersejarah, yang diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya daerah. Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik, terbatasnya peran perempuan dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan partai politik (Parpol), serta kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya legalitas kelembagaan Ormas, LSM, dan lembaga keagamaan, ditambah dengan cakupan pembinaan

wawasan kebangsaan dan kemasyarakatan yang masih terbatas di perkotaan.

6. Belum optimalnya keluarga berencana, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

- a. Pengendalian penduduk dan pelaksanaan program keluarga berencana belum optimal, ditandai dengan masih ditemukannya kelahiran pada usia anak, tingginya angka *drop out* peserta KB, serta rendahnya capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Selain itu, pendampingan dan penanganan terhadap keluarga berisiko stunting juga belum berjalan secara maksimal.
- b. Masih adanya kekurangan dalam pengelolaan anggaran responsif gender, yang berdampak pada belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta berlanjutnya pernikahan anak di bawah umur, yang semuanya memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah

- a. Banyak wirausaha belum menyadari pentingnya pendaftaran NIB, pelayanan perizinan dan pembinaan koperasi belum optimal, serta pembinaan dan bantuan untuk UKM terbatas akibat rendahnya kesadaran pelaku usaha dan data yang belum lengkap.
- b. Pelayanan perizinan dan non-perizinan, kemudahan perizinan berusaha, promosi, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal karena belum terpenuhinya regulasi dan kebijakan yang mendukung.
- c. Masih banyak pasar yang tidak memenuhi standar kelayakan fungsi, daya beli yang tidak stabil, kompetisi produk asing yang meningkat, serta keterbatasan SDM di sektor perdagangan, sementara di sisi lain, pendataan dan pengembangan IKM di Kabupaten Karanganyar juga terbentur oleh ketidaklengkapan data, rendahnya kesadaran IKM dalam pelaporan, dan pengembangan serta distribusi pemasaran yang belum optimal.
- d. Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Karanganyar belum berjalan optimal, ditandai dengan masih lemahnya pengelolaan dan pembinaan desa menuju desa mandiri. Pengelolaan ekonomi desa juga belum maksimal, yang tercermin dari peran BUMDes dan BUMDesma yang masih terbatas. Dukungan lintas sektor dalam mewujudkan desa mandiri juga belum terpadu, sementara potensi unggulan desa belum dikelola secara maksimal untuk mendukung produk unggulan daerah.
- e. Lembaga kemasyarakatan desa belum berfungsi optimal. Pengembangan tiga kawasan perdesaan strategis, Beras Organik Bergizi, dan Agrowisata Ngargoyoso) yang telah mampu memberikan dampak kesejahteraan masyarakat, sedangkan kawasan pedesaan purba belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal.

2. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja, kompetensi pencari kerja, dan sinkronisasi data dengan stakeholder terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar belum

optimal. Pendidikan vokasi belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI), sehingga lulusan sering kali tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja. Rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja juga menjadi penghambat dalam peningkatan daya saing daerah.

- b. Perlunya perhatian yang intens terhadap kondisi ketenagakerjaan dan iklim usaha yang sedang tidak stabil, karena situasi ini dapat berdampak langsung pada peningkatan angka pengangguran terbuka dan potensi bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar. Penanganan masalah ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut pelatihan dan penempatan kerja, tetapi juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif.
- c. Penyelenggaraan perpustakaan dan pemahaman literasi numerasi di kalangan pendidikan belum optimal, dan pembinaan perpustakaan masih terbatas.
- d. Pembinaan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Karanganyar belum optimal, ditandai dengan masih kurangnya peran organisasi pemuda dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam mendorong partisipasi pemuda. Pembinaan cabang olahraga dan gerakan pramuka juga belum maksimal dalam meningkatkan prestasi pemuda dan pengembangan olahraga masyarakat.

3. Belum optimalnya daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah

- a. Penyelenggaraan jalan, sistem drainase perkotaan, pengelolaan sumber daya air, dan pengendalian banjir di Kabupaten/Kota masih belum optimal, begitu pula dengan perencanaan tata ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pemenuhan kebutuhan air minum, dan kualitas jasa konstruksi yang perlu ditingkatkan. Ketersediaan air minum memerlukan perhatian lebih, terutama dalam menghadapi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan domestik yang terus meningkat. Upaya menjaga kelestarian daerah resapan air, seperti di Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatiyoso, dan Kecamatan Tawangmangu, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ketersediaan air tanah dan mencegah kekeringan di musim kemarau. Selain itu, pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air yang ada juga perlu diperkuat melalui perlindungan vegetasi, pengendalian alih fungsi lahan, serta edukasi masyarakat untuk menjaga ekosistem lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Tata kelola kawasan perkotaan juga perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam penyediaan dan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai serta pengembangan kawasan yang ramah bagi pejalan kaki (*pedestrian-friendly*) untuk mendukung kualitas hidup masyarakat, estetika kota, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
- c. Masih terdapat backlog rumah, rumah yang tidak layak huni, serta kawasan kumuh yang penanganannya terbatas, selain itu masih adanya PSU yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah dan rendahnya komitmen pengembang untuk melakukan registrasi.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas, penerangan jalan umum (PJU) di lokasi rawan kecelakaan,

serta konektivitas antar wilayah dengan transportasi massal masih belum optimal.

- e. Penggunaan trotoar di beberapa kawasan Kabupaten Karanganyar belum sesuai dengan fungsi utamanya sebagai ruang khusus bagi pejalan kaki. Banyak trotoar yang dialihfungsikan secara ilegal, seperti untuk parkir kendaraan, lapak pedagang kaki lima, atau area usaha lainnya, sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Kondisi ini mencerminkan kurang optimalnya pengawasan, penataan ruang publik, dan penegakan aturan pemanfaatan fasilitas umum. Upaya pengembalian fungsi trotoar sebagai ruang pedestrian yang aman, ramah, dan inklusif perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan tata kota yang tertib, manusiawi, dan berkelanjutan.

D. Aspek Pelayanan Umum

1. Masih terdapat keterbatasan dalam pemerataan informasi publik, karena belum semua wilayah menerima informasi kegiatan penting daerah dan belum seluruh desa/kelurahan memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), ditambah dengan integrasi aplikasi yang belum optimal.
2. Penerapan Satu Data Indonesia juga belum berjalan efektif akibat belum terwujudnya data sektoral, keterbatasan SDM pengelola data, database yang belum terpadu, serta belum lancarnya pertukaran dan keterhubungan data antar sistem.
3. Aspek keamanan informasi juga masih menghadapi tantangan, antara lain kurangnya SDM, sarana prasarana yang belum memadai, serta rendahnya pemahaman OPD terhadap pentingnya keamanan informasi.
4. Pengelolaan kepegawaian belum optimal karena pembinaan karier dan penilaian kinerja belum berbasis kompetensi dan sistem merit, terbatasnya kuota CPNS, masih adanya pelanggaran disiplin, serta belum didukung kebijakan dan sistem pengembangan kompetensi yang memadai.
5. Pelaksanaan pengawasan belum optimal karena OPD dan desa belum sepenuhnya memahami tata kelola sesuai ketentuan, rekomendasi pengawasan belum menyentuh akar masalah, pelaporan keuangan sering terlambat, belum semua OPD menerapkan SPIP, serta terbatasnya jumlah dan kapasitas pejabat APIP.
6. Pelayanan publik belum optimal akibat dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum optimal, keterbatasan SDM, koordinasi yang belum maksimal, serta digitalisasi pelayanan yang belum optimal.
7. Pengelolaan arsip dinamis dan statis belum optimal akibat kurangnya personil khusus di OPD dan belum semua perangkat daerah melaksanakan pengarsipan sesuai standar.

2.6.2. Isu Strategis Daerah

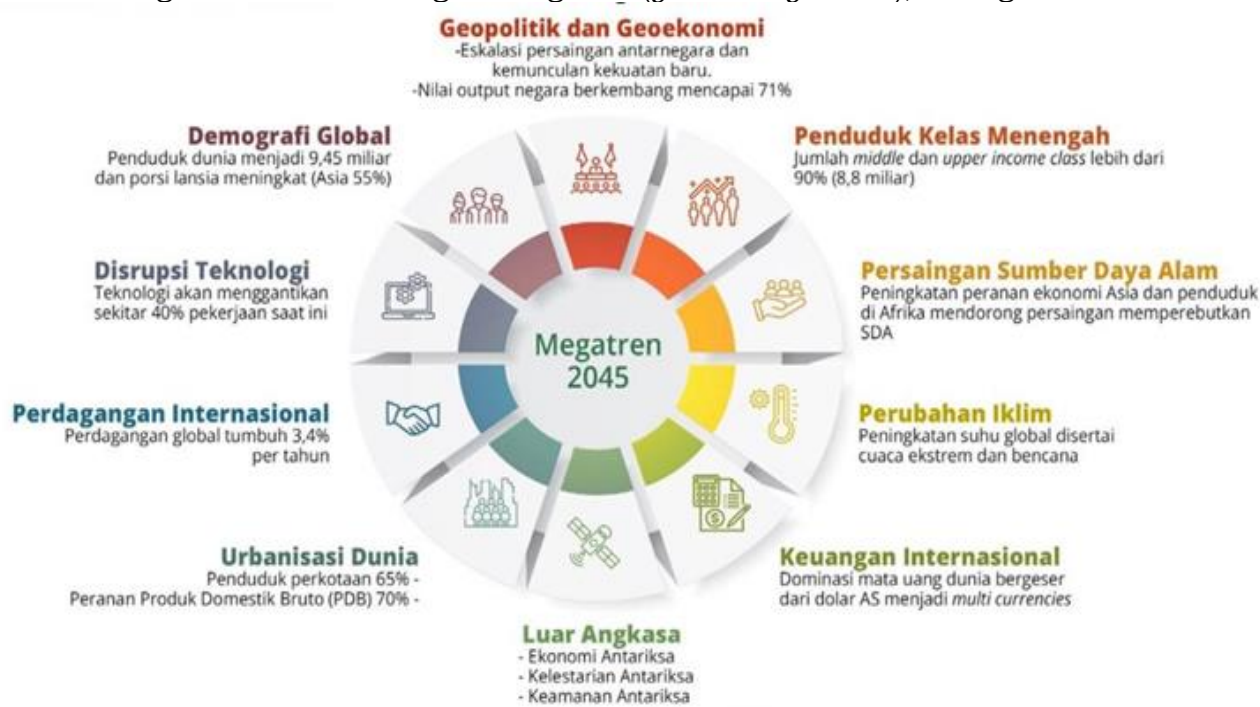
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah disimpulkan dari : a) isu strategis lingkungan (Isu Global, nasional, dan regional); b) mengidentifikasi isu strategis

lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai Tahun 2045; c) masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan d) potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam rangka perumusan isu strategis, dikemukakan sebagai berikut.

1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan isu global (*global megatrend*), sebagai berikut :



Sumber: Bappenas (2022)

Gambar 2.74. Megatren Global 2045

Penjelasan masing-masing kecenderungan besar (*Global Megatrend*) diuraikan di bawah ini.

Tabel 2.74. Isu Strategis Internasional dan Tantangan Pembangunan

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
1	Demografi Global	Perkembangan penduduk tahun 2050 diproyeksikan menjadi sebanyak 9,45 milyar jiwa dan proporsi Lansia di Asia (menjadi 55%); dengan kecenderungan pertumbuhan semakin menurun. Tantangan pembangunan terkait pemenuhan pangan, energi dan air bersih.
2	Geopolitik dan Geoekonomi	Meningkatnya persaingan geopolitik global yang berdampak luas pada tantangan global, munculnya potensi kekuatan baru negara Asia – Pasifik dan peran negara sedang berkembang semakin penting.
3	Distrupsi Teknologi	Perkembangan Iptek yang pesat, IoT, dan pemanfaatan robotik yang cepat akan menggantikan 40% tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan baru dengan pemanfaatan TIK.
4	Urbanisasi Dunia	Jumlah penduduk perkotaan di negara industri baru, dimana 95% berada di perkotaan dan perkembangan Iptek yang memacu pelayanan perkotaan.

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
5	Perdagangan Internasional	Tantangan perkembangan peningkatan peran negara berkembang, semakin menggantikan peran negara maju. Meningkatnya kerjasama perdagangan intra-Asia terutama Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN.
6	Keuangan Internasional	Perkembangan bank digital, pemanfaatan finansial teknologi dalam keuangan semakin penting dan meningkatkan efisiensi dan semakin pesatnya persaingan antar Lembaga.
7	Kelas Menengah	Meningkatnya kelompok kelas menengah pada Tahun 2045 menjadi 90% dari populasi dunia, Proporsi kelas menengah meningkat mendorong meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru terutama di Asia (Tiongkok dan India) serta negara-negara ASEAN
8	Persaingan Sumberdaya Alam	Tantangan terbatasnya sumberdaya alam, migas, energi dan pangan serta perkembangan energi baru dan terbarukan.
9	Perubahan Iklim	Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi Generasi IV dan tenaga surya dan tenaga bayu/angin/ gelombang laut.
10	Pemanfaatan Luar Angkasa	Tantangan dalam pemanfaatan angkasa luar secara bersama-sama dan menjadi ruang strategis dalam pengembangan industri antariksa. Posisi strategis Indonesia sangat menguntungkan bagi perkembangan masa datang.

2. Isu Jangka Panjang Nasional

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka panjang nasional yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

Tabel 2.75.

Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Produktivitas Rendah	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2. IPTEKIN dan Riset Lemah	a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3. Deindustrialisa Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Pariwisata Di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5. Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
8. Kualitas SDM yang rendah	Kualitas pendidikan yang masih rendah. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi : belum meratanya akses mendapatkan pelayanan kesehatan, rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
9. Kemiskinan	Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada Tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
10. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	a. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
11. Pembangunan belum berkelanjutan	a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D. e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat. h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan. j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	sasaran jangka panjang. k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.
13. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	a. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan. f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

3. Isu Kewilayahan Jawa Bali dari Evaluasi Pembangunan

- Masih tingginya kesenjangan antar wilayah karena persebaran pembangunan ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan.
- Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa.
- Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai dan polusi udara akibat industri.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
- Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- Belum optimalnya upaya penanganan kemiskinan dalam mengarungi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi COVID-19.

4. Isu Jangka Menengah Nasional

- Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia.
- Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral.
- Penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level Global.
- Tantangan transisi energi, namun ada peluang untuk pemerataan
- Aging population* negara maju.

5. Isu Strategis Transformasi

a. Isu Strategis Transformasi Sosial

1) Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan responsiveness sistem kesehatan di seluruh wilayah.

- a) AKI masih tinggi (189/100.000)
- b) Stunting masih tinggi (21,6%)
- c) Prevalensi obesitas 21,6%
- d) Kasus baru TB peringkat ke-2 dunia
- e) Kasus kusta peringkat ke-3 dunia
- f) 51,14% puskesmas tidak tersedia 9 jenis Nakes sesuai standar
- g) 24,7% RSUD Kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
- h) 36,5% Rumah Sakit terakreditasi paripurna
- i) 56,4% FKTP terakreditasi

2) Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

- a) Layanan pendidikan belum merata
- b) Kualitas pendidikan masih rendah
- c) Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas
- d) Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah
- e) Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah
- f) Daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah

3) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditunjukkan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

- a) Akurasi program bantuan sosial masih rendah
- b) Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim
- c) Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan
- d) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah
- e) Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan
- f) Program Jaminan Sosial belum optimal

b. Isu Strategis Transformasi Ekonomi

1) Industri

- a) Deindustrialisasi dini, ditunjukkan oleh penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 32,0% (2002) menjadi 18,3% (2022)
- b) Rendahnya produktivitas tenaga kerja, dimana produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2020 setara dengan produktivitas Tenaga Kerja Jepang di Tahun 1960-an (APO, 2022)

- c) Kompleksitas dan daya saing produk, produk industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global padahal Malaysia dan Thailand semakin bergerak ke arah ekspor produk knowledge intensive (Basri, 2023;, 2021)
- d) Adopsi teknologi kian masif, sementara TK di industri pengolahan masih didominasi oleh unskilled labour (89,3%, 2022) dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi yg berasal dari program STEAM (BPS, 2022; WEF, 2020; WB, 2017)
- e) Mismatched produksi dengan permintaan global, contoh untuk produk HS 85, Indonesia mengekspor produk yang permintaannya melambat dalam 5 Tahun terakhir (Trademap, 2023)
- f) Rendahnya kemampuan inovasi, dalam Global Innovation Index Tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 132 negara
- g) Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih di atas 60% (IESR, 2022)

2) Pariwisata

- a) Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (overtourism) dan akulturasi budaya dari wisatawan
- b) Terbatasnya amenities, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan
- c) Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman
- d) Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
- e) Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal.

3) Ekonomi Kreatif

- a) Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
 - Indeks Kekayaan Intelektual Indonesia berada pada posisi 50 dari 55 negara, di bawah rata-rata nilai Indeks di Asia (2023)
 - Merujuk data yang sama pilar komersialisasi KI menjadi skor terendah dengan 2,5 skala 100
- b) Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas, sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun kebijakan
- c) Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
- d) Daya saing SDM Ekonomi kreatif yang rendah, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual
- e) Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama di daerah.

4) UMKM dan Koperasi

Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi, dan inovasi usaha. Sementara itu, jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah.

5) Ketenagakerjaan

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia (berada di bawah rata-rata negara kawasan ASEAN), menjadi tantangan besar dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

6) Badan Usaha Milik Negara

- a) Kinerja BUMN
 - Masih rendahnya ROA BUMN (3,05% di Tahun 2022)
 - Masih rendahnya Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan negara (Rp573,6 Triliun pada Tahun 2022)
- b) Daya Saing BUMN
 - Jumlah BUMN Indonesia yang masuk peringkat global masih di bawah 10 BUMN
 - Masih rendahnya Total Asset Turnover BUMN (0,3% pada Tahun N (0,3% pada Tahun 2022)
- c) Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan
 - Masih rendahnya Rasio capex BUMN terhadap PDB (1,3% pada Tahun 2022)
 - Masih rendahnya rasio Jumlah TJSL BUMN yang disalurkan kepada masyarakat terhadap laba bersih BUMN (1,5% pada Tahun 2022)/Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep Creating Shared Value (CSV).

7) Percepatan Transisi Energi

- a) Ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terus menurun
- b) Emisi GRK sektor energi yang cukup tinggi terutama sektor pembangkit dan transportasi;
- c) Potensi energi terbarukan yang sangat besar dan pemanfaatan masih sangat kecil
- d) Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai
- e) Keterbatasan dukungan pendanaan transisi energi
- f) Pemanfaatan energi baru yang belum berkembang
- g) Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil dan keterbatasan sistem penyaluran
- h) Ketimpangan dan rendahnya kualitas pelayanan ketenagalistrikan
- i) Ketergantungan pada produksi impor
- j) Belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan termasuk kebijakan tarif dan harga
- k) Terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi
- l) Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi (termasuk digitalisasi).

8) Ekonomi Sirkuler Industri

- a) Pemanfaatan limbah hasil sisa pembakaran di PLTU (Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)) yang belum optimal
- b) Rendahnya kapasitas pengolahan limbah elektronik (e-waste)
- c) Rendahnya tingkat pengumpulan sisa material untuk suplai industri daur ulang
- d) Ketergantungan terhadap bahan baku kritis industri
- e) Pemanfaatan limbah B3 untuk bahan bakar dan bahan baku industri masih terbatas

- f) Industri yang menerapkan standar industri hijau masih terbatas
- g) Desain produk dan kemasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri daur ulang
- h) Kurangnya kesadaran industri pariwisata akan penerapan ekonomi sirkular dan prinsip berkelanjutan dalam operasional kegiatan usaha pariwisata
- i) Kurangnya fasilitas pengumpulan sisa produk dan material tekstil dan elektronik
- j) Belum adanya standar pengelolaan limbah sisa konstruksi
- k) Belum adanya rantai pasok bahan baku sirkular yang terintegrasi
- l) Beberapa material membutuhkan teknologi tinggi untuk proses daur ulangnya
- m) Tata kelola terkait ekonomi sirkular masih belum optimal.

9) Tenaga Kerja Hijau

- a) Rendahnya pemahaman mengenai pekerjaan hijau (green jobs)
- b) Terbatasnya data dan informasi mengenai pasar kerja hijau
- c) Belum terintegrasinya kebijakan dan peraturan terkait pekerjaan hijau (green jobs)
- d) Belum memadainya sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja hijau
- e) Belum memadainya akses pendanaan dan insentif dalam pengembangan pekerjaan hijau (green jobs)
- f) Terbatasnya panduan dan model pengembangan pekerjaan hijau (green jobs) baik di tingkat nasional maupun daerah
- g) Masih lemahnya peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau (green jobs)

10) Pengelolaan Hutan Lestari

- a) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional masih rendah
- b) Rendahnya Produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
- c) Belum berkembangnya Bioekonomi Sektor Kehutanan
- d) Belum tuntasnya tata batas kawasan hutan
- e) Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial belum mencapai kondisi ideal
- f) Terbatasnya kewenangan dan peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 6
- g) Proses transaksi izin dan persetujuan bisnis yang belum efektif
- h) Keterlibatan para pihak/multisektor yang belum optimal.

11) Digital

- a) Belum Optimalnya Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional
 - 78% ekonomi nasional terpusat di Jawa dan Sumatera (BPS, 2022).
 - Setiap 1% peningkatan proporsi penduduk perkotaan di Indonesia pada Tahun 1996-2016, hanya mampu mendorong peningkatan PDB per kapita sebesar 1,4%, berbeda dengan China sebesar 3%. (World Bank, 2019).
- b) Digitalisasi Sektor Strategis

- Terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berinternet Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI)
- Adopsi digital bagi para pelaku UMKM masih rendah (e-commerce)
- Inovasi dan pengembangan keuangan digital (FinTech)
- Pengelolaan destinasi wisata, pertanian, perikanan, logistik dan industri berbasis teknologi
- c) Aspek Pendukung dan Akselerator Transformasi Digital
 - Keamanan siber nasional
 - Perlindungan data pribadi dan privasi
 - Literasi digital masyarakat belum merata
 - Penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas untuk menguasai dan menerapkan adopsi teknologi
 - Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Blockchain.

12) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

- a) Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas
 - Pusat pertumbuhan masih berfokus di Jawa
 - Infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi
 - Kinerja sistem logistik nasional belum optimal
 - Pembangunan wilayah tidak merata
 - Ketimpangan pembangunan antardaerah dan kebutuhan pendekatan
- b) Perdagangan antar wilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global masih belum optimal
 - *Supply Side* :
 - 1) Keterkaitan rantai nilai antarwilayah masih rendah serta ekspor serta terpusat di Pulau Jawa
 - 2) Masih rendahnya awareness daerah untuk diversifikasi ekspor
 - 3) Masih rendahnya daya saing ekspor domestik
 - 4) Pembiayaan ekspor masih terhambat
 - 5) Masih belum terintegrasinya fasilitasi dan informasi terkait perdagangan
 - 6) Keterbatasan informasi dalam mengakses data sektor perdagangan jasa
 - 7) Sektor jasa memiliki regulasi yang saling tumpang tindih
 - 8) Standarisasi produk ekspor yang masih belum optimal
 - 9) Masih belum optimalnya ekosistem persaingan usaha
 - *Demand Side* :
 - 1) Daya saing produk sektor jasa yang masih rendah
 - 2) Minat pelaku industri sektor jasa yang masih rendah untuk masuk ke dalam pasar global.
 - 3) Adanya kebijakan dekarbonisasi (*decarbonization policies*) di beberapa negara Peningkatan kebijakan proteksionisme serta trade barriers yang tinggi (bea masuk, NTMs) di beberapa negara.
- c) Belum optimalnya penguatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global
 - Infrastruktur yang belum memadai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

- Kekurangan pembiayaan, terutama di daerah dengan sumber daya keuangan terbatas.
 - Perlunya pasar yang kuat untuk mendukung investasi.
 - Biaya tinggi dan hambatan dalam menarik investasi.
- d) Daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global perlu diperkuat
- Masih terdapat regulasi yang menghambat perbaikan iklim berusaha
 - Terbatasnya investasi produktif dan berkualitas yang mendukung upaya transformasi ekonomi
 - Tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang menghambat pembangunan infrastruktur.
 - Koordinasi cermat diperlukan dalam integrasi moda transportasi.

13) Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

- a) Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas
- Pusat pertumbuhan masih berfokus di Jawa
 - Infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi
 - Kinerja sistem logistik nasional belum optimal
 - Pembangunan wilayah tidak merata
 - Ketimpangan pembangunan antardaerah dan kebutuhan pendekatan
- b) Pemenuhan Layanan Perkotaan yang Belum Memadai dan Inklusif
- Hanya daerah perkotaan di 14 Provinsi memiliki akses <0,5 km terhadap shelter angkutan umum (BPS, 2022)
 - RT perkotaan mendiami rumah layak huni sebesar 63,45% dan dengan akses air minum sebesar 41,95% (BPS, 2022)
- c) Tata kelola yang Belum Terpadu, Inovatif, dan Kolaboratif
- Peran Pemerintah Provinsi dalam mendorong kerjasama pengelolaan Wilayah Metropolitan masih rendah (Pemkot Mataram, 2022)
 - Dari 2000 RDTR pada 514 kab/kota, baru tercapai 357 RDTR, dengan 40 RDTR merupakan RDTR Kota Otonom (Kemen ATR/BPN, 2022)
- d) Masalah Sosial-Ekonomi di Masyarakat Perkotaan
- Angka rasio gini perkotaan 0,409 d lebih tinggi dibandingkan perdesaan (BPS, 2022).
 - Terdapat 47,62% proporsi lapangan kerja informal di perkotaan (BPS, 2022).
 - Tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 7,29% (BPS, 2022).
- e) Pola Pembangunan Perkotaan yang Menyerak
- Sumber utama urbanisasi adalah reklasifikasi desa menjadi kota sebesar 43% pada Tahun 2000-2010 (World Bank, 2019).
 - Pertumbuhan kawasan terbangun pinggiran kota berciri perdesaan sebesar 62,9% karena tumbuh industri dan aglomerasi penduduk baru (World Bank, 2019).
- f) Degradasi Lingkungan Perkotaan dan Rendahnya Ketangguhan Bencana
- 75% Kawasan Perkotaan Indonesia berada di daerah pesisir, rentan banjir, dan kenaikan muka air (World Bank, 2021).

- Kecenderungan keberhasilan pengurangan risiko bencana lebih besar terjadi pada Kota Besar dibandingkan Kota Kecil (Bappenas, 2019)

c. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

1) Integritas Partai Politik

Integritas Partai Politik belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal (meliputi standar etik parpol, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi berjenjang belum terlembaga, rekrutmen politik secara tertutup, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol belum optimal).

2) Sistem Pengajian Tunggal

Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif.

3) Kualitas Regulasi

Hyper regulasi, kewenangan regulasi yang tersebar, belum memadai SDM regulasi, partisipasi yang belum optimal.

4) Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan

Belum adanya sistem penilaian Kementerian/Lembaga/Daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran dan integritas.

5) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat.

6) Manajemen Talenta

Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D (Isu Transformasi Manajemen ASN).

7) Integrasi Proses Bisnis

Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi.

d. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

1) Stabilitas Makro

Risiko climate action; Deglobalisasi; Krisis lapangan pekerjaan; Krisis. utang, Konfrontasi geoekonomi; Asset bubble burst; Inflasi masih tinggi; tingkat suku bunga higher for longer; tensi geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlambatan ekonomi China, AS da Eropa, serta divergensi ekonomi global; transisi demografi; perubahan iklim; potensi pandemi ke depan; digitalisasi; rendahnya penerimaan perpajakan; masih terbatasnya belanja negara, serta imbal hasil obligasi yang tinggi.

2) Pertahanan

Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang yang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata *Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive* (CBRNE) termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya.

3) Politik Luar Negeri

Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, beberapa di antaranya seperti konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global dan tren global economic decoupling; belum terselesaikannya perundingan batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.

4) Hukum

Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM; Rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan; Keterbatasan akses terhadap keadilan; dan Kelembagaan penegak hukum yang belum profesional.

5) Keamanan

Insurgensi; konflik internal termasuk konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Nasional (IIVN) dari serangan *cyber*.

6) Demokrasi

Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) Permasalahan politik electoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA; (5) Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.

6. Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- a) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
- b) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- c) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana
- d) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
- e) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat
- f) Tata kelola pemerintahan yang dinamis

7. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Karanganyar

Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

- a) SDM *Equity* dan Inklusi
- b) Pertumbuhan Ekonomi
- c) Tingkat Pengangguran
- d) Kemiskinan
- e) Tata Kelola Pemerintahan
- f) Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana
- g) Kondusivitas

8. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar

Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut :

- a) Penurunan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- b) Rendahnya penyediaan infrastruktur;
- c) Peningkatan angka Kemiskinan;
- d) Penurunan kualitas pelayanan kesehatan;
- e) Rendahnya Daya Saing Ekonomi;
- f) Penurunan Ketahanan Pangan;
- g) Pencemaran lingkungan (limbah industri, limbah domestik);
- h) Persampahan; dan
- i) Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.

9. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Karanganyar

Dalam rangka perumusan isu strategis Kabupaten Karanganyar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 2.76.

Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Karanganyar

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS RPJPN	ISU STRATEGIS RPJPD PROVINSI	ISU STRATEGIS RPJPD KAB. KARANGANYAR	ISU RPJMN	ISU KLHS RPJMD KAB. KARANGANYAR	ISU RPJMD KAB. KARANGANYAR
1. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 2. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 3. Perubahan iklim	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Bencana	Isu ekonomi : industri, pariwisata, UMKM dan Koperasi, BUMN, Ketenagakerjaan, percepatan transisi energi, Ekonomi sirkuler industri, tenaga kerja hijau, pengelolaan hutan lestari, Digital, Integrasi ekonomi domestik dan global, dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.	1. Penurunan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan; 2. Rendahnya penyediaan infrastruktur; 3. Pencemaran lingkungan (limbah industri, limbah domestik); 4. Persampahan; dan 5. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.	- Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kebencanaan
4. Kemiskinan 5. Kesehatan 6. Pendidikan 7. Pangan dan gizi	2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan	4. Ketahanan pangan yang berkelanjutan	1. Tingkat Pengangguran 2. Kemiskinan	Isu Sosial : kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang	6. Peningkatan angka Kemiskinan;	- Kemiskinan - Kualitas SDM yang Berkarakter

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS RPJPN	ISU STRATEGIS RPJPD PROVINSI	ISU STRATEGIS RPJPD KAB. KARANGANYAR	ISU RPJMN	ISU KLHS RPJMD KAB. KARANGANYAR	ISU RPJMD KAB. KARANGANYAR
	kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	3. SDM Equity dan Inklusi	merata, perlindungan sosial yang adaptif	7. Penurunan kualitas pelayanan kesehatan; 8. Penurunan Ketahanan Pangan;	- Tingkat Pengangguran
8. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	6. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	4. Tata kelola pemerintahan	Isu tata kelola : Integrasi partai politik, Sistem Pengajian Tunggal, Kualitas Regulasi , Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan, Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik, Manajemen Talenta, Integrasi Proses Bisnis		- Tata Kelola Pemerintahan
9. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas	7. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	5. Pertumbuhan Ekonomi	Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia : Supremasi Makro, Pertahanan, Politik Luar Negeri,	9. Rendahnya Daya Saing Ekonomi;	- Pertumbuhan Ekonomi - Kemiskinan

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS RPJPN	ISU STRATEGIS RPJPD PROVINSI	ISU STRATEGIS RPJPD KAB. KARANGANYAR	ISU RPJMN	ISU KLHS RPJMD KAB. KARANGANYAR	ISU RPJMD KAB. KARANGANYAR
	ekonomi, diplomasi tangguh			Hukum, Keamanan, Demokrasi		
10. Gender	5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi	8. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	6. SDM Equity dan Inklusi 7. Kondusivitas	Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan ekologi : Isu Agama, Isu Budaya, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, Pangan, energi, kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati		- Kondusivitas Wilayah
11. Kesenjangan Kota dan Permukiman 12. Infrastruktur 13. Sumberdaya kelautan 14. Energi 15. Air bersih dan sanitasi 16. Ekosistem daratan	6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	9. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	8. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Bencana			Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kebencanaan

ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS RPJPN	ISU STRATEGIS RPJPD PROVINSI	ISU STRATEGIS RPJPD KAB. KARANGANYAR	ISU RPJMN	ISU KLHS RPJMD KAB. KARANGANYAR	ISU RPJMD KAB. KARANGANYAR
17. Kemitraan global	7. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	10. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	9. Tata kelola pemerintahan			

Berdasarkan analisis permasalahan, potensi, tantangan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka dikemukakan isu strategis pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkarakter

Kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter dengan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas dan perilaku hidup sehat masyarakat serta optimalisasi layanan kesehatan.

Kabupaten Karanganyar saat ini berada pada fase penting dalam pembangunan daerah, di mana kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat, menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial menuntut masyarakat Karanganyar untuk memiliki SDM yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas, disiplin, mandiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budaya lokal. Sayangnya, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi lulusan pendidikan formal dan non-formal di daerah ini. Selain itu, pergeseran nilai dan gaya hidup generasi muda juga menjadi perhatian tersendiri dalam membentuk karakter yang kuat dan tangguh.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu merumuskan kebijakan dan program yang holistik dan berkelanjutan, mulai dari sektor pendidikan, pelatihan vokasi, pembinaan generasi muda, hingga penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk karakter SDM. Penguatan pendidikan karakter sejak usia dini, integrasi nilai-nilai lokal dan budaya dalam kurikulum, serta peningkatan *soft skill* menjadi langkah-langkah penting yang harus diambil.

Isu ini juga sangat relevan dalam mendukung visi pembangunan jangka menengah daerah yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (*people centered development*). SDM yang unggul dan berkarakter adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi di tengah persaingan regional maupun global.

Dengan menjadikan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter sebagai isu strategis, Karanganyar dapat mempersiapkan generasi masa depan yang mampu membawa perubahan positif, menjaga kearifan lokal, serta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Struktur perekonomian Karanganyar didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; serta jasa pendidikan.

Pertumbuhan perekonomian daerah semakin didorong optimalnya peran unggulan daerah, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif serta jasa-jasa modern. Perhubungan dan jaringan jalan dapat membuka pelayanan konektivitas antar wilayah dan kabupaten/kota sekitar serta bandara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah. Di

Kabupaten Karanganyar, pertumbuhan ekonomi menjadi isu strategis yang memegang peranan sentral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas basis penerimaan daerah.

Meskipun Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dalam beberapa tahun terakhir, tantangan ke depan masih cukup besar. Ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan industri pengolahan, membuat struktur ekonomi daerah rentan terhadap gejolak eksternal, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, maupun dinamika pasar global.

Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur pendukung ekonomi, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan merata. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian lokal juga masih menghadapi tantangan dalam hal permodalan, akses pasar, dan digitalisasi.

Untuk itu, dibutuhkan strategi pembangunan ekonomi daerah yang terintegrasi dan adaptif. Diversifikasi sektor ekonomi, peningkatan investasi, penguatan UMKM, pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan, serta optimalisasi sektor pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi langkah penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam mendorong inovasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda. Peningkatan kualitas infrastruktur, kemudahan berusaha, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel akan menjadi fondasi penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai isu strategis, Kabupaten Karanganyar menegaskan komitmennya untuk membangun ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing, demi terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Tingkat Pengangguran

Pengangguran terbuka masih cukup tinggi, rendahnya pendidikan dan keterampilan, produktivitas rendah serta budaya kerja. Upaya pengurangan pengangguran ke depan agar peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius di Kabupaten Karanganyar. Pengangguran tidak hanya berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, tetapi juga dapat memicu permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga meningkatnya beban sosial bagi pemerintah daerah.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pelatihan kerja, penyediaan informasi pasar kerja, dan fasilitasi penempatan tenaga kerja, kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja, terutama dari kalangan usia produktif dan lulusan pendidikan menengah serta tinggi. Selain itu, tantangan transformasi digital dan perkembangan industri juga menuntut tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (*link and match*).

Sebagian besar penduduk Karanganyar bekerja di sektor informal dan pertanian tradisional, yang rentan terhadap fluktuasi

ekonomi dan belum memberikan penghasilan yang stabil. Kurangnya akses terhadap pelatihan vokasi yang relevan, keterbatasan informasi pasar kerja, serta minimnya investasi di sektor padat karya juga memperparah kondisi ini.

Oleh karena itu, pengurangan tingkat pengangguran harus menjadi prioritas strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu memperkuat kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif melalui pengembangan pusat pelatihan kerja berbasis kebutuhan lokal, peningkatan kerja sama dengan sektor industri dan swasta, serta dorongan terhadap kewirausahaan dan pengembangan UMKM.

Selain itu, diperlukan pendekatan lintas sektor dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperluas investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, dan mendukung digitalisasi ekonomi kerakyatan. Dengan strategi yang tepat, pengangguran dapat ditekan secara signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Menjadikan penurunan tingkat pengangguran sebagai isu strategis adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa setiap warga Karanganyar memiliki kesempatan yang adil untuk bekerja, mandiri secara ekonomi, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

4. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun persoalan ini belum sepenuhnya dapat diatasi, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan kawasan terpencil. Kemiskinan bukan hanya tentang rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pelayanan dasar lainnya.

Sebagian besar masyarakat miskin di Karanganyar menggantungkan hidupnya pada sektor informal, pertanian subsisten, dan pekerjaan tidak tetap yang rentan terhadap guncangan ekonomi dan perubahan iklim. Selain itu, masih terdapat kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Upaya penanggulangan kemiskinan selama ini telah dilaksanakan melalui berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas layanan dasar. Namun, program-program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih antar program, belum tepatnya sasaran penerima manfaat, serta lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah.

Kemiskinan di Karanganyar harus dipandang sebagai isu strategis yang memerlukan pendekatan komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mengedepankan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta perlindungan sosial yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Pengurangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik melalui program pemerintah, sektor swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui akses pendidikan, kesehatan, peluang usaha ekonomi. Selain itu, upaya

peningkatan pendapatan kelompok miskin, mengurangi beban biaya hidup dan jaminan perlindungan sosial.

Kolaborasi lintas sektor, optimalisasi dana desa, dan pemanfaatan data kemiskinan yang valid dan mutakhir menjadi kunci untuk memastikan program tepat sasaran dan berdaya guna. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian dan ketahanan keluarga miskin.

Dengan menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai isu strategis, Kabupaten Karanganyar menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, serta memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indek Pembangunan Digital Indonesia (IPDI) bagi peningkatan kepercayaan publik, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi landasan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Birokrasi yang efisien, dipercaya dan pelayanan cepat, mudah meningkatkan iklim investasi/ bisnis.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan landasan utama bagi keberhasilan pembangunan daerah. Di Kabupaten Karanganyar, isu penguatan tata kelola pemerintahan menjadi sangat strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Saat ini, pemerintah daerah terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta menjamin transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Namun, tantangan masih tetap ada, seperti birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah inkonsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, tumpang tindih kewenangan antarperangkat daerah, serta masih adanya praktik pelayanan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat. Padahal, tata kelola yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk itu, Kabupaten Karanganyar perlu menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai isu strategis. Fokus utamanya meliputi percepatan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembangunan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Selain itu, peningkatan partisipasi publik, keterbukaan informasi, serta penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berbasis data menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya dan dicintai masyarakat.

Dengan memperkuat tata kelola pemerintahan, Kabupaten Karanganyar tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi, tetapi juga memastikan bahwa

setiap kebijakan dan program pembangunan dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

6. Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, dan kebencanaan merupakan isu strategis yang semakin krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar. Sebagai daerah dengan bentang alam yang beragam, dari wilayah pegunungan hingga dataran rendah, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi sekaligus kerentanan tinggi terhadap berbagai dampak lingkungan dan bencana alam.

Degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan, pencemaran air dan udara, serta pengelolaan sampah yang belum optimal menjadi tantangan nyata yang mengancam kualitas hidup masyarakat. Selain itu, fenomena perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, tanah longsor, banjir, dan kekeringan, yang berdampak langsung pada sektor pertanian, infrastruktur, dan keselamatan warga.

Di sisi lain, kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana masih perlu ditingkatkan. Penataan ruang yang belum sepenuhnya memperhatikan aspek mitigasi bencana, serta masih terbatasnya sistem peringatan dini dan data kebencanaan, menjadi faktor penghambat dalam membangun ketahanan wilayah.

Kabupaten Karanganyar perlu menjadikan isu kualitas lingkungan, perubahan iklim, dan kebencanaan sebagai prioritas strategis yang terintegrasi dalam seluruh aspek perencanaan pembangunan. Langkah-langkah penting meliputi penguatan kebijakan pelestarian lingkungan, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta penguatan sistem manajemen bencana yang berbasis masyarakat.

Penerapan prinsip pembangunan rendah karbon (*low carbon development*), peningkatan *green infrastructure*, rehabilitasi lahan kritis, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari arah kebijakan daerah. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sangat penting dalam membangun budaya sadar lingkungan dan tangguh bencana.

Dengan menjadikan kualitas lingkungan, perubahan iklim, dan kebencanaan sebagai isu strategis, Kabupaten Karanganyar menegaskan komitmennya untuk melindungi ekosistem, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan menciptakan masyarakat yang lebih adaptif, tangguh, dan siap menghadapi dinamika lingkungan masa depan.

7. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah merupakan elemen penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang stabil, aman, dan berkelanjutan. Kabupaten Karanganyar sebagai daerah yang terus berkembang, memerlukan kondisi wilayah yang aman dari konflik sosial, gangguan keamanan, dan ketegangan sosial-politik agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara optimal.

Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, potensi munculnya gesekan antar kelompok masyarakat, penyebaran informasi hoaks, intoleransi, hingga kriminalitas perlu diantisipasi secara cermat. Selain itu, tahun-tahun politik juga kerap

menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga ketertiban umum dan netralitas birokrasi.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang tidak stabil akan berdampak langsung terhadap turunnya minat investasi, terhambatnya pelayanan publik, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, menjaga kondusivitas wilayah harus dipandang sebagai isu strategis yang berkaitan erat dengan keberhasilan seluruh sektor pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu membangun sinergi yang kuat antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen warga dalam menciptakan suasana yang harmonis dan inklusif. Penguatan forum-forum komunikasi masyarakat, peningkatan peran intelijen kewilayahan, serta edukasi publik mengenai pentingnya toleransi, kebhinekaan, dan penyelesaian konflik secara damai menjadi langkah penting yang harus terus dikembangkan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi gangguan sosial, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing, akan memperkuat sistem keamanan berbasis partisipasi.

Dengan menjadikan kondusivitas wilayah sebagai isu strategis, Kabupaten Karanganyar menegaskan pentingnya stabilitas sosial dan keamanan sebagai pondasi utama bagi tercapainya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi RPJMD disusun berdasarkan visi Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada saat kampanye.

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode jabatan Tahun 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah **“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera**”. Visi Sesarengan Mbangun Karanganyar memiliki arti bersama sama membangun Karanganyar untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi perindustrian, pertanian dan pariwisata yang berintegritas, berdaya saing dan sejahtera. Visi ini memiliki makna sebagai berikut :

1. Bumi Intanpari adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan dengan potensi unggulan sektor perindustrian, pertanian dan pariwisata.
2. Berintegritas bermakna bahwa Kabupaten Karanganyar adalah suatu kabupaten yang memiliki pemerintahan dan masyarakat yang berakhlak, berbudi pekerti, berkarakter, jujur dan bertanggungjawab.
3. Berdaya saing adalah Kabupaten Karanganyar menjadi sebuah kabupaten yang mempunyai keunggulan komparatif dan sangat kompetitif jika dibandingkan dengan daerah lain dan menjadi daerah rujukan daerah lain di Indonesia.
4. Sejahtera bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Karanganyar di semua wilayah (17 kecamatan) akan dapat meningkatkan kesejahteraannya dan terpenuhi kecukupan kebutuhan dasarnya.

Misi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah **“tugas atau peran yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi”**. Misi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi, antara lain: mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan misi Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar yang terpilih:

1. Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.
Misi ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan dan prestasi dalam olahraga. Kemudian mendukung adanya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam rangka perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

2. Misi 2 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian
Misi kedua ini melakukan penguatan pada sektor ekonomi, memiliki pengertian untuk melakukan penguatan potensi perluasan peluang usaha dengan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendasari prinsip kemandirian. Sektor ekonomi didorong untuk memiliki prinsip mandiri yang berarti menonjolkan bidang unggulan pembangunan seperti kontribusi sektor unggulan daerah dalam rangka menumbuhkan nilai investasi daerah.
3. Misi 3 Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.
Misi ini dalam rangka mencapai peningkatan pemajuan daerah melalui penguatan infrastruktur pada desa dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta mendorong penanganan kemiskinan yang dengan kegotongroyongan dan mendorong karakter bangsa.
4. Misi 4 Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik
Pada misi ini mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan pengelolaan keuangan daerah, efisiensi dan efektifitas, peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan berbasis teknologi dan penguatan pencapaian Merit Sistem melalui peningkatan kompetensi ASN, penguatan tata kelola kepegawaian dan penguatan sistem kepegawaian.
5. Misi 5 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama
Pada Misi ini akan mendorong kemajuan kebudayaan melalui penguatan kelestarian cagar budaya dan budaya tak benda, penyelarasan dengan prioritas kabupaten dan perwujudan kualitas lingkungan hidup dan mendorong penurunan gas rumah kaca, termasuk penguatan pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah, peningkatan pengangkutan sampah serta pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan, dan pengurangan jumlah kasus konflik.

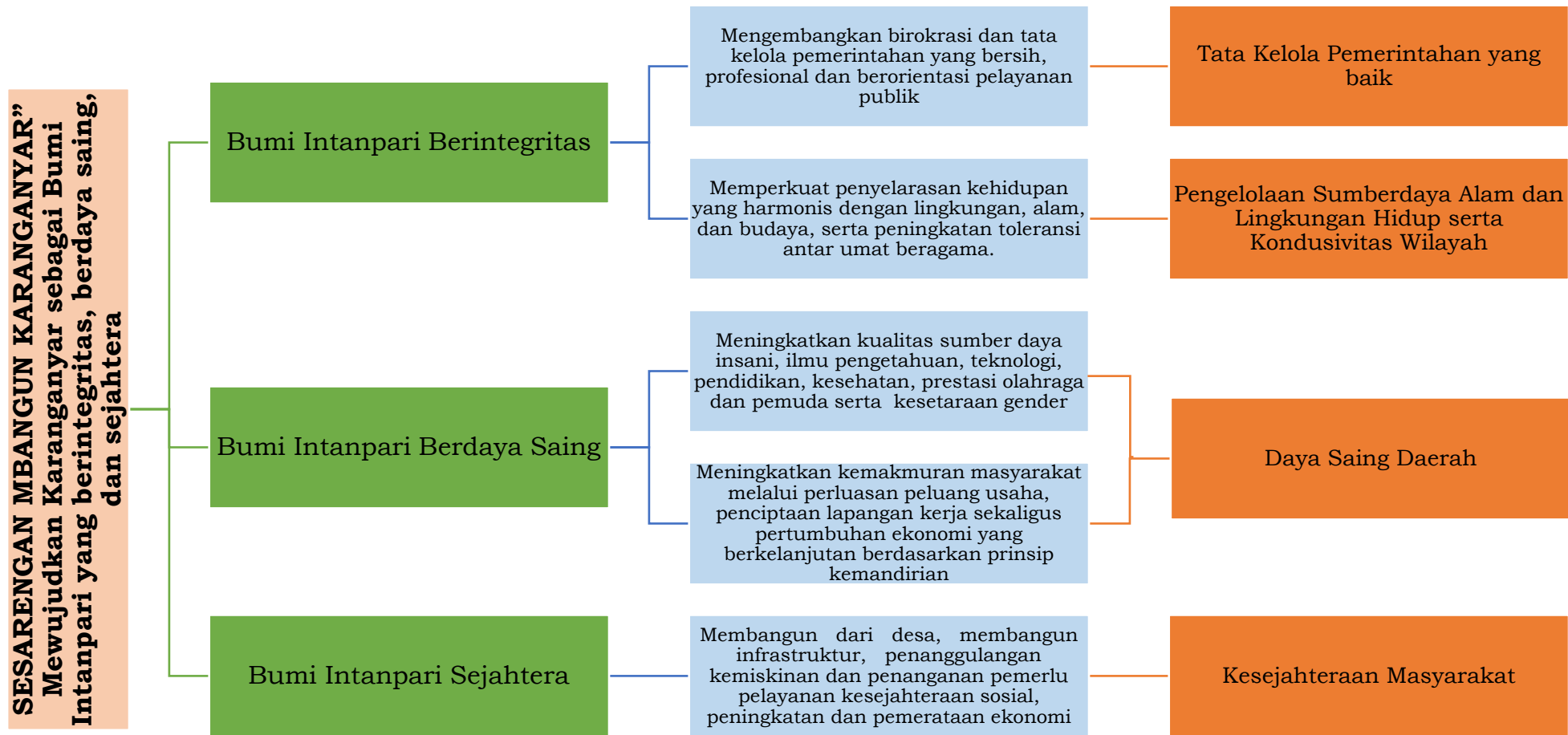
Keterkaitan Visi dengan Misi adalah sebagai berikut:

Frasa Berintegritas dalam Visi akan dicapai dengan Misi 4 yaitu mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik dan Misi 5 memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama.

Frasa Berdaya Saing dalam Visi akan dicapai melalui Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender dan Misi 2 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian.

Frasa Sejahtera dalam Visi akan dicapai melalui Misi 3 Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.

Keterkaitan Visi, Misi, Frase Misi dan Fokus Kerja Pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:



Gambar 3.1.
Keterkaitan Visi, Misi dan Fokus Kerja RPJMD Karanganyar Tahun 2025-2029

Tabel 3.1.
Kesesuaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025-2045

“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.	Visi selaras dengan Visi RPJPD KARANGANYAR <i>LIFE CENTER OF NUSANTARA 2045</i> : “MAJU, KOMPETITIF, DAN HARMONI”
1. Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.	Mewujudkan Kehidupan Sosial berkarakter
2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian	Mewujudkan Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan
3. Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi	
4. Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang Akuntabel, inovatif dan berdaya saing
5. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama	Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Tabel 3.2.
Kesesuaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029
dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.	“Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”
1. Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.	• Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian	• Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan; • Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi
3. Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi	• Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
4. Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas; dan Misi
5. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama	• Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;

Tabel 3.3.
Kesesuaian Visi RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.	Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045
Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak manusia (HAM)
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

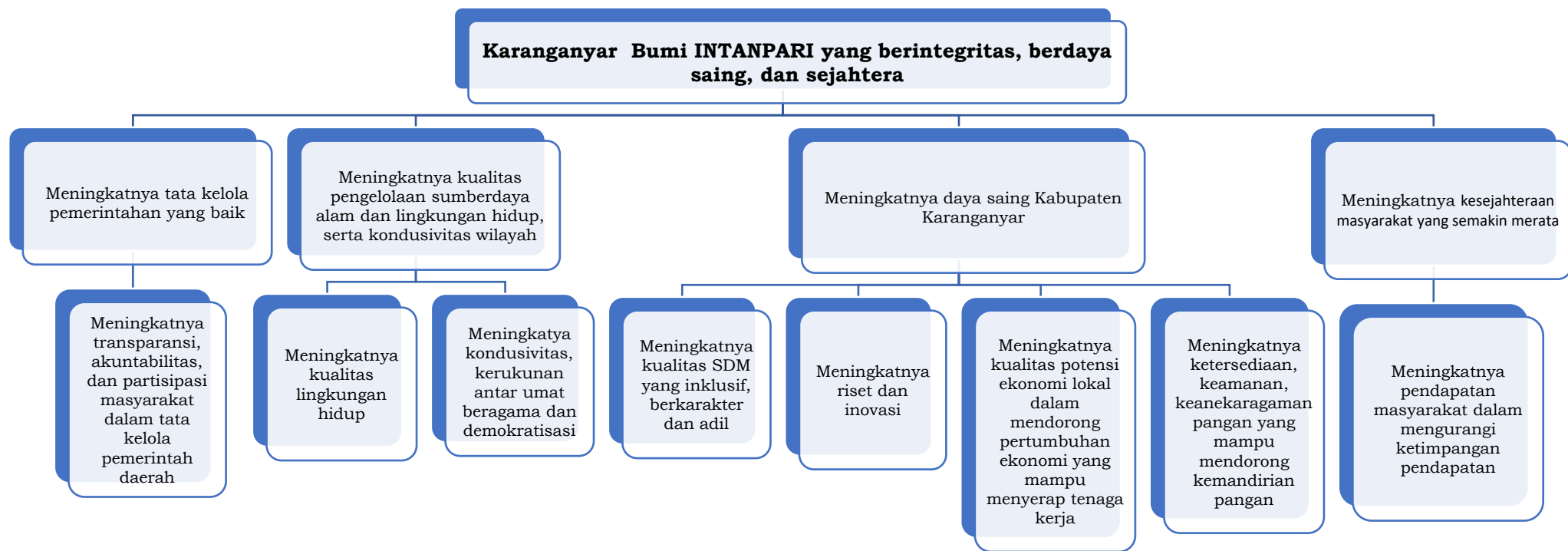
3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Rumusan Tujuan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah
3. Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai Visi Misi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran sebagai berikut;
 - 1) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah
2. Tujuan 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah, dengan sasaran sebagai berikut;
 - 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - 2) Meningkatnya kondusivitas wilayah kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi
3. Tujuan 3 Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar, dengan sasaran sebagai berikut;
 - 1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang inklusif, berkarakter dan adil
 - 2) Meningkatnya riset dan inovasi
 - 3) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja
 - 4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan
4. Tujuan 4 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata, dengan sasaran sebagai berikut;
 - 1) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan



Gambar 3.2.
Logframe Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Tabel 3.4.
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

No	Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Baseline data	Target				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.											
1	BERINTEGRITAS Misi 4: Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	85,74	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50
			Sasaran 1: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai	69,31	70,50	71,00	71,50	72 ,00	72,50	73,00
				Maturitas SPIP	Level	3,151	3,201	3,25	3,31	3,37	3,42	3,45
				Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,43	4,43	4,54	4,57	4,59	4,62	4,64
	Misi 5: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama	TJ 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	1.911,83	1.322.563	1.873.621,1	2.424.679,2	2.975.737,3	3.526.795,4	4.077.853,5
				Kasus Konflik SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
			Sasaran 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	70,12	72,40	72,45	72,49	72,54	72,59	72,63
			Sasaran 3: Meningkatkan kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	Angka Kriminalitas	Angka per 10.000 Pendu duk	198	188	178	168	158	148	138
2	BERDAYA SAING Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya	TJ 3) Meningkatnya daya saing		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,74	3,8	3,85	3,88	3,91	3,93	3,95

No	Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Baseline data	Target				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender Misi 2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian	Kabupaten Karanganyar	Sasaran 4: Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	78,11	78,19	79,26	80,42	80,98	81,53	82,09
			Sasaran 5: Meningkatnya riset dan inovasi	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,61	2,8	3,0	3,22	3,4	3,61	3,65
			Sasaran 6: Meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,54	6,15	6,20	6,27	6,38	6,43	6,50
			Sasaran 7: Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,67	89,70	89,72	89,80	89,85	90,00	90,27
3	SEJAHTERA Misi 3: Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi	TJ 4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata		Tingkat Kemiskinan	%	9,59	8,96	8,84	8,71	8,59	8,47	8,22
			Sasaran 8: Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Angka	0,352	0,348	0,342	0,336	0,332	0,326	0,320

Tabel 3.5.
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar Sebagai Bumi Intanpari Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Dan Sejahtera								
BERINTEGRITAS								
Misi 4: Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi					
		Sasaran 1: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP	PD Pengampu Urusan Perencanaan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD Pengampu Urusan Perencanaan PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah,	IPKD	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan	PD pengampu Urusan Keuangan

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
				barang milik daerah dan pendapatan daerah				
						Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	PD pengampu Urusan Keuangan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Keuangan
				Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi General	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan, kualitas kebijakan, pelayanan publik dan kematangan organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	Sekretariat Daerah
							IKM Kabupaten	Sekretariat Daerah
							Indeks Kualitas Kebijakan	Sekretariat Daerah
							Indeks Tata Kelola Pengadaan	Sekretariat Daerah

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Sekretariat Daerah
			Maturitas SPIP	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Baik, Dan Akuntabel	Indeks Integritas Nasional	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	PD pengampu Urusan Pengawasan Pemerintahan Daerah
							Kapabilitas APIP	PD pengampu Urusan Pengawasan Pemerintahan Daerah
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Pengawasan Pemerintahan Daerah
				Terwujudnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Nilai pengembangan karir dalam Sistem Merit	PD pengampu Urusan Kepegawaian PD pengampu Urusan Pendidikan Dan Pelatihan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Kepegawaian

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
								PD pengampu Urusan Pendidikan Dan Pelatihan
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintahan Digital	Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi	Indeks Domain Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	PD pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika PD pengampu Urusan Statistik PD pengampu Urusan Persandian
							Indeks Domain Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	PD pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika PD pengampu Urusan Statistik PD pengampu Urusan Persandian
							Indeks Domain Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	PD pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika PD pengampu Urusan Statistik PD pengampu Urusan Persandian
							Indeks Domain Keamanan Siber	PD pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika PD pengampu Urusan Statistik PD pengampu Urusan Persandian

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika PD pengampu Urusan Statistik PD pengampu Urusan Persandian
				Meningkatnya kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B	PD pengampu Urusan Kearsipan
			Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setwan Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Survey Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
				Meningkatnya pelayanan adminduk yang prima	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta Kelahiran, KK, KTP, KIA)	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk yang prima	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Admindukcapil

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Kewilayahan (Kecamatan)
Misi 5: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama	TJ 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kondusivitas wilayah		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif					
			Kasus Konflik SARA					
		Sasaran 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya kualitas air, udara, lahan, dan pengelolaan sampah	Indeks Kualitas Air	Meningkatnya kualitas air yang memenuhi baku mutu	Persentase Kualitas Air yang sesuai baku mutu	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara	Meningkatnya kualitas udara	Persentase Kualitas Udara yang terpantau	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Lahan	Meningkatnya kualitas lahan	Luasan Tutupan Lahan	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup PD pengampu urusan Kehutanan

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
					Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Meningkatnya pengelolaan sampah	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
				Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	PD pengampu Urusan Trantibunlinmas (Kebencanaan)
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Trantibunlinmas (Kebencanaan)
		Sasaran 3: Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	Angka Kriminalitas	Terwujudnya penegakan perda dan perkara, kualitas penanagen kebakaran	Persentase Penurunan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat	Meningkanya kualitas penanganan penegakan perda dan perkara, kualitas penanagen kebakaran	Indeks pencapaian SPM Trantibumlinmas	PD pengampu Urusan Trantibunlinmas (Satpol PP)

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
							Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PD pengampu Urusan Trantibunlinmas (Satpol PP)
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Trantibunlinmas (Satpol PP)
				Menurunnya potensi dan kejadian konflik sosial	Konflik Sosial	Meningkatnya harmoni sosial, ekonomi, budaya, keberagaman dalam masyarakat	Indeks Harmonisasi Indonesia	PD pengampu Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
BERDAYA SAING								
Misi 1: Meningkatnya	TJ 3) Meningkatnya		Indeks Daya Saing Daerah					

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender	daya saing Kabupaten Karanganyar							
		Sasaran 4: Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Dan Pelestarian Budaya	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	PD pengampu Urusan Pendidikan
							Harapan Lama Sekolah	PD pengampu Urusan Pendidikan
					Persentase Cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Seni dan Budaya	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	PD pengampu Urusan Kebudayaan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Pendidikan PD pengampu Urusan Kebudayaan

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat	Jumlah kematian ibu	PD pengampu Urusan Kesehatan
							Jumlah kematian balita	PD pengampu Urusan Kesehatan
							Angka populasi bebas Penyakit Menular	PD pengampu Urusan Kesehatan
							Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular	PD pengampu Urusan Kesehatan
							Prevalensi Stunting	PD pengampu Urusan Kesehatan
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	PD pengampu Urusan Kesehatan
							<i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD Karanganyar	PD pengampu Urusan Kesehatan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Kesehatan

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
				Terwujudnya masyarakat yang setara, berkeadilan, dan berkualitas melalui peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak, penguatan pengendalian penduduk dan pelayanan KB, peningkatan kualitas pembangunan keluarga.	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	PD pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)		IPBK (indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	PD pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
							Nilai dalam Kabupaten/Kota	PD pengampu Urusan Pemberdayaan

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
							Layak Anak (KLA)	Perempuan Dan Pelindungan Anak
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PD pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
				Meningkatnya Kualitas Daya Saing Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dan Prestasi Pemuda Serta Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	PD pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga
					Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		Peningkatan prestasi olahraga	PD pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga
				Meningkatnya kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PD pengampu Urusan Perpustakaan
						Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Perpustakaan

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
						perangkat daerah		PD pengampu Urusan Kearsipan
		Sasaran 5: Meningkatnya riset dan inovasi	Kapabilitas inovasi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah Kebijakan Daerah yang Berbasis Riset	PD pengampu Urusan Penelitian Dan Pengembangan
							Jumlah Inovasi Daerah yang Terverifikasi Kemendagri	PD pengampu Urusan Penelitian Dan Pengembangan
Misi 2. Meningkatnya kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian		Sasaran 6: Meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Meningkatnya Stabilitas Harga	Disparitas Harga	PD pengampu Urusan Perdagangan
					Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	PD pengampu Urusan Perindustrian

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas tenaga kerja	PD pengampu Urusan Tenaga Kerja
							Persentase perusahaan yang memiliki PP/PKB	PD pengampu Urusan Tenaga Kerja
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Perdagangan PD pengampu Urusan Perindustrian PD pengampu Urusan Tenaga Kerja
				Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dalam Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Ketahanan Energi dan Mendorong Partisipasi Transmigrasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	PD pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
					Rasio Kewirausahaan Daerah	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM	PD pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
					Luasan Potensi Panas Bumi Yang Diawasi	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Potensi Kawasan Energi Baru Terbarukan	PD pengampu Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah PD pengampu Urusan Transmigrasi PD pengampu Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
				Meningkatnya Kualitas Daya Saing Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Berkembanganya Potensi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	PD pengampu Urusan Pariwisata
							Persentase bertambahnya pelaku usaha ekonomi kreatif	PD pengampu Urusan Pariwisata
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Pariwisata PD pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga
				Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Capaian Realisasi Investasi	Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha	Persentase penambahan kegiatan	PD pengampu Urusan Penanaman Modal

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
						Dalam Pemenuhan Legalitas Perizinan Berusaha	usaha/proyek oleh pelaku usaha	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Penanaman Modal
		Sasaran 7: Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Kontribusi Pertanian dalam Perekonomian dan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Meningkatnya keanekaragaman pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PD pengampu Urusan Pangan
						Meningkatnya Produktivitas Pertanian Unggulan Daerah	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	PD pengampu Urusan Pertanian
							- Padi	PD pengampu Urusan Pertanian
							- Jagung	PD pengampu Urusan Pertanian

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
							- Kacang tanah	PD pengampu Urusan Pertanian
							- Ubi Kayu	PD pengampu Urusan Pertanian
							- Ubi Jalar	PD pengampu Urusan Pertanian
						Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Telur	PD pengampu Urusan Pertanian
							Produksi Daging	PD pengampu Urusan Pertanian
							Produksi Susu	PD pengampu Urusan Pertanian
					Angka Konsumsi Ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan yang berkelanjutan	Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya)	PD pengampu Urusan Keluatan dan Perikanan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Pangan PD pengampu Urusan Pertanian PD pengampu Urusan Keluatan dan Perikanan
				Meningkatnya kualitas infrastruktur, perumahan,	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
				permukiman, sistem air minum dan sanitasi, penataan ruang, serta pengelolaan dan penyelesaian pertanahan secara berkelanjutan guna mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat				
SEJAHTERA								
Misi 3: Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi	TJ 4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata		Tingkat Kemiskinan					

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
		Sasaran 8: Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan	Indeks gini	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terlayani	Meningkatnya Penanganan PPKS	Indeks SPM Sosial	PD pengampu Urusan Sosial
							Persentase PPKS Non SPM yang terlayani	PD pengampu Urusan Sosial
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Sosial
				Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Dalam Mendorong Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun/ Indeks Desa	Meningkatnya Status Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
				Meningkatnya kualitas infrastruktur, perumahan, permukiman, sistem air minum dan sanitasi, penataan ruang, serta pengelolaan dan penyelesaian pertanahan secara berkelanjutan guna mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kualitas jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Meningkatnya pengelolaan sistem penyediaan air minum yang optimal	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah yang terpadu dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
						Meningkatnya efektivitas dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang yang berwawasan lingkungan.	Persentase kesesuaian penggunaan lahan	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PD pengampu Urusan Pertanahan
					Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Terwujudnya hunian layak serta pengembangan kawasan permukiman yang tertata	Presentase kawasan kumuh	PD pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	PD pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PD pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Visi dan Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
								PD pengampu Urusan Pertanahan
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Meningkatnya kelancaran lalu lintas kendaraan	VC Rasio	PD pengampu Urusan Perhubungan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	PD pengampu Urusan Perhubungan
				Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dalam Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Ketahanan Energi dan Mendorong Partisipasi Transmigrasi	Persentase pemenuhan kuota calon transmigran dari Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya Kepesertaan Transmigrasi	Presentase Kepala Keluarga Yang Mendapat Penyuluhan	PD pengampu Urusan Transmigrasi

Tabel 3.6.
Persandingan Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029
Sasaran Daerah 1 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	- Nilai SAKIP - Maturitas SPIP - Indeks Pelayanan Publik	Sasaran Nasional 2 Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	<i>Global Power Indeks</i> meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029)
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran 3 Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah - Angka Kriminalitas	Sasaran Nasional 5 Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero emission	- Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029) - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029)
Sasaran Daerah 4 Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil Sasaran Daerah 5 Meningkatnya riset dan inovasi	- Indeks Pembangunan Manusia - Kapabilitas inovasi	Sasaran Nasional 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)
Sasaran Daerah 6 Meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja Sasaran Daerah 7 Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	- Pertumbuhan Ekonomi - Indeks Ketahanan Pangan	Sasaran Nasional 1 Meningkatnya Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju	- Pertumbuhan Ekonomi dari 5,05% (2024) menjadi 5,03% (2025) dan menuju 8% (2029) - GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029) - Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029)

Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Karanganyar dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029
			- Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)
Sasaran Daerah 8 Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan	- Indeks Gini	Sasaran Nasional 3 Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	- Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026) - Rasio gini turun dari 0,379 (Maret 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029) - Kontribusi PDRB KTI (Kawasan Timur Indonesia) meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029)

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan jangka menengah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan,
2. Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur, transparansi, akuntabilitas, penguatan perencanaan dan penganggaran, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan.
4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah mendorong kualitas kapasitas fiskal, pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif serta pengelolaan aset sesuai standar;
5. Peningkatan kualitas pengawasan dan kepegawaian melalui peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kapasitas Perangkat Daerah dalam pengelolaan kegiatan sehingga dapat mencegah korupsi;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses dan gratis, penggunaan administrasi kependudukan untuk mendorong penanganan penanggulangan kemiskinan sehingga peningkatan kepemilikan administrasi publik menjadi prioritas.
7. Meningkatkan pelayanan aparatur melalui pembangunan gedung instansi pemerintah.

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan penanganan pencemaran lingkungan melalui pengendalian pencemaran air, udara dan tanah;
2. Mendorong keanekaragaman hayati melalui peningkatan ruang terbuka hijau;
3. Meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar meliputi penanganan sampah di hulu dan hilir. Penanganan sampah di hulu dengan pemilahan sampah di sumber, pembentukan bank sampah di setiap RW/desa, program sampah tuntas di desa. Penanganan sampah di hilir meliputi perbaikan sistem pengangkutan sampah dari sumber ke TPA dengan penerapan sistem terpilah dan terjadwal, penataan pengolahan sampah di TPA dengan pembangunan *Refuse Derived Fuel Plant (RDF Plant)* dan memperbaiki sistem operasional TPA dari open dumping menjadi Lahan Urug Residu (LUR) dimana hanya residu yang tidak dapat diolah yang dibuang ke TPA;
4. Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana, pembentukan desa tangguh bencana.

Sasaran 3 Meningkatnya Kondusivitas, Kerukunan Antar Umat Beragama dan Demokratisasi

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, harmonisasi dan demokratisasi dalam mencegah konflik sosial, meningkatkan kerukunan antar umat beragama dalam mencegah konflik antar agama
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan peraturan daerah baik Perda maupun Perbup, meningkatkan pelaksanaan SPM, menjadikan Satpol PP yang humanis dan melakukan pengawasan daerah rawan, melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kecamatan dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.
3. Meningkatkan kewaspadaan bahaya kebakaran dengan melakukan kesiapsiagaan kebakaran, meningkatkan penanganan kebakaran dengan menjaga waktu respon dan mengoptimalkan Wilayah Manajemen Kebakaran, meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran.

Sasaran 4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif, Berkarakter dan Adil

Strategi dalam rangka mencapai sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan standar dari PAUD, SD, SMP dan kesetaraa, dan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidik, peningkatan pendidikan inklusif dan penyediaan lokasi untuk sekolah SMA/SMK dalam rangka mencapai pendidikan 13 tahun, peningkatan kurikulum muatan lokal, digitalisasi dalam penguasaan koding, AI, dan peningkatan pendidikan karakter, melakukan pemetaan potensi lokal dalam pengembangan sekolah vokasi sesuai kewenangan daerah.
2. Meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui penambahan koleksi perpustakaan berupa buku dan *e-book*, mendorong akreditasi perpustakaan.
3. Meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan primer dan kualitas rujukan, peningkatan keselamatan ibu dan anak, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesertaan pembiayaan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan; peningkatan kualitas SDM kesehatan untuk meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan.
4. Meningkatkan mutu pelayanan dan memperluas akses kesehatan masyarakat Karanganyar dan sekitarnya melalui pembangunan rumah sakit.
5. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui peningkatan pelayanan KB, pemahaman masyarakat, kesertaan kelompok masyarakat dan keluarga sejahtera; peningkatan keluarga berkualitas sesuai dengan iBangga.
6. Meningkatkan olahraga rekreasi dalam menunjang kualitas kesehatan masyarakat;
7. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pengembangan kapasitas daya saing pemuda, kualitas pemuda pelopor dan pemuda berwirausaha;
8. Meningkatkan pelestarian budaya berdasarkan potensi daerah melalui pembinaan, pengembangan dan pengelolaan cagar budaya;
9. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal melalui pelestarian seni, budaya, cagar budaya, serta peningkatan peran generasi muda dalam pemajuan kebudayaan;
10. Meningkatkan pengarusutamaan gender melalui peningkatan kualitas kelembagaan PUG, penyediaan data pilah, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan responsif gender, serta sinergitas perencanaan desa yang responsif gender

11. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui peningkatan ketrampilan perempuan rentan, dan penanganan kekerasan dan TPPO, serta mendorong kelembagaan penanganan dan pencegahan kekerasan perempuan sampai ke tingkat desa, peningkatan kerja sama lintas bidang, sektor dan swasta dalam perlindungan perempuan yang mendukung Kecamatan Berdaya.
12. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan pada anak melalui penguatan kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan desa/kelurahan ramah anak, institusi ramah anak (sekolah, pelayanan kesehatan dan pelayanan publik) dan mendukung pembentukan Kecamatan Berdaya.

Sasaran 5 Meningkatnya Riset dan Inovasi

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan peran masyarakat untuk melakukan inovasi, memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penelitian, serta mendorong penerapan hasil penelitian untuk mendukung pembangunan daerah.
2. Mengembangkan penelitian dalam mendorong penemuan energi terbarukan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Karanganyar, seperti energi dari hydro, panas bumi, dan tenaga surya.
3. Mengembangkan inovasi dan penelitian pada produk unggulan yang tercantum dalam dokumen RIPJPID sebagai daya ungkit perekonomian daerah.
4. Memanfaatkan hasil riset dan inovasi sebagai dasar perumusan kebijakan, regulasi, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar lebih berbasis bukti (evidence-based policy).
5. Membangun sistem pengelolaan data dan hasil penelitian yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara tepat dan akuntabel.

Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Potensi Ekonomi Lokal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Mampu Menyerap Tenaga Kerja

Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan penggunaan kawasan peruntukan industri untuk mendorong peningkatan potensi industri pengolahan sebagai sektor andalan Kabupaten Karanganyar. Peningkatan kualitas hasil industri pengolahan, pengembangan sentra dan klaster adalah prioritas Tahun 2025-2029. Mendorong industri hijau dalam pembangunan industri kecil dan menengah adalah strategi untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meningkatkan investasi perindustrian yang mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja adalah upaya untuk mengurangi pengangguran. Mempermudah pelayanan perijinan dan Menyusun kebijakan dalam memberikan insentif kepada calon investor. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan investor dan perusahaan di Karanganyar merupakan salah satu strategi penting dalam mengurai penanganan pengangguran.
2. Meningkatkan kualitas pariwisata, industri kreatif, restoran dan perhotelan adalah strategi dalam pengembangan ekonomi daerah. Peningkatan destinasi wisata yang ramah lingkungan, penjagaan kualitas lingkungan hidup sebagai daya jual dalam pengembangan destinasi wisata adalah prioritas. Mendorong perhotelan dan restoran memiliki standar yang ditentukan dan menuju standar internasional. Dalam internalisasi *life center of nusantara* ini yang menjadi bagian penting adalah mengembangkan budaya dan

pariwisata yang mampu memikat wisatawan nusantara dan mancanegara. Pengembangan wisata di Kabupaten Karanganyar juga merupakan prioritas Jawa Tengah dan Nasional. Mendorong ekonomi kreatif yang mampu mendorong daya ungkit kunjungan wisatawan. Kolaborasi dalam pengembangan desa wisata juga menjadi prioritas dalam pengembangan wisata daerah. Kerja sama dengan lintas sektor dan swasta juga menjadi strategi dalam pembangunan pariwisata Tahun 2025-2029. Meningkatkan akses yang baik menuju destinasi wisata.

3. Meningkatkan distribusi dan kestabilan harga adalah strategi dalam meningkatkan perdagangan di Kabupaten Karanganyar. Peningkatan kualitas pasar tradisional dan pengawasan pasar modern, perlindungan konsumen dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga prioritas dalam pembangunan perdagangan Tahun 2025-2029.
4. Meningkatkan jiwa kewirausahaan adalah strategi dalam meningkatkan pengembangan usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah atau industri kecil dan menengah. Mempermudah akses permodalan melalui kerjasama dengan perbankan dan koperasi. Pengembangan koperasi merah putih sebagai salah satu sumber pembiayaan menjadi fokus Tahun 2025-2029, hal ini sesuai dengan program prioritas ASTA CITA. Pengembangan koperasi Bersama BUMDES dan BUMDesma yang telah terbentuk di seluruh Desa. Peningkatan pembiayaan sesuai dengan syariah Islam.

Sasaran 7 Meningkatnya Ketersediaan, Keamanan, Keanekaragaman Pangan Yang Mampu Mendorong Kemandirian Pangan

Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas pertanian yang mampu mendukung pangan Jawa Tengah dan mendorong kemandirian pangan. Mengembangkan produk unggulan pertanian baik pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Hilirisasi dan modernisasi adalah salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Peningkatan penggunaan pupuk organik merupakan salah satu strategi mencapai pertanian sebagai ekonomi hijau. Meningkatkan produksi perkebunan dan tanaman hortikultura merupakan strategi pengembangan pertanian 5 tahun ke depan hal ini dikarenakan Kabupaten Karanganyar memiliki dataran tinggi. Kopi, karet salah satu produk unggulan yang menjadi komoditas potensi yang akan dikembangkan. Sayuran dan buah juga merupakan andalan pengembangan pertanian. Modernisasi pengembangan bibit ternak juga salah satu upaya dalam pengembangan peternakan di Karanganyar. Meningkatkan peran pemuda untuk menjadi petani milenial dalam rangka mendorong regenerasi petani Kabupaten Karanganyar.
2. Meningkatkan perikanan terutama perikanan darat dikarenakan perikanan darat adalah potensi utama di Karanganyar. Pengembangan benih baik jumlah maupun jenisnya adalah strategi dalam perikanan lima tahun ke depan.
3. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pengembangan lumbung pangan, cadangan pangan, distribusi pangan dan diversifikasi pangan.
4. Meningkatkan keamanan pangan melalui pengolahan bahan pangan aman, bahan pangan segar dan pemeriksaan bahan pangan pada pengolah pangan dan tempat distribusi pangan.
5. Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*) atau fortifikasi pangan berskala besar (FPBB).

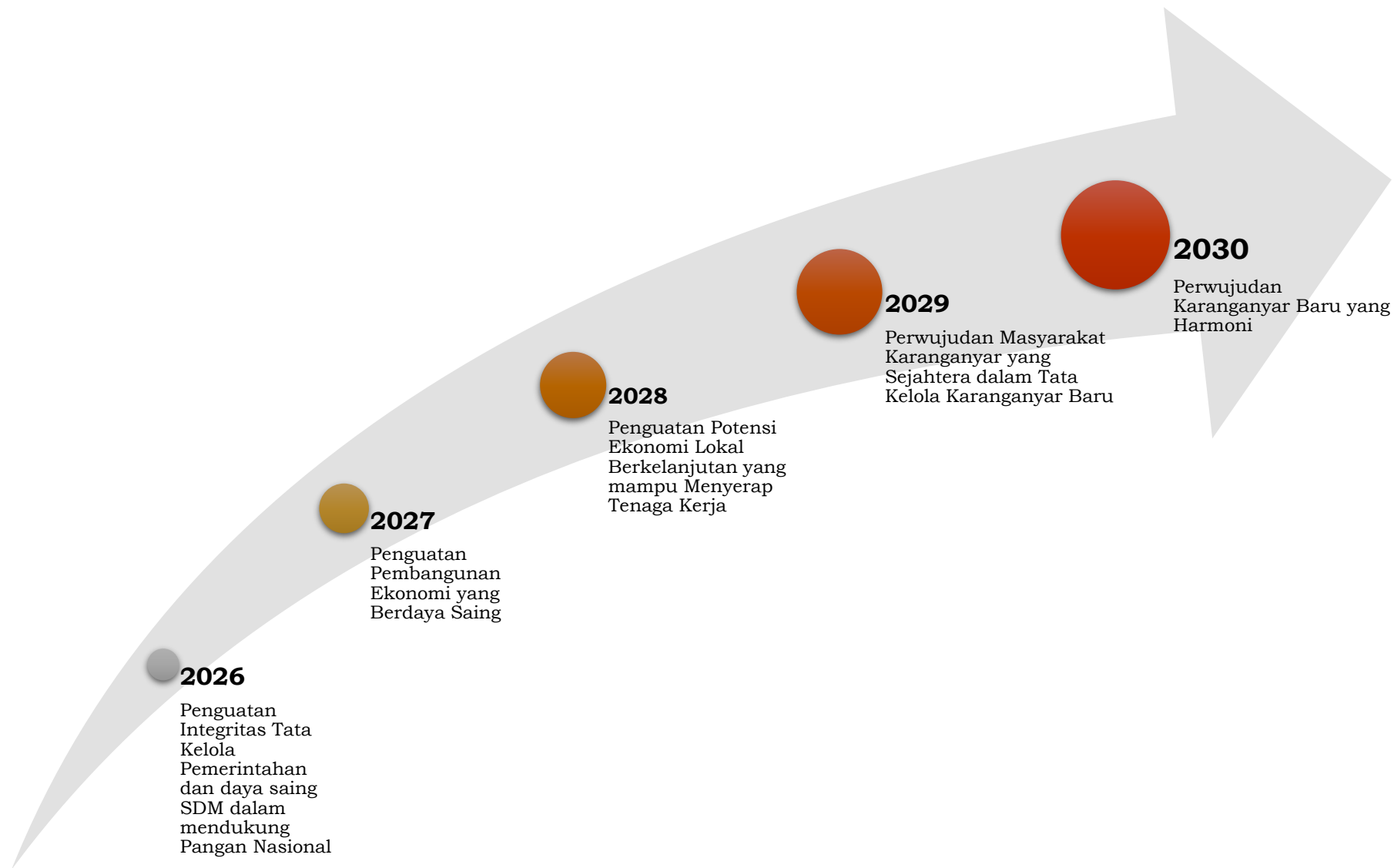
6. Meningkatkan pemanfaatan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar taman hutan rakyat.

Sasaran 8 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan SPM bidang sosial, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas program keluarga harapan;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan peningkatan keterampilan penduduk miskin
3. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar penduduk rentan melalui mengurangi beban penduduk rentan/miskin dengan peningkatan akses sanitasi aman, air minum perpipaan dan pemenuhan rumah layak huni mendukung 1 KK 1 rumah layak huni serta pelayanan administrasi pertanahan;
4. Meningkatkan kualitas lembaga penanganan kemiskinan dan data kemiskinan yang akurat. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, pihak swasta perguruan tinggi dalam penanganan kemiskinan.
5. Meningkatkan pembangunan Kawasan perdesaan melalui pengoptimalan pengelolaan tiga kawasan perdesaan di Kabupaten Karanganyar dengan memperkuat peran BUMDesma Kampung Purba Sangiran Klaster Dayu, Beras Organik Bergizi, dan Agrowisata Ngargoyoso guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung ketahanan pangan, serta mengembangkan potensi wisata dan ekonomi lokal secara berkelanjutan;
6. Meningkatkan tata kelola desa melalui penataan desa, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran desa, peningkatan kualitas aparat desa
7. Meningkatkan kualitas kelembagaan desa dan ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan desa yaitu PKK, Karang taruna, LKMD, dan Koperasi Merah putih, BUMDES serta pengembangan ekonomi desa
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur desa dengan menggunakan anggaran desa mendukung desa berdaya
9. Meningkatkan kualitas desa mandiri energi dengan peningkatan teknologi tepat guna dalam penggunaan energi terbarukan hydro, panas bumi dan surya.
10. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta drainase dalam mencapai Karanganyar bebas jeglongan dan bergelombang.
11. Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui sinergitas dengan transportasi massa Provinsi Jawa Tengah, mendorong transportasi massal kabupaten, melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Meningkatkan keselamatan berkendara melalui edukasi lalu lintas, penyediaan rambu lalu lintas terutama pada daerah rawan kecelakaan
12. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya air melalui pengembangan dan pemeliharaan saluran irigasi, meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah sumber air;
13. Meningkatkan penataan bangunan dan gedung melalui pengawasan bangunan gedung dan lingkungannya;
14. Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi dengan melakukan identifikasi potensi pemanfaatan panas bumi;
15. Meningkatkan akses air minum perpipaan menuju air minum aman, mencapai akses air minum layak diseluruh wilayah.
16. Meningkatkan akses sanitasi layak diseluruh wilayah dengan mendorong kepemilikan sanitasi menuju sanitasi aman, pembangunan instalasi limbah terpadu.

Dalam rangka implementasi strategi diatas berikut ini strategi pentahapan dalam 5 tahun periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai periode pertama RPJPD yaitu mewujudkan ***“Internalisasi Life Center of Nusantara”***. Tahap ini sejalan dengan tahap Indonesia yaitu Penguatan Pondasi Transformasi. Pada tahap ini Kabupaten Karanganyar melakukan penguatan *Life Center of Nusantara* dengan memperkuat daya saing Sumber Daya Manusia, meningkatkan kompetensi pembangunan ekonomi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan.



Gambar 3.3.
Tema Pembangunan Tahunan Periode 2026-2030

Tabel 3.7.
Pentahapan Pembangunan Periode 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional	Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing	Penguatan Potensi Ekonomi Lokal Berkelanjutan yang mampu Menyerap Tenaga Kerja	Perwujudan Masyarakat Karanganyar yang Sejahtera dalam Tata Kelola Karanganyar Baru	Perwujudan Karanganyar Baru yang Harmoni
Prioritas Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM, adalah peningkatan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme aparatur, dan penguatan partisipasi Masyarakat. Meningkatkan pelayanan publik dalam konsep transformasi birokrasi. Menciptakan pelayanan publik dari lahir sampai meninggal dunia. Kemudahan pelayanan Kesehatan pendidikan, admindukcapil, pelayanan dalam kemudahan berusaha dan bekerja, kemudahan pelayanan infrastruktur. Mempercepat penanganan birokrasi tematik, kemiskinan, inflasi. Pelayanan mudah dengan satu data dan penggunaan NIK seluruh pelayanan dapat terlayani dengan mudah dan cepat.	Prioritas Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing, adalah Pengembangan produk unggulan daerah sebagai potensi pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan hilirisasi pertanian untuk penguatan pangan dan industri pertanian, peningkatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, pengembangan UMKM dengan yang tersertifikat halal, pengembangan ekonomi syariah dan pelaku usaha potensi ekspor, pengembangan pariwisata yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup dan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan daya tarik wisatawan, penguatan konektivitas antar wilayah, penguatan ekonomi sikuler, serta peningkatan daya SDM yang mampu memperkuat ekonomi daerah dengan infrastruktur yang handal.	Prioritas pembangunan pada Penguatan Potensi Ekonomi Lokal Berkelanjutan yang mampu menyerap Tenaga Kerja, adalah pengembangan produk unggulan daerah (pertanian, perdagangan, industri pengolahan, pariwisata), penguatan UMKM melalui peningkatan kualitas, akses permodalan, dan digitalisasi pemasaran. Mendorong investasi yang ramah lingkungan, memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, mengembangkan pembangunan wilayah perdesaan menuju desa mandiri, serta membuka lapangan kerja dengan pengembangan industri kreatif dan pariwisata.	Prioritas pembangunan pada perwujudan masyarakat yang sejahtera dalam tata kelola Karanganyar baru, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.	Prioritas pembangunan pada periode ini adalah mengutamakan terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, dan berkeadilan, dengan memperkuat sinergi antara pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan demi mewujudkan internalisasi <i>life center of nusantara</i> .

Tabel 3.8.
Keselarasan Pentahapan RPJMD Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah

Pentahapan	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan
RPJMD Kabupaten Karanganyar	Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional	Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing	Penguatan Potensi Ekonomi Lokal Berkelanjutan yang mampu Menyerap Tenaga Kerja	Perwujudan Masyarakat Karanganyar yang Sejahtera dalam Tata Kelola Karanganyar Baru	Perwujudan Karanganyar Baru yang Harmoni

Tahap I Tahun 2026 **Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing SDM dalam Mendukung Pangan Nasional.** Prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan integritas kualitas SDM, dengan fokus :

- a. meningkatkan karakter dan perilaku masyarakat untuk memiliki jenjang pendidikan tinggi, mengurangi anak putus sekolah, mendorong kesadaran dalam membangun pendidikan kesetaraan, PAUD, peningkatan kualitas pendidikan, membangun pendidikan inklusif (untuk semua kalangan penduduk miskin dan difabel)
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik primer, maupun lanjutan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit menular terutama TB dan HIV), pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular terutama pada Hipertensi, Diabetes Mellitus, dan Cancer serta gangguan jiwa
- c. mengembangkan budaya membaca dengan meningkatkan kualitas perpustakaan
- d. mengembangkan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang bermutu dan akuntabel menuju keluarga berkualitas
- e. Pengembangan kearifan lokal dan budaya dalam mendorong internalisasi nilai-nilai integritas.
- f. Menciptakan kondusivitas sosial dengan peningkatan penanganan kemiskinan dan permasalahan sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- g. Mendorong kesetaraan gender dan perlindungan pada perempuan dan anak.

2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi, dengan fokus :

- a. peningkatan jiwa kewirausahaan, mengembangkan kualitas UMK, mendorong pengembangan sentra/klaster industri dan pelaku usaha menuju ekonomi yang maju, mengembangkan koperasi sebagaimana prioritas nasional,
- b. mengembangkan hilirisasi pertanian, mengembangkan peran pemuda milenial dalam pertanian, pemenuhan sarana pertanian modern menuju ketahanan pangan. Peningkatan kualitas sumberdaya alam yang mampu mendorong kualitas irigasi pertanian. Mendorong perwujudan fortifikasi pangan. Menjamin kelancaran pupuk bagi petani dan mendorong penggunaan pupuk organik. Meningkatkan pemanfaatan hutan rakyat dalam meningkatkan produk unggulan daerah
- c. Meningkatkan kemandirian pangan dengan meningkatkan cadangan pangan, keanekaragaman pangan dan penyediaan pangan segar
- d. Meningkatkan pariwisata yang berintegritas, destinasi wisata yang menarik dan kolaborasi event dalam mendorong kunjungan.
- e. Meningkatkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja.

3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan, dengan fokus :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal, kualitas kapasitas APIP, integritas nasional dalam mencegah korupsi,
- b. Peningkatan merit system dengan memperkuat profesionalisme ASN dalam konsep merit sistem dan kompetensi ASN
- c. pemantapan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah
- d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi daerah dengan melakukan penilaian manajemen resiko pada dokumen perencanaan
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan sebagai implementasi SPBE
- f. peningkatan pelayanan publik yang cepat dan murah

- g. pengembangan penelitian dan teknologi dalam mempercepat pembangunan daerah

4. Meningkatkan kondusivitas wilayah, dengan fokus :

- a. Peningkatan kemandirian, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, mengurangi terjadinya kebakaran dan mencegah berkurangnya kerugian kebakaran
- b. Peningkatan harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama serta mendorong demokrasi di masyarakat.
- c. Peningkatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, menambah desa tangguh bencana dengan melakukan koordinasi dengan desa

5. Mengembangkan kualitas infrastruktur, dengan fokus :

- a. Pemenuhan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Meningkatkan kualitas jalan dan layanan angkutan. Meningkatkan keselamatan angkutan umum dalam rangka mengurangi kecelakaan. Mengembangkan rintisan angkutan massal yang nyaman dan aman.
- b. Pemenuhan layanan air minum layak, meningkatkan sambungan perpipaan pada perkotaan dan merintis air minum aman
- c. Pemenuhan sanitasi layak, peningkatan kualitas IPLT menuju sanitasi aman.
- d. Peningkatan penanganan perumahan dan Kawasan permukiman

6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan meningkatkan pelayanan penanganan kasus pencemaran, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup mendukung ekonomi hijau

Tahap II Tahun 2027 **Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing**. Prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2027 sebagai berikut :

1. Penguatan daya saing SDM pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro dalam mendorong perekonomian daerah dan mengembangkan ekonomi syariah
- b. Pengembangan sentra dan klaster industri kecil dalam meningkatkan produksi yang mampu mendorong perekonomian yang semakin berdaya saing, membuka pasar baru untuk produk potensi daerah baik antar wilayah maupun internasional,
- c. Peningkatan kualitas petani dalam mengimplementasikan hilirisasi pertanian dan modernisasi pertanian, memperkuat petani milenial, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendorong keanekaragaman pangan, keamanan pangan dalam menuju ketahanan pangan. Peningkatan kualitas sumberdaya alam yang mampu mendorong daya tampung air. Mendorong perwujudan fortifikasi pangan. Menjamin kelancaran pupuk bagi petani dan mendorong penggunaan pupuk organik dalam mendukung ekonomi hijau
- d. Peningkatan kapasitas pengelola wisata untuk mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, memperkuat jejaring dengan kabupaten sekitar dalam meningkatkan kunjungan.
- e. Mengembangkan digitalisasi pelayanan investasi dalam Mall Pelayanan Publik dan mengembangkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Pengembangan keterampilan tenaga kerja dengan memperkuat pelatihan dan *link and match* dunia pendidikan dan usaha

2. Penguatan SDM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus :

- a. Penguatan daya saing SDM dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan PAUD, SD, SMP melalui pemerataan, peningkatan kompetensi pendidik, dan wajib belajar 13 tahun
- b. Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan, dalam pembangunan SDM.
- c. Penguatan budaya literasi dan inovasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan, akses buku digital, serta riset dan inovasi.
- d. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dengan memperkuat layanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan mendorong GERMAS.
- e. Penguatan daya saing yang inklusif melalui penguatan penanganan kemiskinan dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial yang integratif dan kolaboratif.
- f. Memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan pada perempuan dan anak, serta mendorong perwujudan kabupaten layak anak.
- g. Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan sehingga mampu meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dalam indek perencanaan daerah dan komponen dokumen perencanaan dalam SAKIP
- h. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN, terpenuhinya sistem karir sesuai dengan sistem merit. Penguatan pelayanan ASN berbasis digital
- i. Peningkatan persepsi anti korupsi, peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas APIP
- j. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan berbasis digital, penguatan pengelolaan asset dan penyelematan asset daerah yang mampu mendorong pendapatan daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan mendorong pendapatan asli daerah
- k. Peningkatan pemerintahan berbasis teknologi, penguatan satu data dan keamanan informasi
- l. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan dalam implementasi transformasi birokrasi.
- m. Peningkatan SDM yang memiliki inovasi, riset dalam membangun tata kelola pemerintahan.
- n. Peningkatan kualitas reformasi hukum dan sinergitas legeslatif dan eksekutif.

3. Memperkuat kondusivitas wilayah, dengan fokus :

- a. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, peningkatan penegakkan peraturan daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, peningkatan peran serta masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- b. Penguatan harmonisasi, peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama serta demokratisasi
- c. Peningkatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, menambah desa tangguh bencana dengan memperkuat kolaborasi dalam penanganan bencana dan mendorong desa untuk berpartisipasi penanganan bencana

4. Mempercepat kualitas infrastruktur, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas jalan, peningkatan ruas pedestrian, penertiban penggunaan trotoar. Peningkatan kualitas jalan ibu kota Kabupaten
- b. Meningkatkan keselamatan angkutan umum dalam rangka mengurangi kecelakaan. Mengembangkan rintisan angkutan massal yang nyaman dan aman.
- c. Pemenuhan layanan air minum layak, meningkatkan sambungan perpipaan pada perkotaan dan merintis air minum aman

- d. Pemenuhan sanitasi layak, peningkatan kualitas IPLT menuju sanitasi aman.
- e. Peningkatkan penanganan kumuh, pemenuhan PSU dikawasan perumahan dan Kawasan permukiman, dan pemenuhan SPM perumahan
- f. Peningkatan penataan Kota dan perbatasan menjadi kota yang indah, nyaman dan bersih
- g. Penataan dan pemberdayaan desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan, pengembangan teknologi tepat guna serta merintis digitalisasi pembangunan desa.

5. Memperkuat kualitas lingkungan hidup, dengan fokus :

- a. peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan meningkatkan pelayanan penanganan kasus pencemaran,
- b. peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tahap III Tahun 2028 **Penguatan Potensi Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan dan Penyerapan Tenaga Kerja**. Prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2028 sebagai berikut :

1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan, dengan fokus :

- a. pengembangan kapasitas UMK dengan menggunakan produk unggulan daerah, penguatan UMKM melalui peningkatan kualitas, akses permodalan, dan digitalisasi pemasaran. Mendorong kualitas produk unggulan daerah menjadi produk potensi ekspor dan memperlancar distribusi perdagangan serta peningkatan perlindungan konsumen
- b. penguatan koperasi dan BUMDES dalam mendorong ekonomi lokal
- c. meningkatkan pembangunan pertanian yang ramah lingkungan, memperkuat hilirisasi, memperkuat cadangan pangan dan penyediaan pangan aman dan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Penguatan keanekaragaman pangan, keamanan pangan menuju kemandirian pangan. Peningkatan kualitas sumberdaya alam yang mampu mendorong kualitas irigasi pertanian. Mendorong perwujudan fortifikasi pangan. Menjamin kelancaran pupuk bagi petani dan mendorong penggunaan pupuk organik
- d. mendorong investasi yang ramah lingkungan, dan memperkuat Mall Pelayanan Publik
- e. Peningkatan kolaborasi DUDI, balai latihan kerja, perguruan tinggi, SMK dalam mengurangi pengangguran.
- f. pengembangan industri kreatif yang mendukung pengembangan pariwisata. Peningkatan destinasi wisata yang ramah lingkungan
- g. peningkatan kualitas industri kecil dan penataan kawasan peruntukan industri dan memperkuat ekonomi sirkuler.

2. Penguatan daya saing SDM, dengan fokus :

- a. penguatan karakter dan perilaku masyarakat untuk berpendidikan, bebas anak putus sekolah, mendorong kesadaran dalam membangun pendidikan kesetaraan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, mendorong distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan mendorong pencapaian wajib belajar 13 tahun
- b. peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada pelayanan dasar dan rujukan, peningkatan kualitas pemberdayaan kesehatan dalam perwujudan perubahan perilaku, memperkuat Integrasi Layanan Primer, mendorong eliminasi TBC dan mendorong terwujudnya populasi bebas penyakit menular dan tidak menular dalam pemenuhan SPM.
- c. mengembangkan budaya membaca dan pemanfaatan perpustakaan

- d. mengembangkan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang bermutu dan akuntabel. Pemenuhan keluarga berkualitas dalam penerapan iBangga
- e. Pengembangan kearifan lokal dan budaya dalam mendorong internalisasi nilai-nilai integritas.
- f. menciptakan kondusivitas sosial dengan peningkatan penanganan kemiskinan sesuai intruksi presiden dan permasalahan sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- g. Mendorong kesetaraan gender dan perlindungan pada perempuan dan anak, menciptakan desa kelurahan peduli perempuan dan anak. Peningkatan pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus :

- a. penguatan sinergitas perencanaan sehingga mampu meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dalam indeks perencanaan daerah dan komponen dokumen perencanaan dalam SAKIP
- b. penguatan kompetensi dan profesionalisme ASN, terpenuhinya sistem karir sesuai dengan sistem merit. Penguatan pelayanan ASN berbasis digital
- c. peningkatan persepsi anti korupsi, peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas APIP
- d. Peningkatan pemerintahan berbasis teknologi, penguatan satu data dan keamanan informasi
- e. penguatan pengelolaan keuangan berbasis digital, penguatan pengelolaan asset dan penyelamatan asset daerah yang mampu mendorong pendapatan daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan mendorong pendapatan asli daerah
- f. peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan dalam implementasi transformasi birokrasi.
- g. Penguatan inovasi, riset dalam membangun tata kelola pemerintahan yang mendukung data saing daerah.
- h. Penguatan sinergitas legislatif dan eksekutif dalam mendukung daya saing daerah.

4. Memperkuat kondusivitas wilayah, dengan fokus :

- a. Peningkatan keamanan dan ketertiban dengan meningkatkan kualitas penegakkan peraturan daerah baik perda maupun perkada sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, peningkatan peran serta masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- b. Penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, memperkuat kerukunan antar umat beragama serta demokratisasi
- c. mendorong kesiapsiagaan bencana, menambah desa tangguh bencana dengan memperkuat kolaborasi dalam penanganan bencana dan mendorong desa untuk berpartisipasi penanganan bencana

5. Mempercepat kualitas infrastruktur, dengan fokus :

- a. Mempercepat kualitas jalan menuju jalan tanpa jenglongan, dan peningkatan kualitas jalan, pesdetrian ibu kota Kabupaten
- b. Meningkatkan keselamatan angkutan umum dalam rangka mengurangi kecelakaan. Peningkatan kualitas angkutan massal yang nyaman dan aman.
- c. Pemenuhan layanan air minum layak, meningkatkan sambungan perpipaan pada perkotaan dan merintis air minum aman
- d. Pemenuhan sanitasi layak, peningkatan kualitas IPLT menuju sanitasi aman.
- e. Peningkatkan penanganan kumuh, pemenuhan PSU dikawasan perumahan dan Kawasan permukiman, dan pemenuhan SPM perumahan

- f. Peningkatan penataan Kota dan perbatasan menjadi kota yang indah, nyaman dan bersih
- g. Penataan dan pemberdayaan desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan, pengembangan teknologi tepat guna serta merintis digitalisasi pembangunan desa.

6. Memperkuat kualitas lingkungan hidup, dengan fokus :

- a. peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan meningkatkan pelayanan penanganan kasus pencemaran, pencegahan pencemaran, pengelolaan limbah berbahaya dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati
- b. Mempercepat penanganan sampah dan pengelolaan sampah dengan 3R dan pemanfaatan sampah sebagai alternatif energi baru

Tahap IV Tahun 2029 **Perwujudan Masyarakat Karanganyar yang Sejahtera dalam Tata Kelola Karanganyar Baru.** Prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan fokus :

- a. Mewujudkan kemudahan akses sekolah bagi semua penduduk, kualitas pengelolaan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan kewajiban sekolah sampai 13 tahun.
- b. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, masyarakat memiliki perilaku hidup sehat, mewujudkan lingkungan sehat, Integrasi Layanan Primer, dan mendorong terwujudnya Populasi bebas penyakit menular dan tidak menular dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- c. Mewujudkan masyarakat yang memiliki literasi baca yang baik dan pelayanan digital perpustakaan
- d. Mewujudkan pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas, lansia berkualitas, remaja yang sehat dalam konsep ibangga
- e. Pengembangan kearifan lokal dan budaya dalam mendorong internalisasi nilai nilai integritas. Kolaborasi budaya dan destinasi wisata dalam mendorong kunjungan wisata
- f. Menciptakan kondusivitas sosial dengan peningkatan penanganan kemiskinan sesuai intruksi presiden dan permasalahan sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- g. Mendorong kesetaraan gender dan perlindungan pada perempuan dan anak, menciptakan desa kelurahan peduli perempuan dan anak. Peningkatan pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Transparan, dengan fokus :

- a. Digitalisasi pelayanan publik (*smart government*) dan transformasi birokrasi partisipatif
- b. Mewujudkan dokumen perencanaan yang sinergi dengan pusat, daerah dan keuangan
- c. Mewujudkan merit sistem dalam pengembangan karir dan profesionalisme ASN
- d. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, pengelolaan asset yang baik dengan kapasitas fiskal tinggi
- e. Mewujudkan pemerintahan yang inovatif dan digital
- f. Mewujudkan satu data dan kemananan informasi

3. Penguatan Daya Saing Ekonomi, dengan fokus :

- a. Pengembangan kapasitas UMK dengan menggunakan produk unggulan daerah, penguatan UMK melalui peningkatan kualitas, akses permodalan, dan digitalisasi pemasaran. Mendorong kualitas produk unggulan daerah menjadi produk potensi ekspor dan

memperlancar distribusi perdagangan serta peningkatan perlindungan konsumen

- b. Pengembangan produk pertanian yang ramah lingkungan, memperkuat hilirisasi, memperkuat cadangan pangan dan penyediaan pangan aman dan PAST. Penguatan keanekaragaman pangan, keamanan pangan menuju kemandirian pangan. Peningkatan kualitas sumberdaya alam yang mampu mendorong kualitas irigasi pertanian. Mendorong perwujudan fortifikasi pangan. Menjamin kelancaran pupuk bagi petani dan mendorong penggunaan pupuk organik
- c. Mendorong investasi yang ramah lingkungan, dan memperkuat Mall Pelayanan Publik
- d. Peningkatan kolaborasi DUDI, balai latihan kerja, perguruan tinggi, SMK dalam mengurangi pengangguran.
- e. Pengembangan industri kreatif yang mendukung pengembangan pariwisata. Peningkatan destinasi wisata yang ramah lingkungan
- f. Peningkatan kualitas industri kecil dan penataan kawasan peruntukan industri dan memperkuat ekonomi sirkuler.

4. Penguatan Infrastruktur dan Layanan Dasar, dengan fokus :

- a. Mempercepat kualitas jalan menuju jalan tanpa jeglongan, dan peningkatan kualitas jalan, pesdetrian ibu kota Kabupaten
- b. Mewujudkan keselamatan angkutan dan kualitas angkutan massal yang nyaman dan aman.
- c. Pemenuhan layanan sambungan perpipaan pada perkotaan dan pedesaan dan mempercepat air minum aman
- d. Pemenuhan sanitasi layak, peningkatan kualitas IPLT menuju sanitasi aman.
- e. Peningkatkan penanganan kumuh, pemenuhan PSU dikawasan perumahan dan Kawasan permukiman, dan pemenuhan SPM perumahan
- f. Peningkatan penataan kota dan perbatasan menjadi kota yang indah, nyaman dan bersih
- g. Penataan dan pemberdayaan desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan, pengembangan teknologi tepat guna serta merintis digitalisasi pembangunan desa.

5. Penguatan Kondusivitas Wilayah dan Keamanan Sosial, dengan fokus :

- a. Penguatan forum komunikasi warga dan tokoh masyarakat, pendidikan wawasan kebangsaan di sekolah dan komunitas, serta kerjasama dengan TNI-Polri dalam penyuluhan masyarakat, kolaborasi lintas sektor untuk edukasi, dan rehabilitasi, peningkatan patrol terpadu sebagai wujud gerakan anti narkoba dan kekerasan, dan pembentukan tim reaksi cepat Pemda untuk menangani gesekan sosial, unjuk rasa atau kejadian darurat berbasis masyarakat
- b. Peningkatan keamanan dan ketertiban dengan meningkatkan kualitas penegakkan peraturan daerah baik perda maupun perkara sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, peningkatan peran serta masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- c. Peningkatan kesiapsiagaan bencana pada masyarakat dan mendorong desa tangguh bencana

6. Memperkuat Pelestarian Lingkungan, dengan fokus :

- a. Peningkatan keanekaragaman hayati, terkelolanya kualitas air, udara, peningkatan ruang terbuka hijau dan melalui gerakan penanaman pohon, pemberdayaan masyarakat sekitar konservasi hutan,
- b. Mempercepat penanganan sampah dan pengelolaan sampah dengan 3R dan pemanfaatan sampah sebagai alternatif energi baru

Tahap V Tahun 2030 **Perwujudan Karanganyar Baru yang Harmoni**. Prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2030, sebagai berikut :

- 1. Harmoni sosial dan budaya**, dengan fokus :
 - a. Penguatan forum-forum dialog antar umat beragama dan antar budaya, revitalisasi nilai-nilai budaya Jawa (gotong royong, unggah-ungguh, *tepa selira*).
 - b. Penguatan penanganan kemiskinan dalam akselerasi pembangunan
 - c. Penguatan penanganan permasalahan kesejahteraan masyarakat dalam akselerasi pembangunan sosial
 - d. Membangun harmoni budaya dan pariwisata dalam akselerasi pembangunan ekonomi
 - e. Mendorong kesetaraan gender dan perlindungan pada perempuan dan anak, menciptakan desa kelurahan peduli perempuan dan anak. Peningkatan pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak.
- 2. Harmoni pendidikan dan kesehatan**, dengan fokus :
 - a. Mewujudkan kemudahan akses sekolah bagi semua penduduk, kualitas pengelolaan pendidikan sesuai dengan SNP, dan kewajiban sekolah sampai 13 tahun.
 - b. Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, mewujudkan lingkungan sehat, dan mendorong terwujudnya populasi bebas penyakit menular dan tidak menular dalam pemenuhan SPM dalam akselerasi pembangunan kesehatan
 - c. Mewujudkan masyarakat yang memiliki literasi baca yang baik dan pelayanan digital perpustakaan
 - d. Mewujudkan pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas, lansia berkualitas, remaja yang sehat dalam konsep ibangga
- 3. Harmoni ekonomi kerakyatan**, dengan fokus :
 - a. pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa berbasis potensi ekonomi lokal,
 - b. pengembangan pasar rakyat yang tertib dan ramah lingkungan dan kemitraan antara pengusaha besar dan pelaku usaha kecil.
 - c. Pemantapan hilirisasi pertanian yang mampu memberikan nilai tambah pada pertanian, teknologi pertanian yang berkembang, irigasi yang cukup dalam mendorong produksi pertanian, cadangan pangan dan swasembada pangan yang terpenuhi, peningkatan keaneragaman pangan dan fortifikasi pangan
 - d. Peningkatan destinasi wisata yang ramah lingkungan memenuhi standar dan kolaborasi wisata di aglomerasi solo raya sebagai destinasi alternatif Jogja Magelang
- 4. Harmoni tata kelola pemerintahan**, dengan fokus :
 - a. Perwujudan digitalisasi layanan publik, transformasi birokrasi
 - b. Perwujudan digitalisasi pengelolaan keuangan, aset yang akuntabel dan terintegrasi
 - c. Perwujudan kapasitas fiskal yang baik dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah
 - d. Perwujudan pembangunan satu data dan keamanan informasi
 - e. Inovasi dan Riset yang mendorong akselerasi pembangunan
- 5. Harmoni infrastruktur dan tata ruang serta lingkungan hidup**, dengan fokus :
 - a. Terciptanya infrastruktur mantap yaitu jalan yang mantap, drainase, air minum dan sanitasi menuju aman
 - b. Penataan kota dan batas kota yang mantap
 - c. Konektivitas antar wilayah dan wilayah perbatasan
 - d. Kualitas lingkungan yang selaras dengan kualitas air, udara dan tutupan lahan.

Arah kebijakan dalam pencapaian visi misi tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah vokasi;
2. Peningkatan literasi masyarakat dengan fokus pembentukan perpustakaan digital;
3. Peningkatan inovasi daerah dengan fokus pembentukan pusat penelitian daerah;
4. Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dengan fokus perbaikan gizi masyarakat, pemeriksaan kesehatan rutin, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan Desa Siaga;
5. Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;
6. Peningkatan capaian olahraga rekreasi dan pemasyarakatan olahraga dengan fokus pelaksanaan *event* kejuaraan olahraga rekreasi dari tingkat RT kelurahan sampai kabupaten;
7. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender;
8. Peningkatan capaian pemuda dengan fokus pengembangan kapasitas pemuda dalam organisasi sosial;
9. Peningkatan kualitas produksi pertanian yang dititik beratkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan, modernisasi dan hilirisasi pertanian dan pengembangan agro industri serta peningkatan kualitas petani millennial, pembangunan perikanan difokuskan pada Peningkatan kualitas perikanan budidaya;
10. Peningkatan daya saing pariwisata dengan fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemantapan pengelolaan daya tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata;
11. Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air dengan fokus pemeliharaan saluran irigasi dalam kondisi baik.
12. Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/klaster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
13. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;
14. Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi dengan melakukan identifikasi potensi pemanfaatan panas bumi;
15. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perizinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
16. Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
17. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi;
18. Peningkatan cadangan pangan masyarakat dengan peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
19. Peningkatan konservasi hutan dengan fokus melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar taman hutan rakyat dalam menjaga kelestarian hutan;
20. Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN);

21. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningkatan Indeks Desa, Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan dan Pengembangan kerjasama antar desa;
22. Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
23. Peningkatan pencapaian SPM sanitasi difokuskan pada pengembangan sanitasi aman, penyediaan kualitas IPLT;
24. Peningkatan pencapaian rumah tangga yang memiliki akses air minum difokuskan pada pemenuhan air minum layak dan mendorong perkotaan untuk penyediaan air minum perpipaan yang aman;
25. Peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada pemenuhan rumah layak huni baik pada penduduk miskin maupun penduduk korban bencana dan proyek, peningkatan kualitas kawasan permukiman dan perumahan untuk mengurangi kumuh;
26. Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan dengan fokus perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan;
27. Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi;
28. Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemantapan kelembagaan, kebijakan yang mampu menyelesaikan problem daerah dan pro rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah;
29. Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas *Smart City*, dan kualitas layanan aduan masyarakat;
30. Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip;
31. Peningkatan kualitas satu data difokuskan pada peran produsen data dan penyediaan data sektoral;
32. Peningkatan keamanan informasi daerah;
33. Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat;
34. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset yang mendorong PAD;
35. Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko;
36. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa difokuskan pada peningkatan kualitas *e-procurements*, kualitas sarana dan prasarana;
37. Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan;
38. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca, Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
39. Peningkatan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan dengan fokus pendataan secara berkelanjutan dan menyeluruh;
40. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST;
41. Peningkatan kondusivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan;
42. Pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana; dan

43. Peningkatan pelestarian budaya dengan fokus pengelolaan cagar budaya.

Tabel 3.9.
Keterkaitan Misi dengan Arah Kebijakan

Frasa	Misi	Arah Kebijakan
Berintegritas	Misi 4 : Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	a. Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi. b. Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemantapan kelembagaan, kebijakan yang mampu menyelesaikan problem daerah dan pro rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah. c. Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas <i>Smart City</i> , dan kualitas layanan aduan masyarakat. d. Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip. e. Peningkatan kualitas satu data difokuskan pada peran produsen data dan penyediaan data sectoral. f. Peningkatan keamanan informasi daerah. g. Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat. h. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset yang mendorong PAD. i. Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko. j. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa difokuskan pada peningkatan kualitas <i>e-procurements</i> , kualitas sarana dan prasarana. k. Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan.
	Misi 5 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama	a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca, Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industry. b. Peningkatan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan dengan fokus pendataan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Frasa	Misi	Arah Kebijakan
		c. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST. d. Peningkatan kondusivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan. e. Pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.
Berdaya Saing	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender	a. Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah vokasi; b. Peningkatan literasi masyarakat dengan fokus pembentukan perpustakaan digital; c. Peningkatan inovasi daerah dengan fokus pembentukan pusat penelitian daerah; d. Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dengan fokus perbaikan gizi masyarakat, pemeriksaan kesehatan rutin, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan Desa Siaga; e. Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB dan kualitas keluarga sejahtera; f. Peningkatan capaian olahraga rekreasi dan pemasyarakatan olahraga dengan fokus pelaksanaan event kejuaraan olahraga rekreasi dari tingkat RT kelurahan sampai kabupaten; g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender; h. Peningkatan capaian pemuda dengan fokus pengembangan kapasitas pemuda dalam organisasi sosial; dan i. Peningkatan pelestarian budaya dengan fokus pengelolaan cagar budaya.
	Misi 2 : Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus	a. Peningkatan kualitas produksi pertanian yang dititik beratkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan, modernisasi dan hilirisasi pertanian dan pengembangan agro industri serta peningkatan kualitas petani millennial, pembangunan perikanan

Frasa	Misi	Arah Kebijakan
	pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian	difokuskan pada Peningkatan kualitas perikanan budidaya; b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar taman hutan rakyat dalam mendorong produk unggulan daerah; c. Peningkatan daya saing pariwisata dengan fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemantapan pengelolaan daya tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata; d. Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/klaster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital; e. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen; f. Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi dengan melakukan identifikasi potensi pemanfaatan panas bumi; g. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perizinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; i. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi; j. Peningkatan cadangan pangan masyarakat dengan peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
Sejahtera	Misi 3 : Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi	a. Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN); b. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningkatan Indeks Desa, Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan dan Pengembangan kerjasama antar desa; c. Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah; d. Peningkatan pencapaian SPM sanitasi difokuskan pada pengembangan sanitasi aman, penyediaan kualitas IPLT;

Frasa	Misi	Arah Kebijakan
		e. Peningkatan pencapaian rumah tangga yang memiliki akses air minum difokuskan pada pemenuhan air minum layak dan mendorong perkotaan untuk penyediaan air minum perpipaan yang aman; f. Peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada pemenuhan rumah layak huni baik pada penduduk miskin maupun penduduk korban bencana dan proyek, peningkatan kualitas kawasan permukiman dan perumahan untuk mengurangi kumuh. g. Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan dengan fokus perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan.

Tabel 3.10. Keterkaitan Penahapan Prioritas Tahunan dengan Arah Kebijakan				
TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional	Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing	Penguatan Potensi Ekonomi Lokal Berkelanjutan yang mampu Menyerap Tenaga Kerja	Perwujudan Masyarakat Karanganyar yang Sejahtera dalam Tata Kelola Karanganyar Baru	Perwujudan Karanganyar Baru yang Harmoni
• Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan dengan fokus perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan; • Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi; • Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemantapan kelembagaan, kebijakan yang mampu menyelesaikan problem daerah dan pro rakyat,	• Peningkatan kualitas produksi pertanian yang dititik beratkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan, modernisasi dan hilirisasi pertanian dan pengembangan agro industri serta peningkatan kualitas petani millennial, pembangunan perikanan difokuskan pada Peningkatan kualitas perikanan budidaya; • Peningkatan konservasi hutan dengan fokus melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar taman hutan rakyat dalam menjaga kelestarian hutan; • Peningkatan daya saing pariwisata dengan fokus	• Peningkatan kualitas produksi pertanian yang dititik beratkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan, modernisasi dan hilirisasi pertanian dan pengembangan agro industri serta peningkatan kualitas petani millennial, pembangunan perikanan difokuskan pada Peningkatan kualitas perikanan budidaya; • Peningkatan konservasi hutan dengan fokus melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar taman hutan rakyat dalam	• Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN); • Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningkatan Indeks Desa, Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan dan	• Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN); • Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningkatan Indeks Desa, Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, Peningkatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah; • Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas Smart City, dan kualitas layanan aduan masyarakat; • Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip; • Peningkatan kualitas satu data difokuskan pada peran produsen data dan penyediaan data sektoral; • Peningkatan keamanan informasi daerah; • Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang	pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemantapan pengelolaan daya tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata; • Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/klaster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital; • Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen; • Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi dengan melakukan identifikasi potensi pemanfaatan panas bumi; • Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perizinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan	menjaga kelestarian hutan; • Peningkatan daya saing pariwisata dengan fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemantapan pengelolaan daya tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata; • Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/klaster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital; • Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen; • Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi dengan melakukan identifikasi potensi pemanfaatan panas bumi;	Pengembangan kerjasama antar desa; • Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah; • Peningkatan pencapaian SPM sanitasi difokuskan pada pengembangan sanitasi aman, penyediaan kualitas IPLT; • Peningkatan pencapaian rumah tangga yang memiliki akses air minum difokuskan pada pemenuhan air minum layak dan mendorong perkotaan untuk penyediaan air minum perpipaan yang aman; • Peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada pemenuhan rumah layak huni baik pada penduduk miskin	pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan dan Pengembangan kerjasama antar desa; • Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah; • Peningkatan pencapaian SPM sanitasi difokuskan pada pengembangan sanitasi aman, penyediaan kualitas IPLT; • Peningkatan pencapaian rumah tangga yang memiliki akses air minum difokuskan pada pemenuhan air minum layak dan mendorong perkotaan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat; • Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset yang mendorong PAD; • Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko; • Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa difokuskan pada peningkatan kualitas <i>e-procurements</i>, kualitas sarana dan prasarana; • Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan;	peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); • Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; • Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi; • Peningkatan cadangan pangan masyarakat dengan peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;	• Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perizinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); • Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; • Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi; • Peningkatan cadangan pangan masyarakat dengan peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;	maupun penduduk korban bencana dan proyek, peningkatan kualitas kawasan permukiman dan perumahan untuk mengurangi kumuh; • Peningkatan kualitas produksi pertanian yang dititik beratkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan, modernisasi dan hilirisasi pertanian dan pengembangan agro industri serta peningkatan kualitas petani millennial, pembangunan perikanan difokuskan pada Peningkatan kualitas perikanan budidaya; • Peningkatan konservasi hutan dengan fokus melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar taman hutan rakyat dalam	untuk penyediaan air minum perpipaan yang aman; • Peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada pemenuhan rumah layak huni baik pada penduduk miskin maupun penduduk korban bencana dan proyek, peningkatan kualitas kawasan permukiman dan perumahan untuk mengurangi kumuh.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah vokasi; • Peningkatan literasi masyarakat dengan fokus pembentukan perpustakaan digital; • Peningkatan inovasi daerah dengan fokus pembentukan pusat penelitian daerah; • Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dengan fokus perbaikan gizi masyarakat, pemeriksaan kesehatan rutin, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan Desa Siaga;		• Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN); • Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningkatan Indeks Desa, Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan dan Pengembangan kerjasama antar desa; • Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang	menjaga kelestarian hutan; • Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar taman hutan rakyat dalam mendorong produk unggulan daerah; • Peningkatan daya saing pariwisata dengan fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemantapan pengelolaan daya tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata; • Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/klaster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital; • Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;	

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB dan kualitas keluarga sejahtera; • Peningkatan capaian olahraga rekreasi dan pemasyarakatan olahraga dengan fokus pelaksanaan event kejuaraan olahraga rekreasi dari tingkat RT kelurahan sampai kabupaten; • Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender; • Peningkatan capaian pemuda dengan fokus pengembangan kapasitas		menghubungkan antar wilayah; • Peningkatan pencapaian SPM sanitasi difokuskan pada pengembangan sanitasi aman, penyediaan kualitas IPLT; • Peningkatan pencapaian rumah tangga yang memiliki akses air minum difokuskan pada pemenuhan air minum layak dan mendorong perkotaan untuk penyediaan air minum perpipaan yang aman; • Peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada pemenuhan rumah layak huni baik pada penduduk miskin maupun penduduk korban bencana dan proyek, peningkatan kualitas kawasan permukiman dan	• Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi dengan melakukan identifikasi potensi pemanfaatan panas bumi; • Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perizinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); • Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; • Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi; • Peningkatan cadangan pangan masyarakat	

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
pemuda dalam organisasi sosial • Peningkatan kualitas produksi pertanian yang dititik beratkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan, modernisasi dan hilirisasi pertanian dan pengembangan agro industri serta peningkatan kualitas petani millennial, pembangunan perikanan difokuskan pada Peningkatan kualitas perikanan budidaya;		perumahan untuk mengurangi kumuh;	dengan peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan; • Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca, Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri; • Peningkatan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan dengan fokus pendataan secara berkelanjutan dan menyeluruh; • Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST; • Peningkatan kondusivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat	

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan; • Pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana; dan • Peningkatan pelestarian budaya dengan fokus pengelolaan cagar budaya • eningkatan pelayanan administrasi pertanahan dengan fokus perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan; • Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dengan	

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dokumen perencanaan pusat dan provinsi; • Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemantapan kelembagaan, kebijakan yang mampu menyelesaikan problem daerah dan pro rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah; • Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas Smart City, dan kualitas layanan aduan masyarakat; • Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip;	

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			• Peningkatan kualitas satu data difokuskan pada peran produsen data dan penyediaan data sektoral; • Peningkatan keamanan informasi daerah; • Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat; • Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset yang mendorong PAD; • Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko;	

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa difokuskan pada peningkatan kualitas <i>e-procurements</i>, kualitas sarana dan prasarana; - Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan;	

3.2.2. Program Prioritas Daerah

Berikut ini program prioritas daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 3.11.

Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2029

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.							
BERINTEGRITAS	TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka			
		Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola	Nilai SAKIP	Nilai	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terintegrasi	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan
					2. Tersinkronisasinya perencanaan pembangunan antar perangkat daerah dan antar jenjang pemerintahan	2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu		
		pemerintahan daerah			3. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan		
					4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan		
					5. Meningkatnya efisiensi dan optimalisasi penggunaan aset daerah	5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keuangan		
					6. Meningkatnya pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan	6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan		
					7. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keuangan		
					8. Terselenggaranya koordinasi kebijakan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif	8. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah		
					9. Terselenggaranya perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi daerah secara terintegrasi	9. Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah		
					10. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah		
					Maturitas SPIP	Level	11. Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	11. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan
					12. Tersusunnya kebijakan pengawasan internal dan		12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pengawasan	

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					meningkatnya kapasitas pelaksanaan pengawasan		
					13. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan
					14. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur sipil negara daerah	14. Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
					15. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur dalam mendukung pelayanan publik	15. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan Pelatihan
					16. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
					17. Meningkatnya diseminasi informasi publik yang akurat dan transparan kepada masyarakat	17. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika
					18. Meningkatnya kualitas layanan digital pemerintah melalui pengelolaan aplikasi yang andal dan terpadu	18. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
					19. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah	19. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Statistik
					20. Terjaminnya keamanan informasi melalui sistem persandian yang andal di lingkungan Pemerintah Daerah	20. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persandian

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					21. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	21. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian
					22. Meningkatnya tertib arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	22. Program Pengelolaan Arsip	Kearsipan
					23. Terlindunginya arsip statis dan vital sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan memori kolektif daerah	23. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Kearsipan
			Indeks Pelayanan Publik	Angka	24. Meningkatnya cakupan dan ketepatan data pendaftaran penduduk untuk mendukung perencanaan pembangunan	24. Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					25. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dan diakui secara hukum	25. Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					26. Terwujudnya sistem informasi kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses	26. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					27. Meningkatnya kualitas data dan profil kependudukan yang mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan	27. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					28. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	28. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					29. Meningkatnya efektivitas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD	29. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					30. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	30. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD
					31. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif	31. Program penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kewilayahan (kecamatan)
					32. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	32. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kewilayahan (kecamatan)
					33. Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	33. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kewilayahan (kecamatan)
					34. Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	34. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kewilayahan (kecamatan)
					35. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	35. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kewilayahan (kecamatan)
					36. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	36. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kewilayahan (kecamatan)
	TJ 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq			
			Kasus Konflik SARA	Kasus			
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	37. Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan	37. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					38. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan secara signifikan	38. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
					39. Terlindunginya keanekaragaman hayati dan meningkatnya konservasi ekosistem lokal	39. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Lingkungan Hidup
					40. Meningkatnya pengelolaan B3 dan limbah B3 yang aman dan ramah lingkungan	40. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Lingkungan Hidup
					41. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan lingkungan	41. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan Hidup
					42. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	42. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup
					43. Tumbuhnya motivasi masyarakat dalam berperan aktif menjaga lingkungan	43. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup
					44. Respons cepat dan penyelesaian pengaduan lingkungan yang efektif	44. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
					45. Meningkatnya cakupan layanan persampahan dan pengurangan timbulan sampah	45. Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
					46. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	46. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup
					47. Terlindunginya keanekaragaman hayati dan	47. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Kehutanan

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					ekosistem melalui upaya konservasi yang berkelanjutan		
					48. Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana	48. Program Penanggulangan Bencana	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)
					49. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	49. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)
		Sasaran 3: Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	Angka Kriminalitas	Angka per 10.000 Penduduk	50. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat	50. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
					51. Meningkatnya kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap kejadian kebakaran dan non kebakaran	51. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
					52. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	52. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
					53. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	53. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					54. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang beretika dan berbudaya	54. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
					55. Meningkatnya kemandirian dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan	55. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
					56. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap tekanan ekonomi, sosial, dan budaya	56. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
					57. Meningkatnya kewaspadaan dan kemampuan daerah dalam mencegah serta menangani konflik sosial	57. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
					58. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	58. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
BERDAYA SAING	TJ 3) Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar		Indeks Daya Saing Daerah	Angka			
		Sasaran 4: Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	59. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	59. Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
					60. Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	60. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
					61. Terjaminnya kepatuhan dan kualitas lembaga pendidikan melalui perizinan yang sesuai ketentuan	61. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Pendidikan

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					62. Meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah	62. Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
					63. Terpeliharanya kesenian tradisional sebagai identitas dan daya tarik budaya lokal	63. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kebudayaan
					64. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah daerah	64. Program Pembinaan Sejarah	Kebudayaan
					65. Terlestarikannya cagar budaya sebagai warisan sejarah dan budaya daerah	65. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan
					66. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	66. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Kebudayaan
					67. Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	67. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
					68. Meningkatnya kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas	68. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
					69. Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan, serta keamanan pangan yang sesuai standar	69. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kesehatan
					70. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya promotif dan preventif kesehatan	70. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
					71. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	71. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan
					72. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	72. Program Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk dan

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					secara proporsional dan berkelanjutan		Keluarga Berencana
					73. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata dan mudah diakses	73. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					74. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial	74. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					75. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	75. Program pengaursutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					76. Terwujudnya perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi	76. Program Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					77. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan	77. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					78. Meningkatnya kualitas data gender dan anak yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan	78. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					79. Terpenuhi hak-hak anak dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan partisipasi	79. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					80. Terlindunginya anak dari situasi khusus yang mengancam tumbuh kembang dan masa depannya	80. Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					81. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	81. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					82. Meningkatnya partisipasi dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah	82. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
					83. Meningkatnya prestasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	83. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kepemudaan dan Olahraga
					84. Meningkatnya karakter, kemandirian, dan kepemimpinan generasi muda melalui kepramukaan	84. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kepemudaan dan Olahraga
					85. Meningkatnya kapasitas layanan dan aksesibilitas perpustakaan daerah	85. Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
					86. Terlestarikannya koleksi nasional dan naskah kuno sebagai warisan budaya daerah	86. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Perpustakaan
					87. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	87. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan, Kearsipan
		Sasaran 5: Meningkatnya riset dan inovasi	Kapabilitas inovasi	Angka	88. Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik	88. Program Riset Dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
		Sasaran 6: Meningkatnya kualitas potensi	Pertumbuhan Ekonomi	%	89. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan industri daerah	89. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perindustrian

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
		ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja			90. Tertibnya pelaksanaan usaha industri sesuai regulasi yang berlaku	90. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Perindustrian
					91. Meningkatnya kualitas data industri yang akurat dan terkini untuk perencanaan pembangunan industri	91. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Perindustrian
					92. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan dan legalitas usaha	92. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Perdagangan
					93. Meningkatnya efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa	93. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
					94. Terkendalinya harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	94. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perdagangan
					95. Meningkatnya daya saing dan volume ekspor produk unggulan daerah	95. Program Pengembangan Ekspor	Perdagangan
					96. Meningkatnya perlindungan konsumen dan kualitas produk yang beredar di pasar	96. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Perdagangan
					97. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan ekonomi daerah	97. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan
					98. Tersusunnya perencanaan tenaga kerja yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan pasar kerja	98. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
					99. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
					100. Meningkatnya kesempatan kerja melalui penempatan yang sesuai dengan kompetensi	100. Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					101. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan	101. Program Hubungan Industrial	Tenaga Kerja
					102. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	102. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja
					103. Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui pengembangan daya tarik wisata pengembangan daya tarik wisata	103. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
					104. Meningkatnya promosi dan citra destinasi pariwisata daerah	104. Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata
					105. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual	105. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Pariwisata
					106. Meningkatnya kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	106. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
					107. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	107. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					108. Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi koperasi simpan pinjam	108. Program pelayanan izin usaha Simpan Pinjam	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					109. Meningkatnya kepatuhan dan tata kelola koperasi yang sehat dan transparan	109. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					110. Terwujudnya koperasi yang sehat dan berkelanjutan	110. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					melalui evaluasi kinerja keuangan dan manajemen		
					111. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan dan kewirausahaan	111. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					112. Meningkatnya kemandirian koperasi serta perlindungan hukum dan usaha koperasi	112. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					113. Meningkatnya daya saing dan kemandirian UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal	113. Program Pemberdayaan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					114. Terlaksananya penguatan ekosistem usaha bagi UMKM melalui akses pasar, pembiayaan, dan teknologi	114. Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					115. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam mendukung ketahanan energi daerah	115. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Energi dan Sumber Daya Mineral
					116. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	116. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral
					117. Terciptanya iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan	117. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal
					118. Meningkatnya minat dan realisasi investasi melalui promosi potensi unggulan daerah	118. Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					119. Terwujudnya pelayanan investasi yang cepat, mudah, dan transparan	119. Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
					120. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal dan perizinan	120. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	Penanaman Modal
					121. Meningkatnya kualitas data penanaman modal yang akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan	121. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Penanaman Modal
					122. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	122. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penanaman Modal
		Sasaran 7: Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	123. Meningkatnya kemandirian pangan daerah	123. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Pangan
					124. Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta ketahanan pangan rumah tangga	124. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
					125. Menurunnya wilayah dan jumlah penduduk rawan pangan secara berkelanjutan	125. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pangan
					126. Terjaminnya keamanan pangan dari hulu ke hilir demi perlindungan kesehatan masyarakat	126. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan
					127. Meningkatnya Produksi 4 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	127. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					128. Meningkatnya Produksi 10 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji. pisang, tanaman hias, tanaman biofarmaka)	128. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian
					129. Meningkatnya produksi unggulan komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Cengkeh, Kelapa, Kakao, Tebu) dalam tahun n	129. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian
					130. Meningkatnya Populasi Ternak (Ternak Besar Sapi, Ternak Kecil Kambing dan Domba)	130. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertanian
					131. Meningkatnya cakupan dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung usaha tani	131. Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian
					132. Meningkatnya produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	132. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan
					133. Meningkatnya pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	133. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan
					134. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	134. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan
					135. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	135. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					136. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya air	136. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SEJAHTERA	TJ 4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata		Tingkat Kemiskinan	%			
		Sasaran 8: Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	137. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi sosial masyarakat rentan	137. Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
					138. Meningkatnya fungsi sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan	138. Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
					139. Terpenuhinya hak dasar dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan	139. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sosial
					140. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam mitigasi serta respons bencana	140. Program Penanganan Bencana	Sosial
					141. Terpeliharanya kehormatan dan kelestarian Taman Makam Pahlawan secara berkelanjutan	141. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Sosial
					142. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	142. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sosial
					143. Meningkatnya tertib administrasi dan tata ruang wilayah desa secara berkelanjutan	143. Program Penataan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					144. Terjalinnnya sinergi antar desa dan pihak lain dalam pengembangan potensi dan pelayanan masyarakat	144. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					145. Meningkatnya kapasitas dan tertib administrasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel	145. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					146. Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa	146. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					147. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	147. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					148. Berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis potensi wilayah	148. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Transmigrasi
					149. Meningkatnya konektivitas dan kelayakan infrastruktur jalan	149. Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					150. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pengelolaan air limbah	150. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					151. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak	151. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					152. Menurunnya genangan dan risiko banjir di kawasan permukiman	152. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					153. Meningkatnya kapasitas dan daya saing penyedia jasa konstruksi	153. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					154. Terwujudnya bangunan gedung yang tertib, aman, dan fungsional	154. Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					155. Terkendalinya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berdaya saing	155. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					156. Meningkatnya ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau	156. Program pengembangan perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
					157. Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata dan berkelanjutan	157. Program kawasan permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
					158. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh secara signifikan	158. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
					159. Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata dan berkelanjutan	159. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
					160. Meningkatnya tertib administrasi dan mutu pelaku pembangunan perumahan dan permukiman	160. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
					161. Meningkatnya pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah masyarakat melalui redistribusi tanah secara adil dan berkelanjutan	161. Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Pertanahan
					162. Terwujudnya tertib administrasi, tertib penggunaan, dan pengendalian pemanfaatan tanah secara optimal, berkeadilan, serta berkelanjutan sesuai peruntukan ruang	162. Program Penatagunaan Tanah	Pertanahan

Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Outcome	Program Prioritas	Urusan Pengampu
					163. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	163. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					164. Meningkatnya kelancaran, keselamatan, dan keterpaduan sistem transportasi darat bagi masyarakat	164. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan
					165. Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	165. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perhubungan

Tabel 3.12.
Persandingan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Unggulan Daerah

Visi Dan Frase Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Unggulan	Urusan	Satuan
“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.							
BERINTEGRITAS	Misi 4: Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi			Angka
			Sasaran 1) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	- Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah. - Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta.	Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Diklat, Setda, Setwan, Pengawasan, Dukcapil, Kearsipan, Statistik, Persandian, Kecamatan, Kominfo	Nilai
				Maturitas SPIP			Level
				Indeks Pelayanan Publik			Angka
	Misi 5: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	TJ 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif			Ton CO2eq
				Kasus Konflik SARA			Kasus

Visi Dan Frase Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Unggulan	Urusan	Satuan
“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.							
	lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama.	lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah	Sasaran 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		Lingkungan Hidup, Ketentraman, Ketertiban Perlindungan Masyarakat, Kehutanan	Angka
			Sasaran 3: Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	Angka Kriminalitas		Ketentraman, Ketertiban Perlindungan Masyarakat, Kesbangpol	Angka per 10.000 Penduduk
BERDAYA SAING	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	TJ 3) Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar		Indeks Daya Saing Daerah			Angka
			Sasaran 4) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil	Indeks Pembangunan Manusia	Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta.	Pendidikan, Kesehatan, Litbang, Pemuda Dan Olah Raga, Perpustakaan, Pengendalian Penduduk &	Angka

Visi Dan Frase Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Unggulan	Urusan	Satuan
“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.							
	olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender		Sasaran 5) Meningkatnya riset dan inovasi	Indeks Kapabilitas inovasi		Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan Kebudayaan	Angka
	Misi 2: Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian		Sasaran 6) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja	Pertumbuhan Ekonomi	- Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas. - Setunggal Karangtaruna, setunggal kelompok usaha disertai bantuan modal langsung yang berkelanjutan. - Memfasilitasi event UMKM, Kesenian, Kebudayaan, Keagamaan dan olahraga dalam skala lokal, nasional maupun internasional yang	Naker, ESDM, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi UMKM, Penanaman Modal	%

Visi Dan Frase Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Unggulan	Urusan	Satuan
“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.							
					dikemass dalam kalender event tahunan Kabupaten Karanganyar agar tercipta multiplier effect yang hebat.		
			Sasaran 7) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar	Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, PUPR (terkait Irigasi)	Angka
SEJAHTERA	Misi 3: Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan	TJ 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata		Tingkat Kemiskinan			%
			Sasaran 8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi	Indeks Gini	KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan	Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Transmigrasi	Angka

Visi Dan Frase Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Unggulan	Urusan	Satuan
“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.							
	pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi		ketimpangan pendapatan		sistem terpadu dan tepat sasaran. • Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah. • Satu desa satu tempat umum yang nyaman dengan layanan internet cepat dan gratis. • Pembangunan infrastruktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”	PUPR, Perkim, Pertanahan Perhubungan	

Dalam rangka menjadi sinergitas pembangunan, Kabupaten Karanganyar melakukan integrasi program prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ke dalam program pembangunan daerah. Berikut ini peran Kabupaten Karanganyar dalam mencapai Prioritas Provinsi dan Nasional:

Tabel 3.13.

Persandingan Program Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Karanganyar

No	17 Program Prioritas Presiden	Program Prioritas Jawa Tengah	Program Prioritas Kabupaten Karanganyar
1	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air		Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara		
3	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi
5	Pemberantasan Kemiskinan		Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar
6	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba		Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7	Menjamin Tersedia nya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin;	Peningkatan kesertaan dan keaktifan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui KTP Hebat.
8	Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk	Peningkatan pengelolaan pendidikan (PAUD, SD, SMP), pemberian insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta

No	17 Program Prioritas Presiden	Program Prioritas Jawa Tengah	Program Prioritas Kabupaten Karanganyar
		sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif		
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas		Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai;	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keanekaragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana
12	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;	Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar
13	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;	Pembangunan infrastruktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”, pembangunan rumah layak huni, peningkatan destinasi wisata dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga
14	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;	Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan

No	17 Program Prioritas Presiden	Program Prioritas Jawa Tengah	Program Prioritas Kabupaten Karanganyar
		Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;	Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata
		Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;	Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah
15	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Manusia untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi		Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan modernisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja
16	Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendidikan, dan Perawatan Rumah Ibadah	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air
		Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren;	Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat
17	Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga		Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade

Berikut ini dukungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota:

Tabel 3.14.
Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar Terhadap 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah
yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar	Urusan
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Penyediaan 3 Kecamatan sebagai Kecamatan berdaya dalam mendorong desa ramah perempuan dan anak, peningkatan ekonomi kreatif dan sarana olahraga	Koordinator: Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Urusan Pendukung: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Pembangunan jalan halus bebas jeglongan, kualitas akses air minum layak menuju aman, peningkatan akses sanitasi layak dan rumah layak huni yang mendukung 1 KK 1 rumah layak huni Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Program Prioritas pada Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan maturitas SPIP dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karanganyar bebas korupsi	Inspektorat/pengawasan
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan primer dan rujukan, mendorong Integrasi layanan primer	Kesehatan
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Peningkatan kualitas produk perikanan budidaya	Perikanan dan kelautan
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerja sama dengan Pihak Sekolah Swasta	Penyediaan lokasi untuk pembangunan SMA dan SMK oleh pemerintah Provinsi.	Pertanahan

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar	Urusan
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dengan pembentukan Desa ramah perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata	Pariwisata
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Peningkatan kualitas BUMDES dan pembentukan BUMDESma, peningkatan dan pemberdayaan Koperasi Merah Putih	Pemberdayaan masyarakat dan desa
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana	Ketentraman Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
11	Cek Kesehatan Gratis	Program Kesehatan Gratis dengan peningkatan anggaran kesehatan untuk keaktifan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, pelayanan kesehatan gratis dengan menggunakan KTP	Kesehatan
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Pengembangan & optimalisasi Puskesmas Rawat Inap di tiap-tiap Puskesmas dengan standar tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan Menteri kesehatan termasuk dokter dan bidan	Kesehatan
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan mencegah korupsi	Inspektorat/pengawasan
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada disabilitas, perempuan rentan serta pendampingan hukum bagi masyarakat rentan	Sosial, setda bagian hukum

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar	Urusan
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Bantuan keuangan desa 100 juta setiap desa per tahun sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah	Pemberdayaan Masyarakat Desa
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada disabilitas, perempuan rentan	Sosial
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Peningkatan pembiayaan syariah oleh koperasi merah putih dan pembiayaan lain	Koperasi UMKM
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Peningkatan kualitas UMKM dengan memberikan akses pada PIRT, sertifikat halal secara gratis dengan menggunakan KTP	Koperasi UMKM, Kesehatan
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Peningkatan kualitas peternakan dengan modernisasi	Pertanian
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Pembangunan desa mandiri dan mendorong kemampuan desa dalam menuju ketahanan pangan, desa Tangguh bencana	Pemberdayaan Masyarakat dan desa Ketentraman Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Pembangunan desa mandiri dan mendorong kemampuan desa dalam menuju ketahanan pangan	Pemberdayaan Masyarakat dan desa Pangan
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Program Pengembangan UMKM yang prioritas adalah perempuan	Koperasi UMKM
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Peningkatan penggunaan teknologi dalam pengembangan desa mandiri dan peningkatan promosi wisata berbasis teknologi	Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar	Urusan
		Peningkatan kualitas pelaku ekonomi kreatif	Pariwisata
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Pemberian modal usaha 10-30 untuk karang taruna dan fasilitasi UMKM	Sosial, Koperasi UMKM
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Lingkungan hidup
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Mendorong keanekaragaman hayati melalui peningkatan ruang terbuka hijau	Lingkungan hidup
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	Kesbangpol
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air dan peningkatan forum kerukunan antar umat beragama	Kesbangpol
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Peningkatan kualitas kelembagaan desa/kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan desa
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Peningkatan kualitas hidup lansia	Kesehatan
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	Tenaga kerja
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Pengembangan koperasi sebagai wadah yang mampu memberikan jaminan ketersediaan modal bagi pelaku usaha dan UMKM,	Pemberdayaan Masyarakat dan desa, koperasi UMKM
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Peningkatan pengelolaan olahraga prestasi, rekreasi	Kepemudaan and olahraga
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	mendorong sekolah inklusi,	Pendidikan
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana	Ketentraman Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel 3.15.

Dukungan Program Daerah Kabupaten Karanganyar terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029
Prioritas Nasional/Asta Cita	Program Prioritas Kabupaten Karanganyar
Asta Cita 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air 2. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan 2. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian 3. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar
Asta Cita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”, pembangunan rumah layak huni, peningkatan destinasi wisata dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga 2. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas 3. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata
Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1. Peningkatan kepesertaan dan keaktifan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui KTP Hebat 2. Peningkatan pengelolaan pendidikan (PAUD, SD, SMP), pemberian insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta 3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan 4. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sejahtera. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029
Prioritas Nasional/Asta Cita	Program Prioritas Kabupaten Karanganyar
Asta Cita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan modernisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja
Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar 2. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan 3. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah
Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi
Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	1. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah 2. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana

Tabel 3.16.
Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar
terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	
Prioritas Nasional/Asta Cita	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
Asta Cita 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Umum (KESBANGPOL)
	2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	PD pengampu Urusan Pemerintahan Umum (KESBANGPOL)
	3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	PD pengampu Urusan Pemerintahan Umum (KESBANGPOL)
Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	PD pengampu Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	PD pengampu Urusan Pangan
	3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PD pengampu Urusan Pangan
	4. Program Penanganan Kerawanan Pangan	PD pengampu Urusan Pangan
	5. Program Pengawasan Keamanan Pangan	PD pengampu Urusan Pangan
	6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	PD pengampu Urusan Pertanian
	7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PD pengampu Urusan Pertanian
	8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	PD pengampu Urusan Pertanian
	9. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	PD pengampu Urusan Pertanian
	10. Program Penyuluhan Pertanian	PD pengampu Urusan Pertanian
	11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	PD pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	12. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	PD pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	
Prioritas Nasional/Asta Cita	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
	13. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	PD pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	14. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	15. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	PD pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
	16. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	PD pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
Asta Cita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD pengampu Urusan Pariwisata
	2. Program Pemasaran Pariwisata	PD pengampu Urusan Pariwisata
	3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PD pengampu Urusan Pariwisata
	4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PD pengampu Urusan Pariwisata
	5. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	PD pengampu Urusan Perdagangan
	6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	PD pengampu Urusan Perdagangan
	7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PD pengampu Urusan Perdagangan
	8. Program Pengembangan Ekspor	PD pengampu Urusan Perdagangan
	9. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	PD pengampu Urusan Perdagangan
	10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	PD pengampu Urusan Perdagangan
	11. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	PD pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	12. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	PD pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	13. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	PD pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	14. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	PD pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	
Prioritas Nasional/Asta Cita	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
	15. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	PD pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	PD pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	17. Program Pengembangan UMKM	PD pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	18. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	PD pengampu Urusan Penanaman Modal
	19. Program Promosi Penanaman Modal	PD pengampu Urusan Penanaman Modal
	20. Program Pelayanan Penanaman Modal	PD pengampu Urusan Penanaman Modal
	21. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	PD pengampu Urusan Penanaman Modal
	22. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	PD pengampu Urusan Penanaman Modal
	23. Program Perencanaan Tenaga Kerja	PD pengampu Urusan Tenaga Kerja
	24. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PD pengampu Urusan Tenaga Kerja
	25. Program Penempatan Tenaga Kerja	PD pengampu Urusan Tenaga Kerja
	26. Program Hubungan Industrial	PD pengampu Urusan Tenaga Kerja
	27. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	28. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	29. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	30. Program Penataan Bangunan Gedung	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	31. Program Penyelenggaraan Jalan	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	32. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	33. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PD pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	34. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PD pengampu Urusan Perhubungan

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	
Prioritas Nasional/Asta Cita	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
	35. Program Pengembangan Perumahan	PD pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	36. Program Kawasan Permukiman	PD pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	37. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	PD pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	38. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	PD pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	39. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	PD pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	40. Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	PD pengampu Urusan Pertanahan
	41. Program Penatagunaan Tanah	PD pengampu Urusan Pertanahan
Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1. Program Pengelolaan Pendidikan	PD pengampu Urusan Pendidikan
	2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	PD pengampu Urusan Pendidikan
	3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	PD pengampu Urusan Pendidikan
	4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PD pengampu Urusan Kesehatan
	5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	PD pengampu Urusan Kesehatan
	6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PD pengampu Urusan Kesehatan
	7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PD pengampu Urusan Kesehatan
	8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	PD pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	9. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PD pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	10. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	PD pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	11. Program Pembinaan Perpustakaan	PD pengampu Urusan Perpustakaan
	12. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	PD pengampu Urusan Perpustakaan

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	
Prioritas Nasional/Asta Cita	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
	13. Program Pengendalian Penduduk	PD pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	14. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	PD pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	15. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	PD pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	16. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	17. Program Perlindungan Perempuan	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	18. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	19. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	20. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	21. Program Perlindungan Khusus Anak	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	22. Program Pengembangan Kebudayaan	PD pengampu Urusan Kebudayaan
	23. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	PD pengampu Urusan Kebudayaan
	24. Program Pembinaan Sejarah	PD pengampu Urusan Kebudayaan
	25. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	PD pengampu Urusan Kebudayaan
	26. Program Riset Dan Inovasi Daerah	PD pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
Asta Cita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	PD pengampu Urusan Perindustrian
	2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	PD pengampu Urusan Perindustrian
	3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	PD pengampu Urusan Perindustrian

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	
Prioritas Nasional/Asta Cita	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1. Program Penataan Desa	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2. Program Peningkatan Kerjasama Desa	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	PD pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PD pengampu Urusan Transmigrasi
	6. Program Pemberdayaan Sosial	PD pengampu Urusan Sosial
	7. Program Rehabilitasi Sosial	PD pengampu Urusan Sosial
	8. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	PD pengampu Urusan Sosial
	9. Program Penanganan Bencana	PD pengampu Urusan Sosial
	10. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	PD pengampu Urusan Sosial
Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PD pengampu Urusan Perencanaan
	2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PD pengampu Urusan Perencanaan
	3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	PD pengampu Urusan Keuangan
	4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	PD pengampu Urusan Keuangan
	5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	PD pengampu Urusan Keuangan
	6. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	7. Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
	8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah
	9. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
	10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
	11. Program Pendaftaran Penduduk	PD pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	12. Program Pencatatan Sipil	PD pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	
Prioritas Nasional/Asta Cita	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
	13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PD pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	14. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	PD pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	15. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
	16. Program Kepegawaian Daerah	PD pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan
	17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PD pengampu Urusan Kepegawaian
	18. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	PD pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
	19. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PD pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
	20. Program Pengelolaan Arsip	PD pengampu Urusan Kearsipan
	21. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	PD pengampu Urusan Kearsipan
	22. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	PD pengampu Urusan Statistik
	23. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	PD pengampu Urusan Persandian
	24. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PD pengampu Urusan Kewilayahan (Kecamatan)
	25. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PD pengampu Urusan Kewilayahan (Kecamatan)
	26. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PD pengampu Urusan Kewilayahan (Kecamatan)
	27. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PD pengampu Urusan Kewilayahan (Kecamatan)
	28. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PD pengampu Urusan Kewilayahan (Kecamatan)
Asta Cita 8 Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	PD pengampu Urusan Pemerintahan Umum (KESBANGPOL)
	2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	PD pengampu Urusan Pemerintahan Umum (KESBANGPOL)
	3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	
Prioritas Nasional/Asta Cita	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
mencapai masyarakat yang adil dan makmur	4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	11. Program Pengelolaan Persampahan	PD pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	12. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	PD pengampu Urusan Kehutanan
	13. Program Penanggulangan Bencana	PD pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)

3.2.3. Arah Pembangunan Wilayah

Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan yang setidaknya terdapat 5 pembagian kawasan dengan total sejumlah 18 Kawasan yang berada di Jawa Tengah, yaitu:

1. Kawasan Pertumbuhan (8 Kawasan): Kawasan Perkotaan Purwokerto, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap, Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang, WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus, Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo, Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar, Kawasan Perkotaan Rembang;
2. Kawasan komoditas Unggulan (2 Kawasan) yaitu komoditas Tebu di Pegunungan Kendeng (Rembang, Pati, Blora, dan Sragen) dan Ekonomi Biru di Pati-Rembang, dan Cilacap;
3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi (4 Kawasan):
 - a. Swasembada Pangan dan Air: Pemali-Comal (Brebes, Kab. Tegal, Pemalang, Kab. Pekalongan dan Batang);
 - b. Swasembada Pangan, Air dan Energi: Dieng-Serayu-Bogowonto (Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo); Jragung – Tuntang – Serang – Lusi – Juwana (Kab. Semarang, Demak, Jepara, Pati, Kudus, Rembang, Grobogan); Bengawan Solo (Blora, Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri).
4. Kawasan Afirmasi (1 Kawasan): Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan);
5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana (3 Kawasan): TN Merbabu - Merapi, TN Karimunjawa dan Geopark Kebumen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Wilayah Pengembangan (WP) adalah pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar Kabupaten/Kota. Sepuluh WP di Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian wilayah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. WP Bregasmalang meliputi: Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang;
2. WP Cibalingmas, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
3. WP Petanglong, meliputi: Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan;
4. WP Kedungsepur, meliputi: Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan;
5. WP Jekuti, meliputi: Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati;
6. WP Banglor, meliputi: Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang;
7. WP Wonobanjar, meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
8. WP Keburejo, meliputi: Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo
9. Gelangmanggung, meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;

10. Subosukawonosraten, meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.

Rencana Sistem Perkotaan Wilayah adalah suatu rencana strategis yang merumuskan bagaimana suatu wilayah perkotaan akan dibangun, dikembangkan, dan diatur secara keseluruhan. Rencana ini mencakup berbagai aspek, termasuk penggunaan lahan, transportasi, infrastruktur, lingkungan, perumahan, serta fasilitas umum lainnya di wilayah tersebut. Tujuan dari Rencana Sistem Perkotaan Wilayah adalah menciptakan suatu kerangka kerja yang terorganisir untuk pengembangan kota yang berkelanjutan. Ini melibatkan penataan ruang yang baik, keberlanjutan lingkungan, aksesibilitas, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

Pusat pertumbuhan ini ditetapkan berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi strategis, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, atau potensi pasar yang besar. Upaya untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ini dapat melibatkan pembangunan jalan, pusat industri, pusat perdagangan, pendidikan, serta layanan kesehatan, yang diharapkan dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut. Pengembangan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan hortikultura, karena Karanganyar merupakan salah satu lumbung hortikultura di Jawa Tengah, terutama di wilayah dataran tinggi (Ngargoyoso, Tawangmangu, Karangpandan) (sayuran: cabai, wortel, kol, bawang putih, sawi, dan Tanaman obat/jamu: jahe, kunyit, temulawak, kencur (yang menjadi bahan baku utama industri herbal) dan dimana sektor pertanian juga menjadi penyedia lapangan pekerjaan non formal terbesar; peningkatan destinasi wisata terutama destinasi wisata alam seperti Grojogan Sewu dan air terjun Jumog, Kebun Teh Kemuning, maupun wisata budaya misalnya Astana Giribangun atau wisata Candi Cetho dan Candi Sukuh;

Adapun pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Karanganyar meliputi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Pusat Kegiatan Lokal.

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Karanganyar ditetapkan di wilayah:

- a. Kawasan Perkotaan Karanganyar; dan
- b. Kawasan Perkotaan Kecamatan Colomadu;

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Adapun PPK di Kabupaten Karanganyar berdasarkan pada Perda Nomor 19 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar meliputi:

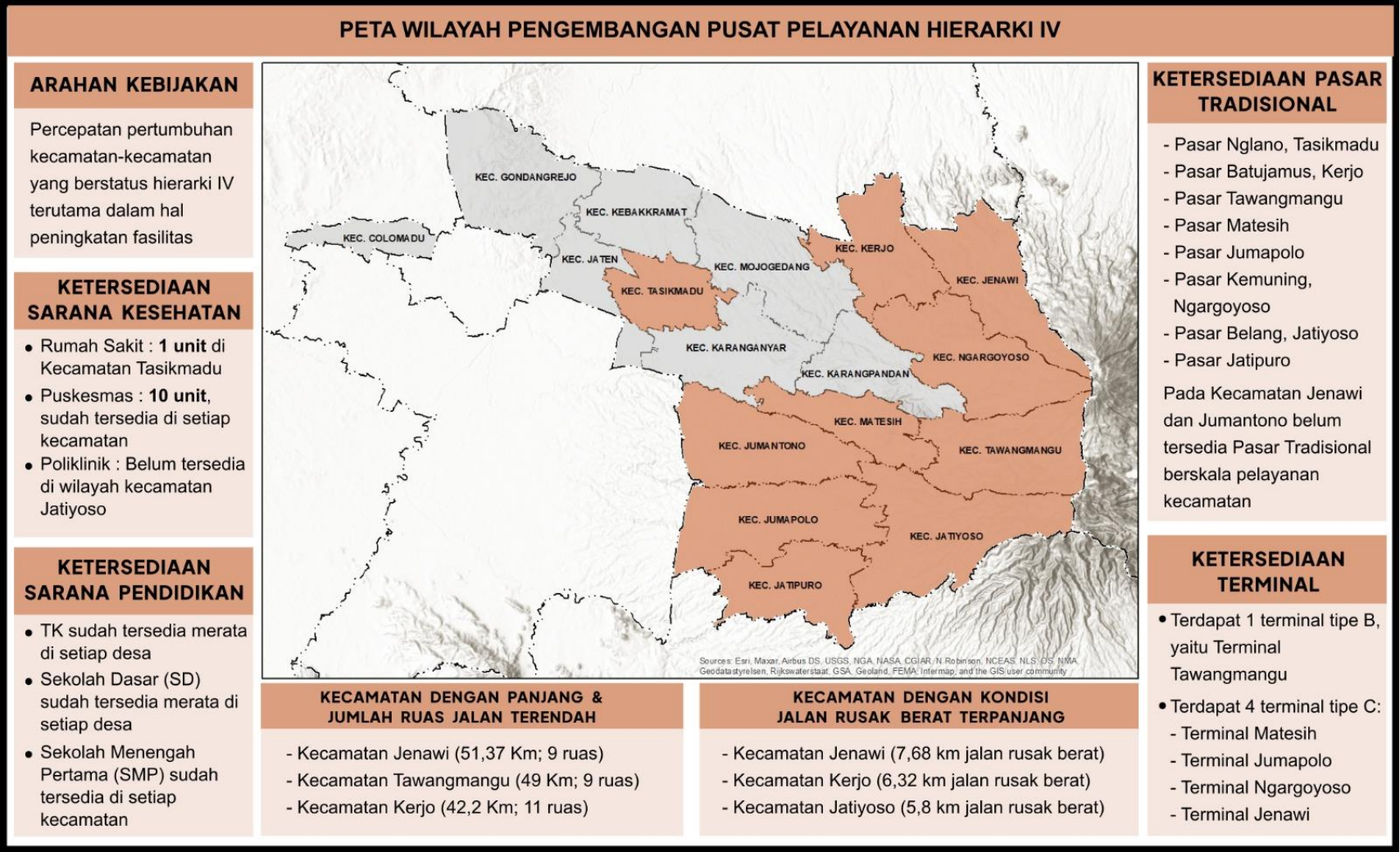
- a. Kawasan Perkotaan Kecamatan Kebakkramat;
- b. Kawasan Perkotaan Kecamatan Kerjo;
- c. Kawasan Perkotaan Kecamatan Jumapolo;
- d. Kawasan Perkotaan Kecamatan Gondangrejo;
- e. Kawasan Perkotaan Kecamatan Tawangmangu;
- f. Kawasan Perkotaan Kecamatan Karangpandan;
- g. Kawasan Perkotaan Kecamatan Matesih; dan
- h. Kawasan Perkotaan Kecamatan Ngargoyoso.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

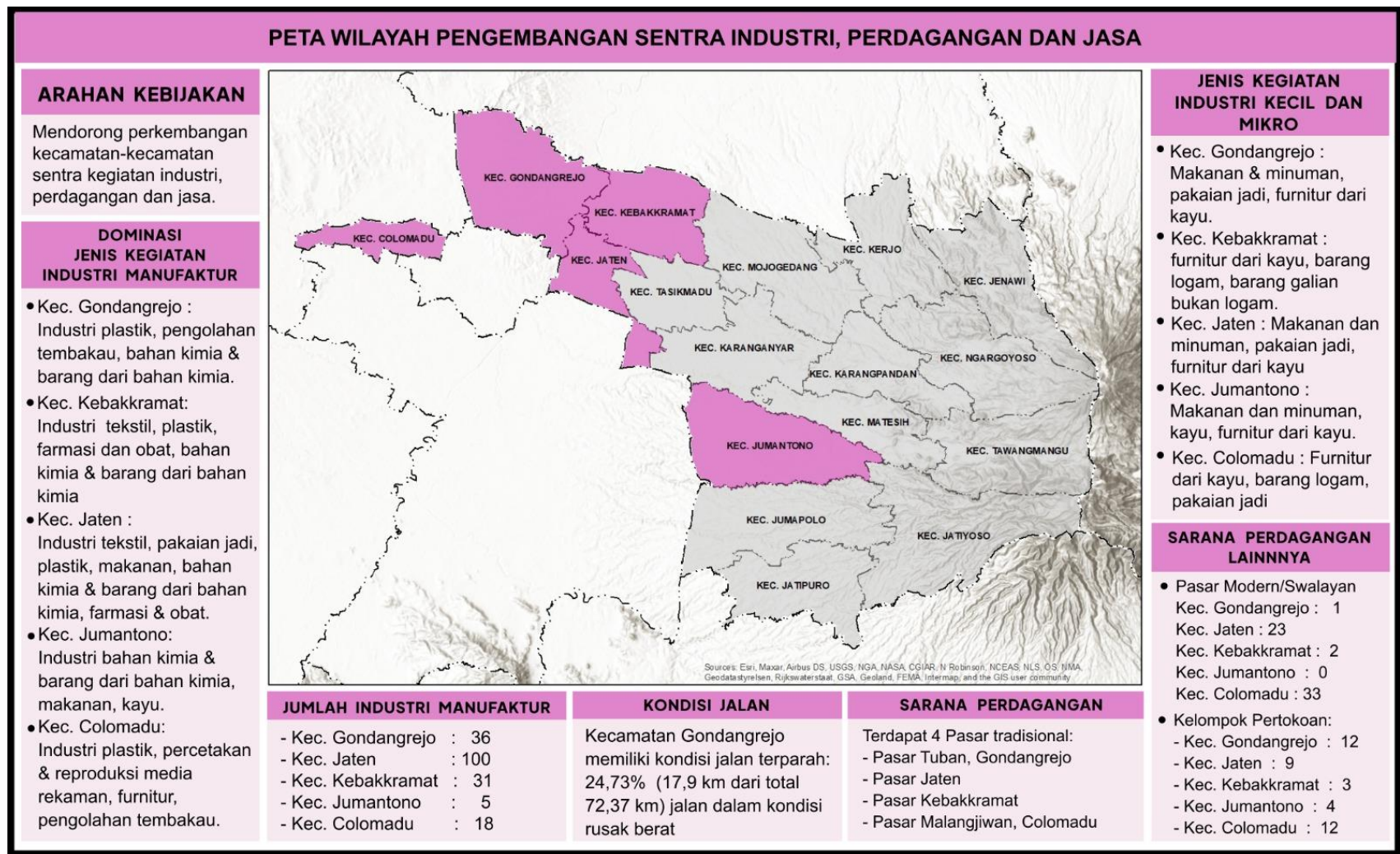
Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Karanganyar ditetapkan di wilayah:

- a. PPL di Kecamatan Mojogedang;
- b. PPL di Kecamatan Kebakkramat;
- c. PPL di Kecamatan Matesih;
- d. PPL di Kecamatan Jenawi;
- e. PPL di Kecamatan Ngargoyoso;
- f. PPL di Kecamatan Jatipuro
- g. PPL di Kecamatan Jatiyoso;
- h. PPL di Kecamatan Jumantono;
- i. PPL di Kecamatan Jumapolo; dan
- j. PPL di Kecamatan Gondangrejo.



Gambar 3.4.
Peta Wilayah Pengembangan Pusat Pelayanan Hierarki IV



Gambar 3.5.
Peta Wilayah Pengembangan Sentra Industri, Perdagangan dan Jasa



Gambar 3.6.
Peta Wilayah Pengembangan Sentra Produksi Pertanian



Gambar 3.7.
Peta Wilayah Pengembangan Agrowisata

Tabel 3.17. Cascading Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

"SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.									
MISI 1									
Meningkatkan kualitas sumber daya insan, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender									
MISI 2									
Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian									
MISI 3									
Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif, berkeadilan									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 4									
Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik									
MISI 5									
Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama									
MISI 6									
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik									
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta konduktivitas wilayah									
MISI 7									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 8									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 9									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 10									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 11									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 12									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 13									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 14									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 15									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 16									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 17									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 18									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 19									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 20									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 21									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 22									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 23									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 24									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 25									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 26									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 27									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 28									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 29									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									
MISI 30									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
Meningkatkan kualitas potensi ekonomi lokal dalam									
Meningkatkan ketersediaan, keamanan									
Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam									

III-116

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada Akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja yang akan dituangkan dalam APBD. Selanjutnya pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi PD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ditambah 1 tahun untuk rencana tahun 2030, terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang meliputi :

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
Program ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas PAUD, kualitas Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui peningkatan kualitas ruang kelas, kualitas laboratorium, bantuan pembiayaan pendidikan SD dan SMP, peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan, dan peningkatan sertifikasi kompetensi guru. Program ini diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini diprioritaskan pada peningkatan distribusi pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Program ini diprioritaskan pada peningkatan kepemilikan perizinan pendidikan swasta.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini diprioritaskan pada peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dalam SPM Kesehatan, peningkatan gizi masyarakat terutama pada balita stunting dan wasting, peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan kesehatan lansia dan usia produktif, peningkatan pemeriksaan kesehatan di semua usia penduduk, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular diprioritaskan pada TBC, HIV, Hipertensi, Diabetes Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa, DBD, Cancer, dan Malaria. Peningkatan penanganan kegawatdaruratan, peningkatan keaktifan pemilik jaminan pemeliharaan kesehatan, Pada program ini difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini diprioritaskan pada peningkatan kompetensi sumberdaya, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan distribusi pemerataan tenaga kesehatan.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
Program ini difokuskan pada peningkatan penyediaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, peningkatan kualitas laik sehat pada tempat-tempat umum, serta pemilikan IPRT pada pengolahan makanan.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas usaha kesehatan berbasis masyarakat, pelaksanaan advokasi dan KIE serta peningkatan rumah tangga berperilaku hidup sehat dan bersih.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini difokuskan pada pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pengembangann dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota.
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini difokuskan pada terciptanya tertib penyelenggaraan bangunan yang sesuai dengan fungsi, standar teknis, dan administratif.

- f. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini difokuskan pada peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten.
- g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini difokuskan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerahn Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini difokuskan pada penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Perumahan
Program ini difokuskan pemenuhan SPM perumahan.
- b. Program Kawasan Permukiman
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dasar, penataan lingkungan, serta peningkatan aksesibilitas dan keterpaduan antarwilayah permukiman.
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini difokuskan pada penanganan kawasan permukiman kumuh melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan sarana dan prasarana dasar, serta penataan lingkungan untuk menciptakan hunian yang layak, aman, dan sehat.
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini difokuskan pada perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh.
- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program ini difokuskan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelaku jasa di bidang perumahan dan permukiman. Selain itu program ini mencakup penyediaan layanan sertifikasi tenaga kerja, penetapan kualifikasi dan klasifikasi badan usaha, serta registrasi yang terintegrasi dan transparan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program ini difokuskan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban daerah dengan penegakan Perda.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini difokuskan untuk pencapaian SPM kebakaran.
- c. Program Penanggulangan Bencana
Program ini difokuskan untuk pencapaian SPM Penanggulangan bencana.

6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial
Program ini difokuskan untuk meningkatkan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah.
- b. Program Rehabilitasi Sosial
Program ini difokuskan untuk pemenuhan SPM Sosial.
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program ini diarahkan untuk penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin.
- d. Program Penanganan Bencana
Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan kabupaten.

4.1.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja daerah.
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online*, pelayanan antar kerja lintas daerah dan pelaksanaan *job fair*.
- d. Program Hubungan Industrial
Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak adanya PHK.

2. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini difokuskan untuk pengukuran kualitas udara dan air sesuai baku mutu yang berlaku.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Program ini difokuskan untuk melakukan pengukuran dan perbaikan indeks tutupan vegetasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Program ini difokuskan untuk mengetahui perusahaan yang memiliki rintek/pertek pengolahan limbah.

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini difokuskan pada pencegahan pelanggaran izin lingkungan yang telah diterbitkan pemerintah kabupaten.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini difokuskan pada pembinaan satuan pendidikan dan lembaga/komunitas dalam menjaga lingkungan hidup.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini difokuskan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini difokuskan pada tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap terjadinya pencemaraan lingkungan hidup.
- i. Program Pengelolaan Persampahan
Program ini difokuskan pada pengelolaan sampah secara berkelanjutan mulai dari rumah sampai tempat pembuangan akhir

3. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten.
- b. Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota; serta penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten; serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan.

4. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Program ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.

- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program ini diarahkan untuk pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rentan pangan.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pengujian keamanan mutu pangan.

5. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
Program ini difokuskan pada penataan ulang kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum dan tanah absentee melalui retribusi dan pemberian ganti kerugian guna menciptakan keadilan agraria.
- b. Program Penatagunaan Tanah
Program ini difokuskan pada pemanfaatan dan peruntukan tanah secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk
Program ini difokuskan pada pencatatan dan perekaman data kependudukan setiap individu untuk menjamin hak identitas dan kepastian hukum.
- b. Program Pencatatan Sipil
Program ini difokuskan pada pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian, untuk kepentingan administrasi negara.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini difokuskan pada pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data kependudukan secara digital untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan akurat.
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Program ini difokuskan pada penyusunan dan analisis data profil penduduk sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Desa
Program ini difokuskan pada penataan wilayah administrasi desa, penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
- b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
Program ini difokuskan pada pengembangan dan penguatan kerja sama antardesa, desa dengan pihak ketiga, serta desa dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.

- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan, pengarsipan, pelaporan, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program ini difokuskan pada penguatan peran serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal, serta perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk
Program ini difokuskan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui perencanaan keluarga dan penyebaran penduduk yang seimbang.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB untuk mendukung keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga melalui pembinaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan keluarga secara berkelanjutan.

9. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program ini difokuskan pada peningkatan keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas serta penyediaan angkutan jalan yang andal dan terjangkau.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Program ini difokuskan pada penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan komunikasi publik untuk membangun partisipasi dan kepercayaan masyarakat.
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program ini difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan aplikasi digital untuk mendukung layanan pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Program ini difokuskan pada pemberian kemudahan perizinan usaha simpan pinjam koperasi secara tertib, cepat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program ini difokuskan pada pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan koperasi.

- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Program ini difokuskan pada penilaian kondisi keuangan dan operasional Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perkoperasian.
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program ini difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi serta perlindungan hukum dan usaha koperasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Program ini difokuskan pada peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, dan pelatihan guna mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
- g. Program Pengembangan UMKM
Program ini difokuskan pada fasilitasi penguatan daya saing dan inovasi UMKM agar mampu berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada penciptaan regulasi dan kondisi yang kondusif bagi investor agar tertarik menanamkan modal di daerah.
- b. Program Promosi Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada peningkatan daya tarik daerah melalui kegiatan promosi peluang investasi kepada calon investor dalam dan luar negeri.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada penyediaan layanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi bagi para investor.
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada pemantauan dan evaluasi kegiatan investasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan komitmen dan peraturan yang berlaku.
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data investasi yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan investasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas, kreativitas, dan peran pemuda dalam pembangunan melalui pelatihan, kewirausahaan, dan kepemimpinan.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini difokuskan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kebangsaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

14. Statistik

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
Program ini difokuskan pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik sektoral yang akurat dan terpadu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

15. Persandian

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Program ini difokuskan pada perlindungan dan pengamanan informasi strategis melalui sistem persandian guna menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi pemerintahan.

16. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan untuk mendukung literasi, pendidikan, dan akses informasi masyarakat.
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program ini difokuskan pada upaya perlindungan, perawatan, dan digitalisasi koleksi langka serta naskah kuno agar tetap lestari dan dapat diakses oleh generasi mendatang.

17. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini difokuskan pada penguatan nilai-nilai budaya lokal dan nasional melalui pelestarian, pemajuan, dan pemanfaatan budaya secara berkelanjutan.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Program ini difokuskan pada pelestarian dan pengembangan seni tradisional sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa.
- c. Program Pembinaan Sejarah
Program ini difokuskan pada pengkajian, dokumentasi, dan penyebarluasan pengetahuan sejarah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan jati diri bangsa.
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya
Program ini difokuskan pada perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya agar tetap lestari dan bernilai bagi pendidikan serta pariwisata.

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip
Program ini difokuskan pada pengaturan, penciptaan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip secara sistematis untuk mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja.

- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program ini difokuskan pada upaya menjaga keamanan dan keutuhan arsip statis maupun vital dari risiko kerusakan, kehilangan, atau bencana.

4.1.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program ini difokuskan pada peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain pembinaan kelompok pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas, adopsi teknologi ramah lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana budidaya. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan bina kelompok pembudidaya ikan, sehingga dapat memperkuat ketahanan usaha perikanan skala kecil maupun menengah.
- b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui kegiatan pengawasan, penyuluhan secara terkoordinasi. Fokus utama adalah memperluas cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan daratan agar pemanfaatan sumber daya dilakukan secara tertib, adil, dan berkelanjutan, serta mampu menjaga kelestarian ekosistem perairan.
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan melalui pengolahan hasil yang higienis dan memenuhi standar mutu, serta memperkuat akses pasar. Kegiatan utama meliputi pembinaan terhadap pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan, fasilitasi sarana pengolahan, dan promosi hasil perikanan unggulan lokal. Dengan demikian, diharapkan peningkatan cakupan bina pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pelaku UMKM perikanan.

2. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini difokuskan pada penyediaan dan peningkatan kualitas sarana produksi pertanian dan peternakan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyediaan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian, serta penyediaan sarana produksi peternakan seperti bibit ternak unggul, pakan, obat hewan, dan vaksin. Selain itu, program ini juga mendukung peningkatan produksi daging, telur, dan susu, serta peningkatan populasi ternak ruminansia dan non-ruminansia guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung kemandirian pangan hewani.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung pertanian dan peternakan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran usaha tani dan ternak. Kegiatan utama meliputi pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan gudang hasil pertanian. Di bidang

peterernakan, program ini mencakup fasilitasi penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi unit usaha produk hewan, serta peningkatan kualitas dan jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) agar sesuai standar kesehatan masyarakat veteriner dan mendukung jaminan mutu produk peternakan

- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program ini difokuskan pada pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta jaminan keamanan produk asal hewan bagi kesehatan masyarakat.
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini difokuskan pada mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan terhadap gangguan usaha tani akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, atau perubahan iklim.
- e. Program Penyuluhan Pertanian
Program ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani melalui pendampingan dan diseminasi teknologi pertanian yang tepat guna.

3. Kehutanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Program ini difokuskan pada pemberdayaan desa melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
Program ini difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi daerah.

5. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Program ini difokuskan pada penyiapan transmigran serta pengembangan kawasan yang menjadi tujuan transmigrasi agar layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan pusat pertumbuhan baru, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik transmigran maupun penduduk lokal.

6. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Program ini difokuskan pada penyederhanaan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh pengusaha.
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini difokuskan pada penguatan jaringan distribusi barang dan jasa untuk memastikan kelancaran pasokan dan pemerataan distribusi ke seluruh wilayah.

- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini difokuskan pada upaya pengendalian dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
- d. Program Pengembangan Ekspor
Program ini difokuskan pada peningkatan volume dan diversifikasi produk ekspor melalui penguatan daya saing dan akses pasar global.
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini difokuskan pada pengaturan standar produk dan layanan serta perlindungan konsumen untuk memastikan kualitas dan keamanan barang/jasa yang beredar di pasar.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program ini difokuskan pada peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri melalui promosi dan penguatan daya saing produk lokal.

7. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini difokuskan pada pengembangan dan promosi destinasi wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
- b. Program Pemasaran Pariwisata
Program ini difokuskan pada promosi dan pemasaran destinasi wisata secara efektif melalui berbagai media dan kegiatan untuk menarik minat wisatawan.
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Program ini difokuskan pada pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI untuk mendukung inovasi dan menciptakan nilai tambah produk kreatif.
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendorong pengembangan berkelanjutan.

8. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini difokuskan pada perencanaan dan pengembangan sektor industri untuk meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, dan kontribusi industri terhadap perekonomian daerah.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Program ini difokuskan pada pengaturan dan pengawasan izin usaha industri di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi industri untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan transparansi sektor industri.

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan adil.
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Program ini difokuskan pada pengembangan sektor ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program ini difokuskan pada penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan peran legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara efektif.

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Kepegawaian Daerah
Program ini difokuskan pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karier, serta pemberian layanan kepegawaian yang efisien dan berkualitas.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk mendukung kemajuan di berbagai sektor.

3. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini difokuskan pada penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi hasil pembangunan untuk memastikan pencapaian sasaran dan efektivitas program.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini difokuskan pada koordinasi antar instansi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan agar berjalan secara harmonis dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.

4. Keuangan Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini difokuskan pada pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk mendukung

- pelaksanaan pembangunan serta memastikan keberlanjutan fiskal daerah.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini difokuskan pada pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien, termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik.
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini difokuskan pada pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah melalui berbagai sumber pendapatan, baik dari pajak, retribusi, maupun sumber lain, untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Riset dan Inovasi Daerah
Program ini difokuskan pada pengembangan riset dan inovasi untuk mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan daya saing daerah, serta menghasilkan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan daerah.

4.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program ini difokuskan pada pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan peningkatan akuntabilitas.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini difokuskan pada penyusunan kebijakan yang tepat dan penyediaan pendampingan serta asistensi untuk mendukung implementasi kebijakan di tingkat daerah secara efektif.

4.1.7. Unsur Kewilayahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan.
- c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program ini difokuskan pada menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban di masyarakat melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik yang optimal.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini difokuskan pada memperkuat pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila serta pengembangan karakter kebangsaan untuk membentuk masyarakat yang bersatu, adil, dan sejahtera.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini difokuskan pada penguatan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang mendidik, beretika, dan mengembangkan budaya politik yang sehat di masyarakat.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini difokuskan pada pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial terhadap pembangunan serta pengawasan terhadap kegiatan masyarakat.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan zaman dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini difokuskan pada peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat merusak stabilitas nasional serta peningkatan kapasitas dalam penanganan dan penyelesaian konflik sosial di masyarakat.

4.1.9. Urusan Pemerintahan Wajib yang Diselenggarakan oleh Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota difokuskan pada dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Fokus utama program ini adalah pada penguatan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.

Tabel 4.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
A.	Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
	Pendidikan																	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	89,93	89,93	164.006.527.347	89,96	162.459.689.607	89,97	162.459.689.607	90,00	162.459.689.607	90,20	162.459.689.607	90,25	162.459.689.607	
			Angka Partisipasi Sekolah Dasar	%	99,39	99,39		99,43		99,46		99,49		99,51		99,50		
			Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	%	98,34	98,79		98,80		98,82		98,87		98,91		99,00		
			Angka Partisipasi Sekolah Kesenjaraan	%	61,82	63,00		63,50		64,00		64,50		65,00		66,00		
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru (PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Non formal/ Kesenjaraan) yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	%	81,20	81,50	14.286.800	81,80	50.000.000	82,00	50.000.000	82,20	100.000.000	82,50	100.000.000	82,80	100.000.000	
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Terjaminnya kepatuhan dan kualitas lembaga pendidikan melalui perizinan yang sesuai ketentuan	Persentase Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Swasta yang Disetujui	%	90,00	90,20	6.360.000	90,50	12.720.000	90,80	12.720.000	91,00	12.720.000	91,20	12.720.000	91,50	12.720.000	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,50	75,60	641.852.650.107	75,80	642.599.151.647	75,90	642.599.151.647	76,00	642.599.151.647	76,20	642.599.151.647	76,40	642.599.151.647	
	Kesehatan																	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Meningkatnya kesehatan	Persentase desa/kelurahan STBM	%	80,00	80,00	96.393.181.622	80,00	76.626.972.500	85,00	71.626.972.500	90,00	71.626.972.500	95,00	83.626.972.500	100,00	88.626.972.500	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	perorangan dan masyarakat																
			Rasio daya tampung fasilitas kesehatan Rujukan terhadap Jumlah Penduduk	ratio	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
			Indek pencapaian SPM ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, anak sekolah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	71,00	71,00		71,00		72,00		73,00		74,00		75,00		
			Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun	%	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
			Cakupan penerima pemeriksaan cek kesehatan gratis	%	46,00	46,00		46,00		55,00		61,00		70,00		80,00		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	97,00	97,00		97,00		98,00		99,00		99,00		99,00		
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	80,10	80,10		80,10		80,20		80,30		80,40		80,50		
			Cakupan Angka keberhasilan pengobatan TB	%	87,00	87,00		87,00		88,00		89,00		90,00		91,00		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85,00	85,00		85,00		88,00		92,00		95,00		96,00		
			Persentase puskesmas yang sudah melakukan kebijakan aktivitas fisik cukup	%	NA	NA		66,10		67,90		69,70		80,00		80,00		
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya kesehatan dan ketersediaan	Persentase tenaga kesehatan teregistrasi	%	100,00	100,00	3.143.807.300	100,00	2.264.776.000	100,00	2.264.776.000	100,00	2.264.776.000	100,00	2.264.776.000	100,00	3.264.776.000	

No	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Manusia Kesehatan	tenaga kesehatan yang berkualitas																
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1.000 penduduk	2,62	2,62		2,62		2,63		2,63		2,64		2,64		
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan, serta keamanan pangan yang sesuai standar.	Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat.	%	58,00	78,00	485.425.970	58,00	547.836.700	62,00	547.836.700	66,00	547.836.700	70,00	547.836.700	70,00	547.836.700	
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	84,00	10,00		84,00		84,50		85,00		85,50		86,00		
			Persentase tempat pengelolaan pangan yang memiliki SLHS	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya promotif dan preventif kesehatan	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	29,00	30,00	527.696.000	34,00	588.096.000	38,00	588.096.000	42,00	588.096.000	46,00	588.096.000	50,00	588.096.000	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,60	77,80	308.735.845.454	78,00	303.490.253.340	78,40	269.888.070.661	78,90	275.430.173.661	79,50	275.430.173.661	80,00	275.574.618.106	
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																	OPD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya air	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	75,50	76,50	6.082.947.375	77,00	15.143.661.000	77,50	15.143.661.000	78,00	15.143.661.000	78,50	15.143.661.000	79,00	15.143.661.000	
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui	%	99,40	99,46	2.737.079.200	99,50	2.634.800.000	99,60	2.634.800.000	99,70	2.634.800.000	99,80	2.634.800.000	99,90	2.634.800.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Penyediaan Air Minum		SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota															
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,38	99,38	756.884.720	99,40	796.600.000	99,50	796.600.000	99,60	796.600.000	99,70	796.600.000	99,80	796.600.000	
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Menurunnya genangan dan risiko banjir di kawasan permukiman	Persentase Jaringan Drainase Perkotaan Terbangun	%	34,81	35,07	1.487.413.200	35,35	400.000.000	35,63	400.000.000	35,90	400.000.000	36,18	400.000.000	36,46	400.000.000	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Terwujudnya bangunan gedung yang tertib, aman, dan fungsional	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	23,62	23,70	2.831.340.260	23,81	2.518.680.000	24,00	2.518.680.000	24,19	2.518.680.000	24,38	2.518.680.000	24,57	2.518.680.000	
			Persentase Tingkat Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan	%	NA	57,00		65,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya konektivitas dan kelayakan infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan yang perlu ditingkatkan dan dipelihara	%	30.88	30,54	51.554.513.250	26,41	105.200.000.000	21,89	105.200.000.000	17,68	105.200.000.000	13,76	105.200.000.000	9,00	105.200.000.000	
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kapasitas dan daya saing penyedia jasa konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	93.714.800	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berdaya saing	Presentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	%	85,30	85,30	1.885.967.400	85,30	2.724.000.000	85,30	2.724.000.000	85,30	2.724.000.000	85,30	2.724.000.000	85,30	2.724.000.000	
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71	71,5	23.353.966.554	72	23.907.399.444	73	23.907.399.444	74	23.907.399.444	75	23.907.399.444	76	23.907.399.444	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman																	OPD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	340.344.910	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Kawasan Permukiman	Terciptanya kawasan permukiman yang layak huni	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	39,91	49.79	698.348.375	59.67	750.000.000	69.55	750.000.000	79.43	750.000.000	89.30	750.000.000	92.85	750.000.000	
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh secara signifikan	Persentase penanganan RTLH	%	96,12	96,48	35.083.700	96,96	1.000.000.000	97,38	1.000.000.000	97,80	1.000.000.000	98,20	1.000.000.000	98,66	1.000.000.000	
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	%	65,50	65,55	1.522.603.340	65,60	1.595.320.000	65,65	1.595.320.000	65,70	1.595.320.000	65,75	1.595.320.000	65,80	1.595.320.000	
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya tertib administrasi dan mutu pelaku pembangunan perumahan dan permukiman	Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	%	7,00	14,00	34.585.750	21,00	50.000.000	28,00	50.000.000	35,00	50.000.000	42,00	50.000.000	49,00	50.000.000	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat																	OPD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
																		Pelindungan Masyarakat
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	90,00	100,00	4.906.083.350	100,00	4.472.093.127	100,00	4.075.695.100	100,00	4.075.695.100	100,00	4.075.695.100	100,00	4.075.695.100	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	14,28	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Presentase Linmas yang dibina	%	0,15	0,111		0,11		0,12		0,08		0,12		0,09		
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap kejadian kebakaran dan non kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	11,02	15,00	899.736.550	15,00	933.150.000	15,00	933.150.000	15,00	933.150.000	15,00	933.150.000	15,00	933.150.000	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,2	74,25	7.294.153.009	74,30	7.322.417.809	74,5	7.322.417.809	74,6	7.322.417.809	74,9	7.322.417.809	75	7.322.417.809	
4	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	2.341.034.600	100,00	2.437.104.000	100,00	2.437.104.000	100,00	2.437.104.000	100,00	2.437.104.000	100,00	2.437.104.000	
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya dukungan administrasi dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,40	72,50	2.865.211.049	73,00	2.908.570.149	73,2	2.908.570.149	73,4	2.908.570.149	73,6	2.908.570.149	73,8	2.908.570.149	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah																
	Sosial																	OPD Pengampu Urusan Sosial
1	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi sosial masyarakat rentan	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00	39.428.250	100,00	52.758.600	100,00	52.758.600	100,00	222.758.600	100,00	252.758.600	100,00	52.758.600	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya fungsi sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan	Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	422.353.200	100,00	530.000.000	100,00	530.000.000	100,00	530.000.000	100,00	530.000.000	100,00	530.000.000	
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya hak dasar dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00	5.688.040.170	100,00	5.810.918.500	100,00	5.810.918.500	100,00	5.810.918.500	100,00	5.810.918.500	100,00	5.810.918.500	
			Persentase PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)	%	3,88	3,98		3,98		4,08		4,08		4,08		4,38		
4	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam mitigasi serta respons bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	94.192.400	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya kehormatan dan kelestarian Taman Makam Pahlawan secara berkelanjutan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	31.639.400	100,00	31.641.400	100,00	31.641.400	100,00	31.641.400	100,00	31.641.400	100,00	31.641.400	

No.	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,20	72,00	4.815.981.606	72,50	4.976.874.526	72,75	4.976.874.526	73	4.976.874.526	73,25	4.976.874.526	73,5	4.976.874.526	
B.	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
	Tenaga Kerja																	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya perencanaan tenaga kerja yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan pasar kerja	Jumlah dokumen kebijakan tenaga kerja yang disusun (RTK Makro dan RTK Mikro)	Dokumen	1 RTK Makro	1 RTK Makro	44.704.950	1 RTK Mikro	50.000.000	1 RTK Mikro	50.000.000	1 RTK Mikro	50.000.000	1 RTK Mikro	50.000.000	1 RTK Makro	50.000.000	
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih	%	30,00	33,00	1.789.873.000	33,00	1.563.398.000	36,00	1.563.398.000	39,00	2.563.398.000	42,00	2.563.398.000	45,00	3.563.398.000	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja melalui penempatan yang sesuai dengan kompetensi	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	79,74	80,00	43.062.950	81,00	104.000.000	82,00	104.000.000	83,00	104.000.000	84,00	263.967.642	85,00	104.000.000	
4	Program Hubungan Industrial	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan	Persentase kasus perselisihan yang terselesaikan	%	100,00	100,00	73.185.200	100,00	118.000.000	100,00	118.000.000	100,00	118.000.000	100,00	118.000.000	100,00	118.000.000	
	Lingkungan Hidup																	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	%	100,00	100,00	254.250.400	100,00	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00	270.000.000	
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan secara signifikan	Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu (air dan udara)	%	50,00	62,50	652.778.350	65,62	633.197.000	68,90	633.197.000	72,34	633.197.000	75,95	633.197.000	79,75	633.197.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Lingkungan Hidup																	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terlindunginya keanekaragaman hayati dan meningkatnya konservasi ekosistem lokal	Luasan ruang terbuka hijau	Ha	3.982,55	3.982,55	96.109.200	3.982,75	97.300.000	3.982,95	97.300.000	3.983,15	97.300.000	3.983,35	97.300.000	3.983,55	97.300.000	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya pengelolaan B3 dan limbah B3 yang aman dan ramah lingkungan	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	%	77,50	77,80	7.883.400	78,00	12.800.000	78,50	12.800.000	79,00	12.800.000	79,50	12.800.000	80,00	12.800.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan lingkungan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	76,9	77,00	176.284.200	77,5	110.000.000	77,80	110.000.000	78,00	110.000.000	78,20	110.000.000	78,50	110.000.000	
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Persentase Sekolah Adiwiyata	%	0,00	25,00	59.305.900	35,00	70.500.000	45,00	70.500.000	55,00	70.500.000	65,00	70.500.000	75,00	70.500.000	
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tumbuhnya motivasi masyarakat dalam berperan aktif menjaga lingkungan	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan terkait LH	%	50	52,00	15.723.000	55,00	20.000.000	60,00	20.000.000	65,00	20.000.000	70,00	20.000.000	75,00	20.000.000	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Respons cepat dan penyelesaian pengaduan lingkungan yang efektif	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	38.186.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
9	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya cakupan layanan persampahan dan pengurangan timbunan sampah	Persentase Pengurangan sampah	%	0,07	3,00	27.912.458.300	3,50	17.102.594.600	4,00	16.102.594.600	4,50	16.102.594.600	5,00	16.102.594.600	5,50	16.102.594.600	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,5	75,6	9.888.453.206	75,7	10.026.705.556	75,9	10.026.705.556	76,1	10.526.705.556	76,3	12.526.705.556	76,5	12.526.705.556	
	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak																	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.	Persentase ARG pada belanja operasional APBD	%	8,70	8,80	15.000.000	8,90	300.000.000	9,00	300.000.000	9,10	300.000.000	9,20	380.000.000	9,30	380.000.000	
2	Program Perlindungan Perempuan	Terwujudnya perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	4,20	4,19	215.330.400	4,18	375.330.400	4,17	375.330.400	4,16	375.330.400	4,15	375.330.400	4,15	375.330.400	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	%	2,26	2,80	50.000.000	3,30	250.000.000	3,90	250.000.000	4,50	250.000.000	5,60	250.000.000	6,20	250.000.000	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya kualitas data gender dan anak yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak	%	40,48	42,85	5.000.000	45,23	122.908.895	47,61	84.908.895	50,00	81.908.895	52,38	61.908.895	54,76	35.000.000	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Terpenuhinya hak-hak anak dalam aspek	Persentase kasus kekerasan anak	%	100,00	100,00	140.000.000	100,00	280.000.000	100,00	280.000.000	100,00	280.000.000	100,00	280.000.000	100,00	280.000.000	

No.	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		kesehatan, pendidikan, dan partisipasi	yang dilayani secara komprehensif															
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Terlindungnya anak dari situasi khusus yang mengancam tumbuh kembang dan masa depannya	Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 anak	Per 100.000 penduduk	7,30	7,29	205.329.600	7,28	495.329.600	7,27	495.329.600	7,26	495.329.600	7,25	495.329.600	7,25	495.329.600	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,65	72,70	4.758.922.978	72,75	5.015.758.283	72,85	4.953.758.283	72,95	4.956.758.283	73	4.976.758.283	73	5.003.667.178	
	Pangan																	OPD Pengampu Urusan Pangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Persentase lumbung pangan yang difasilitasi	%	NA	NA	-	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	1.050.000.000	100,00	1.050.000.000	100,00	1.050.000.000	
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta ketahanan pangan rumah tangga	Konsumsi protein perkapita per hari	gram/kapita/hari	63,93	63,94	60.278.000	64,20	125.000.000	64,40	125.000.000	64,60	175.000.000	64,80	175.000.000	65,00	175.000.000	
			Konsumsi energi per kapita per hari	kkal/kapita/hari	2201,43	2201,60		2201,80		2202,00		2202,20		2202,40		2202,50		
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Menurunnya wilayah dan jumlah penduduk rawan pangan secara berkelanjutan	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	2,82	2,80	5.490.000	2,78	40.000.000	2,76	40.000.000	2,74	50.000.000	2,72	50.000.000	2,70	50.000.000	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terjaminnya keamanan pangan dari hulu ke hilir demi perlindungan kesehatan masyarakat	Jumlah sertifikat ijin edar PSAT yang sudah diterbitkan	sertifikat	138,00	156,00	10.220.000	176,00	55.000.000	198,00	55.000.000	218,00	65.000.000	238,00	65.000.000	258,00	65.000.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pertanahan																	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terlaksananya sosialisasi dan verifikasi pelaksanaan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah	Jumlah sosialisasi dan verifikasi pelaksanaan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah	Kegiatan	-	1	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Meningkatnya pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah masyarakat melalui redistribusi tanah secara adil dan berkelanjutan	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang	-	1,00	28.750.000	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	
3	Program Penatagunaan Tanah	Terwujudnya tertib administrasi, tertib penggunaan, dan pengendalian pemanfaatan tanah secara optimal, berkeadilan, serta berkelanjutan sesuai peruntukan ruang	Persentase tanah Pemda yang meiliki sertifikat	%	45,00	47,00	230.437.160	50,00	416.300.000	55,00	416.300.000	60,00	416.300.000	65,00	416.300.000	70,00	416.300.000	
	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																	OPD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya cakupan dan ketepatan data pendaftaran penduduk untuk mendukung perencanaan pembangunan	Perekaman KTP elektronik	%	99,50	99,00	898172537,00	99,15	1.083.749.500	99,30	1.083.749.500	99,45	1.083.749.500	99,50	1.083.749.500	99,55	1.083.749.500	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	69,23	69,23		69,35		69,40		69,45		68,50		69,55		

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
			Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dan diakui secara hukum	Prosentase Kepemilikan akta kelahiran	%	99,21	99,23	63.338.300	99,24	151.638.300	99,25	151.638.300	99,26	151.638.300	99,27	151.638.300	99,28	151.638.300	
			Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya sistem informasi kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses	Prosentase tertib pelaksanaan pelayanan adminduk di desa/kelurahan seKabupaten Karanganyar	%	-	-	83.954.225	37,50	163.079.700	40,00	163.079.700	42,50	163.079.700	45,00	163.079.700	47,50	163.079.700	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas data dan profil kependudukan yang mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan	Dokumen penyajian data kependudukan	Buku	2,00	2,00	11.865.000	2,00	24.400.000	2,00	24.400.000	2,00	24.400.000	2,00	24.400.000	2,00	24.400.000	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,40	71,45	5.657.723.152	71,50	5.802.794.714	71,55	5.802.794.714	71,60	5.802.794.714	71,65	5.802.794.714	71,70	5.802.794.714	
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa																	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Program Penataan Desa	Meningkatnya tertib administrasi dan tata ruang wilayah desa secara berkelanjutan	Persentase Penataan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	83,30	85,00	137.299.100	91,40	195.000.000	93,80	195.000.000	96,30	195.000.000	98,10	195.000.000	100,00	195.000.000	
			Persentase desa yang difasilitasi dalam	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			pembangunan Sapras															
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Terjalinnnya sinergi antar desa dan pihak lain dalam pengembangan potensi dan pelayanan masyarakat	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	%	88,20	89,30	59.605.000	89,50	95.000.000	92,50	95.000.000	94,00	95.000.000	96,00	95.000.000	100,00	95.000.000	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas dan tertib administrasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel	Persentase Desa yang memiliki dokumen RPJMDes, APBDes, dan RKPDes yang mendukung pencapaian prioritas daerah	%	100,00	100,00	3.766.106.300	100,00	4.190.000.000	100,00	4.190.000.000	100,00	4.190.000.000	100,00	4.190.000.000	100,00	4.190.000.000	
			Persentase desa tertib administrasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase desa memiliki BUMDes	%	98,77	98,77		98,77		98,77		98,77		98,77		100,00		
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina	%	100,00	100,00	8.696.086.200	100,00	8.682.133.088	100,00	6.767.600.000	100,00	6.767.600.000	100,00	7.767.600.000	100,00	8.767.600.000	
			Persentase desa dengan infrastruktur baik melalui TMMD	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,40	72,00	5.975.417.586	72,00	6.075.351.586	72,25	6.075.351.586	72,50	6.075.351.586	72,75	6.075.351.586	73,00	6.075.351.586	
	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk secara	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific	Kelahiran per 1000	4,42	4,35	374.369.000	4,30	1.383.148.000	4,20	1.383.148.000	4,20	1.383.148.000	4,10	1.383.148.000	4,10	1.383.148.000	

No.	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		proporsional dan berkelanjutan	Fertility Rate/ASFR 15-19)	WUS 15-19 tahun														
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata dan mudah diakses	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	70,22	70,25	5.351.964.800	70,50	4.361.672.000	70,75	3.361.672.000	71,00	3.361.672.000	71,25	3.361.672.000	71,50	4.361.672.000	
			Persentase Kampung KB Mandiri	%	27,70	28,80		30,00		31,00		32,00		32,90		33,80		
			Kelahiran Tidak Diinginkan	%	10,30	10,00		9,60		9,30		9,00		8,70		8,50		
			Demand Satisfied	%	87,83	88,60		89,30		89,90		90,60		91,10		91,70		
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif	%	92,30	93,00	4.914.658.400	93,50	3.928.800.000	94,00	2.928.800.000	94,50	2.928.800.000	95,00	2.928.800.000	95,00	2.928.800.000	
			Indeks Lansia Berdaya	Angka	55,51	56,00		56,50		57,00		57,40		57,90		58,40		
			Indeks Pengasuhan Remaja	Angka	89,51	90,20		90,90		91,15		92,10		92,70		93,10		
	Perhubungan																	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Meningkatnya kelancaran, keselamatan, dan keterpaduan sistem transportasi darat bagi masyarakat	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	49,37	50,94	3.174.817.450	51,57	3.366.715.000	52,20	3.366.715.000	52,83	3.366.715.000	53,46	3.366.715.000	53,77	3.366.715.000	
			Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik	%	75,00	75,20		75,30		75,35		75,40		75,50		75,60		
			Persentase terminal kondisi baik	%	47,29	48,00		48,30		48,60		48,90		49,20		49,50		
			Persentase kendaraan yang lulus uji KIR	%	83,18	83,50		85,00		85,50		86,00		86,50		87,00		

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,15	72,15	7.694.880.884	72,15	9.224.719.334	72,2	7.724.719.334	72,25	7.724.719.334	72,3	7.724.719.334	72,35	7.724.719.334	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
	Komunikasi Dan Informatika																	
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya diseminasi informasi publik yang akurat dan transparan kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Nilai	3,00	2,00	1.617.341.201	4,00	1.758.612.800	5,00	1.758.612.800	5,00	1.758.612.800	5,00	1.758.612.800	5,00	1.758.612.800	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas layanan digital pemerintah melalui pengelolaan aplikasi yang andal dan terpadu	Tingkat kematangan Keterpaduan layanan digital pemerintah	Nilai	2,00	5,00	4.069.351.920	5,00	5.388.377.400	5,00	5.388.377.400	5,00	5.388.377.400	5,00	5.388.377.400	5,00	4.088.377.400	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,95	73,00	6.802.433.416	73,5	6.927.993.337	74	6.927.993.337	74,5	6.927.993.337	75	6.927.993.337	75,5	6.927.993.337	OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah																	
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi koperasi simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	9,00	9,00	10.000.000	13,00	10.000.000	15,00	10.000.000	17,00	10.000.000	19,00	10.000.000	21,00	10.000.000	
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya kepatuhan dan tata kelola koperasi yang sehat dan transparan	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	26,00	26,00	128.400.000	32,00	118.400.000	35,00	128.400.000	38,00	128.400.000	41,00	128.400.000	44,00	128.400.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Terwujudnya koperasi yang sehat dan berkelanjutan melalui evaluasi kinerja keuangan dan manajemen	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	%	28,73	28,73	35.000.000	28,80	35.000.000	28,85	35.000.000	28,90	35.000.000	28,95	35.000.000	29,00	35.000.000	
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan dan kewirausahaan	Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	%	30,00	35,00	1.220.000.000	37,00	1.220.000.000	40,00	1.220.000.000	43,00	1.220.000.000	45,00	1.220.000.000	47,00	1.220.000.000	
5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya kemandirian koperasi serta perlindungan hukum dan usaha koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	64,77	64,80	1.505.000.000	64,87	1.505.000.000	64,90	1.505.000.000	64,93	1.505.000.000	64,95	1.505.000.000	65,00	1.505.000.000	
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Meningkatnya daya saing dan kemandirian UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	26,85	26,86	121.400.000	26,87	121.400.000	26,88	121.400.000	26,89	121.400.000	26,90	121.400.000	26,91	121.400.000	
7	Program Pengembangan Umkm	Terlaksananya penguatan ekosistem usaha bagi UMKM melalui akses pasar, pembiayaan, dan teknologi	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	11,64	11,65	4.111.000.000	11,66	5.111.000.000	11,67	5.111.000.000	11,68	5.111.000.000	11,69	5.111.000.000	11,70	5.111.000.000	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,15	70,30	4.076.272.451	70,50	4.076.272.451	71,00	4.076.272.451	71,30	4.076.272.451	71,50	4.076.272.451	72,00	4.076.272.451	
	Penanaman Modal																	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terciptanya iklim investasi yang kondusif,	Persentase kebijakan Penanaman Modal yang diterbitkan	%	50,00	50,00	22.497.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		kompetitif, dan berkelanjutan																
2	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya promosi potensi unggulan daerah	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti	%	100,00	100,00	11.443.400	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terwujudnya pelayanan investasi yang cepat, mudah, dan transparan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	%	100,00	100,00	87.955.250	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal dan perizinan	Persentase Kepatuhan LKPM	%	44,00	50,00	51.521.550	52,00	75.000.000	54,00	75.000.000	56,00	75.000.000	58,00	75.000.000	60,00	75.000.000	
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas data penanaman modal yang akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan	Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan Berusaha	%	100,00	100,00	4.039.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	72,5	5.952.624.534	73	6.140.742.734	73,5	6.140.742.734	74	6.140.742.734	74,5	6.140.742.734	75	6.140.742.734	
	Kepemudaan Dan Olahraga																	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya partisipasi dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	48,62	35,00	718.336.000	40,00	815.000.000	45,00	815.000.000	50,00	815.000.000	55,00	815.000.000	60,00	815.000.000	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya prestasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100,00	100,00	8.914.898.000	100,00	8.077.920.000	100,00	6.077.920.000	100,00	6.077.920.000	100,00	6.077.920.000	100,00	6.077.920.000	
3	Program Pengembangan	Meningkatnya karakter, kemandirian, dan	Persentase Organisasi pramuka	%	100,00	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kapasitas Kepramukaan	kepemimpinan generasi muda melalui kepramukaan	yang terlibat dalam pembangunan															
	Statistik																	OPD Pengampu Urusan Statistik
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah	Tingkat kematangan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi	Angka	2,90	2,91	41.435.000	2,92	49.774.000	2,93	49.774.000	2,94	49.774.000	2,95	49.774.000	2,96	49.774.000	
	Persandian																	OPD Pengampu Urusan Persandian
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terjaminnya keamanan informasi melalui sistem persandian yang andal di lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan siber	Nilai	2	3	188.000.000	3	190.000.000	3	190.000.000	3	190.000.000	3	190.000.000	3	190.000.000	
	Perpustakaan																	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kapasitas layanan dan aksesibilitas perpustakaan daerah	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun persatuan penduduk	%	98,80	100,00	1.165.445.700	90,00	1.311.738.850	91,00	1.311.738.850	92,00	1.311.738.850	93,00	1.311.738.850	94,00	1.311.738.850	
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Teridentifikasinya naskah kuno di Kabupaten Karanganyar	Jumlah naskah kuno yang teridentifikasi	Naskah	0,00	5,00	64.980.650	6,00	64.980.650	7,00	64.980.650	8,00	64.980.650	9,00	64.980.650	10,00	64.980.650	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,05	72,10	4.666.948.602	72,15	4.710.296.352	72,2	4.710.296.352	72,4	4.710.296.352	72,6	4.710.296.352	72,8	4.710.296.352	
	Kebudayaan																	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	45,00	50,00	2.083.731.600	55,00	1.418.000.000	60,00	1.418.000.000	65,00	1.418.000.000	70,00	1.418.000.000	75,00	2.418.000.000	
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Terpeliharanya kesenian tradisional sebagai identitas dan daya tarik budaya lokal	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	78,00	80,00	968.251.100	85,00	1.090.000.000	87,00	1.090.000.000	88,00	1.090.000.000	89,00	1.090.000.000	90,00	1.090.000.000	
3	Program Pembinaan Sejarah	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah daerah	Persentase sejarah lokal yang teregistrasi/tercatat	%	37,00	-	-	45,00	10.000.000	55,00	10.000.000	60,00	10.000.000	65,00	10.000.000	70,00	10.000.000	
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya cagar budaya sebagai warisan sejarah dan budaya daerah	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	%	45,00	50,00	187.505.300	55,00	200.000.000	60,00	200.000.000	70,00	200.000.000	75,00	200.000.000	80,00	200.000.000	
	Kearsipan																	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
1	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tertib arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabana nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	%	100,00	100,00	101.267.400	100,00	157.278.500	100,00	157.278.500	100,00	157.278.500	100,00	157.278.500	100,00	157.278.500	
2	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Terlindunginya arsip statis dan vital sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan memori kolektif daerah	Persentase arsip yang di kelola dan dilestarikan	%	100,00	-	-	100,00	2.975.000	100,00	2.975.000	100,00	2.975.000	100,00	2.975.000	100,00	2.975.000	
C.	Urusan Pemerintah Pilihan																	
	Kelautan Dan Perikanan																	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
1	Program Pengelolaan	Meningkatnya produksi produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	kg	1.940.692	1.945.102	652.614.725	1.948.990	720.000.000	1.952.890	720.000.000	1.956.795	720.000.000	1.960.710	720.000.000	1.964.630	720.000.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Perikanan Budidaya	budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan																
2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan Wilayah Pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan	%	35,29	35,29	21.468.750	35,29	40.000.000	37,50	40.000.000	40,00	50.000.000	45,00	50.000.000	50,00	50.000.000	
3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	%	14,00	25,00	24.371.650	30,00	50.000.000	35,00	50.000.000	40,00	60.000.000	45,00	60.000.000	50,00	60.000.000	
	Pertanian																	OPD Pengampu Urusan Pertanian
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Jumlah Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)				16.694.865.100		18.500.000.000		18.500.000.000		19.000.000.000		20.500.000.000		20.500.000.000	
			1. Padi	Ton	343995,00	344020,00		344032,00		344039,00		344042		344044		344049		
			2. Jagung	Ton	27264,00	27300,00		27320,00		27331,00		27343		27350		27352		
			3. Kacang Tanah	Ton	3207,00	3210,00		3215,00		3220,00		3222		3226		3228		
			4. Ubi Kayu	Ton	74553,00	74560,00		74570,00		74580,00		74590		74595		74560		
			5. Ubi Jalar	Ton	38842,00	38850,00		38860,00		38867,00		38870		38880		38890		
		Meningkatnya Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, tanaman hias, tanaman biofarmaka)	Jumlah Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, Tanaman hias dan tanaman biofarmaka)															
			1. Cabai besar	Kuintal	28440,00	28445,00		28450,00		28455,00		28460		28470		28480		

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			2. Cabai rawit	Kuintal	8240,00	8250,00		8255,00		8260,00		8266		8270		8280		
			3. Bawang Merah	Kuintal	50564,00	50570,00		50572,00		50575,00		50578		50580		50590		
			4. Bawang Putih	Kuintal	24468,00	24470,00		24475,00		24477,00		24480		24482		24490		
			5. Alpukat	Kuintal	96314,00	96415,00		96496,00		96517,00		96618		96719		96790		
			6. Duku	Kuintal	3992,00	4003,00		4104,00		4205,00		4266		4287		4300		
			7. Durian	Kuintal	117156,00	117177,00		117180,00		117200,00		117300		117361		117462		
			8. Jambu Biji	Kuintal	4118,00	4221,00		4230,00		4240,00		4250		4260		4270		
			9. Pisang	Kuintal	170273,00	170274,00		170280,00		170290,00		170296		170300		170310		
			10. Tanaman Hias (Krisan)	Buah	1247400,00	1247450,00		1247460,00		1247470,00		1247480		1247490		1247500		
			11. Tanaman Biofarmaka (Jahe)	Kuintal	5739,00	5740,00		5745,00		5746,00		5748		5750		5755		
		Meningkatnya produksi unggulan komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Teh, Cengkeh, Kelapa, Kakao)	Angka produksi komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Teh, Cengkeh, Kelapa, Kakao)															
			Tembakau	Ton	209,76	243,20		255,36		268,13		281,53		295,61		310,39		
			Kopi	Ton	183,73	192,37		202,56		212,68		223,31		224,47		235,69		
			Teh	Ton	4,60	4,70		4,80		4,90		5		5,1		5,2		
			Cengkeh	Ton	38,37	40,29		42,30		45,05		47,30		49,67		52,15		
			Kelapa	Ton	460,97	461,20		484,26		508,47		533,89		560,58		588,61		
			Kakao	Ton	25,32	26,59		27,92		29,32		30,79		32,33		33,95		
		Meningkatnya Populasi Ternak (Ternak Besar	Jumlah Populasi Ternak (Ternak	Ekor														

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Sapi, Ternak Kecil Kambing dan Domba serta unggas)	Besar, Ternak Kecil, Unggas)															
			1. Ternak Besar (Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau)	Ekor	55427,00	55567,00		55707,00		55847,00		55987,00		56128,00		56270,00		
			2. Ternak Kecil (Kambing dan Domba)	Ekor	153569,00	153953,00		154338,00		154724,00		155110,00		155498,00		155887,00		
			3. Ternak Unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik)	Ekor	12576777,00	12608219,00		12639740,00		12671339,00		12703017,00		12734774,00		12766611,00		
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya cakupan dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung usaha tani	Presentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik	%	28,56	28,57	4.409.815.000	28,58	4.800.000.000	28,59	3.750.000.000	28,6	5.800.000.000	28,61	7.300.000.000	28,62	7.300.000.000	
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menurunnya kasus penyakit hewan dan zoonosis melalui sistem kesehatan hewan yang terpadu	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	236,84	-23,44	25.451.200	-2,04	210.000.000	-4,17	210.000.000	-6,52	250.000.000	-9,3	250.000.000	-12,82	250.000.000	
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya penanganan bencana terhadap sektor pertanian melalui upaya mitigasi dan adaptasi	Persentase Bencana Tanaman pangan dan hortikultura Pertanian yang Tertangani	%	100,00	100,00	22.232.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
			Persentase Bencana perkebunan yang Tertangani	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100		100		100		
5	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani melalui penyuluhan yang efektif	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	16,50	16,50	783.628.000	16,50	500.000.000	19,00	500.000.000	19	550.000.000	19	550.000.000	19	550.000.000	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,65	73,15	19.843.119.870	73,65	19.821.755.295	74,15	19.871.744.295	74,65	20.021.744.295	75,15	20.021.744.295	75,5	20.021.744.295	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kehutanan																	OPD Pengampu Urusan Kehutanan
1	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Terlindunginya keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui upaya konservasi yang berkelanjutan	Persentase masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan	%	25	30	21.092.200	35	130.000.000	40	130.000.000	45	130.000.000	50	130.000.000	55	130.000.000	
	Energi Dan Sumber Daya Mineral																	OPD Pengampu Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
1	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam mendukung ketahanan energi daerah	Jumlah potensi panas bumi yang diawasi	Kawasan	2,00	2,00	8.700.000	2,00	8.700.000	2,00	8.700.000	2,00	8.700.000	2,00	8.700.000	2,00	8.700.000	
	Transmigrasi																	OPD Pengampu Urusan Transmigrasi
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis potensi wilayah	Jumlah calon transmigran yang terdaftar	KK	0	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	
	Perdagangan																	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan dan legalitas usaha	Prosentase penerbitan ijin usaha pedagangan	%	74,00	-		76,00	12.509.250	77,00	12.509.250	78,00	12.509.250	79,00	12.509.250	80,00	12.509.250	
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa	Persentase Sarpras perdagangan sesuai standar (SNI)	%	22,00	22,00	891.202.550	22,00	396.202.550	23,00	396.202.550	23,00	3.396.202.550	24,00	3.396.202.550	24,00	5.396.202.550	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Terkendalinya harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	Persentase pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100,00	-		100,00	39.830.600	100,00	39.830.600	100,00	39.830.600	100,00	39.830.600	100,00	39.830.600	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
4	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya daya saing dan volume ekspor produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	USD\$	159.165.904	-	-	159.500.000	6.658.800	160.000.000	6.658.800	160.500.000	1.136.658.800	170.000.000	1.136.658.800	170.500.000	1.136.658.800	
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya perlindungan konsumen dan kualitas produk yang beredar di pasar	Persentase Ukur Takar Timbang (UTTP) ditera dan tera ulang	%	70,00	-		72,00	25.000.000	74,00	25.000.000	76,00	25.000.000	78,00	25.000.000	80,00	25.000.000	
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan ekonomi daerah	Persentase pelaku usaha produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasaran	%	75,00	-	-	77,00	200.000.000	79,00	200.000.000	81,00	200.000.000	83,00	200.000.000	85,00	200.000.000	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,95	73,00	18.229.307.022	73,1	18.450.136.272	73,3	18.450.136.272	73,5	18.450.136.272	73,7	18.450.136.272	73,9	18.450.136.272	
	Pariwisata																	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui pengembangan daya tarik wisata	Jumlah Tamu wisatawan	Orang	5741253,00	5781253,00	1.261.336.700	5850000,00	1.354.640.000	5900000,00	1.354.640.000	5950000,00	1.354.640.000	6000000,00	1.354.640.000	6050000,00	1.354.640.000	
2	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya promosi dan citra destinasi pariwisata daerah	Tingkat hunian akomodasi	%	30,58	31,08	472.032.500	31,58	504.320.000	32,08	504.320.000	32,58	504.320.000	33,08	504.320.000	33,58	504.320.000	
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual	jumlah usaha ekraf yang terdaftar HAKI	Unit	57,00	65,00	13.900.000	77,00	30.000.000	87,00	30.000.000	97,00	30.000.000	107,00	30.000.000	117,00	30.000.000	
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan	%	14,27	14,30	30.075.000	14,50	60.000.000	14,80	60.000.000	15,00	60.000.000	15,30	60.000.000	15,50	60.000.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,4	74,7	5.109.596.677	75	5.258.655.877	75,25	5.258.655.877	75,5	5.258.655.877	75,75	5.258.655.877	76	5.258.655.877	
	Perindustrian																	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan industri daerah	Jumlah sentra industri yang dibina	Sentra	3	3	497432000,00	3	521.706.000	3	521.706.000	3	521.706.000	4	521.706.000	4	521.706.000	
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tertibnya pelaksanaan usaha industri sesuai regulasi yang berlaku	persentase penerbitan izin usaha industri	%	100	100	30084200,00	100	38.275.400	100	38.275.400	100	38.275.400	100	38.275.400	100	38.275.400	
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya kualitas data data industri yang akurat dan terkini untuk perencanaan pembangunan industri	Persentase IKM yang terdaftar SIINAS	%	6,83	7,80	39375000,00	9,59	42.000.000	10,80	42.000.000	11,92	42.000.000	12,95	42.000.000	13,91	42.000.000	
D.	Urusan Pendukung Urusan Pemerintah																	
	Sekretariat Daerah																	OPD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terselenggaranya koordinasi kebijakan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif	Indeks Reformasi Hukum	Angka	99,50	99,50	9.952.566.500	99,50	15.482.800.000	99,50	15.482.800.000	99,50	15.482.800.000	99,50	15.482.800.000	99,50	17.482.800.000	
			Nilai LPPD	nilai	3,59	3,59		3,60		3,63		3,64		3,65		3,66		
			Persentase kebijakan kesra yang diterbitkan	%	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	erselenggaranya perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi daerah secara terintegrasi	Persentase penyerapan APBD	%	93,90	100,00	1.311.727.550	94,20	1.850.000.000	94,40	1.850.000.000	94,60	1.850.000.000	94,80	1.850.000.000	95,00	1.850.000.000	

No	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			ROA (RETURN OF ASET) BUMD	%	1,21	1,82		1,87		1,93		1,98		2,04		2,10		
			Tingkat Kematangan UKPBJ	%	88,89	90,00		100		100		100		100		100		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (SETDA)	Nilai	73,95	74,00	34.627.238.870	74,00	26.308.365.920	74,10	26.308.365.920	74,20	26.308.365.920	74,30	26.308.365.920	74,40	26.308.365.920	
	Sekretariat DPRD																	OPD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Meningkatnya efektivitas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun	%	100,00	100,00	19.824.614.984	100,00	22.914.806.684	100,00	22.914.806.684	100,00	32.914.806.684	100,00	32.914.806.684	100,00	32.914.806.684	
				%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,40	71,50	41682158223,00	71,70	42.582.781.823	71,90	42.582.781.823	72,00	42.582.781.823	72,10	42.582.781.823	72,40	42.582.781.823	
	Perencanaan																	OPD Pengampu Urusan Perencanaan
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	%	90,66	90,70	656.701.600	90,75	1.010.319.000	90,80	1.010.319.000	90,85	1.010.319.000	90,90	1.010.319.000	90,95	1.010.319.000	
			Persentase Keselarasan RPJMD dan RENSTRA PD	%	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Tersinkronisasi ny a perencanaan pembangunan antar perangkat	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/	Angka	39,50	39,50	989.037.700	40,00	1.395.000.000	40,50	1.395.000.000	41,00	1.395.000.000	41,50	1.395.000.000	42,00	1.395.000.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pembangunan Daerah	daerah dan antar jenjang pemerintahan	sub kegiatan Bidang PPM															
			Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/ sub kegiatan Ekonomi SDA	Angka	39,50	39,50		40,00		40,50		41,00		41,50		42,00		
			Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/ sub kegiatan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Angka	39,50	39,50		40,00		40,50		41,00		41,50		42,00		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,9	72	6.303.297.662	73,00	6.377.661.912	73,50	6.377.661.912	74,00	6.377.661.912	74,50	6.377.661.912	75,00	6.377.661.912	
	Penelitian Dan Pengembangan																	OPD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	71,00	71,00	540.222.950											
			Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	%	80,00	79,00												
2	Program Riset Dan Inovasi	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik	Persentase hasil riset yang menjadi kebijakan dan atau inovasi	%	30,00	-	-	34,00	650.000.000	36,00	800.000.000	37,00	1.000.000.000	40,00	1.000.000.000	42,00	1.000.000.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Keuangan Daerah																	OPD Pengampu Urusan Keuangan Daerah
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.	Persentase ketepatan APBD	%	100,00	100,00	367.994.033.393	100,00	370.682.876.744	100,00	371.501.546.094	100,00	383.501.546.094	100,00	384.610.434.982	100,00	386.467.076.785	
			Persentase realisasi anggaran	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya efisiensi dan optimalisasi penggunaan aset daerah	Manajemen Aset	%	100,00	100,00	1.442.022.396	100,00	1.846.126.120	100,00	1.846.126.120	100,00	1.846.126.120	100,00	1.846.126.120	100,00	1.846.126.120	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	%	48,00	50,00	5.485.807.430	51,00	6.287.545.407	52,00	6.287.545.407	52,00	6.287.545.407	52,00	6.287.545.407	53,00	6.287.545.407	
			Persentase piutang pajak yang tertagih	%	91,00	91,10		91,20		91,3		91,4		91,5		91,6		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,90	75,50	89.494.252.371	76,00	90.286.688.621	76,5	90.286.688.621	77	90.286.688.621	77,5	90.286.688.621	78	90.286.688.621	
	Kepegawaian																	OPD Pengampu Urusan Kepegawaian
1	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur sipil negara daerah	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi	%	91,00	91,50	1.488.941.795	92,00	1.464.940.000	95,00	1.464.940.000	95,00	4.464.940.000	95,00	8.464.940.000	95,00	7.464.940.000	
			Tingkat kinerja ASN	%	NA	NA		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,55	69,9	6.678.127.081	70	6.874.314.031	71	6.874.314.031	72	6.874.314.031	73	6.874.314.031	74	6.874.314.031	
	Pendidikan Dan Pelatihan																	OPD Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur dalam mendukung pelayanan publik	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	26,00	26,00	1.627.436.505	27,00	1.831.918.350	28,00	1.831.918.350	29,00	1.831.918.350	30,00	1.831.918.350	31,00	1.831.918.350	
	Pengawasan																	OPD Pengampu Urusan Pengawasan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	%	94,00	95,00	3.003.157.750	95,30	4.299.926.750	95,50	4.299.926.750	95,70	4.299.926.750	96,00	4.299.926.750	96,30	4.299.926.750	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tersusunnya kebijakan pengawasan internal dan meningkatnya kapasitas pelaksanaan pengawasan	Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi	%	59,00	59,00	1.057.371.250	59,00	2.125.288.250	59,00	2.125.288.250	59,00	2.125.288.250	59,00	2.125.288.250	59,00	2.125.288.250	
			Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	%	6,00	6,00		7,00		8,00		9,00		10,00		11,00		
			Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis	Angka	34,00	34,00		35,00		36,00		37,00		38,00		39,00		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,75	72,95	16.055.967.952	73	16.559.591.702	73,25	16.559.591.702	73,5	16.559.591.702	73,75	16.559.591.702	74	16.559.591.702	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kecamatan Jatipuro																	Kecamatan Jatipuro
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	5.413.600	100	9.762.300	100	9.762.300	100	9.762.300	100	9.762.300	100	9.762.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	16.452.300	100	22.896.400	100	22.896.400	100	22.896.400	100	22.896.400	100	22.896.400	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	26.356.050	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	99,87	100	53.431.350	100	80.830.100	100	80.830.100	100	80.830.100	100	80.830.100	100	80.830.100	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	15.062.500	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,40	70,40	2.601.162.437	70,45	2.627.274.337	70,5	2.627.274.337	70,55	2.627.274.337	70,6	2.627.274.337	71	2.627.274.337	
	Kecamatan Jatiyoso																	Kecamatan Jatiyoso
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	41.925.650	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	199.359.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan	masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan																
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	131.872.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	98,87	100	108.106.800	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	61.380.000	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,7	72,00	2.044.153.334	73,2	2.248.115.136	73,5	2.248.115.136	73,5	2.248.115.136	73	2.248.115.136	73	2.248.115.136	
	Kecamatan Jumantono																	Kecamatan Jumantono
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	3.007.050	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	11.830.700	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	126.263.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	99,81	100	69.850.950	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pemerintahan Umum	umum yang efektif dan terkoordinasi																
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDsesuai ketentuan	%	99,8	100	27.904.150	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,65	68,70	2.243.596.657	68,75	2.560.392.540	68,85	2.560.392.540	68,95	2.560.392.540	69,05	2.560.392.540	69,15	2.560.392.540	
	Kecamatan Jumapolo																	Kecamatan Jumapolo
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	2.868.000	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	12.518.000	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	21.600.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	56.200.000	96	80.807.000	97	80.807.000	98	80.807.000	99	80.807.000	100	80.807.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDsesuai ketentuan	%	100	100	6.160.000	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	
6	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya dukungan administrasi dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,05	71,10	2.236.068.136	71,20	2.166.255.119	71,30	2.166.255.119	71,40	2.166.255.119	71,50	2.166.255.119	71,60	2.166.255.119	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah																
	Kecamatan Matesih																	Kecamatan Matesih
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	96.800.000	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	15.985.000	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	149.600.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan pelaksanaan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	31.600.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	4.800.000	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,30	70,32	2.407.133.784	70,35	2.321.126.129	70,40	2.321.126.129	70,45	2.321.126.129	70,50	2.321.126.129	70,55	2.321.126.129	
	Kecamatan Tawangmangu																	Kecamatan Tawangmangu
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	99,15	100	1.778.250	83,5	2.135.400	83,6	2.135.400	83,7	2.135.400	83,8	2.135.400	83,9	2.135.400	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99,99	100	2.908.455.750	100	2.518.870.000	100	2.518.870.000	100	2.518.870.000	100	2.518.870.000	100	2.518.870.000	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	46.379.550	100	31.269.550	100	31.269.550	100	31.269.550	100	31.269.550	100	31.269.550	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	88,95	100	652.894.700	100	615.970.000	100	615.970.000	100	615.970.000	100	615.970.000	100	615.970.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	-	-	-	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,90	71,00	6.223.273.321	73,4	5.682.268.387	73,5	5.682.268.387	73,6	5.682.268.387	73,7	5.682.268.387	73,8	5.682.268.387	
	Kecamatan Ngargoyoso																	Kecamatan Ngargoyoso
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	35.198.400	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	68.895.000	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	142.125.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	

No.	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	116.590.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	73.485.000	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,15	71,55	2.223.961.287	71,55	2.798.565.087	71,75	2.798.565.087	71,95	2.798.565.087	72,05	2.798.565.087	72,25	2.798.565.087	
	Kecamatan Karangpandan																	Kecamatan Karangpandan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	2.640.000	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	17.704.300	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	47.250.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	4.300.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	2.800.000	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
						Target	Pagu	2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,55	73,75	2.524.433.290	73,95	2.642.992.213	74,25	2.642.992.213	74,5	2.642.992.213	74,75	2.642.992.213	75,25	2.642.992.213	
	Kecamatan Karanganyar																	Kecamatan Karanganyar
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	6.706.825	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	13.859.225.070	95	13.799.000.000	96	13.900.273.600	97	13.900.273.600	98	13.900.273.600	98	13.900.273.600	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	2.635.000	100	303.530.000	100	303.530.000	100	303.530.000	100	303.530.000	100	303.530.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	3.026.963.750	100	671.600.000	100	771.600.000	100	771.600.000	100	771.600.000	100	771.600.000	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,65	70,67	16.429.466.244	70,95	13.792.648.789	71	13.888.386.189	71,20	13.888.386.189	71,30	13.888.386.189	71,40	13.888.386.189	
	Kecamatan Tasikmadu																	Kecamatan Tasikmadu
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	2.980.000	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	13.800.000	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	

No	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		dan kelurahan dalam pembangunan																
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	21.600.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	44.250.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	1.200.000	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya dukungan manajerial dan operasional dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,55	72,00	2.684.346.092	73	2.642.108.552	73,1	2.642.108.552	73,2	2.642.108.552	73,3	2.642.108.552	73,4	2.642.108.552	
	Kecamatan Jaten																	Kecamatan Jaten
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	31.701.600	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	6.755.600	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	96.420.050	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan	Persentase kegiatan wawasan	%	100	100	104.049.800	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pemerintahan Umum	umum yang efektif dan terkoordinasi	kebangsaan dan keagamaan															
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	142.434.750	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,40	71,42	2.511.682.890	71,45	2.273.298.287	71,5	2.273.298.287	70,35	2.273.298.287	72,5	2.273.298.287		2.273.298.287	
	Kecamatan Colomadu																	Kecamatan Colomadu
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	74.236.200	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	44.275.100	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	90	100	287.533.500	90	6.000.000	90	6.000.000	90	6.000.000	90	6.000.000	90	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	48.296.700	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	57.933.400	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,5	71,70	2.788.635.087	71.80	2.605.208.084	72	2.605.208.084	72.30	2.605.208.084	72.60	2.605.208.084	72.90	2.605.208.084	
	Kecamatan Gondangrejo																	Kecamatan Gondangrejo
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100,00	100,00	3.400.000	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	100,00	18.000.000	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100,00	100,00	141.600.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	99,60	100,00	54.750.000	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	8.000.000	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,40	71,50	2.306.396.129	71,60	2.303.404.257	71,80	2.303.404.257	72,00	2.303.404.257	72,40	2.303.404.257	72,50	2.303.404.257	
	Kecamatan Mojogedang																	Kecamatan Mojogedang

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100,00	100,00	1.304.100	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	100,00	13.257.450	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100,00	100,00	25.200.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100,00	100,00	37.796.500	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	6.466.350	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,30	72,33	2.322.571.052	72,35	2.460.949.784	72,40	2.460.949.784	72,45	2.460.949.784	72,50	2.460.949.784	72,55	2.460.949.784	
	Kecamatan Kebakkramat																	Kecamatan Kebakkramat
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100,00	100,00	101.923.400	100,00	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	100,00	43.540.000	100,00	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	100	18.846.400	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100,00	100,00	108.640.000	100,00	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100,00	100,00	130.800.000	100,00	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100.590.000	100,00	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,45	71,45	2.085.420.119	71,47	2.527.838.440	71,5	2.527.838.440	72	2.527.838.440	72	2.527.838.440	72,5	2.527.838.440	
	Kecamatan Kerjo																	Kecamatan Kerjo
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100,00	100,00	71.549.100	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	100,00	6.362.300	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	100,00	64.395.450	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	100,00	18.846.400	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100,00	100,00	75.600.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100,00	100,00	101.185.000	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	100,00	80.807.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	60.270.000	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	100,00	19.064.100	

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pemerintahan Desa	transparan, akuntabel, dan partisipatif																
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,80	68,80	2.065.390.430	68,85	2.683.878.530	68,90	2.683.878.530	69,00	2.683.878.530	70,00	2.683.878.530	70,00	2.683.878.530	
	Kecamatan Jenawi																	Kecamatan Jenawi
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100,00	100,00	2.484.950	100,00	4.271.800	100,00	4.271.800	100,00	4.271.800	100,00	4.271.800	100,00	4.271.800	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	100,00	9.675.900	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100,00	100,00	24.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100,00	100,00	19.900.000	100,00	63.850.000	100,00	63.850.000	100,00	63.850.000	100,00	63.850.000	100,00	63.850.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	9.172.000	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,05	73,10	2.506.571.763	73,10	2.705.364.292	73,12	2.705.364.292	73,15	2.705.364.292	73,18	2.705.364.292	73,22	2.705.364.292	
	Kesatuan Bangsa Dan Politik																	Kesbangpol

No .	Bidang Urusan/Program	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025		Target Tahun										Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	Cakupan kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Kecamatan	17,00	17,00	697.933.500	17,00	700.290.244	17,00	700.000.000	17,00	1.200.000.000	17	700.000.000	17	700.000.000	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang beretika dan berbudaya	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	37,27	37,50	1.753.204.600	37,50	800.000.000	37,75	800.000.000	38,00	800.000.000	38,25	800.000.000	38,5	800.000.000	
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kemandirian dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	53,70	54,00	6.235.297.050	54,00	5.308.750.000	54,50	6.308.750.000	55,00	6.308.750.000	55,50	6.308.750.000	56,00	6.308.750.000	
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap tekanan ekonomi, sosial, dan budaya	Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kecamatan	17,00	17,00	142.609.900	17,00	150.000.000	17,00	150.000.000	17,00	150.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan dan kemampuan daerah dalam mencegah serta menangani konflik sosial	Persentase kecamatan yang dilakukan pemantauan wilayah	%	100,00	100,00	366.258.260	100,00	1.810.319.000	100,00	1.842.949.657	100,00	1.810.319.000	100	1.810.319.000	100	1.810.319.000	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerahk	Nilai	73,35	73,45	4.074.455.417	73,50	4.221.513.727	73,75	4.221.513.727	74,00	4.538.271.604	74,25	4.221.513.728	74,50	4.221.513.527	
Jumlah							2.256.919.025.100		2.296.796.059.321		2.250.590.955.289		2.291.867.185.510		2.314.429.284.164		2.327.770.402.568	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline data 2025	Target				
									2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Berdasarkan PermenPAN No 8 Tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan umenggambarkan tingkat kemajuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas	Penilaian dilaksanakan oleh Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Nasional (leading sektor Kemenpan RB) berdasarkan capaian indikator-indikator kinerja pada reformasi birokrasi reguler (tata kelola pemerintahan) dan capaian dari reformasi birokrasi tematik (berdampak).	Dikeluarkan dan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)	Setda	Angka	85,74	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50
2	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP adalah skor atau predikat yang diperoleh instansi pemerintah dalam penilaian untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur sejauh mana suatu instansi mampu menjalankan perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara akuntabel untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.	Penilaian dilaksanakan oleh Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Nasional (leading sektor Kemenpan RB); dihitung dari bobot dan nilai masing-masing komponen evaluasi kinerja, yaitu: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%), dan capaian kinerja (20%), yang dirangkum menjadi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (AKIP). Nilai	Nilai SAKIP daerah dikeluarkan dan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)	Setda	Nilai	69,31	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline data 2025	Target				
									2026	2027	2028	2029	2030
			AKIP akhir ini kemudian dikonversikan menjadi predikat, seperti AA (Sangat Memuaskan), A (Memuaskan), BB (sangat baik), B (baik), CC (cukup), C (kurang), dan D (Sangat Kurang).										
3	Maturitas SPIP	Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian internal. Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penilaian Mandiri dan atau oleh BPKP. dilakukan dengan mempertimbangkan tiga komponen utama: Perencanaan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan. Setiap komponen memiliki sub-komponen dengan bobot tertentu yang kemudian diakumulasikan untuk menentukan skor total maturitas.	Maturitas SPIP Daerah dikeluarkan setelah melalui proses penilaian yang melibatkan Penilaian Mandiri (PM) oleh perangkat daerah, Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP (Auditor Intern Pemerintah), dan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Setda	Level	3,151	3,201	3,250	3,310	3,370	3,420	3,450

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline data 2025	Target				
									2026	2027	2028	2029	2030
4	Indeks pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diukur berdasarkan 6 Aspek pelayanan publik dengan metode sampling. IPP hasil pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)	Penilaian oleh Kemenpan RB dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik dengan menilai 6 aspek beserta bobotnya	IPP dikeluarkan dan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)	Setda	Angka	4,43	4,43	4,54	4,57	4,59	4,62	4,64
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Perhitungan IKLH Kab/Kota yang tidak memiliki gambut adalah (PermenLHK No.27/2021): $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	IKLH dikeluarkan dan dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH)	DLH	Angka	70,12	72,40	72,45	72,49	72,54	72,59	72,63
6	Indeks daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi, Meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, baik dalam skala domestik maupun internasional.	Untuk menghitung Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), tidak ada satu rumus tunggal, tetapi melibatkan analisis berbagai aspek yang membentuk daya saing daerah, seperti Faktor Penguat (Enabling Environment), Sumber Daya Manusia (SDM), Pasar, dan Ekosistem Inovasi, yang kemudian diukur melalui sejumlah indikator.	BRIN	Baperida	Angka	3,74	3,80	3,85	3,88	3,91	3,93	3,95
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan	Penilaian / Pengukuran oleh BPS ukuran kualitas hidup masyarakat yang dihitung	BPS	Baperida	Angka	78,11	78,19	79,26	80,42	80,98	81,53	82,09

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline data 2025	Target				
									2026	2027	2028	2029	2030
		kualitas hidup manusia di suatu wilayah.	berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.										
8	Pertumbuhan Ekonomi	indikator keberhasilan pembangunan dan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Jika pertumbuhan ekonomi makin tinggi maka makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi menggunakan PDRB. PDRB ini merupakan perbandingan total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tertentu. Data pertumbuhan ekonomi menggunakan persentase tahunan pertumbuhan GDP. (peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu atau kenaikan kapasitas produksi suatu wilayah, yang diukur dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu.)	Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan nilai ekonomi (umumnya Produk Domestik Bruto/PDB) dari periode tertentu dengan periode sebelumnya menggunakan rumus: ((PDB tahun ini - PDB tahun lalu) / PDB tahun lalu) x 100%. PDB sendiri merupakan total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara, dan perhitungannya bisa menggunakan pendekatan $PDB = C + I + G + (X - M)$, di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, dan (X - M) adalah ekspor dikurangi impor. (Penilaian / Pengukuran oleh BPS)	BPS	Baperida	%	5,54	6,15	6,20	6,27	6,38	6,43	6,50
9	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan adalah ukuran atau gambaran kondisi pada suatu wilayah di mana seluruh orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau untuk menjalani hidup sehat dan aktif secara berkelanjutan	1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0-100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan	IKP dikeluarkan dan dievaluasi oleh Badan Pangan Nasional (BPN) atau Kementerian Pertanian (Kementan)	DispartanPP	Angka	89,67	89,70	89,72	89,80	89,85	90,00	90,27

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab	Satuan	Kondisi awal 2024	Baseline data 2025	Target				
									2026	2027	2028	2029	2030
			bobot indikator 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP										
10	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Angka Kemiskinan menunjukkan persentase penduduk di suatu negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, yang ditentukan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah.	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuai perhitungan BPS)	BPS	Setda	%	9,59	8,96	8,84	8,71	8,59	8,47	8,22

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
A	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH							
1	Indeks Reformasi birokrasi	Angka	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50
2	Nilai SAKIP	Nilai	70,50	71,00	71,50	72 ,00	72,50	73,00
3	Maturitas SPIP	Level	3,201	3,25	3,31	3,37	3,42	3,45
4	Indeks Pelayanan publik	Angka	4,43	4,54	4,57	4,59	4,62	4,64
5	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	1.322.563	1.873.621,1	2.424.679,2	2.975.737,3	3.526.795,4	4.077.853,5
6	Kasus Konflik SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	72,40	72,45	72,49	72,54	72,59	72,63
8	Angka Kriminalitas	Angka per 10.000 penduduk	188	178	168	158	148	138
9	Indeks daya saing daerah	Angka	3,8	3,85	3,88	3,91	3,93	3,95
10	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	78,19	79,26	80,42	80,98	81,53	82,09
11	Kapabilitas inovasi	Angka	2,8	3,0	3,22	3,4	3,61	3,65
12	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,15	6,20	6,27	6,38	6,43	6,50
13	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,70	89,72	89,80	89,85	90,00	90,27
14	Tingkat Kemiskinan	%	8,96	8,84	8,71	8,59	8,47	8,22

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
15	Indeks Gini	Angka	0,348	0,342	0,336	0,332	0,326	0,320
B	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,70	89,72	89,75	89,76	89,80	89,85
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	7,05	7,02	7,00	6,98	6,95	6,90
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	39,66	42,68	45,69	48,71	51,73	54,74
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,40	72,45	72,49	72,54	72,59	72,63
5	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,14	6,17	6,20	6,23	6,26	7,84
6	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah	%	1,50	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50
7	Kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif	TonCO2eq	1.322.563	1.873.621,10	2.424.679,20	2.975.737,30	3.526.795,40	4.077.853,50
8	Indeks Risiko Bencana	Angka	87,42	86,55	85,68	84,82	83,98	83,14
C	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Tingkat Kemiskinan	%	8,96	8,84	8,71	8,59	8,47	8,22
2	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	57,26	61,95	66,63	71,32	76,00	85,37
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,41	3,35	3,24	3,12	3,00	2,88

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
4	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	18,88	19,11	19,34	19,57	19,80	20,04
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	78,00	78,56	78,79	79,02	79,25	79,65
6	Total <i>Fertility Rate</i> /Angka Kelahiran Total	Jiwa	1,95	1,98	1,99	2,00	2,00	2,00
7	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	77,70	77,69	77,69	77,78	77,68	77,67
8	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	9,50	9,50	9,40	9,40	9,30	9,30
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13,65	13,24	12,82	12,41	11,99	11,57
10	Persentase Penduduk Penerima PKG	%	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	70,00
11	Cakupan Imunisasi bayi lengkap	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00
13	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	65,00	66,10	67,90	69,70	80,00	80,00
14	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15	Jumlah Kasus Kematian balita	Kasus	105,00	105,00	104,00	104,00	103,00	103,00
16	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus	%	90,40	90,85	91,31	91,76	92,22	92,68

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
	tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)							
17	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	92,80	92,91	93,02	93,13	93,25	93,36
18	Penyangdang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari ULD	Orang	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
19	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,04	10,16	10,28	10,41	10,53	10,66
20	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,95	14,02	14,09	14,16	14,23	14,30
21	Angka Literasi/Numerasi							
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	67,70	70,20	72,70	75,20	77,70	80,20
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	79,80	80,90	82,00	83,10	84,20	85,30
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	60,10	63,00	65,90	68,80	71,70	74,60
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	69,13	70,63	72,13	73,63	75,13	76,63
22	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	79,91	82,88	85,85	88,82	91,78	94,33
23	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	10,97	11,16	11,35	11,54	11,74	11,93
24	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	8,26	8,27	8,27	8,28	8,29	8,30
25	Cakupan kepesertaan jaminan sosial	%	32,75	32,91	33,08	33,24	33,41	33,58

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
	ketenagakerjaan kabupaten/ kota							
26	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,43	95,62	95,81	96,00	96,20	96,39
27	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	95,73	95,77	95,80	95,83	95,85	95,87
28	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	30,45	30,50	32,00	32,50	33,50	35,00
29	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	20,45	21,20	21,70	22,30	23,00	24,20
30	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	128.500,00	129.000,00	129.500,00	130.000,00	130.500,00	131.000,00
31	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,262	0,260	0,259	0,257	0,256	0,255
32	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,67	66,68	66,69	66,70	66,71	66,72
33	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH							

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,88	60,48	61,08	61,68	62,28	62,88
2	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,8	3	3,22	3,4	3,61	3,65
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	75,52	77,03	78,57	80,15	81,75	83,38
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,25
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	47,02	47,4	47,67	47,94	48,21	48,49
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,88	3,97	4,06	4,16	4,26	4,36
8	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	4,6	4,67	4,74	4,81	4,88	4,96
9	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	2,02	1,91	1,82	1,73	1,65	1,58
10	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	2	1,9	1,8	1,7	1,61	1,53
11	<i>Return on Aset (ROA) BUMD</i>	%	1,82	1,87	1,93	1,98	2,04	2,1
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	23,36	23,66	23,97	24,28	24,6	24,92

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
13	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,4	83,5	84	84,5	85	85,5
14	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	50,94	51,57	52,2	52,83	53,46	53,77
15	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	74	75	75,5	76	76,5	77
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	92,78	93,14	93,5	93,86	94,22	94,58
17	Persentase Status Desa Mandiri	%	19,14	20,99	22,22	23,46	24,69	25,31
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,53
19	Disparitas Harga	%	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,39	4,41	4,44	4,47	4,49	4,51
D	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50
2	Indeks Reformasi Hukum	Angka	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,60	3,65	3,69	3,74	3,78	3,83

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
4	Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,90	1,92	2,25	2,50	2,75	3,00
5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,43	4,54	4,57	4,59	4,62	4,64
6	Indeks Integritas Nasional	Angka	80,70	81,50	82,30	83,10	83,90	84,70
7	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
Urusan Pendidikan								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Kesehatan								
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota								

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,00	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,46	99,50	99,60	99,70	99,80	99,90
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,38	99,40	99,50	99,60	99,70	99,80
4.	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,40	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50
6.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
7.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	49,79	59,67	69,55	79,43	89,3	92,85
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3,52	3,04	2,62	2,20	1,80	1,34
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Urusan Sosial								

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Tenaga Kerja								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00	62,00
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	58.500.000,00	59.000.000,00	59.500.000,00	60.000.000,00	60.500.000,00	61.000.000,00
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,	%	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
	dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)							
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,80	8,90	9,00	9,10	9,20	9,30
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk	4,19	4,18	4,17	4,16	4,15	4,15
Urusan Pangan								
1	Persentase Cadangan Pangan	%	17,9	20,18	22,38	24,28	26,55	28,83
Urusan Pertanahan								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
	dengan luas izin lokasi yang diterbitkan							
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	72,40	72,45	72,49	72,54	72,59	72,63
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,00	99,15	99,30	99,45	99,50	99,55
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	67,00	67,25	67,50	67,75	68,00	68,25
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,23	99,25	99,30	99,35	99,37	99,40

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase Status Desa Mandiri	%	19,14	20,99	22,22	23,46	24,69	25,31
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,95	1,98	1,99	2,00	2,00	2,00
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,25	70,5	70,75	71,00	71,25	71,5
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,50	8,10	7,80	7,60	7,50	7,40
Urusan Perhubungan								
1	Rasio konektivitas	indeks	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	ratio	0,70	0,66	0,66	0,67	0,69	0,70
Urusan Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
	Dinas Komunikasi dan Informatika							
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	64,85	64,87	64,90	64,93	64,95	65
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Urusan Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Unit/Medali	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00
Urusan Statistik								
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	72,00	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	72,00	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00
Urusan Persandian								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	63	65	66	67	68	70
Urusan Perpustakaan								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	70,00	70,5	70,8	71,00	71,4	71,6
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	75,00	75,3	75,6	75,8	76,00	76,3

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
Urusan Kelautan dan Perikanan								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Kg	2.488.702,00	2.509.625,00	2.530.747,00	2.552.070,00	2.573.596,00	2.595.328,00
Urusan Pariwisata								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	56,50	57,00	57,50	58,00	58,50	58,50

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20
3	Tingkat hunian akomodasi	%	31,00	31,50	32,00	32,50	33,00	33,00
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	4,20
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,00
Urusan Pertanian Kabupaten/Kota								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, porang)	Ton/Ha/ Tahun	7,70	7,71	7,72	7,73	7,74	7,75
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-23,44	-2,04	-4,17	-6,52	-9,3	-12,82
Urusan Perdagangan								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	97,30	97,40	97,50	97,60	97,70	97,80
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
Urusan Perindustrian								
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	34,80	35,00	35,20	35,40	35,60	35,80
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	92,80	92,90	93,00	93,10	93,20	93,30
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Menengah Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
	Usaha Industri (IPUI) Menengah Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait							
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00
Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)								
1	Rasio PAD	%	14,10	14,89	15,56	16,26	16,99	17,75
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
4	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	0,72	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76
5	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Urusan Pemerintahan (Pengadaan)								
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00
Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	182,60	182,70	182,80	182,90	183,00	183,10

No.	Urusan	Satuan	Baseline Tahun 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27,30	27,50	27,70	28,00	28,40	28,60
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80,10	80,30	80,60	80,90	81,20	81,50
Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)								
1	<i>Budget execution:</i> Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	91,21	91,21	91,21	91,21	91,21	91,21
2	<i>Revenue mobilization:</i> Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	108,35	108,35	108,35	108,35	108,35	108,35
3	<i>Assets Management</i>	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	<i>Cash Management:</i> Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 bersifat strategis, karena dokumen tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama lima tahun. RPJMD mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, pengembangan wilayah, manajemen keuangan daerah, serta program kolaboratif segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah. Proses penyusunan RPJMD secara hierarkis selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 menjadi landasan bagi perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, utamanya menjamin keselarasan dan keberlanjutan kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang. Poin kritis yang perlu diperhatikan mencakup aturan teknis pelaksanaan dan panduan transisi, yang akan menjadi acuan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada akhir periode tahun 2030. Berikut ini dijabarkan kaidah operasional dan pedoman transisi yang tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

5.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi dan kerjasama, serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target dalam RPJMD berdasarkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun;
- e. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- f. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya untuk lembaga perencana pembangunan daerah, berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar.
- g. RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 memungkinkan untuk diubah dengan ketentuan:

- 1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan;
 - 2) Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - 3) Terjadi perubahan yang bersifat mendasar (antara lain bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional);
- h. Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 2 (dua) tahun;
- i. RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026-2030, dan digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026-2030;

5.2. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman pada masa transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2030–2034 belum tersusun, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2030 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah periode berikutnya dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

